


Gus Dur

Di Mata Wong Cirebon

A close-up portrait of Gus Dur, an elderly man with grey hair and glasses, looking slightly downwards with a thoughtful expression. He is wearing a patterned batik shirt. His right hand is partially visible, pointing towards the right side of the frame.

**Refleksi Tokoh-Tokoh Cirebon
atas Berbagai Pemikiran dan Gerakan
KH. Abdurrahman Wahid**

Editor: Ilman Nafi'a

Gus Dur

Di Mata Wong Cirebon

Gus Dur

Di Mata Wong Cirebon

REFLEKSI TOKOH-TOKOH CIREBON
ATAS BERBAGAI PEMIKIRAN DAN GERAKAN
KH. ABDURRAHMAN WAHID

GUS DUR DIMATA WONG CIREBON

Refleksi Tokoh-Tokoh Cirebon atas
Berbagai Pemikiran dan Gerakan
KH. Abdurrahman Wahid

12 x 18 cm, xxiv + 438 halaman

Cetakan Pertama: April 2010

Editor:

Ilman Nafi'a

Desain/Lay Out:

an@nd

Foto by <http://triyugowinarko.files.wordpress.com>

Penerbit:

PILAR MEDIA - Anggota IKAPI

Jl. Petung No. 22 B Papringan Yogyakarta

Telp. (0274) 541888, E-mail: pilar_media@yahoo.com

ISBN:

PENGANTAR

Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Cirebon

Riwayat hidup Gus Dur sudah banyak ditulis orang baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya. Kajian tentang Gus Dur dilihat dari berbagai sisi dan sudut pandang, namun sepertinya tidak pernah habis diungkap, ibarat orang melihat sisi intan permata, selalu nampak indah dan berkilau dilihat dari arah manapun. Orang begitu antusias membicarakan tentang Gus Dur dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mulai dari yang menyanjung tanpa batas sampai dengan yang mensikapinya dengan sinis.

Sosok Gus Dur adalah pribadi yang fenomenal, artinya bahwa Gus Dur selalu hadir dalam waktu yang tepat dan memberikan warna khas dalam setiap sepak terjangnya, sehingga

dirasakan betul manfaat kehadirannya, dan ini diakui oleh hampir semua orang yang pernah mengenalnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkadang Gus Dur bersikap lemah lembut menyampaikan nasehat-nasehat kepada orang lain menyangkut persoalan-persoalan kehidupan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti nasehat orang tua kepada anak-anaknya, tetapi juga terkadang bersikap keras dan garang, jika itu terkait dengan persoalan-persoalan prinsip yang harus diperjuangkannya.

Sikap dasar Gus Dur dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari pandangan hidupnya, dan selalu mendasarkan pada kaidah “ *al muhafadzoh ‘alal qodimissholih wal akhdzu bil jadidil ashlah* ” artinya bersikap mempertahankan nilai-nilai lama yang baik dan relevan, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Sikap dasar ini selalu Gus Dur perlihatkan dalam menyelesaikan setiap persoalan apa pun dalam konteks keumatan maupun kenegaraan. Hal itu tidaklah berlebihan karena pada dasarnya, ketika kita menghadapi suatu persoalan, maka pilihannya adalah nilai-nilai apa yang kita miliki dari norma-norma agama dan budaya yang dapat dikonstruksikan dalam penyelesaian masalah, serta bagaimana

sikap inovatif kita dalam memberikan solusi atas masalah tersebut.

Sebagai orang besar dengan pemikiran besar Gus Dur selalu berusaha memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada orang lain tentang arti pentingnya visi kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya gagasan dan pemikirannya selalu dilontarkan dalam berbagai kesempatan, bahwa kita hidup sebagai bangsa yang majemuk, oleh karena itu perlu ada formula yang bisa memberikan ruang dan waktu untuk hidup secara selaras dan berdampingan antar semua warga bangsa dalam keharmonisan yang seimbang. Gus Dur tidak pernah berhenti dan mengenal lelah memperjuangkan gagasannya itu, yang terpenting dirinya telah berusaha secara maksimal persoalan hasil itu urusan lain. Pegangannya adalah adagium ushul fiqh yang menyatakan “*ma lam yudrok kulluh lam yutrok julluh*” ketika sesuatu tidak bisa diperoleh seluruhnya maka tidak berarti harus ditinggalkan semuanya.

Pada sisi lain Gus Dur sering dituduh sebagai sosok yang kontroversial karena gagasannya yang sering dianggap nyeleneh oleh kebanyakan orang, bahkan nyerempet-nyerempet pada hal-hal yang sensitif yang tidak biasa dan tidak nyaman

dilakukan oleh seorang Gus Dur yang nota bene adalah ulama besar, seperti pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian dan contoh-contoh lain yang semisal dengan itu. Isu-isu itu ditanggapi dengan tenang, dan lambat laun orang baru bisa memahaminya setelah melalui penjelasan-penjelasan, dan seiring dengan perjalanan waktu, orang pun berpikir dan membenarkan tindakannya, sekalipun ini tidak bisa diterima oleh semua kalangan, terutama warga nahdliyyin di kampung dan pedesaan.

Sesungguhnya yang menarik adalah bagaimana upaya Gus Dur agar dirinya bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di kalangan minoritas dan pihak-pihak yang selama itu termarjinalkan dari kehidupan, dalam arti tidak adanya kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan, budaya dan adat istiadat yang mereka peluk. Dalam konteks itu Gus Dur sangat gigih berjuang untuk memulihkan hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam falsafah dan idiologi negara Pancasila dan UUD 1945. Ternyata hasilnya bisa dirasakan oleh kita semua, dan karenanya Gus Dur dianggap pahlawan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas.

Sekiranya tidaklah berlebihan, berkat jasa-

jasanya dalam membangun keutuhan bangsa dan negara, kepadanya layak diberikan gelar pahlawan nasional. Hal ini didasarkan pada kenyataan, bahwa Gus Dur telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemaslahatan umat, dan dilakukannya tanpa pamrih, di samping gagasan-gagasannya yang besar akan senantiasa mengilhami para generasi berikutnya baik di kalangan nahdliyyin maupun di luar untuk melanjutkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sosok Gus Dur tidak akan terlahir kembali, dan tidak perlu lahir Gus Dur-Gus Dur yang lain, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana visi besar Gus Dur tentang kebangsaan bisa dilanjutkan oleh para pemimpin NU khususnya dan tokoh-tokoh yang lain. Itulah wujud terbaik penghormatan kita kepada Gus Dur. Semoga kiprah dan perjuangannya menjadi amal soleh di sisi Allah SWT, dan kita dapat mewarisi perjuangannya.

Semoga hadirnya buku Gus Dur di Mata Wong Cirebon memberikan pencerahan wawasan tentang pemikiran Gus Dur dalam prespektif yang beragam, dengan harapan semoga pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam buku

Pengantar

tersebut menyadarkan kita, bahwa betapa masih panjangnya perjuangan kita untuk mewujudkan bangsa yang maju berperadaban sebagaimana yang dipikirkan oleh mendiang almaghfur lahu KH. Abdurrahman Wahid.

Cirebon, April 2010 M / Robiul Akhir 1431 H

H. FARIHIN NUR

PENGANTAR EDITOR

“Gus Dur di Mata Wong Cirebon”

Dunia berduka dengan kewafatan KH. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal nama panggilan “Gus Dur”. Banyak orang tidak percaya dengan kepergiannya yang dianggap begitu cepat, bahkan sempat sebagian menaruh kecurigaan bahwa kewafatan sang guru bangsa ini “disengaja” oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Apapun yang ada dalam pikiran dan benak masyarakat Indonesia dan dunia tentang “kewafatan Gus Dur”, ternyata keberadaan dan kiprahnya selama ini mempunyai nilai yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Kepergian Gus Dur tidak hanya telah membuat bumi Indonesia menangis, tetapi juga menyadarkan seluruh komponen bangsa ini untuk memberikan penghormatan sekecil apapun bagi

pejuang-pejuang dan penjaga-penjaga NKRI ini. Gus Dur terlahir bukan hanya milik Nahdlatul Ulama, komunitas muslim, komunitas pesantren, bahkan bukan milik Indonesia, tetapi ia telah menjadi milik semua komunitas dan milik semua bangsa. Gus Dur benar-benar terlahir menjadi “rahmat” bagi kehidupan manusia di dunia ini.

KH. Musthofa Bisri menuliskan kesannya tentang Gus Dur di salah satu media terkenal di Jawa, yaitu Jawa Pos, 11 Pebruari 2010. Beliau menuturkan ada beberapa orang biasa yang kepergiannya banyak ditangisi dan dihormati orang lain sepanjang abad 20 ini, yaitu John F Kenedy Presiden Amerika ke-35, Gamal Abdul Nasser Presiden Republik Mesir, dan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mantan ketua PBNU dan Mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-4. Menurutnya, John F Kennedy ditangisi kepergiannya, karena presiden ini dianggap berjasa dalam membangun Amerika. Ia terkenal sebagai tokoh yang berani, berwawasan luas kedepan, dan menjanjikan perubahan dunia. Kewafatannya membuat Amerika menangis. Pemakamannya dihadiri oleh ribuan pelayat. Namun, bila dibandingkan dengan jumlah pelayat ketika Gamal Abdul Nasser dimakamkan jumlah itu masih jauh lebih sedikit, karena pemakaman

Gamal Abdul Nasser (1918-1970) dihadiri lebih dari 4 juta orang. Presiden ini yang sering mengaku sebagai muridnya “Bung Karno” begitu dicintai orang dan dihormati orang, karena ia dianggap berjasa mendamaikan konflik Timur Tengah yang tidak kunjung usai. Mesir dan seluruh Timur Tengah berduka akan kewafatannya. Dan dunia berduka kembali dengan kewafatan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 30 Desember 2009.

Kewafatan Gus Dur menjadi fenomena, karena bukan hanya jumlah pengiring dan penta'ziyah pada saat pemakamannya yang mencapai ratusan ribu orang dari seluruh lapisan masyarakat, tetapi hari-hari setelah pemakamannya sampai 7 hari dan 40 hari, bahkan 100 hari dan berikutnya, ribuan orang dari berbagai kalangan masyarakat masih dan akan mendatangi tempat pemakamannya, bahkan diberbagai daerah dan tempat menyampaikan penghormatannya dengan berbagai acara; seminar, bedah buku, do'a bersama, pameran seni, istighosah, tapak tilas, menyalakan lilin, renungan suci, penerbitan buku dll. Dalam catatan ini, nampaknya KH. Musthofa Bisri ingin menyampaikan bahwa John F Kennedy dan Gamal Abdul Nasser adalah tokoh besar dan berpengaruh dunia dua abad ini, namun Gus Dur

telah melampaui kebesaran kedua tokoh tersebut. Hari Kewafatan Gus Dur sampai ketujuh harinya telah menjadi *head-line* pemberitaan di berbagai media massa cetak maupun elektronik secara masif. Bahkan perbincangan-perbincangan tentang pribadi Gus Dur baik dalam acara formal ataupun informal di tengah masyarakat telah berhasil menggeser tema-tema perbincangan yang sedang hangat sebelumnya seperti persoalan “bank century”. Berita kewafatan Gus Dur menjadikan dirinya sebagai “the main discourse” berbagai pembicaraan di seluruh lapisan masyarakat. Gus Dur bukan hanya menjadi teks tetapi juga telah menjadi konteks.

Sebagai bentuk penghormatan atas berbagai perjuangan dan pengabdian Gus Dur dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara ini, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama’ (ISNU) Kota Cirebon berupaya untuk menerbitkan Buku ini “Gus Dur di Mata Wong Cirebon”, yang merupakan kumpulan tulisan tokoh-tokoh Cirebon dalam acara “in memoriam Gus Dur” refleksi 100 tokoh Cirebon atas Pemikiran dan Gerakan Gus Dur. Acara ini diselenggarakan oleh ISNU Kota Cirebon bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAIN Cirebon. Setelah melalui proses seleksi dan editing, beberapa makalah atau tulisan

yang terkumpul dianggap memenuhi standar kelayakan penulisan yang dikehendaki oleh tim editor, dan telah diterbitkan menjadi buku ini.

Dalam buku ini secara umum seluruh penulis mengungkapkan “kebesaran” seorang Gus Dur dengan berbagai predikat fenomenal, seperti KH. Husen Muhammad menuliskan Gus Dur sebagai “Sang Sufi Besar”. Gus Dur adalah “Matahari Dhuha” yang cahaya spiritualitasnya menebarkan kehangatan cinta, kesegaran, kegairahan sekaligus mencerahkan dan menyuburkan bumi manusia. Gus Dur bagaikan gunung berapi yang menyimpan magma spiritualitas begitu dahsyat. Magma itu tak pernah berhenti bergolak dan begitu aktif yang seringkali meletup-letup, menumpahkan lahar panas, mengalir tanah kering-kerontang. Manakala telah dingin, tanah berubah menjadi subur, bumi menghihau menghasilkan bunga warna-warni, indah dan menebarkan wewangian”.

Petrus Juarno menyebutkan Gus Dur sebagai “sang multi talenta”. Menurutnya Gus Dur dalam arti kata benda atau sisi kemanusiannya, mengandung makna bahwa beliau adalah manusia biasa. Yaitu manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Manusia yang mempunyai sisi gelap dan

terang seperti kita. Namun sebagai manusia biasa, dibandingkan dengan yang lain, Gus Dur mempunyai bakat atau talenta yang lebih dari manusia pada umumnya. Menurut penulis K. H Abdurrahman Wahid adalah sosok "*Manusia Multi Talenta*". Yang kalau dijabarkan dalam kiprahnya, *Gus Dur* adalah seorang *Agamawan, Negarawan, Cendekiawan, Budayawan, Seniman* serta sebutan lainnya.

Penulis lainnya, Septi Gumiandari menganggap bahwa Gus Dur sebagai feminis sejati. Menurutnya Gus Dur, secara sadar, merasakan adanya peran para ahli agama (agamawan), bukan saja Islam tapi dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi atas perempuan. Meski ia meyakini bahwa Islam tidak akan menjustifikasi ketidakadilan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hakekat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia, namun penafsiran terhadap agama tak akan bebas dari tendensi, interest ataupun background pemikiran serta budaya penafsirnya.

Adang Djumhur menjelaskan bahwa Gus Dur memaknai konsep-konsep ajaran Islam itu lebih luas dari pada yang difahami oleh para penentangannya. Misalnya, konsep Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Umat Islam pada umumnya

mengakui dan meyakini konsep ini, tetapi pemaknaan dan penjabarannya sangat sempit. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, konsep *rahmatan lil'alamin* itu sering dimaknai menjadi *rahmatan lilmuslimin*. Yakni, bahwa umat Islam harus ramah terhadap sesama muslim, sedangkan terhadap non-Muslim tidak harus demikian. Kalau mungkin, kepada mereka harus bersikap keras dan tegas. Lebih tragis lagi, bila konsep itu direduksi menjadi *rahmatan lin-Nahdliyyin* atau *li-Muhammadiyyin*. Bahwa keharusan bersikap ramah itu hanya terhadap sesama Nu atau sesama Muhammadiyah. Terhadap komunitas lain di luar itu tidak harus lagi bersikap ramah, melainkan harus tegas dan keras. Sugeng Daryadi menambahkan bahwa Gus Dur adalah tokoh nasional yang humanis, pluralis, demokratis, berhati tulus dan berani yang sulit dicari bandingannya

Dalam tulisan lain, Didin Rasyidin memandang Gus Dur sebagai “*Ice Breaker*”. Menurutnya Gus Dur memiliki keberanian untuk menentang arus umum, meskipun ia harus menanggung akibatnya. Dengan gayanya yang santai tetapi tegas, langkah-langkah Gus Dur dapat dilihat sebagai bentuk dari proses pemberdayaan masyarakat melalui metode *Ice-*

Breaker. Dengan berbagai sebutan dan gelar yang telah diekspresikan dan dituliskan berbagai tokoh dan kalangan di berbagai media, termasuk dalam tulisan-tulisan di buku ini, nampaknya sebutan terhadap “Gus Dur” dianggap belum cukup memadai sehingga pantas kalau salah satu penulis dalam buku ini, Marzuki Wahid menuliskan “*Gus Dur bukanlah seorang sosiolog, bukan seorang politikus, bukan seorang politisi, bukan seorang seniman, bukan seorang budayawan, bukan seorang agamawan, bukan seorang feminis, dan juga bukan seorang pemikir, tapi Gus Dur adalah semuanya*”.

Namun demikian, apapun yang telah disematkan penulis-penulis dalam buku ini kepada Gus Dur, ia adalah manusia biasa yang tentu mempunyai sisi kelebihan sekaligus kekurangan. Dari realitas kedua sisi ini, pembaca bisa belajar banyak dari pribadi Gus Dur yang unik dan fenomenal. Dan akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua penulis buku ini dan semua pihak yang membantu penerbitannya, dan semoga buku ini bermanfaat untuk semua. (Sirban)

Ilman Nafi’a

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Cirebon	v
Pengantar Editor	xi
Daftar Isi	xix
Matahari Telah Pulang, Merenungkan Sufisme Gus Dur (<i>Husein Muhammad</i>)	1
Gus Dur, “Sebuah Nama” Mengandung Banyak Makna (<i>Petrus Juarno, SE</i>)	45
Peta Intelektualisme dan Tema Pokok Pemikiran Gus Dur (<i>Marzuki Wahid</i>)	65
Gus Dur; Sosok Feminis Muslim Laki-laki (<i>Dr. Septi Gumindari, M.Ag</i>)	103
In Memoriam Gus Dur (<i>Jamali Sahrodi</i>)	137

Tekstualitas “Apa Jare Gus Dur” Telaah Hermetika Filosofis Hans-Georg Gadamer (<i>Faqihuddin Abdul Kodir</i>)	161
Tafsir Islam Perspektif Gus Dur (<i>Hajam, MA</i>)	189
Gus Dur Sang Ice-breaker (<i>Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D</i>)	205
Mengenang Sang Pendekar NU, Gus Dur Kedigdayaan Era Muktamar NU Cipasung (<i>Mahrus eL-Mawa</i>)	231
Gus Dur: Pikiran, Ucapan dan Tindakan (<i>Andriyanto, S. Ag</i>)	261
Gus Dur, Islam Indonesia dan Pancasila (<i>Moh. Sulhan</i>)	275
Islam Pribumi Ala Gusdur (<i>Mulyanto SWA</i>)	305
Gus Dur Sosok yang Disegani Masyarakat Indonesia (<i>Hj. Umayah, M.Ag & Siti Fatimah</i>)	325
Gus Dur Sang Pluralis (<i>Yohanes Muryadi</i>)	345
Warna Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam Diskursus Pluralisme Global (<i>Burhanudin Sanusi dan Beny Baskara</i>)	359
Gus Dur dan Progresivitas NU (<i>Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag</i>)	401

KH. Abdurrahman Wahid Kiai Besar yang Sangat Peduli Kaum Kecil (<i>Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wilayah Cirebon</i>)	415
Indeks	419
Biografi Penulis	435

MATAHARI TELAH PULANG

Merenungkan Sufisme Gus Dur

Husein Muhammad

Langit Desember Yang Murung

Jam 19.00, satu hari menjelang tahun 2009 berganti, HP berdering mengganggu makan malam gratis saya di rumah makan “Jepun”, milik N, sahabat saya. Jay, wartawan Koran Sindo mengkonfirmasi kabar mengejutkan. “Bagaimana Gus Dur, aku dengar beliau wafat”, katanya tegang. Dengan dada berdegup, saya segera menghubungi A.W. Maryanto, teman yang selalu mendampingi Gus Dur di Rumah Sakit. Jawabannya tak meyakinkan. Katanya: “Aku baru saja istirahat dan sekarang sedang makan. Jam 17.00 tadi, 18 orang dokter khusus telah memeriksa kesehatan Bapak dan beliau sudah baik”. Tetapi saya penasaran. Yenni, putri kedua Gus Dur, saya kontak. “Bapak

meninggal, mbak Yenni di dalam”, suara Innayah, putri bungsunya, lirik bergetar, tersekat. Dan saya terkulai lemas. Langit 30 Desember 2009 tiba-tiba menjadi muram. Saya segera sms Ibu Shinta, isteri tercinta Gus Dur: “Ibu, saya sangat menyesal tidak berada di samping bapak, seperti sebelumnya, mohon maaf”. Ya seperti sebelumnya ketika Gus Dur beberapa kali berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saya menjenguknya sekaligus mendo’akan kesembuhannya dengan segera. Dan saya merasa mendapat kehormatan, ketika beliau meminta saya berdo’a bagi kesehatannya. Dengan tetap berbaring di tempatnya, di didampingi ibu dan orang-orang yang hadir, Gus Dur dan mereka mengamininya.

Sepanjang jalan dari Cirebon ke Ciganjur, sms dari teman-teman dari segala macam identitas diri; Kiyai, Santri, Abangan, Pendeta, Romo, Bhiku, penganut Konghuchu dan Ahmadiyah, terus berhamburan masuk ke HP saya. Mereka menyatakan duka nestapa teramat dalam dan rasa kehilangan atas kepergian orang yang dicintainya. Saya tak mengerti mengapa mereka mengirim sms, selain ingin mengabari saya tentang wafatnya Gus Dur dan mendo’akan bagi orang yang mereka kagumi dan keluarga yang ditinggalkannya. Saya membalasnya singkat:

“Dia yang selalu membagi kegembiraan, cinta dan harapan pada bangsa, Negara dan mereka yang tak berdaya, telah kembali kepada kekasihnya, dalam damai abadi”.

Dini hari yang sejuk, jam 03.00, ketika saya tiba, jalan Warung Sila sampai rumah duka, karangan bunga berwarna-warni, tanda duka cita, berjejer tak berjarak, berserak dan bertumpuk, bagi “Presiden ke 4”, bukan “Mantan Presiden”. Saya tak bisa menghitung jumlahnya. Beberapa jam sebelumnya jalan ini macet total. Ratusan kendaraan dan pejalan kaki seakan tak bergerak. Semuanya sengaja datang ke Ciganjur, ke rumah Gus Dur, menyambut kedatangannya dan menyampaikan ta’ziyah kepada keluarganya. Ketika saya tiba, ribuan orang masih berjaga di ruang-ruang di sekitar rumah. Masjid al Munawwaroh, tempat Gus Dur mengaji kitab “al Hikam”, karya Ibnu Athaillah, seorang sufi besar, dan kitab-kitab yang lain, masih gemuruh dengan bacaan ayat-ayat suci al Qur’an. Saya segera masuk rumah. Jenazah sudah dibaringkan. Wajah Gus Dur yang tertutup kelambu putih yang tipis, terlihat jelas, seakan-akan sengaja dibiarkan demikian agar para pelayat bisa melihatnya. Saya segera mendapat giliran entah untuk yang ke berapa kali, memimpin shalat janazah, tahlil dan

berdo'a.

Di hadapan tubuh yang masih utuh itu, saya teringat kata-kata dalam sebuah buku tasawuf: "Ketika jiwa pergi dalam keadaan bersih, tanpa membawa serta bersamanya hasrat-hasrat rendah duniawi yang menciptakan ketergantungan, yang selama hidupnya selalu dihindari dan tak pernah dibiarkan menguasai diri; menjadi diri sendiri dan menempatkan perpisahan jiwa dari badan sebagai tujuan dan bahan permenungan... maka jiwa itu telah siap untuk memasuki wilayah kasat mata di mana para bijak tinggal".

Ya, inilah jiwa yang telah matang. Ia yang hatinya telah menjadi hati orang-orang yang ditinggalkannya, yang dicintainya. Ia yang telah membagi cinta kepada mereka yang hatinya remuk-redam, tak berdaya dan tanpa gantungan. Ia yang bicara begitu bebas, tanpa beban, polos, karena tak punya hasrat rendah apapun dan tak tergantung pada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Ia yang tak pernah peduli dengan gelar-gelar kehormatan yang dianugerahkan dunia kepadanya. Ia yang pikirannya mampu menjangkau masa depan dan melampaui zaman, tetapi yang tetap bisa bertahan dengan kokoh menjalani tradisinya. Ia yang tak pernah gentar untuk melawan setiap tangan tiranik dan korup.

Ia yang tak mau kompromi terhadapnya dan peduli pada cibiran orang kepadanya.

Begitu usai, saya masuk ke bagian dalam rumah yang kamar-kamarnya sudah lama saya hapal. Ibu sudah di dalam kamarnya yang tampak remang, didampingi tiga putriya, tentu dalam rinai tangis yang mengiris. Saya tak bisa menemui beliau untuk ta'ziah, membesarkan hatinya dengan kesabaran dan ketulusan. Saya hanya bertemu Lissa, putri pertamanya dan menyampaikan ta'ziah itu. Matanya masih tampak lebam dengan wajah sendu, tak bergairah, meski tetap bisa senyum. Saya diminta mengantarnya untuk melihat ayahnya, membuka tirai yang menutup wajahnya, lalu membaca tahlil dan berdoa. Lissa tertunduk dan terisak-isak lirih. Kami melihat dengan jelas wajah Gus Dur, sungguh, tampak ceria, tenang dan teduh. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan tulus dan diridhai-Nya. Amin". Ayat suci ini saya baca berulang.

Masih dalam posisi berdiri sambil menunduk, saya segera teringat kembali syair yang acapkali ditembangkan Gus Dur:

ولدتك امك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا
فاجهد لنفسك ان تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا

Ketika ibumu melahirkanmu,
Wahai anak cucu Adam.
Engkau menangis,
sedang orang-orang di sekitarmu
menyambutmu dengan riang.
Maka, bekerjalah sungguh-sungguh
untukmu sendiri ketika engkau tak lagi
bersama mereka selamanya,
mereka menangis tersedu-sedu
Sedang engkau pulang sendiri
sambil tersenyum manis

Seperti bunyi syair di atas, ribuan orang di seluruh negeri, malam itu, berduka dan menangis tersedu-sedu. Sebagian histeris. Sementara Gus Dur memang pulang sendirian dengan riang. Beliau akan segera memasuki gerbang rumah abadi yang damai. Usai shalaat subuh dan ketika matahari beranjak naik, jenazah dibawa dengan kehormatan kenegaraan, menuju Pesantren Tebuireng, Jombang untuk diistirahkan selamanya di samping ayah; KH. Wahid Hasyim dan kakeknya; Hadratusyeikh KH. Hasyim Asy'ari. Karena terlambat mendaftar, saya tidak bisa ikut mengantarnya sampai Jombang.

Di tempat peristirahatannya yang terakhir itu, sebelum tubuhnya diturunkan ke bumi, Gus Dur mungkin masih membagi kegembiraan dan

pesan kepada para pengantarnya untuk tidak menangisi kepulangannya, seperti pesan Maulana Jalaluddin Rumi ini:

Jangan menangis: "Aduhai kenapa pergi!"
Dalam pemakamanku
Bagiku, inilah bahagia!
Jangan katakan, "Selamat tinggal"
Ketika aku dimasukkan ke liang lahat
Itu adalah tirai rahmat yang abadi! (D911)

Bila datang ke makamku
Untuk mengunjungiku
Jangan datang ke makamku tanpa genderang
Karena pada perjamuan Tuhan,
Orang berduka tidak diberi tempat

Memperebutkan makna Gus Dur

Gus Dur, nama yang akan dikenang rakyat Indonesia berhari-hari, berbulan-bulan dan bertahun-tahun dan untuk rentang waktu yang panjang. Boleh jadi ia akan menjadi ikon dan legenda dalam sejarah bangsa muslim terbesar di dunia. Beberapa orang meramal Gus Dur untuk satu atau dua abad kemudian akan berubah menjadi pribadi yang dimitoskan. Mungkin ini pandangan yang berlebihan bagi manusia yang hidup hari ini, tetapi masa depan yang panjang

adalah kemungkinan-kemungkinan yang tak terpikirkan. Ketika pikiran-pikiran ditulis sebagai babad, sejarah hidupnya didongengkan kepada anak-anak dan pesan-pesannya dipahat di mana-mana, maka ia sangat mungkin menjadi sarat makna mitis, menjadi Sang Legenda.

Lihatlah, hari ketika ia wafat. Puji-pujian dan kekaguman-kekaguman kepadanya mengalir begitu deras dari berbagai sudut, pojok, pusat lingkaran dan pinggir social yang tak terjamah oleh tangan kekuasaan. Bunga warna warni menebar dan berhamburan ke setiap jalan yang dilaluinya dan menumpuk bagai taman bunga di atas tanah tempat istirahatnya yang terakhir dan abadi. Sangatlah terasa dan terlihat dengan kasat mata, pujian dan kekaguman yang disampaikan orang ketika Gus Dur pulang begitu besar, tak terbayangkan dan melampaui kematian orang besar siapapun di negeri ini. Ribuan orang di berbagai kota dan desa menangis tersedu-sedu, pada hari ditinggal Gus Dur dan hari-hari sesudahnya. Mereka berduka sambil komat-kamit memanjatkan do'a ampunan dan rahmat baginya. Lihatlah, ribuan para peziarah, perempuan dan laki-laki, tua, muda dan anak-anak, dari berbagai kota datang ke tempat peristirahatan terakhirnya di Tebuireng. Latar pesantren dan masjid di sana

tak lagi menampungnya. Masjid-masjid di seluruh negeri segera menyelenggarakan shalat ghaib, membaca al Qur'an surah Yasin dan Tahlil. Pahala bacaan-bacaan suci itu dihadiahkan untuk beliau. Gereja-gereja mendentangkan loncengnya, untuk menyelenggarakan ritual dan do'a khusus bagi Gus Dur. Kuil-kuil, Sinagog-sinagog, Vihara-vihara, Pure-pure, dan tempat-tempat penyembahan yang lain juga menyelenggarakan ritual dan do'a untuknya. Kata mereka, Gus Dur adalah orang suci, sang Santo. Di latar Tugu Proklamasi, sejuta lilin duka dinyalakan mereka yang mencintai Gus Dur, meski dalam rinai hujan. Mereka yang hadir malam itu memakai baju keyakinan yang berbeda-beda. Semua menunduk, berdo'a kepada Yang Maha Esa, tak peduli apa nama dan sebutan-Nya, untuk beliau. Orang-orang yang paling rasional dan mungkin tak pernah taat dalam ritual-ritual, tiba-tiba hanyut dalam emosi melankoli tak terkendali, termangu dan menunduk begitu khusyuk. Logika rasional tiba-tiba membeku dihadapan realitas kematian bapak bangsa itu. Lihatlah, para bikhu dengan pakaian khas mereka, kuning kunyit tua, bersimpuh di depan tanah liat tempat Gus Dur dibaringkan dan diistirahatkan, sambil menggumamkan do'a-do'a. Kita tak pernah menyaksikan pemandangan indah

seperti ini. Lihatlah, bendera merah putih berkibar setengah tiang selama tujuh hari, memberi hormat padanya. Para pemimpin dari berbagai belahan dunia menyampaikan belasungkawa, terima kasih dan harapan agar cita-cita Gus Dur diteruskan oleh siapa saja. Do'a-do'a dan wirid-wirid mereka bergemuruh berhari-hari memenuhi ruang maya, menembus langit demi langit sampai ujung tanpa batas. Bukan hanya Yusuf Kalla, mantan wakil Presiden, yang bersaksi: "Sepanjang sejarah bangsa ini tak ada orang yang kematiannya diantarkan dengan kehormatan dan do'a oleh beragam identitas orang dan dalam jumlah yang begitu masif, kecuali beliau".

Bagaimana kita memahami fenomena kepulangan Gus Dur seperti itu? Suara apakah gerangan yang membisikkan dan menggerakkan nurani beribu dan berjuta orang untuk mengantar kepulangannya dan berziarah di pusaranya yang bersahaja itu?. Siapakah gerangan yang masuk dan menyentuh relung hati beribu orang termasuk para Pendeta, Romo, Kardinal, Bhiku-Bhikuni, penganut Kong Hu Cu, Ahmadi, pengikut kebatinan-kepercayaan dan lain-lain, sehingga mereka menangi kepulangan Gus Dur?. Akal manakah yang sanggup menjelaskan fenomena kepiluan, kerinduan dan mabuk kepayang ini?.

Tak ada jawaban rasional. Ia hanya bisa dijelaskan oleh para bijak-bestari, para sufi. Mengutip kata-kata Tuhan dalam bahasa Nabi:

إن الله اذا احب عبدا دعا جبريل .فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه اهل السماء قال فيوضع له القبول في الارض. رواه ابو هريرة. أخرجه مالك في الموطأ, ص ٢٠٩

“Sungguh, jika Tuhan mencintai hamba-Nya, Dia memanggil Jibril. Tuhan mengatakan: “Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Jibril memanggil penghuni langit. Kepada mereka Jibril mengatakan: “Tuhan mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit mencintainya. Maka dia dicintai para penghuni bumi”.

Ya, gelombang manusia yang tak berhenti bergerak menziarahi dan mendo’akan Gus Dur, adalah karena Tuhan mencintainya, karena Gus Dur mencintai lebih dulu. Mencintai Tuhan adalah mencintai semua dan segala ciptaan-Nya. Pikiran-pikiran dan perjalanan Gus Dur adalah kerinduan-kerinduan kepada Tuhan dan seluruh ciptaan-Nya. Maka Dialah yang membimbingnya. Maka mereka mencintainya. Gus Dur menumpahkan cintanya kepada mereka dengan tulus. Maka

getaran-getaran cinta itu menebar dan menembus jiwa mereka.

Segera sesudah itu, begitu reflektif dan tanpa diminta, ribuan orang berebut memberi makna padanya. Gus Dur adalah “Ulama Besar”, “Guru Bangsa”, “Bapak Pluralisme”, “Bapak Demokrasi”, “Sang Humanis Sejati”, “Pelindung kaum Minoritas”, Pembela kaum Tertindas”, “Sang Pembebas”, “Negarawan Paripurna”, “Bapak Bhineka Tunggal Ika”, “Intelektual Sejati”, “Budayawan Besar”, “Waliyullah”, dan masih sejuta sebutan lainnya. Aku sendiri ingin menyebutnya “Sang Sufi Besar”. Gus Dur adalah “Matahari Dhuha” yang cahaya spiritualitasnya menebarkan kehangatan cinta, kesegaran, kegairahan sekaligus mencerahkan dan menyuburkan bumi manusia. “Gus Dur bagaikan gunung berapi yang menyimpan magma spiritualitas begitu dahsyat. Magma itu tak pernah berhenti bergolak dan begitu aktif yang seringkali meletup-letup, menumpahkan lahar panas, mengalir tanah kering-kerontang. Manakala telah dingin, tanah berubah menjadi subur, bumi menghiijau menghasilkan bunga warna-warni, indah dan menebarkan wewangian”.

Sahabat saya Marzuki Wahid, penulis buku *Beyond the Symbols, Jejak Antropoligis*

Pemikiran dan Gerakan Gus Dur, dalam sebuah moment refleksi 100 tokoh atas Gus Dur, di Cirebon, menyampaikan kata pamungkas yang mendebarkan: “Gus Dur bukanlah “Guru Bangsa”, bukan “Bapak Pluralisme”, bukan “Ulama”, bukan “Seorang Humanis” bukan “Waliyullah”, bukan “Negarawan Paripurna”, dan bukan seterusnya. Sampai di sini, hati yang hadir berdegup-degup, tersekat-sekat. “Tetapi Gus Dur adalah semuanya”, katanya menuntaskan. Dan suasana berubah menjadi mengharu-biru.

Begitulah setiap orang telah dan akan terus memaknai Gus Dur dengan ungkapan dan cara yang berbeda-beda, berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar, diingat dan dirasakannya. Pemaknaan atas sesuatu memang selalu lahir dari pengalaman masing-masing. Eskpresi-ekspresi intelektual dan idiom-idiom psikologis selalu merupakan produk dari ruang dan waktunya sendiri-sendiri, produk pengalaman diri pemberi makna. Tak ada seorang pun yang mampu menghadang pengalaman spiritual setiap orang. Pengalaman adalah kebenaran sejati, meski tak bisa diraba, tak bisa dianalisis dengan nalar. Ia melampaui kecerdasan nalar. Pemaknaan yang beragam atas Gus Dur telah cukup menggambarkan betapa di dalam dirinya

sarat dengan makna besar.

Tetapi saya meyakini Gus Dur tak akan pernah meminta diberikan sebutan apapun. Ia akan mengatakan “aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku hanyalah hamba Allah”. Ia tak pernah terganggu oleh sebutan-sebutan duniawi. Lebih dari 10 gelar kehormatan akademis tertinggi yang diterimanya dari berbagai universitas prestisius dunia, tak pernah dipakainya dan tak pernah disandangnya, bahkan bingkai-bingkainya tak dipasang di rumahnya. Ketika saya memasuki salah satu kamar di rumahnya, saya melihat, bingkai-bingkai bertulis kata “penghargaan” tersebut, hanya ditata rapi di atas meja. Gus Dur tak seperti yang lain yang mengejar gelar-gelar kehormatan itu untuk membesarkan dirinya, bahkan meski dengan membayar berapapun. Gus Dur sudah besar dan terhormat, meski tak diberi sebutan kebesaran dan kehormatan apapun. Terhadap penyebutan kehormatan di atas, Gus Dur mungkin akan menyanyikan syair ini:

وكل يدعى وصلا بليلي وليلى لا تقرر لهم بذاك

Masing-masing boleh saja mengaku
kekasih “Laila”

Tetapi “Laila” tak mengakui semua itu

Gus Dur bebas dan bersih dari keinginan-keinginan rendah dan kini. Ia tak menginginkan apapun dan tak iri hati pada siapapun. Ia tak menginginkan dan meminta puja-puji apapun dan dari siapapun. Ia menerima apapun yang terjadi (ridha), yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jiwanya tak ketergantungan pada apa-apa dan pada siapa-siapa. Gelar-gelar kehormatan tak menjadikannya lebih besar. Gus Dur hanya akan mengatakan: “Aku sudah bekerja. Aku sudah berjuang. Aku sudah “berperang”. Aku sudah membagi cinta” dan “Aku sudah memaafkan”. Itu sudah cukup. Selebihnya terserah Tuhan”.

Itu tentu karena Gus Dur telah membaca al Qur'an dan telah lama merenungkan maknanya: “Katakan (wahai Muhammad): “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Lalu adakah orang yang memberi makna sebaliknya? Adakah orang yang membencinya dan senang atas kematiannya, atau paling tidak orang yang tak ambil peduli atas kepergiannya?. Seperti kehidupan yang warna-warni, Tuhan juga

menciptakan keanekaragam individu dengan sifat kualitatif yang berbeda-beda. Keragaman ini akan terus ada sepanjang kehidupan belum selesai, seperti yang sering disampaikan Gus Dur. Saya membaca di dunia maya beragam komentar sinis terhadapnya. Gus Dur yang sudah selesai menjalani hidup, tetap saja dicaci-maki dan dicemooh oleh sejumlah orang, seperti ketika ia masih dan sedang menjalaninya. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia tak pantas dipanggil Gus, karena ini panggilan untuk anak kiyai yang saleh. Lebih tepat ia disebut “Mr. Dur” atau sebutan lain. Bahkan Mr. Dur, kata mereka, tak layak disebut-sebut namanya lagi. Ia telah melukai hati umat dan menjual agamanya. Mereka mengingat apa yang pernah diucapkan dan dilakukan Gus Dur semasa hidupnya yang begitu banyak mengandung kekafiran kesesatan (bid’ah) dan kemusyrikan. Kehadirannya di sejumlah gereja, pendapatnya agar “*Assalamu’alaikum*” bisa diganti “Selamat pagi”, persahabatannya dengan Yahudi, Israel, pembelaannya kepada non muslim adalah bentuk-bentuk kekafiran dan melukai umat Islam, prakarsanya untuk mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 tentang larangan Komunisme, Leninisme dan Marxisme, serta konsistensinya yang luar biasa untuk menghargai keberagaman

keyakinan manusia (Pluralisme) dan sejuta soal lainnya. Ini semua, kata mereka, adalah cacat-cacat Gus Dur yang tidak bisa dimaafkan. Untuk soal Pluralisme, mereka menganggap bahwa ia adalah paham yang sesat dan menyesatkan bahkan merupakan kemusyrikan, karena pluralisme menurut mereka merupakan pengakuan atas kebenaran semua agama-agama dan semua keyakinan-keyakinan manusia. Dan ini dosa maha besar yang tidak akan diampuni.

Di kutub yang lain lagi, saya melihat ada sejumlah orang yang tak bicara apa-apa ketika Gus Dur wafat. Mereka diam, tanpa kata-kata, tanpa ekspresi dan seakan-akan membiarkan Gus Dur pergi. Kata-katanya tak usah didengarkan. Tindakannya tak perlu diikuti. Atau justeru mereka terperangah?, Mengejutkan? Tak lagi mampu mau bicara apa-apa.

Caci maki dan sumpah serapah terhadap Gus Dur, tidaklah membuatnya menjadi rendah. Sikap seperti itu justeru semakin menguatkan kebesarannya. Kita sudah membaca sejarah umat manusia, sejarah orang-orang besar. Orang-orang besar selalu mengandung dualitas yang paradok: dikagumi dan dicemooh. Ka'ab al Ahbar, seorang ahli tafsir, bilang: *"Ma Kana Rajul Hakim fi Qawmih Qathth Illa Baghaw 'Alaih wa Hasaduh"* (Tak ada

tokoh bijak-bestari di sebuah negeri kecuali selalu ada mereka yang mencaci-maki dan mendengki". Jalal al Din al Suyuthi, ulama besar, mengatakan hal yang sama: "*Ma Kana Kabirun fi 'Ashr Qathth Illa Kana Lahu 'Aduww min al Safalah. Idz al Asyraf lam Tazal Tubtala bi al Athraf*" (Tidak ada tokoh besar pada setiap zaman kecuali dicacimaki orang-orang bodoh. Orang-orang terhormat selalu diuji oleh orang-orang yang (secara intelektual dan spiritual) belum matang".

Para tokoh bijak-bestari (*Hukama*) dalam sejarah mereka, memang, bukan hanya disumpah-serapah dan dibenci, tetapi juga dikafirkan, dibid'ahkan dan dizindikkan (dituduh atehis) oleh mereka yang tak matang secara intelektual dan spiritual, atau oleh mereka yang pikirannya tergantung pada bentuk-bentuk kredo formal dan teks-teks literal keagamaan atau oleh fanatisme pada kebenaran diri dan buta pada kebenaran yang lain. Imam al Ghazali menyebut mereka "orang-orang yang memiliki pengetahuan terbatas". Mereka boleh jadi sesungguhnya tak lebih dari orang-orang yang gelisah atas kondisi ketakberdayaan diri dan ketakutan yang berlebih.

Lihatlah, tokoh sufi legendaris Abu Manshur al Hallaj. Ia harus berdiri di atas tiang gantungan

untuk mengakhiri hidupnya. Hukuman ini dijatuhkan terhadapnya menyusul fatwa sejumlah Ulama yang berkolusi atau berselingkuh dengan para penguasa. Mereka menilai pandangan al Hallaj tentang "*Wahdah al Wujud*", sebagai kesesatan, kekafiran dan kemusyrikan yang nyata. Teorinya tentang Kesatuan Wujud pada dasarnya juga meniscayakan pengakuan terhadap eksistensi agama-agama dan keharusan untuk mentoleransi seluruh agama-agama yang ada di muka bumi. Ibnu Arabi, sang Guru terbesar kaum sufi (*al Syaikh al Akbar*), juga harus menerima beragam tuduhan: kafir, musyrik, murtad dan sebagainya. Ibnu Arabi mengemukakan pandangan pluralisme keagamaannya dalam sebuah puisi yang kemudian ditulis dalam kumpulan Puisinya (Diwan) yang terkenal: "*Tarjuman al Asywaq*"; "Agamaku adalah Cinta kepada-Nya", katanya. Abu Yazid al Bisthami diusir dari rumahnya sampai tujuh kali dan disiksa. Dzunnun al Mishri digiring dan diseret dengan tangan dirantai dari Mesir menuju Baghdad. Mereka menuduhnya "zindiq". Sahl al Tusturi diusir dari negaranya. Dia dituduh kafir. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam al Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Jalal al Din al Rumi, Syuhrawardi al Maqtul, Abu Sa'id al Kharraz, Abu

Bakar al Syibli, Abu Bakar al Nablusi, Syeikh Abu Madyan, Syeikh Abu al Hasan al Syazili, Izz al Din bin Abd al Salam, Taj al Din al Subki dan lain-lain juga mengalami “mihnah” (inkuisisi) dengan cara yang beragam. Mereka, seperti diketahui banyak orang, adalah tokoh-tokoh legendaries, para maha guru, sufi besar, para Imam besar, para Ulama, kaum cendikiawan, para pejuang kemanusiaan.

Dengarlah puisi ini:

Mereka yang terbatas
begitu mudah mengkafirkan,
mensesatkan dan memusyrikkan
bila para bijak bestari mengajak

Dengarkan pula puisi elegi sang sufi ini:

Aduhai, betapa banyak mutiara
pengetahuan
Andai aku sebarakan
Niscaya aku dibilang: “kau pemuja
berhala!”
Niscaya mereka menghalalkan darahku
Mereka kira yang mereka lakukan
Adalah kebaikan

Meskipun para bijak-bestari itu harus mengalami nestapa akibat pandangan-pandangannya

yang dinilai sesat oleh keputusan fatwa, atau vonis kekuasaan, mereka tetap tegar. Nama mereka tetap hidup sepanjang sejarah. Pikiran-pikirannya menjadi inspirasi bagi banyak cendekiawan sesudahnya guna membangun peradaban yang humanistik, buku-buku mereka terus dibaca, dikaji, dan didiskusikan atau diseminarkan, berabad-abad. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang masih dikunjungi dan diziarahi, sampai hari ini. Demi nilai-nilai yang luhur, demi kebenaran dan kejujuran, demi keadilan dan cinta, mereka melawan tirani dan melawan kesakitan.

Seperti mereka, begitulah eksistensi Gus Dur. Ia dimaknai secara beragam dan controversial, baik ketika ia hadir di muka bumi maupun sesudah ia menghilang untuk pulang dan tak kembali lagi. Ia dikagumi, dicintai dan dihormati oleh begitu banyak manusia dan mereka memperoleh inspirasi dari gagasan-gagasannya. Tetapi dalam waktu yang sama juga disingkirkan, dikafirkan dan dimusyrikkan oleh orang-orang yang tak mengerti. “manusia memusuhi apa yang tak diketahuinya”, kata pepatah bijak.

Pluralisme Gus Dur, Gagasan Para Sufi

Gus Dur adalah Bapak Pluralisme, ter-

serah jika ada orang yang tidak suka dengan sebutan ini, termasuk para pecintanya sendiri. Konon, Djohan Efendi, sahabat setia Gus Dur, pernah diminta Gus Dur agar jika ia kelak wafat, nisannya ditulis “Di Sini dikubur Sang Pluralis”. Terlepas pesan itu benar diucapkan Gus Dur atau tidak, dan tak peduli masyarakat memperdebatkan maknanya, tetapi beliau orang yang selalu ingin memandang manusia, siapapun dia dan di manapun dia berada, sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghormatinya, Gus Dur juga ingin menghormatinya. Sebagaimana Tuhan mengasihi makhluk-Nya, Gus Dur juga ingin mengasihinya. “*Takhallqu bi Akhlaq Allah*” (berakhlaklah dengan akhlak Allah), Kata pepatah sufi. Sejauh yang saya tahu, Gus Dur tak banyak bicara soal wacana Pluralisme berikut dalil-dalil teologisnya. Tetapi ia mengamalkan, mempraktikkan dan memberi mereka contoh atasnya. Pluralisme jauh lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari Gus Dur dibanding diwacanakan. Kalaupun ia diminta dalil agama, ia akan menyampaikan ayat al Qur’an ini: “Wahai manusia, Aku ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya manusia yang

paling mulia di antara kalian di mata-Ku, ialah orang yang paling bertaqwa kepada-Ku”.

Gus Dur bukan sekedar menghargai atau menghormati manusia yang berbuat baik, melainkan juga menyambutnya dengan rendah hati dan rengkuhan yang hangat. Sebaliknya, ia akan menentang siapa saja yang merendahkan martabat manusia, apalagi menyakiti, mengurangi dan menghalangi hak-hak mereka. Ia akan membela mereka yang martabat kemanusiaannya direndahkan, mereka yang hak-haknya dikurangi, dipasung, disakiti dan ditelantarkan. Ketika para pengikut Ahmadiyah diusir dan masjid-masjid mereka dirobokkan, Gus Dur hadir bersama mereka. Ketika Gereja-gereja dilempari batu, ia berteriak “jangan”. Ketika Inul Daratista dihujat ramai-ramai karena dia bergoyang-goyang dan meliuk-liukkan tubuhnya bagai bor, ia “memeluk”nya dengan hangat. Ketika Dorce disoraki karena berganti kelamin, ia mengajaknya bicara dengan lembut dan penuh kasih. “Jika itu adalah dirimu, terulah bekerja”, katanya. Ketika urusan gambar tubuh polos perempuan (pornografi) hendak diserahkan kepada Negara, ia berdemonstrasi bersama isteri tercintanya; Shinta Nuriah dan bersama-sama yang menghargai kemanusiaan. Ketika orang-orang Thionghoa

meminta hari raya Imlek dan Barongsae, ia memberikannya dengan tulus. Meski tak bisa melihat dengan matanya, ia hadir menyaksikan tarian-tarian singa itu dan bertepuk tangan.

Seringkali kita melihat sikap perlawanan dan pembelaan itu dilakukannya sendirian. Ia berjalan sendiri, meski ia harus mempertaruhkan jiwanya. Ia tak peduli. Dalam perlawanannya terhadap pembredelan tabloid Monitor dan pembelaannya terhadap Salman Rusydi dalam kasus bukunya *Satanic Verses*, yang bikin heboh itu, misalnya, Gus Dur tak menemukan mata lain yang penuh pengertian. Ia berjalan sendiri. Seorang sufi mengatakan “ia yang jiwanya telah mencapai kesadaran yang matang, bantuan eksternal tak lagi diperlukan”. Dan Gus Dur sanggup menjalaninya seorang diri dengan tegar, karena ia telah matang. “*La Yakhaf Laumata Laa-im*” (ia tak pernah takut pada mata yang membenci). Bagi Gus Dur semua manusia adalah sama, terlepas apa jenis kelamin mereka, warna kulit mereka, suku mereka, ras dan kebangsaan mereka. Yang Gus Dur lihat adalah bahwa mereka manusia seperti dirinya dan yang lain. Yang ia lihat adalah niat baik dan perbuatannya, seperti kata Nabi ; “Tuhan tidak melihat tubuh dan wajamu, melainkan amal dan hatimu”. Gus Dur bukan

tidak paham bahwa ada yang keliru, ada yang tidak ia setuju atau ada yang salah dari mereka yang dibelanya. Ia membela karena tubuh mereka diserang dan dilukai hanya karena warna bajunya yang berbeda, harta mereka dirampas semauanya, ekspresi-ekspresi diri mereka dihentikan secara paksa oleh negara atau direnggut dengan pedang oleh otoritas dominan. Bagi Gus Dur, ekspresi-ekspresi diri, personal, individual, yang dianggap sebagian orang sebagai tak bermoral, tak boleh melibatkan Negara, tak boleh diintervensi kekuasaan, tetapi harus diselesaikan sendiri oleh masyarakat dengan cara-cara yang mereka miliki dan dengan mengaji yang sungguh-sungguh dan dengan ketulusan.

Bagi Gus Dur, keyakinan dan pikiran tak bisa dinamai tak bisa diberi tanda. Pikiran adalah misteri yang tersembunyi. Ia bagaikan burung yang terbang di langit lepas. Tuhanlah yang menganugerahkan pikiran-pikiran pada hamba-hamba-Nya. Dialah Pemilik nafas setiap yang hidup dan Dialah yang akan menanyainya kelak, bila tiba masanya. Karena itu, hanya Dialah yang berhak menamainya dan menghakiminya, tidak yang lain. Kata Rumi dalam *Fihi Ma Fihi*:

ليس في وسعك إبعاد تلك الفكر عنك بمائة الف جهد وسعي

“Tak ada kemampuanmu menjauhkan pikiran-pikiran itu meski dengan seratus ribu kali rekayasa berkeringat”.

Itulah sikap seorang yang telah memiliki batin yang bebas. Itulah sifat seorang sufi, seorang bijak-bestari yang jiwanya mampu menembus kedalaman makna kata-kata Tuhan. Karena kata-kata-Nya memiliki berjuta makna dan tak terbatas. Pemaksaan atasnya tak akan menghasilkan apa-apa, sia-sia, kecuali membuat orang dan keluarganya menjadi sakit, menderita, dan menghambat kemajuan peradaban manusia.

Tindakan dan sikap itu, menurut Gus Dur, sesungguhnya telah diajarkan oleh Islam sejak ribuan tahun lalu. Ia sering mengutip sumber literature Islam klasik yang bicara mengenai hak-hak individu. Salah satunya adalah *Al Mustashfa*, karya Imam Abu Hamid al Ghazali. Sufi besar ini mengatakan bahwa tujuan aturan agama adalah memberikan jaminan keselamatan keyakinan, keselamatan fisik, keselamatan profesi, kehormatan tubuh dan pemilikan harta. Al Ghazali menyebut lima prinsip dasar perlindungan ini sebagai “*al Kulliyat al Khams*”. Orang sering menyebutnya “*Maqashid al Syari’ah*” (tujuan-tujuan pengaturan kehidupan). Lima prinsip ini merupakan pemberian Tuhan pada

setiap manusia yang tak ada seorang manusiapun berhak mengurangi atau menghilangkannya. Inilah basis fundamental (*al rukn al asasi*) pikiran-pikiran dan langkah-langkah Gus Dur. Ia tidak mengutip pandangan atau sumber dari Barat atau Yahudi, seperti dituduhkan sebagian orang, melainkan menggalinya dari sumber tradisi Islam sendiri, dan ia mampu menginterpretasikan dengan cara-cara yang memukau dan genuine, sesuai dengan kehidupan yang selalu bergerak. Ia memang sangat kaya dengan referensi tradisi Islam klasik ini berikut perangkat analisisnya: bahasa, sastra, logika, filsafat sosial, dan metode-metode keilmuan.

Melalui penjagaan lima prinsip dasar kemanusiaan universal tersebut, Gus Dur memimpikan berkembang dan tersebarnya persaudaraan manusia tanpa dibatasi sekat-sekat primordial (*ukhuwwah insaniyyah*). Ini menurut saya sesungguhnya merupakan gagasan para sufi besar. Para sufi yang sejumlah namanya disebutkan di atas, adalah orang-orang yang paling vocal menyuarakan gagasan pluralisme dan persaudaraan universal itu. Tak ada keraguan sedikitpun di hati mereka pada prinsip utama agama bahwa tidak ada di alam semesta ini kecuali Tuhan Yang Satu yang kehadapan-Nya

seluruh yang mawjud tunduk. Dan seluruh yang mawjud (ada) sejak ia ada sampai keberadaannya tercabut, selalu dan terus mencari-cari Dia melalui jalan dan bahasa yang berbeda-beda.

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير

Bahasa kita beragam tetapi
Engkaulah Satu-satunya yang Indah
Dan kita masing-masing menuju kepada
Keindahan Yang Satu itu

Maka kebhinekaan realitas alam semesta ini seharusnya tidak menghalangi setiap manusia untuk memahami pikiran, bahasa dan kehendak-kehendak manusia yang lainnya. Para sufi memandang alam semesta yang beragam dan yang seluruhnya mengandung keindahan sebagai “tajalli” Tuhan, perwujudan rahmat dan keagungan-Nya. Keberanekaan berasal dari Tuhan. Ibnu Athaillah, nama sufi besar dari Iskandariah yang sering disebut Gus Dur, banyak bicara soal Kesatuan Semesta. Ibnu Ajibah mengomentari gagasan itu dalam syairnya yang indah:

أنظر جمالی شاهدا في كل إنسان
الماء یجری نافدا في أس الاغصان
تجدہ ماء واحدا والزهر ألوان

Lihatlah Keindahan-Ku
Tampak pada semua manusia
Air mengalir, menembus
pokok dahan dan ranting
Engkau mendapatinya
Berasal dari satu mata air
Padahal bunga berwarna-warni

Nah, lagi-lagi di sini kita menemukan jalan yang ditempuh Gus Dur. Gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan pluralismenya ternyata berangkat dari tradisinya sendiri. Ia tekun mengaji kitab-kitab klasik sampai khatam. Sayang, kitab-kitab ini amat jarang dibaca orang atau bahkan dilarang oleh orang-orang yang hanya bisa membacanya sampai kulit, yang tertulis (literal, harfiah) dan tak khatam.

Sang Zahid di Rumahnya

Sampai detik ini, dua belas tahun sudah saya mondar-mandir, datang dan pergi ke rumah Gus Dur, di Ciganjur-Jalan Paso-Ciganjur. Kedatangan saya ke sana tak pasti. Kadang sebulan sekali, kadang dua bulan dan kadang tak bisa dihitung dengan hari. Di rumah itu saya mengaji kitab kuning, bercanda-canda, tertawa

riang dan tergelak-gelak, berdebat panjang, mendengar dongeng-dongeng, anekdot-anekdot dan cerita-cerita dengan Ibu Shinta, putri-putrinya, sahabat-sahabat dan orang-orang yang ada di rumah itu. Ketika belum ada kamar tamu, saya tidur di dalam rumah untuk satu atau dua malam. Hari-hari yang menyenangkan dan selalu merindukan. Tetapi saya jarang bertemu Gus Dur, hanya beberapa kali saja, karena beliau memang jarang tinggal lama-lama di rumah, meski selalu pulang untuk istirahat dua atau tiga jam, paling lama empat jam. Gus Dur sering datang dini hari, tanpa jam yang pasti. Kadang jam 24.00, jam 01 atau jam 02.00, tetapi beliau selalu bangun jam 04.00, sebelum subuh. Saya tak tahu pasti apa yang dilakukannya setelah bangun. Setiap saya keluar kamar dan turun, Gus Dur sudah tidak ada lagi di rumah itu. Entah ke mana, tetapi suara bacaan al Qur'an itu dibiarkan melantun-lantun merdu memenuhi ruang dalam rumah itu sampai cahaya matahari pagi menembus jendela kamar. Begitu indah, begitu sejuk. Memperdengarkan alunan ayat-ayat suci al Qur'an di rumah itu berlangsung setiap pagi. Gus Dur memang senang mendengar bacaan al Qur'an. Bukan hanya melalui kaset yang diputar setiap pagi, tetapi juga mengundang para penghafal al Qur'an. Hampir setiap bulan

beliau mengundang mahasiswa-mahasiswi dari Perguruan Tinggi Ilmu al Qur'an dan Institut Ilmu al Qur'an untuk "sema'an".

Sering, ketika tamu sudah pulang dan malam telah sepi, Gus Dur tak langsung masuk kamar untuk tidur, istirahat. Beliau lebih suka tidur di ruang depan. Jika pun sudah di dalam kamar ia acap keluar kamar sendirian, sambil meraba-raba, mencari kursi. Ia duduk-duduk atau mengambil tempat dilantai dan merebahkan tubuhnya begitu saja atau melingkar sambil memeluk bantal. Ia tak pernah memilih tempat. Tampaknya, bagi Gus Dur, tempat di mana-mana sama saja, sebab tubuh sangat tergantung pada jiwa. Tubuh mengikuti jiwa. Dengan begitu Gus Dur juga seakan-akan tak lagi memikirkan dirinya sendiri. Yang ada dalam pikiran dan jiwanya adalah manusia.

Sering saya melihat, Gus Dur di rumah hanya mengenakan kaos dan celana sebatas bawah lutut, dari bahan yang tak tampak berkualitas, persis seperti ketika beliau di depan istana, sambil melambai-lambaikan tangan kepada umatnya menjelang dilengserkan. Saya tak pernah melihat Gus Dur memakai sarung, seperti kiyai pada umumnya. Ia memang tak memikirkan atau tak lagi terpikirkan soal bahan apa, warna apa dan bikinan siapa untuk pakaiannya. Ia menerima

saja apa yang diberikan kepadanya. Tetapi tentu saja, ibu atau anak-anaknya memperhatikan apa yang pantas bagi suami atau bapaknya.

Kiyai A.Wahid Maryanto, santri Gus Dur ketika di Pesantren Tebuireng, bercerita kepada saya bahwa Gus Dur sering tak betah sendirian di rumah, baik ketika malam maupun siang. Ia sering mencari-cari teman untuk sekedar menjadi teman bicara ngalor ngidul tentang politik, partai, negara, dunia, bangsa, tentang NU dan umat, atau bercerita yang ringan-ringan dan tak ketinggalan joke-joke menyegarkan, sambil memijat tubuhnya yang kelelahan. Dia sendiri, terutama malam hari, jika ada di sana, sering dipanggil “bapak” untuk keperluan yang sama. Bila “bapak” telah tidur, dia pamit.

Jika Gus Dur tak bisa tidur nyenyak dan berlama-lama, saya paham. Bagi tubuh yang menyimpan magma spiritual yang bergolak, kesendirian kadang menyiksa. Ia selalu ingin menumpahkannya lalu mengaliri siapa saja yang ditemuinya. Dan ia selalu ingin menemui orang di mana saja untuk bicara apa saja atau sekedar untuk bercanda atau menumpahkan humor-humor segar-cerdas yang baru saja melintas dalam pikirannya. Ibu Shinta bercerita kepada saya, “Sering pada malam-malam yang telah sepi,

Gus Dur, meminta, setengah memaksa untuk pergi ke suatu tempat yang jauh, di Jawa Timur. Ketika disampaikan “mas, ini sudah malam dan tak ada pesawat, beliau baru berhenti meminta, meski tampak beliau kecewa”.

Saya sering makan di rumah itu, pagi, siang atau malam, baik usai mengaji atau tidak. Apabila sarapan pagi atau makan siang, ibu Shinta hanya menemani saja, tak pernah ikut makan bersama, karena beliau puasa tiap hari dan itu dilakoninya selama bertahun-tahun. Lauk-pauknya tak ada yang istimewa. Begitu sederhana; tempe, tahu, sambal, lalap, sayur bening atau lodeh atau rawon atau soto Lamongan, telur, daging kering dan kerupuk. Cuci mulutnya pisang, jeruk, es cendol, atau es campur. Begitulah isi meja makan di rumah itu, begitu bersahaja, tak ada kemewahan atau berlebih-lebihan.

Ada satu malam yang tak akan pernah saya lupakan. Itu adalah ketika saya diajak makan malam bersama Gus Dur dan keluarganya di rumah itu. Saya amat senang karena beliau ada di rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Di meja makan itu saya adalah satu-satunya orang asing. Menu makanan yang dihidangkan tetap saja tak terlalu istimewa, seperti yang sudah disebut di atas. Gus Dur tak memilih-milih lauk

apa yang diberikan kepadanya. Beliau menerima saja, memakannya dan menikmatinya. Tak ada makanan yang tak disukainya. Usai makan yang penuh berkah itu, dengan tetap berada di depan meja, Gus Dur mulai melemparkan cerita-cerita unik dan humor-humor baru yang membuat semuanya tergelak-gelak. Lemparan humor Gus Dur disambut dengan humor-humor dari yang lainnya, kecuali saya, dengan humor-humor yang tak kalah lucu dan sanggup meledakkan tawa yang tak habis-habis.

Jika Gus Dur tak pergi ke mana-mana, atau memang ada jadwal mengaji kitab kuning di masjidnya, beliau mengaji dan memberikan kuliah kepada para santrinya. Gus Dur biasanya menentukan hari Sabtu untuk mengaji kitab kuning. Banyak kitab yang sudah dibaca Gus Dur, di hadapan para santrinya, terutama kitab-kitab sastra klasik, kitab-kitab Tasawuf dan Ushul Fiqh atau al Qawa'id al Fiqhiyyah. Menurut Kiyai AW. Maryanto, yang biasa mendampingi atau membacakan kitab, Gus Dur sudah mengaji kitab Al Mu'allaqat al Sab', kumpulan puisi Imri al Qais, raja penyair Arab pra Islam. Secara literal "al Mu'allaqat al Sab'" adalah tujuh puisi yang digantung di dinding ka'bah. Bila puisi sudah digantung di situ, maka ia adalah yang terseleksi

dari sekian banyak puisi. Gus Dur juga membaca Diwan Al Buhturi, Maqamat al Hariri dan Diwan al Mutanabbi. Semuanya adalah kitab sastra Arab klasik. Yang lain adalah Al Asybah wa al Nazhair, sebuah kitab tentang kaedah-kaedah hukum (fiqh). Di tengah-tengah mengaji kitab-kitab tersebut beliau juga menyinggung dan bercerita tentang kitab lainnya. Misalnya *Al Insan al Kamil* (Manusia Paripurna), buku Tasawuf, karya sufi besar Abd al Karim al Jilli dan *Nuzhah Alibba fi Thabaqat al Udaba* (Taman Para Cendikia; Biofrafi Para Sastrawan). Buku yang terakhir ini, menurut cerita Gus Dur, ada di lemari kakeknya; hadratussyeikh KH. Hasyim Asy'ari. Ia membacanya ketika masih sangat muda. Tetapi dari banyak sekali kitab klasik tersebut, Gus Dur tampaknya sangat terkesan pada kitab *al Hikam* (Kearifan-kearifan), karya Ibnu Athailla al Sakandari. Gus Dur sering mengulang-ulang kata-kata yang amat indah dari sufi besar itu:

إِذْفَن وَجُودَكَ فِي أَرْضِ الْخَمُولِ فَمَا نَبَتَ مِمَّا لَمْ يَدْفَنَ لَا يَتِمُّ نَتَاجُهُ

Sembunyikan wujudmu
pada tanah yang tak dikenal
Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji
yang tak ditanam tak berbuah sempurna

Zaki Mubarak, sarjana Tasawuf terkemuka dari Mesir, mengatakan: “Syair *Idfin* itu amat memukau, begitu indah. Aku tak pernah menemukan yang sepertinya di tempat lain. Di dalamnya tersimpan gejolak yang amat kuat. Sang penulis, agaknya, menemukan maknanya ketika ia melakukan permenungan dalam sunyi, lalu merasuki jiwanya, maka ia menjadi kata-kata yang abadi, sepanjang zaman”. Puisi tersebut bicara soal perlunya menjauhkan hasrat dan ambisi akan popularitas, kemasyhuran diri. “Simpanlah hasratmu akan popularitas, karena hasrat demikian tak akan membuat dirimu tumbuh dan berkembang sempurna”. Hasrat akan kemasyhuran akan menyibukkan diri pada urusan-urusan yang tak berguna dan mengabaikan kerja-kerja yang bermanfaat. Cinta pada kemasyhuran mendorong orang untuk mengurus dirinya sendiri dan tak peduli pada orang lain. Makna lain dari ini adalah perlunya ketulusan dan keikhlasan. “*Sepilah ing pamrih, ramelah ing gawe*”.

Puisi lain yang juga sering disampaikan Gus Dur yang dihafalnya dari kitab di atas adalah:

لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله

Tak usah temani orang yang
ak membangkitkan tingkah-lakumu
Dan yang kata-katanya
tak membimbingmu kepada Tuhan

Menurut Gus Dur, pada suatu hari, syair inilah yang mengilhami para ulama untuk memberi nama organisasinya menjadi “Nahdlatul Ulama” (Kebangkitan Ulama).

Setiap mendengar Gus Dur membaca kalimat-kalimat puitis di atas, saya tak tahan untuk menangis sendiri. “Pesan-pesan itulah rupanya yang menuntun dan membimbing Gus Dur sepanjang hidupnya”. Beliau selalu menyimpan hasrat-hasrat kemasyhuran diri dan lebih banyak bekerja daripada bicara. Beliau bicara jika memang harus bicara. Meskipun gemar humor, tetapi humor-humornya memberi makna. Gus Dur selalu ingin dan memang sering menemui orang-orang yang direndahkan dan disisihkan hanya karena mereka miskin, papa tak penting dan tak berharga. Tetapi tidak bagi beliau. Merekalah yang telah memberi makna, menginspirasi dan membangkitkan dirinya.

Jika begitu Gus Dur adalah sang Zahid. Dalam terma misitisme Islam, ia adalah seorang yang bersahaja, yang selalu rela atas pemberian

Tuhan, tak protes pada-Nya. Ia yang tak berhasrat pada hari ini dan bernilai rendah. Ia yang tak pernah gelisah ketika kehilangan kemegahan, kehormatan dan kenikmatan benda-benda. Ia yang tak pernah bergantung pada makhluk Tuhan.

Tarekat dan Do'a-Do'a Gus Dur

Orang-orang yang dekat Gus Dur, bercerita, bahwa jika tak ada teman yang diajak bicara dan beliau sendiri, maka dalam waktu yang sepi itu beliau membaca surah al Fatihah, entah berapa kali, lalu “tawassul kepada Nabi dan berdo'a untuk dirinya sendiri, untuk para wali dan ulama yang telah wafat. Itulah jalan sepirtual (thariqah)nya. Tawassul dan do'a-do'a Gus Dur itu kini telah menyebar. Beliau menyanyikannya dengan nada-nada elegi. Bait-bait Tawasul dan do'a tersebut sesungguhnya tidaklah asing. Ia telah berabad disenandungkan di pesantren-pesantren dan surau-surau. Suara Gus Dur memang tak semerdu suara Hadad Alwi atau lainnya, tetapi jika beliau mengalunkannya, terasa memiliki makna keindahan mitis yang menghujam.

Inilah do'a-do'a yang selalu dibaca Gus Dur di samping do'a yang lain. Semua orang mungkin

sudah tahu do'a-do'a ini. Yang pertama do'a ampunan yang diawali dengan tawassul kepada al Musthafa, Muhammad Saw. Yang kedua do'a pertaubatan. Konon, ia ditulis oleh Abu Nawas, sang cendikia yang jenaka itu. Dengan do'a-do'a itu, kita tentu paham bahwa beliau selalu mohon ampunan kepada Tuhan. Para Nabi, orang-orang arif dan orang-orang yang rendah hati setiap hari mohon ampunan-Nya, ratusan dan ribuan kali.

Do'a 1

Wahai Tuhanku,
Anugerahi kedamaian dan keselamatan
Selama-lamanya
Pada sang kekasih-Mu
Ciptaan-Mu yang terbaik dari semuanya

Berkat al Musthafa,
sampaikan maksud-maksudku
Ampunilah dosa-dosa yang lewat
Wahai Yang Maha Mulia

Al Musthafa, dialah sang kekasih
Pertolongannya diharap-harap
Bagi setiap kegelisahan yang memuncak

Do'a 2

Wahai Tuhanku
Aku bukan orang yang pantas tinggal
di surga-Mu

Tetapi aku juga tak sanggup di neraka-Mu
Anugerahi aku kemampuan
kembali pada-Mu
Dan ampuni dosa-dosaku
Karena hanya Engkau yang bisa
memberi ampun

Dosa-dosaku bak jumlah butir pasir
di bumi
Anugerahi aku kemampuan
kembali pada-Mu
Wahai Yang Maha Agung

Umurku berkurang setiap hari
Tetapi dosaku bertambah-tambah saja
Bagaimana aku sanggup menanggungnya

Wahai Tuhanku,
Hamba-Mu yang berdosa
Telah datang, telah datang
Sambil mengakui begitu banyak dosa
Dan ia telah sungguh-sungguh
meminta-Mu

Bila Engkau mengampuniku
Karena hanya Engkau yang bisa
mengampuni
Tetapi bila Engkau menolakku
Kepada siapa lagi aku bisa berharap

Sang Pengembara: Selamat Jalan!

Gus Dur adalah satu dari sedikit para pengembara (*ghuraba*). Sebagaimana umumnya pengembara, ia sering menjadi subyek yang aneh, asing, dicurigai atau bahkan dimusuhi oleh mereka yang tak mengerti dan tak paham. Pengembara sering dianggap aneh oleh orang-orang di kampung, bukan hanya pakaian dan perilakunya, tetapi juga pikiran-pikirannya. Maka ia acap dianggap pribadi yang aneh atau “nyleneh”. Jika ia kemudian mengungguli otoritas yang ada di sana dan menarik semakin banyak pengikut yang mengaguminya, maka ia akan segera dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan sosial.

Kaum pengembara (*Ghuraba*) akan selalu hadir pada setiap situasi sejarah social yang menjelang runtuh atau ketika jalan sejarah tak lagi lurus. Mereka hadir untuk mendakwahkan kembali ide keasalan dan janji primordial manusia, ketika mereka belum mewujud; “*alastu*”, yakni “*alastu bi rabbikum?*”. *Qalu Bala*”(bukankah Aku Tuhanmu?. Mereka menjawab: Ya, Engkau Tuhan kami). Para pengembara tersebut memproklamkan kembali Tauhid, tentang Kemahaesaan Tuhan kepada siapa semua yang ada di muka bumi

harus menyerah dan menundukkan diri, dan Kehanifan (kejujuran, ketulusan dan jalan lurus). Di atas landasan itu, mereka, para pengembara itu, tampil untuk memberangus praktik-praktik kekuasaan yang despotik, tiranik dan membodohi rakyat jelata dengan berlindung di bawah ketiak berhala-berhala yang disebutnya sebagai tuhan-tuhan. Pada saat yang sama mereka hadir untuk menancapkan kembali pilar-pilar kemanusiaan yang hilang atau diberangus. Ide-ide kemanusiaan itu tak pelak mengguncang dan merontokkan setiap otoritas politik, kebudayaan dan keagamaan yang diciptakan untuk kepentingan dan kenikmatan duniawi bagi dirinya sendiri atau bagi kelompoknya.

Gus Dur adalah salah satu sang pengembara itu. Ia seperti tak pernah lelah berjalan dan terus berjalan, mengembara ke mana-mana, ke gurun pasir yang kering dan mendaki gunung-gemunung yang terjal dan meliuk-liuk, menapaki jalan setapak yang lengang. Ia melihat keindahan sekaligus juga kengerian. Ia melihat banyak jalan yang tak lagi lurus dan yang belum selesai.

Dengarlah apa kata Nabi yang agung, Muhammad bin Abd Allah, Saw, tentang kehadiran para pengembara itu:

بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ

“Islam hadir sebagai orang asing, aneh, sebagai pengembara. Ia akan kembali asing, aneh, seperti awal. Maka berbahagialah wahai orang-orang yang mengembara”.

Ketika Nabi Islam hadir menyampaikan pesan-pesan suci Tuhan: kemerdekaan, kesetaraan, keadilan dan penghormatan manusia, beliau menjadi manusia pengembara, orang asing, diasingkan, diusir dan dianggap manusia gila, oleh orang-orang yang tak paham, tak mengerti, pimpinan Abu Jahal (bapak orang-orang bodoh).

Hari ini sang pengembara
telah pulang,
Selamat Jalan!
Hari ini orang asing itu telah pulang.
Selamat Jalan!
Hari ini orang hanif itu telah pulang.
Selamat Jalan!
Dunia mengantarmu dengan do'a.
Selamat Jalan!
Suara-suara riang di langit menyambutmu:
Selamat Datang!

Cirebon, 22 Januari 2010
Disiapkan untuk memperingati 40 hari Gus Dur.

GUS DUR, “SEBUAH NAMA” Mengandung Banyak Makna

Petrus Juarno, SE

Berpulangny seorang Putra Bangsa milik Semua

Pada tanggal 30 Desember 2009 merupakan hari duka yang mendalam bagi kita semua. Tepatnya ada pukul 16.45 WIB, Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal dengan panggilan GUS DUR telah berpulang menghadap Sang Khalik. Berita wafatnya Gus Dur langsung membahana keseluruhan pelosok negeri dari kota sampai ke desa-desa. Dari para kerabat, sahabat, rakyat sampai para pejabat. Semua merasa kaget, sedih dan berduka karena merasa kehilangan sosok yang dicintai berkat jasa-jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negeri ini. Berkat pengabdian dan jasanya yang besar kepada

negara, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) melakukan rapat mendadak dengan jajaran kabinet dan membatalkan acara tahun barunya, guna merencanakan upacara pemakaman dan penghormatan terakhir kepada mendiang Presiden ke 4 negri ini. Sebagai penghormatan, Presiden SBY menyatakan hari berkabung nasional selama 7 hari dengan memasang bendera setengah tiang. Sejak tersiar berita wafatnya Gus Dur, ungkapan rasa turut berduka cita dari para kerabat, kenalan dan simpatisan terus mengalir tak henti-henti, seiring gema tahlil dan tahmid di Mesjid-mesjid dan kediaman mendiang Gus Dur di Ciganjur.

Melihat banyaknya pelayat dan para tokoh masyarakat serta pemuka-pemuka agama, disamping pejabat dan aparat resmi pemerintah yang hadir dalam acara pemakaman Sang Kyai, hal ini menunjukkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid betul-betul sosok yang dihormati dan dikagumi oleh banyak komponen masyarakat. Sebagai wujud penghormatan pemerintah kepada almarhum GUS DUR, pemakamannya dilakukan dengan Upacara Kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY sebagai Inspektur Upacara dan dihadiri pula oleh Wakil Presiden dan para Menteri. Dalam sambutannya Presiden SBY menyampaikan rasa kehilangan

yang dalam atas berpulanginya Putra terbaik Bangsa. Presiden juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa almarhum dalam membangun tatanan dasar kehidupan demokrasi di negeri ini. Selain membangun tatanan kehidupan demokrasi, beliau juga merupakan sosok Tokoh yang membangun rasa toleransi dalam kehidupan keberagaman di Indonesia dengan pandangan Pluralisnya. Oleh karena itu sebagai penghormatan dan pengakuan atas jasa dan pengabdianya, GUS DUR didaulat sebagai *“Bapak Pejuang Demokrasi dan Bapak Pluralisme”*.

Secara pribadi penulis tidak mengenal KH. Abdurrahman Wahid secara langsung. Penulis hanya mengenal GUS DUR dari apa yang dibaca, dilihat dan dicermati dari perjalanan hidupnya, terutama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan keberagaman. Dari pengamatan penulis tentang kiprah Gus Dur, ada 3 hal yang dapat dijadikan refleksi. Menurut pandangan penulis, *ibarat sebuah kata*, yang kalau diartikan menurut tata bahasa, nama GUS DUR mengandung makna jamak. Yakni, merupakan *“ kata benda dari sisi kemanusiaannya, kata sifat dari sisi pemikiran-pemikirannya dan kata kerja dari sisi perjuangannya”*.

Manusia Multi Talenta

GUS DUR dalam arti kata benda atau sisi kemanusiannya, mengandung makna bahwa beliau adalah manusia biasa. Yaitu manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Manusia yang mempunyai sisi gelap dan terang seperti kita. Namun sebagai manusia biasa, dibandingkan dengan yang lain, Gus Dur mempunyai bakat atau talenta yang lebih dari manusia pada umumnya. Menurut penulis Kyai Haji Abdurrahman Wahid adalah sosok "*Manusia Multi Talenta*". Yang kalau dijabarkan dalam kiprahnya, *GUS DUR* adalah seorang *Agamawan, Negarawan, Cendekiawan, Budayawan, Seniman* serta sebutan lainnya.

Sebagai orang yang dilahirkan dari keluarga yang taat keagamaannya, yang adalah cucu dari KH. Hasyim Asy'ari pendiri Nahdatul Ulama (NU) dan putra KH. Wahid Hasyim Menteri Agama pertama dalam Pemerintahan Orde Lama, GUS DUR mencerminkan sosok Agamawan. Berkat tempaan pendidikan keluarga dan lingkungannya di pesantren, Gus Dur tumbuh menjadi sosok yang memiliki pemahaman agama yang kuat. Dengan pengetahuan keagamaan yang dalam, terutama tentang pemahaman *Islam*

sebagai Rahmat bagi sekalian Alam (Rahmatan Lil Alamin) telah beliau tunjukan dengan sikap dan perbuatannya. Kedekatan dengan umat dan para pemuka agama lain adalah salah satu wujud nyatanya. Sikap dan rasa toleransi, pengakuan dan perlindungan terhadap agama minoritas, telah menunjukkan dirinya sebagai seorang Pluralis. Maka tidak heran, hal ini menumbuhkan rasa hormat para umat dan tokoh agama diluar Islam terhadapnya. Jadi tidaklah berlebihan kalau penulis menyebut GUS DUR adalah “*Agamawan Mumpuni*”.

Meskipun pemerintahannya tidak bertahan lama, pada saat GUS DUR menjadi Presiden RI ke 4 sikap kenegarawanannya telah beliau tunjukan. Dalam kapasitasnya sebagai presiden pada waktu itu, Gus Dur melakukan terobosan-terobosan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Sekat-sekat diskriminasi dan kebebasan Gus Dur buka dengan dasar demokrasi dan kesetaraan, terutama dalam bidang hak-hak sosial dan politik warga Negara. Kesempatan bagi kalangan minoritas turut serta memutuskan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan langkah tepat Gus Dur untuk menghindari separatisme yang mulai bermunculan disana-sisi. Kebebasan

berekspresi dan berkebudayaan juga beliau beri ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai keberagaman bangsa Indonesia. Perundang-undangan yang dipandang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, Gus Dur hapuskan. Langkah kontroversial Gus Dur pada saat pemerintahannya adalah pertentangan dengan Lembaga MPR dan DPR dengan dikeluarkannya Dekrit membubarkan lembaga tersebut. Klimak dari pertentangan ini berujung dengan pemakzulan dirinya dari kedudukannya sebagai Presiden. Sebagai konsekuensi logis atas kebijakannya, *Gus Dur menerima pelengseran tersebut dengan jiwa besar*. Dari sikap jiwa besar yang dtunjukkan Gus Dur, tidak keliru kalau penulis menyebut GUS DUR sosok "*Negarawan Besar*".

Sebagai seorang yang mengenyam pendidikan tinggi, khususnya tentang keagamaan ("ke-Islam-an") pada Fakultas Syari'ah Universitas AlAzhar, Kairo, Mesir (1964-1966) serta kiprahnya di berbagai organisasi keagamaan, baik tingkat nasional maupun dunia, telah menjadikan Gus Dur sosok pribadi yang mempunyai pengetahuan luas dan universal. Berbagai ilmu pengetahuan dan beberapa bahasa yang GUS DUR kuasai, menunjukkan bahwa Kyai Abdurrahman Wahid

adalah seorang yang cerdas. Komitmen dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan serta kebebasan intelektual yang selama ini beliau perjuangkan patut kita kagumi. Oleh karena itu sepatutnya kalau DUS DUR juga penulis sebut sebagai seorang *“Cendekiawan Sejati”*.

Dengan pemahaman agama yang kuat dan kemampuan intelektual yang tinggi serta interaksi sosial budaya yang luas, menjadikan GUS DUR juga sosok budayawan. Pengenalan karakter, budaya dan pikiran anak-anak bangsa Indonesia yang multi plural, telah menjadikan sosok Gus Dur Tokoh Budayawan yang tidak ada taranya di Nusantara. Kedekatan secara pribadi Kyai Abdurrahman Wahid dengan berbagai tokoh kebudayaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku dan etnis, dari Sabang sampai Merauke, menunjukkan bahwa Gus Dur adalah seorang pribadi yang cinta budaya. Jadi tidak salah juga kalau penulis menyebut GUS DUR adalah seorang *“Budayawan Rendah Hati”*.

Selama ini kita mengenal Kyai Abdurrahman Wahid adalah seorang yang kontroversial dengan celotehan jenaknya. Sindiran lucu yang ceplas ceplos keluar dari mulut GUS DUR membuat banyak orang tersenyum bahkan tertawa. Bahkan kalimat *“Begitu saja kok repot”* telah menjadi

ikon guyonan populer di masyarakat kita. Dari semua itu menunjukkan bahwa sosok Gus Dur adalah orang yang mempunyai rasa humor dan berkesenian tinggi untuk membuat orang terhibur. Maka tidak berlebihan kalau penulis menjuluki GUS DUR juga seorang "*Seniman Kocak*".

Representasi Ke-Islam-an dan Ke-Indonesia-an

GUS DUR sebagai kata sifat atau sisi pemikirannya, mengandung makna bahwa pemikiran-pemikiran beliau mempunyai banyak dimensi. Menurut penulis ada dua dimensi pemikiran KH. Abdurrahman Wahid yang berasal dari teks yang berbeda, yaitu ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an, tetapi menyatu dalam konteks bangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai seorang yang dilahirkan dari keluarga yang taat beragama, yang nota bene cucu dari pendiri Nahdatul Ulama (NU) suatu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Gus Dur tentunya mempunyai dasar pemahaman agama yang kuat. Ditambah dengan pendidikan formal yang dijalaninya baik di pesantren maupun Fakultas Sya'riah Universitas Al Azhar Kairo, telah menambah dalam lagi pemahaman Kyai Abdurrahman Wahid tentang ajaran Islam yang

sesungguhnya.

Pemahaman Islam sebagai agama yang melindungi sekalian alam (“Rahmatan Lil Alamin”), GUS DUR yakini dan pegang kuat sebagai ajaran yang hakiki. Ajaran Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam Gus Dur terapkan dan amalkan dalam kehidupan nyata sebagai seorang beriman. Sebagai pemeluk Islam yang taat, Gus Dur senantiasa memakai Kitab Suci Al Quran dan hadist sebagai landasan berpikir dan bertindakya. Berpegang pada iman yang kuat, Gus Dur menjalankannya dengan sikap rendah hati, tegas, lugas dan tanpa beban. Sikap dan perilaku Gus Dur sebagai seorang yang Rahmatan Lil Alamin, diwujudkan pada keberpihakan terhadap kaum minoritas dan termarginalkan. Rasa toleransi dan penghormatan terhadap agama dan keyakinan lain, Gus Dur tumbuhkan dalam membangun kerukunan hidup beragama. Semua ini menunjukkan bahwa betapa kuat dan percaya dirinya Gus Dur pada ajaran agama yang diyakininya. Artinya, dalam menjalankan kehidupan, selain berihitiar, Gus Dur melakukan penyerahan diri secara total kepada Sang Khaliknya.

Dari apa yang GUS DUR yakini, pahami dan amalkan dalam sikap dan perbuatannya,

menunjukkan *Gus Dur adalah seorang Muslim yang merepresentasikan Islam yang Rahmatan Lil Alamin.*

Sebagai seorang anak bangsa yang sejak kecil hidup dalam lingkungan sosial masyarakat yang beragam (plural), GUS DUR juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Hidup di lingkungan pesantren yang pada umumnya majemuk, dalam arti para santrinya datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, merupakan pembelajaran awal tentang keberagaman. Ditambah dengan pendidikan tinggi yang diperoleh Gus Dur diluar negeri serta pengalaman organisasi yang dimiliki, baik nasional maupun internasional, telah menambah wawasan pemikirannya tentang kehidupan universal.

Berbekal pemahaman agama dan wawasan kebangsaan yang kuat, GUS DUR mengaktualisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai wujud nyata atas pemahaman kebangsaan tersebut, Gus Dur representasikan dalam upaya membangun kehidupan demokrasi di negeri ini. Meskipun pemerintahannya tidak sampai seumur jagung, pada saat Kyai Haji Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI ke 4, inilah awal perjuangannya membangun dasar-dasar demokrasi Indonesia.

Prinsip demokrasi yang berorientasi pada suara rakyat, Gus Dur lakukan dengan cara dialog dan mendengarkan aspirasi mereka. Melalui kebijakan dengan memberi apa yang dapat pemerintah berikan, dengan tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan cara Gus Dur menyelesaikan gejolak konflik-konflik yang terjadi. Saat itu Gus Dur tidak hanya berada di puncak kekuasaan, tetapi dia juga berusaha untuk berada ditengah-tengah rakyat yang mencintainya. Pada masa pemerintahannya meskipun itu dianggap kontroversial, Gus Dur membuka sekat-sekat dan kran diskriminasi serta kebebasan. Baginya kebebasan dan kemerdekaan adalah hak bagi setiap warga, dimana Negara wajib melindunginya sesuai konstitusi. Perlindungan terhadap hak-hak kaum minoritas dan tersisihkan wajib dilakukan karena merupakan amanat Undang-undang Dasar. Pemahaman kebhinekaan atau pluralitas ke-Indonesia-an adalah suatu keniscayaan yang harus kita akui dan jaga sebagai komitmen bersama dalam kehidupan berbangsa bernegara. Meskipun kejatuhan Gus Dur dari kepemimpinan negeri ini tragis, namun masih banyak rakyat yang mencintainya. Dengan pedoman kepemimpinan yang dekat dan bermuara pada kepentingan

rakyat, seperti yang sering diucapkannya, *yaitu bahwa kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus terkait langsung dengan kesejahteraan mereka, (Tasharuf al-imam ala ar-ra'iyah manutun bi al-maslah)*, telah membuat Gus Dur ada dalam kenangan hati sebagian besar masyarakatnya. Kyai Abdurrahman Wahid adalah pemimpin yang selalu menorehkan hasil perjuangannya di hati masyarakat yang diperjuangkannya. *Melihat pemahaman, sikap dan tindakan yang dilakukan GUS DUR dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menunjukkan bahwa beliau adalah sosok pemimpin dan warga Negara yang merepresentasikan Indonesia yang sesungguhnya.*

Dari dua dimensi pemikiran Kyai Abdurrahman Wahid tentang pemahaman Agama dan Negara dalam konteks kebangsaan, maka tidak berlebihan kalau *GUS DUR penulis juluki sebagai "Muslim yang Paripurna dan Nasionalis Sejati" ("100% Muslim dan 100% Indonesia")*.

Perjuangan menegakan Tatanan Nilai Kehidupan

GUS DUR sebagai kata kerja mengandung makna bahwa perjuangannya adalah menegakan

tatanan nilai kemanusiaan dan kehidupan. Kehidupan yang kalau penulis artikan sebuah proses memberi nilai pada hidup agar lebih bermanfaat bagi orang banyak, maka kehidupan adalah kumpulan tatanan nilai yang harus diperjuangkan.

Tatanan nilai yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah nilai kemanusiaannya itu sendiri. *Nilai kemanusiaan adalah adi kodrati yang hakiki yang dimiliki manusia dimana harus diperjuangkan dan di junjung tinggi oleh setiap orang tanpa kecuali.*

Dalam konteks perjuangan tatanan nilai diatas, GUS DUR sudah melakukan dalam sikap dan perbuatannya selama ini. Apa yang Gus Dur lakukan dalam kiprahnya baik dalam kehidupan keberagamaan, sosial kemasyarakatan maupun kenegaraan, semua bermuara pada perjuangan tatanan nilai. Kepekaan Gus Dur atas pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan pengekangan terhadap hak azasi manusia, itulah obsesinya. Keberpihakan Gus Dur pada orang-orang lemah, tersisihkan dan terzolimi, merupakan wujud nyata perjuangannya. Dengan prinsip maju tak gentar membela yang benar, Gus Dur maju tanpa bisa dihalangi oleh siapapun, baik oleh kawan maupun

lawan. Dari apa yang Gus Dur lakukan dalam perjuangannya untuk menegakan kemanusiaan, kebenaran dan keadilan, maka sudah selayaknya kalau kita sebut *Kyai Abdurrahman Wahid* sebagai "*Pejuang Kemanusiaan*".

Refleksi bagi kita semua yang masih ada

Saat ini Bapak Pejuang Demokrasi, Pluralisme dan Kemanusiaan ini telah tidak berada ditengah-tengah kita lagi. Jasadnya telah menyatu kembali ketanah dan debu sebagai asalnya manusia diciptakan. Saat ini almarhum KYAI HAJI ABDURRAHMAN WAHID telah tenang dialam kebakaan karena telah menyelesaikan pertempurannya dengan baik. Prajurit pemberani itu telah kembali menghadap pada yang mengutusnyanya. Yang tinggal saat ini adalah *wacana pemikiran, gagasan dan teladan hidupnya* sebagai *wasiat buat kita semua*. Tugas dan tanggung jawabnya sekarang ada ditangan kita semua yang mencintainya..

Lalu pertanyaannya, apa yang sekarang dapat kita lakukan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab itu ?.

Seperti kita ketahui dan maklumi, salah satu impian Gus Dur "*adalah terbangunnya*

kerukunan hidup beragama yang tulus dimuka bumi Pertiwi tercinta ini". Namun kelihatannya, impian atau cita-cita itu masih jauh dari harapan. Disana-sini masih sering kita lihat dan saksikan dengan nyata, gesekan dan pertentangan antara paham keagamaan, baik intern agama maupun antar agama yang ada. Hal ini menunjukkan, bahwa pemahaman nilai keagamaan yang dimiliki bangsa ini, masih jauh dari pemahaman nilai agama yang sesungguhnya. Jadi sangatlah ironis kalau kita kaitkan dengan anggapan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang agamis, seperti yang tertuang dalam Sila Ke-Tuhan-nya.

Sebagai bahan permenungan atau refleksi buat kita semua, terutama dalam hubungan antar agama, penulis akan mencoba membuat telaahan sederhana, yang mungkin dapat menjadi masukan. Dalam hal ini penulis tidak bermaksud memberikan gambaran negatif tentang hubungan antar umat beragama. Namun kita secara jujur harus mau mengakui dan menerima bahwa sejarah hubungan antar umat beragama, khususnya antara Islam dan Kristen, bukanlah sejarah yang hanya baik dan mulus. Sejarah ini mencatat dan menyimpan berbagai macam konflik yang mengakibatkan luka-luka batin bagi keduanya. Dan hal ini benar terjadi baik pada tingkat

internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional mungkin kita masih ingat, misalnya "*Perang Salib*" yang berlangsung antara abad 11-13 M. Kolonialisme dan sikap dunia Barat, yang sering diindentikan dengan dunia Kristen yang memusuhi Islam. Kita maklum, pengalamam-pengalamam ini tentu meninggalkan luka-luka pada umat Islam.

Demikian sebaliknya, dunia Barat sejak akhir abad ke 15 selama sekitar 300 tahun mengalami yang disebut "*bahaya Turki*". Ini pun tentunya meninggalkan luka-luka pada umat Kristen. Hal yang sama terjadi pada tingkat nasional. Baik umat Islam maupun Kristen harus menanggung beban-beban sejarah panjang yang menyakitkan. Misalnya, pada awal kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang selalu mencurigai dan mengesampingkan orang Islam, dan pada waktu yang sama memberi peran yang penting bagi orang-orang Kristen. Sebaliknya umat Kristen juga sulit lepas dari sindrom minoritas, takut terhadap ancaman Islam. Hal itu ditambah lagi dengan kecurigaan-kecurigaan yang terus berlansung, dengan isu Islamisasi atau Kristenisasi.

Bahkan lebih berbahaya lagi, saat ini sejarah pahit dan luka-luka ini senyatanya telah menjadi bagian dari "*identitas kolektif*" umat Islam

maupun Kristen. Akibat hal ini agama (“Islam dan Kristen”) lalu menjadi landasan bagi munculnya *“politik identitas”*. Dalam politik semacam ini yang menjadi tujuan terakhir dalam berbagai usahanya, baik politik, ekonomi, sosial hukum maupun lainnya, bukan lagi kepentingan publik, melainkan kepentingan kelompok tertentu. Sejarah dan akibat-akibat dari keadaan seperti ini perlu kita akui dan terima dengan hati yang tulus serta jiwa besar. Kita perlu menyembuhkan luka-luka sejarah itu dan membebaskan diri dari belenggunya, meskipun kita tahu bahwa untuk menyembuhkan luka-luka batin itu perlu menempuh jalan yang panjang. Tetapi inilah tugas kita bersama yang amat penting untuk masa kini agar kita mempunyai masa depan. Langkah berani inilah yang dilakukan oleh *“Paus Yohanes Paulus II”* ketika beliau meminta maaf atas pelbagai dosa dan penyimpangan Gereja selama sejarahnya. Ini pulalah kiranya yang telah dilakukan *“Presiden KH. Abdurrahman Wahid”*, yang dengan tulus mengakui dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan pemerintah di masa lampau.

Dari refleksi diatas tentang bagaimana sejarah dan luka-luka yang terjadi dalam hubungan antar umat beragama, serta bagaimana

teladan GUS DUR dalam menyikapinya, ada benang merah yang dapat kita petik sebagai pijakan langkah kita kedepan.

Pertama, bukankah pada dasarnya agama-agama itu memiliki potensi pemberdayaan publik? Alangkah baiknya kalau potensi atau energi itu kita curahkan untuk bersama-sama membangun suatu masyarakat dengan tatanan baru, yang menjamin kesejahteraan bersama (*bonum publicum*) sebagai tujuannya. Kalau kita bisa berpikir dan bertindak sampai ke titik ini, maka kebersamaan kita tidak mudah digoyang dan dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan tidak terpuji. Ada nilai pokok yang dapat menjadi ranah dalam pemberdayaan kebijakan publik, *yaitu martabat manusia sebagai pribadi, solidaritas, dan keberpihakan pada yang lemah (option to the poor)*.

Kedua, untuk mengaktualisasikan pemikiran dan potensi diatas diperlukan kerjasama antar umat beragama. Memang hal ini bukanlah hal yang mudah dengan trauma-trauma masa lalu. Namun demikian, dengan terus kita kembangkan *semangat perjuangan kemanusiaan (uhuwah insaniyah)* serta membangun dialog yang tulus, diharapkan dapat berangsur pulih. Kerja sama dan dialog yang diharapkan adalah, kerja sama

dan dialog kehidupan yang riil. Bukan kerjasama dan dialog sebatas wacana yang seringkali hanya dilakukan ditataran elit agama, melainkan kerjasama dan dialog yang sampai ke akar rumput umat. Misalnya, sebut saja dialog dan kerjasama untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan dan penyakit masyarakat lainnya.

Ketiga, sebagai tanggung jawab moral dan sosial kita sebagai umat beragama, penulis menghimbau kepada semua komponen bangsa, untuk mulai saat ini tidak membuang energi dengan pertentangan dan perselisihan. Mari dengan kesungguhan, kita kesampingkan perbedaan-perbedaan dan kepentingan-kepentingan sempit yang ada, dan mengarahkannya pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Sudah saatnya kita berusaha menyembuhkan luka-luka lama itu melalui introspeksi diri dan pertobatan dengan memberi ruang bagi terbangunnya rekonsiliasi bangsa. Sebagai penutup tulisan ini, penulis mengajak mari dengan tulis hati, kita bersama-sama bergandeng tangan bersatu padu sebagai sesama saudara dan Anak Bangsa, *mempersatukan langkah membangun tatanan baru, Indonesia yang damai, demokratis, adil, makmur dan beradab.*

Demikian refleksi ini penulis sampaikan sebagai wujud apresiasi pada perjalanan hidup GUS DUR, semoga dapat menjadi bahan permenungan bagi kita semua yang mencintainya. Atas segala kekurangan dan keterbatasannya, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan memberkati segala niat baik dan upaya kita amin ! ☞

PETA INTELEKTUALISME dan Tema Pokok Pemikiran Gus Dur

Marzuki Wahid

Kehadiran Gus Dur—panggilan akrab KH. Abdurrahman Wahid, Presiden RI Keempat dan Ketua Umum PBNU 1984-1999 yang wafat pada 30 Desember 2009—tidak bisa dipisahkan dari sejarah kontroversi dan *kenylenahan* di negeri ini, utamanya sepanjang era Orde Baru. Semenjak kepulangan dari studinya di Mesir dan Irak sekitar awal 1970-an, ia mulai membuat kejutan-kejutan baru. Baik lewat tulisan-tulisannya di pelbagai media massa terkemuka saat itu, maupun lompatan-lompatan tindakannya dari bandara tradisi habitatnya, pondok pesantren, Gus Dur selalu menggulirkan wacana kritis ke hadapan publik—jika ia sendiri tidak menjadi konsumsi untuk wacana publik. Pertanyaannya kemudian: mengapa terjadi

kontroversi dan mengapa dianggap *nyleneh*? Apakah karena faktor Gus Dur yang memicu kontroversi ataukah karena kondisi masyarakat atau negara yang belum siap menerima ajakan Gus Dur, sehingga menimbulkan kontroversi dan menganggapnya *nyleneh*?

Pertanyaan ini penting dimajukan setidaknnya karena dua hal. *Pertama*, untuk menguji sejauh mana kualitas pemikiran Gus Dur di hadapan publik sehingga mampu membuat kontroversi dan dianggap *nyleneh*. *Kedua*, sebaliknya, untuk menilai sejauh mana kedewasaan masyarakat atau negara dalam menghadapi dan menerima pemikiran-pemikiran cerdas dan tindakan-tindakan kritis yang mengagetkan di luar *mainstream*. Kedua hal ini memang harus dilihat dan diketahui agar kita bisa membaca secara jernih pemikiran atau tindakan Gus Dur, baik dari aspek substantif maupun dari segi pengaruh sosialnya ketika hal itu dilontarkan. Dari sini akan menjadi jelas mana dimensi ontologis dan epistemologis pemikiran Gus Dur—yang oleh beberapa ahli filsafat ilmu bisa bebas nilai—dan mana dimensi aksiologisnya yang tidak bisa mengabaikan sistem nilai di mana pemikiran itu hendak diterapkan.

Pengakuan Berbagai Kalangan

Terlepas dari debat filosofi pemikiran dan tindakannya, sebagaimana umum diketahui, jauh sebelum jadi presiden, Gus Dur memang sering memerankan dirinya sebagai aktor kritis terhadap negara. Perjuangannya yang gigih menegakkan demokrasi dan pemikirannya yang di luar kebiasaan umum selalu diposisikan sebagai 'pesaing politik' dari negara. Menjadi tak heran, kalau ia kemudian dianggap sebagai satu-satunya kekuatan sosial politik paling independen di Indonesia sepanjang Orde Baru. Jika Presiden Soeharto dengan kalangan tentara dan birokrasi, pada saat itu, dianggap sayap negara (*the state*), maka Gus Dur dengan NU dan kalangan pro-demokrasi adalah sayap masyarakat sipil (*the civil society*). Tak ayal lagi, negara dan *civil society* selalu berhadapan dan bersitegang akibat proses demokratisasi yang selalu membentur benteng otoritarianisme-birokrasi raksasa politik Orde Baru.

Juga tak aneh kemudian, bila komentar-komentarnya dan gerakannya selalu menghiasi halaman-halaman media massa sebanding lurus dengan penampilan negara yang kian hegemonik. Demikian juga keberaniannya menentang arus

utama negara dan dalam hal-hal tertentu juga arus masyarakat yang tidak sesuai dengan gagasan dan pikirannya, serta kesetiiaannya pada Islam dan nilai-nilai kebangsaan, menjadikannya sebagai tokoh yang populer dan disegani sekaligus dimusuhi dan dicaci-maki sepanjang hidupnya.

Walhasil, Gus Dur menjadi *the news maker* dan pernah terpilih menjadi tokoh terpopuler tiga kali: *pertama*, tokoh tahun 1989 oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat; *kedua*, tokoh tahun 1990 oleh Majalah Editor, dan *ketiga*, tokoh tahun 1999 oleh Surat Kabar Kompas. Lebih dari itu, dia juga banyak menerima penghargaan nasional maupun internasional, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Dalam bidang akademik, Gus Dur banyak menerima gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari berbagai universitas dunia ternama. Gus Dur disejajarkan dengan Soekarno sebagai ilmuwan yang masuk ke dalam deretan orang-orang pandai di dunia. Soekarno mampu mengantongi 24 gelar Doktor Honoris Causa (HC), Gus Dur memperoleh 10 gelar Doktor HC. Dalam bidang non-akademik, Gus Dur, di antaranya, memperoleh penghargaan *Ramon Magsaysay Award* dari Philipina (1993), *Global Tolerance Award* dari *Friends of the United Nations* New York (2003), *World Peace Prize Award*

dari *World Peace Prize Awarding Council (WPPAC)*, Seoul Korea Selatan (2003), Presiden *World Headquarters on Non-Violence Peace Movement* (2003), *Simon Wiethemtal Center*, AS (2008), penghargaan dari Mebal Valor, AS (2008), penghargaan dan kehormatan dari Temple University, Philadelphia, AS, yang memakai namanya untuk penghargaan terhadap studi dan pengkajian kerukunan antarumat beragama, *Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Studies* (2008).

Sedangkan penghargaan nasional, di antaranya, adalah Bintang Tanda Jasa Kelas 1, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dari Pemerintah Mesir, Pin Penghargaan Keluarga Berencana dari Perhimpunan Keluarga Berencana I, Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI BJ Habibie.

Tidak hanya semasa hidupnya penghargaan diperoleh, setelah wafat pun penghargaan masih mengalir diberikan kepadanya. Di antaranya adalah Universitas Mahendradatta memberikan *Mahendradatta Award A* di bidang akademik (2010), Dewan Adat Papua (DAP) menganugerahi Bapak Demokrasi Papua oleh (2010), dan LSM Charta Politika memberikan anugerah *Lifetime Achievement Charta Politika Award* (2010). Julukan Guru Bangsa dan Bapak Bangsa—bahkan

Pahlawan Nasional--hampir diberikan oleh seluruh komponen organisasi, baik dari lembaga Negara, Pemerintah, NGO's, maupun komunitas sosial lainnya.

Penghargaan-penghargaan ini suatu bukti pengakuan nasional dan internasional terhadap peran dan kontribusinya dalam proses kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat demokratis, adil, dan berkeadaban.

Tokoh Muslim Terkemuka

Pada sisi pemikiran, sejak terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidhiyyah PBNU pada tahun 1984, Gus Dur telah menjadi salah seorang intelektual muslim Indonesia yang sangat berpengaruh dan diperhitungkan. Hal ini bukan saja didukung oleh posisinya di NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, melainkan juga karena percikan-percikan pemikirannya yang progresif tentang Islam, pluralisme, Pancasila, dan demokrasi. Douglas E Ramage,¹ Greg

¹ Baca tulisannya yang berjudul “*Democratisation, Religious Tolerance, and Pancasila: The Political Thought of Abdurrahman Wahid*”, dalam Greg Barton dan Greg Fealy (Ed.), *NU, Traditional Islam and Modernity*, (Clyton: Monash University, 1995), dan “Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya dalam Era Paska Asas Tunggal” dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta:

Barton,² Adam Schwarz,³ Mitsuo Nakamura,⁴ dan Einar M. Sitompul,⁵ secara umum—meskipun tersirat—sepakat menyebutnya sebagai salah seorang intelektual Indonesia yang paling berpengaruh dalam diskursus pemikiran Islam kontemporer dengan corak pemikiran Islam yang kritis dan progresif.⁶ Dalam penjelasan mereka,

LKiS, 1997).

- ² Baca bukunya, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, (Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI, dan Ford Foundation, 1999); “Memahami Abdurrahman Wahid” kata pengantar untuk buku KH. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999); dan “*The Impact of Islamic Neo-Modernism on Indonesian Islamic Thought: the Emergence of a New Pluralism*” dalam David Bouchier dan John Legge, *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, (Clayton: Monash University, 1994).
- ³ Baca tulisannya yang bersubtitel “*Mam: Coming in from the Cold*”, dalam *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, (Sydney: Alien & Unwin Ply Ltd., 1994).
- ⁴ Baca bukunya yang berjudul *Agama dan Perubahan Politik-Tradisionalisme Radikal NU di Indonesia*, (Surakarta: Hapsara, 1982), dan “*The NU’s Leadership Crisis and Search for Identity in the Early 1980’s: From Semarang (1979) to Situbondo (1984) Congress*” dalam Greg Barton dan Greg Fealy (ed.), *NU, Traditional Islam and Modernity*, (Clyton: Monash University, 1995).
- ⁵ Baca bukunya yang berjudul *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989); dan “NU, Asas Tunggal Pancasila, dan Komitmen Kebangsaan: Refleksi Kiprah NU Paska Khittah 26” dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 1997).
- ⁶ Greg Barton, Ph.D, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, (Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI, dan

Gus Dur pada satu sisi dipandang dan dikenal banyak orang sebagai figur genius dan karismatik setingkat wali, namun pada sisi lain, ia ditafsirkan oleh banyak orang, khususnya kelas menengah terdidik Indonesia, sebagai politisi yang sekular atau sebagai intelektual liberal. Kedua posisi inilah yang, dalam perjalanan sosial Gus Dur, menjadi kekuatan sekaligus juga sasaran kritik dari banyak kalangan Islam sendiri.

“Kontroversial” dan “kenylenehan” menjadi fokus, karena titik-titik inilah yang telah banyak dijelaskan para ahli pada bidangnya, yakni oleh agamawan, budayawan, politikus, politisi, feminis, ekonom, dan ahli tasawuf. Pencatatan ini penting dilakukan, setidaknya, sebagai pintu masuk (*entry point*) kita dalam memahami Gus Dur melalui pendekatan antropologis.

Disadari, memang tidak mudah merumuskan pokok-pokok pemikiran Gus Dur. Karena pemikirannya tersebar ke berbagai media massa dan ditulis dalam waktu yang berlainan secara singkat-singkat, jika tidak hanya berupa lontaran-lontaran gagasan belaka. Kesulitan demikian diakui sendiri oleh Gus Dur ketika memulai kata pengantarnya untuk dua buah buku bunga rampainya, *Bunga Rampai Pesantren*

Ford Foundation, 1999), hlm. 332.

(1978) dan *Muslim di Tengah Pergumulan* (1983). Dia menyadari bahwa betapa sukarnya untuk mengumpulkan tulisan-tulisannya itu ke dalam sebuah tema atau susunan yang utuh, bukan saja bagi pembaca tapi juga bagi dirinya sendiri.

Kata Barton, peneliti tulisan-tulisan Gus Dur dari Australia, pengakuan Gus Dur tersebut merupakan ekspresi dari kenyataan yang ada, bahwa kedua bukunya itu memuat sejumlah artikel yang ditulis untuk maksud serta audiens yang berbeda. Meski begitu, tidak berarti bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur tak memiliki tema pokok yang dapat memayunginya sebagai sebuah tawaran pemikiran alternatif. Tulisan-tulisan yang berjumlah lebih dari 500 buah itu jika dilakukan klasifikasi dan reformulasi secukupnya kiranya bisa membuahkkan satu bangunan pemikiran yang relatif utuh. Karena itu, seperti dikatakan Barton, pengakuan yang disampaikan Gus Dur secara terang-terangan itu sebenarnya hanyalah ungkapan halus dari sikap rendah hatinya kepada para pembaca.⁷ Buktinya, secara konsisten, Gus

⁷ Satu contoh aktual konsistensi pemikiran dan kebijakan Gus Dur terakhir ini adalah soal usulannya kepada MPR untuk mencabut TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan Paham Komunisme, Marksisme-Leninisme di Indonesia. Orang menduga usulan ini bersifat politis dan hanya untuk kepentingan politiknya semata agar mendapat dukungan politik dari kalangan pro-PKI atau dukungan internasional, berkaitan dengan posisinya sebagai presiden.

Dur tetap berada pada *mainstream* paradigma pemikiran makronya, meski dengan gaya *zig-zag* dalam implementasi partikularnya. Ingin dikatakan, bahwa gaya *zig-zag* inilah yang sering disalahpahami dan menjadi sasaran kontroversi di tingkat publik.

Praktis, usulan itu mendapat protes, penolakan, dan demonstrasi dari berbagai kalangan, terutama kalangan umat Islam, di berbagai daerah. Padahal kalau kita membaca kembali tulisan Gus Dur tahun 1988 di Majalah *Aula*, yang berjudul “Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme”, maka kita segera paham dan tahu konsistensi berfikirnya. Menurut Gus Dur dalam tulisan itu, “.... Salah satu cara untuk melihat titik-titik persamaan antara Islam dan Marxisme-Leninisme, keduanya [adalah] sebagai semacam ajaran kemasyarakatan.Kesamaan orientasi tersebut, dapat dilihat pada besarnya semangat egalitarianisme dan populisme dalam kedua sistem kehidupan itu. Karenanya, menurut Gus Dur, “.....Dari sudut pandangan ini, sikap kaum muslimin Indonesia yang menolak kehadiran Marxisme-Leninisme, melalui ketetapan MPR, adalah sebuah anomali, yang hanya dapat diterangkan dari kenyataan bahwa telah dua kali mereka dikhianati oleh kaum Komunis, di tahun 1948 dan 1965. Penolakan itu dengan demikian berwatak politis, bukannya ideologis.” Dalam alinea lain, ia menulis, “.... Kenyataan seperti ini, memang jarang dimengerti, karena tinjauan yang dilakukan selama ini—alas hubungan Islam dan Marxisme-Leninisme—sering kali bersifat dangkal, melihat persoalannya dari satu sisi pandangan saja. Itu pun yang bersifat sangat formal. Wajar saja, kalau kaitan antara Marxisme-Leninisme tidak diakui secara formal di kalangan gerakan-gerakan Islam, melainkan diterima dalam praktik.....” Baca sepenuhnya pada Abdurrahman Wahid, “Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme”, Majalah *Aula*, Surabaya: PWN Jawa Timur, September 1988.

Tema-Tema Pokok Pemikiran Gus Dur

Dari studi bibliografis yang saya lakukan, ternyata ditemukan ada 493 buah tulisan Gus Dur sejak awal 1970-an hingga awal tahun 2000. Kini hingga akhir hayatnya (2009) bisa jadi telah lebih dari 600 buah tulisan Gus Dur. Karya intelektual yang ditulis selama lebih dari dua dasa warsa itu kami klasifikasikan ke dalam delapan bentuk tulisan, yakni tulisan dalam bentuk buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, antologi buku, artikel, kolom, dan makalah. Rincian jumlah dari setiap klasifikasi tersebut sebagai berikut:

Jumlah Tulisan Gus Dur dengan Berbagai Bentuknya (Tahun 1970-an hingga Tahun 2000)

No	Bentuk Tulisan	Jumlah	Keterangan
1.	Buku	12 buku	Terdapat pengulangan tulisan
2.	Buku Terjemahan	1 buku	Bersama Hasyim Wahid
3.	Kata Pengantar Buku	20 buku	-
4.	Epilog Buku	1 buku	-
5.	Artikel	41 buku	-

No	Bentuk Tulisan	Jumlah	Keterangan
6.	Antologi Buku	263 buku	Di berbagai majalah, surat kabar, jurnal, dan media masa
7.	Kolom	105 buku	Di berbagai majalah
8.	Makalah	50 buku	Sebagian besar tidak dipublikasikan
		493 buku	

Dari tabel di atas jelaslah bahwa Gus Dur tidak sekadar membuat pernyataan dan melakukan aksi-aksi sosial politik, kebudayaan, dan pemberdayaan *civil society* belaka, melainkan juga merefleksikannya ke dalam tulisan, baik dalam bentuk artikel, kolom, makalah, maupun kata pengantar buku, yang sebagian tulisan tersebut belakangan diterbitkan dalam bentuk buku. Hanya saja, karena buku-buku yang diterbitkan itu dalam bentuk bunga rampai, tanpa ada rekonstruksi dari Gus Dur sendiri, maka kesan ketidakutuhan bangunan pemikiran menjadi tidak bisa dihindari. Tetapi itulah barangkali cermin dari latar intelektual Gus Dur yang bukan dari tradisi akademik “sekolah modern” di mana setiap tulisan mesti terikat dengan suatu metodologi dan referensi formal.

Gus Dur adalah seorang intelektual bebas (independen), atau mungkin —meminjam istilah Antonio Gramsci— “intelektual organik” dari tradisi akademik pesantren, sehingga tulisan-tulisannya cenderung bersifat reflektif, membumi, terkait dengan dunia penghayatan realitas, bahkan senantiasa bermotifkan transformatif. Referensi formal akademis dan pengikatan diri terhadap satu metodologi tidaklah menjadi penting, sepenting substansi yang disampaikannya.

Sejumlah karya tulis ini membuktikan intelektualisme Gus Dur yang kaya dengan gagasan dan pemikiran yang kreatif-transformatif dan inovatif. Tulisan-tulisan ini juga mungkin suatu bukti bahwa gerakan atau aksi Gus Dur tidak hampa teori atau tidak tanpa visi, yang suatu waktu bisa terjerumus pada oportunisme dan pragmatisme politik. Ketajamannya membaca realitas dan kekritisannya mengambil keputusan bisa dilihat dari kecenderungan tulisan-tulisan tersebut.

Sebanding dengan waktu dan kepentingan tulisan-tulisan tersebut dibuat, tema pembicaraan atau wacana yang dikembangkannya pun sangat beragam dan kompleks: mengenai apa saja. Mulai dari wacana fikih praktis di pesantren hingga wacana global “rekayasa masa depan” disinggung

oleh Gus Dur. Jenis tulisannya pun beragam. Mulai dari bentuk tulisan yang serius-akademis hingga tulisan ringan-populer, semuanya dilakukan Gus Dur. Namun begitu, untuk kepentingan pemahaman makro pemikiran Gus Dur, secara simplifikasi tulisan-tulisan tersebut saya kelompokkan ke dalam tujuh tema pokok.

Ketujuh tema pokok ini juga menandai gagasan besar yang menjadi perhatian Gus Dur selama ini, baik melalui tulisannya maupun visi gerakannya. Tujuh hal yang dimaksud adalah:

1. pandangan-dunia pesantren,
2. pribumisasi Islam,
3. keharusan demokrasi,
4. finalitas negara-bangsa Pancasila,
5. pluralisme agama,
6. humanitarianisme universal, dan
7. antropologi kiai.

Ketujuh tema pokok ini secara umum menjelaskan keluasan wawasan dan besarnya perhatian Gus Dur terhadap tema-tema kontemporer yang menjadi isu global abad XX, yakni demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan gender. Tema-tema pokok inilah barangkali yang melandasi seluruh gerakan Gus Dur selama ini, baik dalam wilayah keagamaan, politik, kebudayaan,

maupun ekonomi. Semua tema tersebut, dalam banyak tulisan, dibidik Gus Dur dari pemahaman keagamaan (Islam) melalui kekayaan intelektual dan kebudayaan pesantren. Ini tidak lain karena pemikiran Gus Dur mengenai agama diperoleh dari dunia pesantren yang sangat akrab dengan budaya lokal. Lembaga inilah yang membentuk karakter keberagamaan Gus Dur. Sementara pengembaraannya di Timur Tengah dan di Barat telah mempertemukan Gus Dur dengan berbagai isu-isu mondial yang membuat Gus Dur harus berpikir kosmopolit dan progresif.

Tema Pokok Pemikiran Gus Dur (1970-an sampai 2000)

No	Bentuk Tulisan	Jumlah	Keterangan
1.	Pandangan dunia pesantren	70 buah	Termasuk tema pesantren vs modernisasi, dan pengembangan masyarakat
2.	Pribumisasi Islam	43 buah	Termasuk tema pembaruan Islam
3.	Keharusan demokrasi	140 buah	Termasuk tema <i>civil society</i> dan pemberdayaan ekonomi
4.	Finalitas negara bangsa Pancasila	73 buah	Termasuk tema hubungan NU, agama dan negara

No	Bentuk Tulisan	Jumlah	Keterangan
5.	Pluralisme agama	31 buah	Termasuk tema Islam toleransi dan inklusif
6.	Humanitari-anisme universal	72 buah	Termasuk tema HAM, gender, dan lingkungan hidup
7.	Antropologi kiai	24 buah	Sebagian besar berbentuk kolom

Jika dilacak, dari segi kultural, Gus Dur memang melintasi tiga model lapisan budaya. *Pertama*, kultur dunia pesantren yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal, dan *apreciate* dengan budaya lokal; *kedua*, budaya Timur Tengah yang terbuka dan keras; dan *ketiga*, lapisan budaya Barat yang liberal, rasional, dan sekuler. Semua lapisan kultural itu tampaknya terinternalisasi dalam pribadi Gus Dur membentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk pribadi Gus Dur. Sampai akhir hayatnya, Gus Dur senantiasa berdialog dengan semua watak budaya tersebut. Inilah, barangkali, anasir yang menyebabkan Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan tidak segera mudah dipahami, alias kontroversial.⁸

⁸ Cf. Al-Zastrouw Ng, *Gus Dur Siapa sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hlm. 33-34.

Sementara Moeslim Abdurrahman, sahabat dekatnya, mengibaratkan Gus Dur sebagai tokoh yang hendak membebaskan umat dari beban sejarah politik masa lalunya, seraya menyeru agar umat Islam Indonesia mampu menjawab beberapa persoalan mendesak, seperti kemajemukan dalam berbangsa dan bernegara, demokratisasi, dan keadilan sosial. Di sisi lain, Gus Dur, menurutnya, termasuk salah satu tokoh penting yang melengkapi khazanah intelektual Islam Indonesia lewat literatur klasik. Dalam konteks inilah, ia —bersama Nurcholish Madjid— lantas disebut sebagai kelompok *neo-modernist*.⁹

Mempertimbangkan penjelasan di atas, kita kadang menyangkan sekali mengapa sebagian orang bisa mencapai kesimpulan bahwa pemikiran atau tindakan Gus Dur tidak konsisten, hanya karena melihat *zig-zag* politiknya yang artistik itu. Padahal tampak jelas visi dan gagasan makronya. Hal itu bisa jadi karena mereka tidak begitu intens membaca tulisan-tulisan Gus Dur dan tidak menangkap narasi-besar Gus Dur. Jika mereka bersedia membaca lebih dekat tulisan-tulisan yang dihasilkan Gus Dur, maka akan terlihat konsistensi pemikiran dan sikap Gus Dur, meski dengan cara *zig-zag* dan melawan arus ke

⁹ *Editor*, No. 31/Thn. VI/1 Mei 1993.

sana ke mari. Keterkaitan satu tulisan dengan tulisan lainnya itulah yang membentuk substansi pemikiran progresif, kritis-transformatif, dari Gus Dur.

Untuk mengetahui spektrum intelektualitas Gus Dur dari waktu ke waktu, dan kecenderungan wacana yang dikembangkannya, lihat periodisasi berdasarkan dekade. Dari tabel tersebut, tergambar produktivitas tulisan Gus Dur dari periode ke periode. Secara kuantitatif, statistika tulisan Gus Dur dari tahun ke tahun kian meningkat: dari 37 buah (1970-an) ke 189 buah (1980-an) hingga 253 buah (1990-an). Wacana yang dikembangkannya pun tampaknya mengikuti garis statistik ini.

Periodisasi Tulisan dan Kecenderungan Wacananya (1970-an sampai 2000)

No	Periode	Jumlah Tulisan	Kecenderungan Wacana
1.	1970-an	37 buah	Tradisi pesantren, modernisasi pesantren, NU, HAM, reinterpretasi ajaran, pembangunan, demokrasi
2.	1980-an	189 buah	Dunia pesantren, NU, ideologi negara (pancasila), pembangunan,

No	Periode	Jumlah Tulisan	Kecenderungan Wacana
			militerisme, pengembangan masyarakat, pribumisasi Islam, HAM, modernisme, kontekstualisasi ajaran, partai politik
3.	1990-an	253 buah	Pembaruan ajaran Islam, demokrasi, kepemimpinan umat, pembangunan, HAM, kebangsaan, partai politik, gender, toleransi agama, universalisme Islam, NU, globalisasi

Kompleksitas wacana yang menjadi perhatian Gus Dur menunjukkan bahwa Gus Dur adalah seorang generalis, bukan spesialis keilmuan tertentu. Hampir setiap isu kontemporer direspon Gus Dur. Ini mungkin berkaitan dengan posisinya sebagai pemimpin publik dan aktivis gerakan sosial, terutama di organisasi NU. Sebagai pemimpin berjuta-juta umat pada level nasional dan internasional (selaku Presiden WCRP) memaksa Gus Dur untuk terlibat dalam segala urusan publik, mulai dari wacana internal keagamaan dan ke-NU-an hingga wacana global yang menjadi *trend* Dunia Ketiga.

Meski secara kuantitatif garis statistiknya kian meningkat, namun belum tentu untuk kualitas tulisan-tulisan tersebut. Untuk mengetahui secara pasti kualitas masing-masing tulisan tersebut kiranya butuh penelitian khusus. Tetapi dengan asumsi bahwa standar tulisan di jurnal ilmiah, seperti Prisma, lebih serius dan lebih bermutu ketimbang tulisan artikel atau kolom di Majalah atau Surat Kabar Harian, maka periode pertengahan akhir 1970-an hingga pertengahan pertama 1980-an merupakan puncak keemasan intelektual Gus Dur. Kurun waktu inilah kiranya bisa disebut “periode ilmiah” Gus Dur. Sepanjang tahun tersebut, Gus Dur mencurahkan energi intelektualnya ke berbagai media massa terkemuka, seperti di Prisma, Tempo, dan Kompas. Beberapa tulisannya juga termuat di berbagai media massa ternama, seperti Pelita, Pesantren, Aula Horison, Pesan, dan Peninjau. Tulisan-tulisan serius di Prisma, dan kolom-kolom kritis di Tempo, lahir pada periode ini. Selain beberapa dalam bentuk antologi buku,¹⁰ ada dua buah buku yang diterbitkan dalam periode ini, yaitu buku *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta: CV Dharma Bhakti, 1978) dan buku *Muslim di Tengah Pergumulan* (Jakarta: Lappenas, 1981). Dua-duanya bunga rampai dari tulisan-tulisannya tentang pondok

pesantren dan tentang Islam *versus* modernitas dengan berbagai pembaruannya.

Sementara pada periode pertengahan akhir 1980-an hingga pertengahan awal 1990-an, tulisan Gus Dur memang tersebar ke berbagai media massa dengan jangkauan lebih luas lagi. Bukan hanya Prisma, Tempo, Kompas, Pesantren, melainkan juga di Panji Masyarakat, Aula, Pelita, Editor, Amanah, Media Indonesia, Jawa Pos, Forum Keadilan, dan sejenisnya. Akan tetapi, tulisan-tulisan periode ini relatif lebih pendek dan singkat ketimbang pada periode sebelumnya. Sebagian tulisannya diterbitkan dalam bentuk antologi.¹¹ Sedangkan dalam bentuk bunga rampai hanya satu, yakni *Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab, Sebuah Pergumulan Wacana dan Transformasi* (Gakarta: RMI bekerjasama dengan Jawa Pos, 1989).

Sementara pada periode 1990-an akhir, tulisan-tulisan Gus Dur selain dalam bentuk artikel dan kolom di pelbagai media massa juga menulis kata pengantar untuk sejumlah buku. Pada periode inilah tulisan-tulisan Gus Dur mulai diterbitkan dalam bentuk buku dan antologi buku secara meluas.¹² Praktis, tulisan-tulisan periode ini, boleh dikatakan, selain memang ada inovasi baru, juga berupa pengembangan dan reproduksi

dari gagasan-gagasan besar periode sebelumnya.

Mengapa demikian? Sebab, seperti berulang kali dikemukakan sebelumnya, Gus Dur itu selain intelektual dan pemikir, juga seorang aktifis organisasi dan gerakan sosial. Di sini, produktivitas tulisan Gus Dur tampaknya menunjukkan garis berbanding terbalik dengan frekuensi aktivitas gerakan sosialnya. Ketika Gus Dur belum menjadi Ketua Umum PBNU, Gus Dur sangat kreatif dan produktif menulis: menghasilkan banyak karya tulis intelektual yang bermutu dan *genuine*. Tulisannya tajam, kritis, dan disertai referensi yang handal. Tetapi, setelah Gus Dur duduk di puncak kepemimpinan PBNU lebih sering terlibat di berbagai gerakan sosial, seperti NGO's, Forum Demokrasi, WCRP, GANDI, dengan akselerasi gerakan yang tinggi, maka produktivitas tulisan pun menurun. Tulisan-tulisan ilmiah bermutu itu berganti dengan komentar-komentar dan statemen-statement yang hampir tiap hari menghiasi wacana Koran atau Majalah. Apalagi setelah nuansa gerakan politiknya kian pekat di penghujung 1990-an, di mana Gus Dur menjadi deklarator PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan sekarang menjadi Presiden RI Keempat, maka tulisan-tulisan itu tampaknya akan berubah menjadi pidato-pidato

dan statemen-statemen politik saja. Demikian gambaran singkat spektrum intelektualitas Gus Dur dan hubungannya dengan gerakan praksis sosialnya.

Dengan pemaparan data-data karya tulis intelektual ini, tampak jelas bahwa Gus Dur ternyata bukan hanya seorang aktifis gerakan sosial dan gerakan politik semata, melainkan juga seorang intelektual dan pemikir cerdas yang terkemuka, sejajar dengan pemikir-pemikir besar lainnya, baik di Indonesia maupun di kalangan internasional.

Meski ia tak pernah belajar di dunia akademik yang terdepan dalam ilmu-ilmu sosial, tetapi dalam daftar karya intelektual Gus Dur itu jelas terlihat kedalamannya meramu ilmu-ilmu sosial dengan pengetahuan keagamaan kritis.

Ilmuwan Multitalenta

Dalam beberapa kali diskusi rutin kami di *INCRoS* Bandung sepuluh tahun yang lalu dan di *Fahmina-institute* lima tahun terakhir ini, tersirat suatu kesimpulan untuk tidak memosisikan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke dalam kelompok-kelompok aliran pemikiran yang ada atau ke dalam golongan-golongan ahli disiplin

ilmu yang lazim diberikan oleh perguruan tinggi kita. Bukan karena takut salah atau latah, juga bukan karena khawatir terkena tuduhan Benedict R.O'G Anderson tentang *scholarly prejudices* (prasangka ilmiah) dalam studi-studi Indonesia yang pernah ditujukan pada para Indonesianis yang karenanya untuk beberapa dasawarsa wacana Nahdlatul Ulama (NU) seolah menjadi tak terpikirkan (*unthought-of*).¹⁰

Akan tetapi memang terdapat sejumlah keberatan untuk memposisikan Gus Dur dalam satu segi disiplin ilmu saja. Selain karena tak cukup dukungan ilmiah yang kuat dan meyakinkan, juga secara relatif Gus Dur bisa masuk ke dalam semua kategori dan golongan-golongan yang telah dibuat orang. Lebih dari itu, Gus Dur bisa berada di luar semua kategori-kategori positivistik itu (*beyond the categories of positivism*).

Membaca kembali secara cermat tulisan-tulisan Gus Dur sejak tahun 1970-an hingga sekarang, baik yang sudah dibukukan belakangan maupun yang masih manuskrip, terasa ada nuansa reflektif yang mendalam untuk beberapa cabang

¹⁰ Lihat Benedict R. O'G. Anderson, "Religion and Politics in Indonesia Since Independence," dalam Benedict R. O'G. Anderson, Mitsuo Nakamura, dan Mohammad Slamet (eds.), *Religion and Social Change in Indonesia*, (Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1977).

disiplin ilmu. Tak tampak bahwa dia pakar dalam satu disiplin ilmu secara penuh, juga tidak tepat apabila Gus Dur diposisikan secara eksekutif bahwa ia tidak menguasai satu bidang keilmuanpun. Tulisan-tulisan Gus Dur yang berjumlah lebih dari 500 judul itu tampak menyediakan banyak hal untuk banyak objek kajian, tapi tak satu pun dari kajian itu yang tuntas hingga ke akar-akarnya, kecuali jika direkonstruksi ke dalam satu wacana yang utuh. Tulisan-tulisan itu memang kompleks dan secara materi boleh dikata komprehensif, menarik, tajam, dan selalu mengandung gagasan-gagasan cerdas, tetapi tetap saja masih menyisakan ruang untuk bertanya akibat penulisannya yang singkat dan kadang terkait dengan peristiwa atau wacana yang *ngetren* saat itu.¹¹

Akan tetapi sebagai penggagas dan pemikir, Gus Dur sangat maju dan kreatif melontarkan hal-hal baru, semaju dan kreatifnya dalam memperjuangkan liku-liku demokrasi di Indonesia. Jika diibaratkan suatu hidangan dalam suatu pesta, maka Gus Dur adalah seorang koki

¹¹ Diketahui bahwa hampir seluruh tulisan-tulisan Gus Dur berupa kolom di berbagai majalah, artikel di berbagai media massa, "kata pengantar" di berbagai buku, dan makalah-makalah yang dipresentasikan di berbagai seminar di dalam maupun luar negeri. Topik pembicaraannya berbeda-beda sesuai dengan permintaan dan situasi sosial kapan ia menulis.

yang serba bisa masak berbagai jenis makanan dan mampu menyediakannya ke dalam pesta itu secara menarik; di dalam setiap masakinya, koki itu kerap menemukan ramuan masakan terbaru yang belum ada sebelumnya, tetapi — *entah* kenapa— ramuan terbaru itu tak pernah dimasaknya hingga selesai.

Walhasil, secara kelakar —meniru catatan harian Ahmad Wahib¹²— dapat dikatakan bahwa “Gus Dur bukanlah seorang sosiolog, bukan seorang politikus, bukan seorang politisi, bukan seorang seniman, bukan seorang budayawan, bukan seorang agamawan, bukan seorang feminis, dan juga bukan seorang pemikir, tapi Gus Dur adalah semuanya”. Lebih dari itu, Gus Dur juga seorang humoris.¹³ Sebagai

¹² Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), *Pergolakan Pemikiran Islam Catalan Harian Ahmad Wahib*, Cet. V, (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 46.

¹³ Perihal status humoris ini, data paling mutakhir ditunjukkan saat Jaya Suprana mewawancarai Presiden Gus Dur dalam acara *talkshow* di TPI dalam rangka peringatan hari ulang tahun TPI, Minggu, 23 Januari 2000, dari pukul 20.00-21.00. Betapa Gus Dur mampu menampilkan diri sebagai seorang humoris yang cerdas bahkan paling cerdas di antara setumpuk lelucon-lelucon —*entah* dalam bentuk paket acara apapun— yang kerap muncul di televisi akhir-akhir ini. Ketika Jaya Suprana meminta klarifikasi, “Apa ada kepala negara lain yang lebih lucu ketimbang Gus Dur?” Gus Dur menjawab agak serius, “*Nggak* tahu saya.” Jaya Suprana menimpali, “Belum tahu, ya. Tetapi menurut hemat Gus Dur?” Mendengar itu, Gus Dur pun tangkas menjawab, “*Nggak* tahu. Saya ini ‘kan kesasar. masih mau jadi pelawak kok jadi presiden.” Di sini, meski Gus Dur duduk dalam posisi sebagai insan nomor wahid di Indonesia, ia tetap mampu tampil sebagai orang biasa

budayawan, agamawan, politikus, atau apa saja namanya, orang segera memahami Gus Dur, tapi untuk status yang terakhir ini ada penjelasan kecil dari Gus Dur. Lewat tulisan kolomnya “Melawan Melalui Lelucon” di *Tempo* tahun 1981, Gus Dur menyatakan “*Lelucon, dan bentuk-bentuk humor lain, memang tidak dapat mengubah keadaan atas ‘tenaga sendiri’, sebagaimana juga ideologi-ideologi besar tidak mampu melakukan hal itu sendirian. Namun, lelucon yang kreatif tetapi kritis akan merupakan bagian yang tidak boleh tidak harus diberi tempat dalam tradisi perlawanan kultural suatu bangsa, kalau bangsa itu sendiri tidak ingin kehilangan kehidupan waras dan sikap berimbang dalam menghadapi kenyataan pahit dalam lingkup sangat luas. Dera kepahitan dalam jangka panjang tidak mustahil akan ditundukkan oleh kesegaran humor.*”¹⁴

Kelakar model ini menemukan pembenarannya ketika dihubung-hubungkan dengan gerakan dan manuver-manuvernya, baik sebelum maupun saat dan setelah menjadi Presiden RI Keempat. Jika hanya dilihat dari

yang penuh humor dan kocak. “Presiden keempat itu bukan yang paling gila, tetapi yang bikin orang gila!” demikian selorohnya. Lihat *Kompas*, Sabtu, 22 Januari 2000.

¹⁴ “Pesantren, Gegeran, Ger-geran,” Pengantar LKiS untuk buku Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. v.

satu perspektif saja, manuver dan gerakan itu selalu mengundang kontroversi dan *kenylenahan-kenylenahan* yang berarti. Kontroversi ini tidak saja dirasakan oleh kalangan NU, melainkan juga oleh mereka yang sering disebut dengan berbagai julukan akademis itu. Ini tidak lain karena Gus Dur selalu menampilkan peran yang multidimensi dengan multistatus di alam kehidupan ini sekaligus.

Oleh karena itu, kami setuju dengan Hairus Salim HS dan Nuruddin Amin, dua peneliti muda kreatif NU yang lahir dari rahim *LKiS* Yogyakarta, bahwa untuk memahami sosok Gus Dur secara utuh harus dilakukan oleh banyak pengamat dari banyak jalur disiplin. Periodisasi juga penting dilakukan untuk mengetahui masa-masa yang paling menentukan bagi formasi intelektualitas Gus Dur. Dasawarsa 1970-an hingga 1980-an awal, jika kita mau membagi-bagi secara periodik, di mana Gus Dur sangat kreatif menulis, bisa disebut sebagai “periode-ilmiah” Gus Dur. Yakni ketika Gus Dur lagi gandrung dengan penggunaan metodologi ilmu sosial –terutama antropologi– untuk menjelaskan ‘ideologi’nya.¹⁵ Pada periode

¹⁵ Lihat Hairus Salim HS dan Nuruddin Amin, “Gus Dur, Politik, dan “Khittah Yang Terancam”, dalam *Majalah Basis*, No. 5-6 Tahun ke-46, Mei-Juni 1997.

ini, pemikiran dan gerakan Gus Dur terfokus pada persoalan sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang langsung berkaitan dengan pergolakan dunia pesantren. Sementara akhir dasawarsa 1980-an hingga 1990-an awal adalah periode sepek terjang politik Gus Dur dan munculnya ide-ide Gus Dur yang berkaitan dengan demokrasi, pluralisme agama, humanitarianisme, kebebasan berpendapat, pribumisasi Islam, dan lain-lain, yang bisa dianggap sebagai praksis dari pelbagai pemikiran yang dilontarkannya sekitar satu dasawarsa silam.¹⁶

Belakangan, 1990-an akhir, Gus Dur lebih tampak sebagai politisi yang ikut terlibat dalam gonjang-ganjing politik dalam negeri. Lebih-lebih setelah dirinya dipilih MPR sebagai Presiden RI Keempat, menggantikan BJ Habibie, pada 20 Oktober 1999. Meski sebagai politisi, tetapi Gus Dur tetap menjadi budayawan yang manuver dan pernyataannya membuat dunia politik menjadi dunia seni, yang tidak sakral, tidak hitam-putih, dan tidak menang-menangan. Itu sumbangan terbesar Gus Dur kepada praksis politik kita.

Sejalan dengan berkurangnya produktivitas

¹⁶ Baca Greg Barton, "Memahami Abdurrahman Wahid", pengantar buku KH. Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. xx-xiv.

tulisannya, pernyataan dan manuvernya kian *nyleneh* dan kontroversial, yang oleh sebagian orang sulit dipahami dengan ukuran rasionalisme dan logika-logika positivistik. Begitulah seni dan menariknya: Gus Dur bukan lagi koki, ia malah hidangan pesta itu sendiri, di mana setiap orang bisa datang ke pesta itu dan bisa menikmati setiap jenis makanan sesuai selera. Greg Barton, Greg Fealy, Douglas E Ramage, Al-Zastrouw Ng, Arief Affandi, Ellyasa, KH. Dharwis, Dedy Djamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim, Laode Ida & A Thantowi Jauhari, Ahmad Bahar, Ma'mun Murod al-Barabasy, dan Saeful Arief, melalui bukunya masing-masing¹⁷ adalah sedikit orang yang

¹⁷ Buku-buku atau tulisan-tulisan mereka tentang Gus Dur adalah Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Kerjasama Paramadina dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya IKAPI, dan The Ford Foundation, 1999); Greg Barton, "Liberalisme: Dasar-dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (Eds.), *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997); Arief Affandi, *Islam Demokrasi Atas-Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996); Douglas E Ramage, "Demokratisasi, Toleransi Agama, dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (Eds.), *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997); Douglas E Ramage, "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya dalam Era Pasca Asas Tunggal", dalam Ellyasa KH. Dharwis (ed.), *Gus Dur, NU, dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 1994); Laode Ida & A Thantowi Jauhari, *Gus*

mampu menikmati hidangan itu. Bagi orang yang tidak memahami kosmologi dan antropologi Gus Dur tampak tak dapat menikmati, bahkan *enggan* mencicipi.

Itulah sebagian sosok Gus Dur, *beyond the positivism*. Penampilannya di wilayah publik selalu mengundang polemik: kritik dan apresiasi. Pemikiran, gagasan, dan perilakunya tidak mudah begitu saja dipahami. “Sulit memahami Gus Dur”. Pernyataan ini biasanya terdengar dari orang-orang yang kebingungan membaca berbagai pernyataan Gus Dur. Para pengamat politik yang menganalisis pernyataan Gus Dur hanya dengan kerangka teori tertentu pasti tak mudah segera memahaminya. Membaca Gus Dur dengan paradigma positivistik diduga kuat akan gagal memberikan penjelasan yang sebenarnya.

Pernah ada pada tahun 1999, seorang pengamat politik muda yang marah-marah

Dur Di Antara Keberhasilan dan Kenestapaan (Jakarta: Rajawali Press, 1999); Al-Zastrouw Ng., *Gus Dur Siapa sih Sampeyan: Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999); Ahmad Bahar, *Biografi Kiai Politik Abdurrahman Wahid: Gagasan dan Pemikiran* (Jakarta: Bina Utama Jakarta, 1999); Ma'mun Murod al-Barabasy, *Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais: Sebuah Perbandingan* (PT Rajawali Press); Dedy Djamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

dengan (memaksa) melarang pers memberitakan manuver Gus Dur karena dianggap irrasional. Sinyalemen pun muncul —*entah ngejek* atau *memuji*— untuk menandai manuvernya, bahwa Gus Dur merupakan tambahan baru dari tiga rahasia Tuhan yang pernah disitir Nabi SAW. Tak seorang pun akan bisa mengetahui kecuali Allah SWT tentang: kematian, rizki, jodoh, dan Gus Dur.

Nyleneh dan “Membingungkan”?

Memang bagi segenap pembaca dan pendengar, ada sesuatu yang briliyan dan mencerdaskan dari Gus Dur, sekaligus juga ada yang ‘membangungkan’ dan mengacaukan akal sehat bagi segenap yang lain. Untuk yang terakhir ini, Gus Dur sering dijadikan ‘kambing hitam’ sebagai orang yang membuat keresahan masyarakat akibat pernyataan dan tindakannya yang *khariq lil ‘adah* (di luar kebiasaan).

Berkaitan dengan kesan yang terakhir: betulkah Gus Dur membingungkan sehingga meresahkan masyarakat? Sejumlah kiai “tradisional” NU dan aktivis pro-demokrasi yang pernah saya wawancarai, semuanya dapat memahami pernyataan dan tindakan Gus

Dur. Tak seorang pun yang bingung dan resah akibat itu. Bahkan mereka dengan sangat baik menjelaskan mengapa pernyataan dan tindakan itu muncul dan harus dimunculkan dalam kondisi masyarakat Indonesia seperti ini. Jadi, timbul satu pertanyaan: mengapa sering dimunculkan praduga bahwa “Gus Dur membingungkan dan meresahkan masyarakat”? Siapa sebetulnya yang bingung dan siapa yang membuat kebingungan dan keresahan, tidak demikian jelas.

Agaknya kita harus cermat betul dengan dua istilah ini: “membingungkan” dan “meresahkan”. Dua istilah itu mempunyai akar sejarahnya sendiri dalam wacana kepolitikan Orde Baru. “Membingungkan” dan “meresahkan” adalah dua stigma sosial yang sering digunakan aparatus Orde Baru untuk menundukkan lawan politiknya. Pemikiran yang cerdas dan kritis terhadap negara Orde Baru saat itu selalu dicap “membingungkan” dan “meresahkan” untuk tidak mengatakan “membahayakan” dan “merongrong” kekuasaannya. Atas nama labeling semacam itu, Orde Baru mempersalahkan mereka, dan bila perlu segera menyeretnya ke penjara. Maka jelaslah, dua istilah itu sangat bernuansa politis-ideologis: untuk mengalienasi dan mendorong orang untuk bersikap anti terhadap Gus Dur. Dengan kata

lain, sebuah sikap ‘perlawanan’ atas gagasan, pemikiran, dan gerakan Gus Dur yang ingin mengubah *status quo!*

Lepas dari makna-makna kontroversial yang berkembang, Gus Dur memang dikenal sebagai tokoh yang memiliki banyak status.

Selain populer diakui sebagai seorang intelektual kritis, budayawan pluralis, agamawan inklusif, politisi dan politikus independen,⁸ Gus Dur juga akrab dengan dunia metafisik (tasawuf). Meski Gus Dur sendiri menolak, tapi oleh sejumlah kalangan Gus Dur diyakini sebagai *waliyullah* (*the holy person*). Gus Dur, dengan demikian, memerankan tokoh yang serba bisa untuk segala urusan.

Pemikiran, gerakan, dan wacana yang dikembangkan Gus Dur kadang melampaui Nahdlatul Ulama (*beyond the NU*), organisasi besar yang dipimpinnya selama lima belas tahun, dan melintas Indonesia (*post-Indonesia*), negara tempat dia menancapkan pakem-pakem demokrasi. Akan tetapi pada saat lain, sejumlah pemikiran dan gerakannya dinilai cenderung bermuatan ideologis karena keberaniannya melawan arus. Namun, di atas semua itu, komitmen Gus Dur terhadap demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, termasuk keterlibatannya melindungi

dan membela kalangan minoritas dan yang tertindas, tak diragukan sedikitpun.

Dia bahkan telah melintasi sejumlah simbol (*beyond the symbols*), termasuk simbol-simbol keagamaan, yang kerap digunakan orang-orang yang mengkritiknya. Ia ibarat burung elang yang terbang tinggi di atas awan “simbol-simbol bumi” dan mengepakan dua sayapnya ke segala penjuru tanpa beban dan batas yang membelenggunya. Gus Dur sendiri pernah mengatakan, “Siapa saya sebenarnya tidak ada yang tahu, karena pada waktu (dianalisis) itu, (saya) berada di luar jangkauan siapa pun.”¹⁸

Apresiasi, pemujaan, di satu sisi, dan kritik, tuduhan, hujatan, di sisi lain merupakan hal yang biasa mengena kepadanya. Tidak saja dari kalangan-dalam NU, basis komunitas tempat pijakannya, melainkan juga dari kalangan internasional dan kelompok-kelompok yang gemar membawa simbol Islam. Membaca semua fenomena itu, dalam pandangan kami, Gus Dur adalah Gus Dur. Gus Dur tidak bisa direpresentasikan atau merepresentasikan apapun.

¹⁸ Lihat wawancara Dedy Djamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim dalam *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik*, Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 98.

Gus Dur adalah sebuah fenomena otonom, yang seluruh kenyelenehan dan kontroversi pemikiran dan tindakannya hanya bisa dipahami dengan mengungkap secara telanjang semua latar sosial-intelektual-biografisnya, situasi sosial-politik-budaya kemunculannya, dan makna-makna tersembunyi (makro) di balik gerakannya. Itulah, kira-kira, partikel-partikel antropologis yang penting dijelaskan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sosok Gus Dur.

Kita perlu membongkar arkeologi sosial-pemikiran dan gerakan Gus Dur untuk menjelaskan makna (tafsir) dari sejumlah simbol yang sering digunakan Gus Dur di hadapan publik. Banyak memang pemikiran, gagasan, dan perilaku Gus Dur yang membutuhkan penjelasan ilmiah lebih lanjut secara khusus. Belakangan muncul buku-buku tentang Gus Dur, baik tulisan-tulisannya sendiri maupun tulisan orang tentang Gus Dur. Akan tetapi, buku yang mencoba menggali penjelasan-penjelasan antropologis dari sejumlah gerakan, manuver, dan pemikirannya agaknya belum tampak hadir. Kebanyakan buku selain lebih suka membeberkan aspek materiil dari pemikiran dan gerakannya, juga melihat Gus Dur pada sisi politiknya.

Tanpa mengurangi kajian literatur dan

dokumen, penjelasan Gus Dur dapat diperoleh dari pendapat, komentar, kritik, dan apresiasi para pakar yang mempunyai otoritas pada bidangnya. Saya pernah mencoba menyajikan “sejarah lisan” dari teori dan pengalaman para ahli tersebut. Ada tujuh fokus kajian tentang Gus Dur, yaitu kajian kebudayaan, politik, agama, ekonomi, gender, dan tasawuf. Masing-masing fokus ini hanya bisa dibedah oleh ahlinya melalui perspektif kritis, non-positivistik.

Bagi saya, Gus Dur adalah sesuatu yang menarik dan sangat berarti bagi pengayaan intelektualisme Indonesia dan catatan biografi sosio-politiko-intelektual seorang pemikir dan pejuang demokrasi di Indonesia. Hipotesis bahwa Gus Dur adalah tokoh multidimensi—sebagai agamawan, politikus, politisi, budayawan, feminis, dan sufi—hanya bisa diungkap dalam keseluruhan peta pemikiran dan gerakan sosial di Indonesia.

Arkeologi sosial-intelektual Gus Dur, yang saya sebut “narasi-kecil perjalanan sosial-intelektual Gus Dur” merupakan pengetahuan dasar untuk memahami dan mengalisis Gus Dur, setidaknya, karena faktor-faktor ini mempunyai peranan yang signifikan dalam pembentukan jati dirinya dalam konjungtur kebudayaan Indonesia.

Oleh karena itu, 'membaca' Gus Dur tanpa mempertimbangkan "narasi-kecil perjalanan sosial-intelektual Gus Dur " bisa menghasilkan kesimpulan yang keliru. ☞

GUS DUR;

Sosok Feminis Muslim Laki-laki

Dr. Septi Gumindari, M.Ag

Prawacana

Gus Dur adalah pribadi yang tidak hanya menarik, tapi juga unik dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Ia tidak saja memahami dan mempraktikkan idiom-idiom keislaman secara kritis transformatif, tetapi juga memahami dan mengimplementasikan idiom-idiom modernitas secara kritis strategis.

Salah satu wacana yang seringkali membuat posisi agama (baca: Islam) menjadi vis a vis modernitas adalah wacana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (*gender perspective*). Oleh sementara kalangan, kajian gender merupakan kajian yang dianggap sebagai entitas dari representasi keilmuan modern yang bersifat

liberal, anti agama dan produk barat. Apalagi bila ditilik dari salah satu fokus utama kajian gender yakni mendobrak kemapanan tatanan relasi dalam rumah tangga yang selama ini dilanggengkan dalam rumusan fiqh dan penafsiran agama yang bias. Dekonstruksi atas pemahaman ini, sedikitnya telah menghadirkan rasa 'alergi' yang berlebihan dari kaum agamawan untuk menginternalisasikan wacana gender dalam keseharian mereka. Mereka takut sistem barat, melalui wacana gender itu, akan memporak-porandakan relasi kuasa laki-laki atas perempuan dalam domain rumah tangga yang selama ini telah *legitimated*, baik oleh budaya patriarkhal ataupun oleh pemahaman agama mereka yang bias dalam memaknai konsep kesetaraan dalam Islam.

Resistensi pun tak dapat dielakan. Penolakan atas kehadiran konsep gender datang seakan tak pernah padam, hadir untuk menafikan semua gerakan perjuangan perempuan yang dipandang anti nilai-nilai Islam. Disinilah sebenarnya peran strategis Gus Dur sebagai guru dan pemimpin bangsa. Di tengah penolakan massif atas gerakan pengarus utamaan gender ini, Gus Dur berani menentang arus pemahaman mainstream (umum) pada masanya. Ia memberikan visi berbeda dan penafsiran positif atas gerakan sosialisasi

gender. Ia mengajak kepada umat Islam untuk mengembangkan sikap eklektif, daya serap positif yang tinggi terhadap konsepsi barat yang dimungkinkan untuk memberikan manfaat bagi diri dan umat Islam pada umumnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh tradisi Islam selama berabad-abad dahulu. Ia mampu mensinergikan wacana gender dengan nilai-nilai essensl Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan antara setiap entitas manusia.

Keberanian Gus Dur untuk mengambil posisi berseberangan dengan mayoritas umat Islam di Indonesia bukan tanpa alasan. Penolakannya yang tegas terhadap kognisi sebagian besar umat Islam yang selama ini bersikap status quo terhadap pemahaman Islam yang eksklusif sesungguhnya harus dipahami dalam kerangka pembelajaran kepada bangsa untuk sedia berbeda pendapat, berdialog dan toleran atas modernisasi pemikiran dan pemahaman. Cita-cita yang ia usung tidak lain adalah membumikan Islam yang inklusif, tanpa kekerasan, penyeragaman ataupun tekanan, menuju paradigma pembebasan yang humanis dan terarah dalam rangka meningkatkan keadilan gender dalam semua ranah kehidupan. Yang kesemua itu sebenarnya telah terpapar dengan jelas dalam nilai-nilai substansi Islam yang

sesungguhnya.

Berangkat dari itu pulalah, tidak bermaksud mendramatisasi pemikiran, penulis menilai, bahwa Gus Dur sebenarnya dapat dikategorikan sebagai feminis Muslim laki-laki. Gus Dur tidak hanya berani mewacanakan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, iapun mempraktekannya dalam kehidupan keluarganya, disamping menunjukkan kepedulian dan berpihakannya terhadap kaum perempuan dalam berbagai kebijakan dan advokasi yang ia buat. Tulisan sederhana ini akan mengeksplorasi wawasan dan keberpihakan Gus Dur pada gerakan *gender mainstreaming*. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, ada baiknya terlebih dahulu mengelaborasi pemaknaan tentang feminis laki-laki dalam wacana gender. Hal ini penting dilakukan untuk melihat sejauhmana posisi Gus Dur dalam bingkai pemikiran feminisme di Indonesia.

Gus Dur Feminis Muslim Laki-laki?

Kalaulah selama ini, Gus Dur disoroti banyak pihak dari berbagai perspektif dan wacana, penulis melihat ada satu perspektif yang belum banyak terjamah dari lontaran akumulasi pemikir-

an Gus Dur, yakni perspektifnya tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun pertanyaannya kemudian adalah mungkinkah laki-laki bisa menjadi feminis? Pertanyaan ini seringkali muncul dari sekelompok orang yang secara parsial hanya menganggap bahwa gerakan feminisme adalah gerakan sepihak kaum perempuan, untuk perempuan semata, dimana laki-laki dianggap sebagai pelaku kekerasan yang harus dianulir dari gerakan feminisme. Pemahaman ini, secara teoritis, sebenarnya telah bertentangan dengan substansi feminisme itu sendiri.

Yanti Mukhtar dalam jurnal perempuan mengemukakan bahwa kesalahpahaman tentang gerakan feminisme bermuara pada bagaimana sesungguhnya feminisme didefinisikan. Kesalahpahaman tentang definisi feminisme akan mempengaruhi definisi tentang feminis itu sendiri. Ada tiga pandangan yang cukup signifikan dalam pendefinisian feminisme. Pandangan *pertama*, menyatakan bahwa feminisme adalah teori-teori yang mempertanyakan pola hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan. Pandangan *kedua*, berpendapat bahwa seseorang dapat dicap sebagai feminis sepanjang pemikiran dan tindakannya dapat dimasukkan ke dalam aliran-aliran feminisme yang dikenal selama ini, seperti

feminisme liberal, marxis, sosialis dan radikal. Pandangan *ketiga*, adalah pandangan yang berada antara pandangan pertama dan kedua, Dalam pandangan ketiga ini, feminisme adalah sebuah gerakan yang didasarkan pada adanya kesadaran tentang penindasan perempuan yang kemudian ditindak lanjuti oleh adanya aksi untuk mengatasi penindasan tersebut. Kesadaran dan aksi menjadi dua komponen penting untuk mendefinisikan feminisme sekaligus feminis. Seseorang dapat dikategorikan feminis selama ia mempunyai kesadaran akan penindasan perempuan yang diakibatkan oleh berbagai hal dan melakukan aksi tertentu untuk mengatasi masalah penindasan tersebut, terlepas dari apakah ia melakukan analisis hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan atau tidak.

Sebagai sebuah gerakan, tujuan feminisme adalah untuk meningkatkan kesadaran gender demi menghasilkan sebuah transformasi sosial. Hal ini tentunya memerlukan dukungan masyarakat, termasuk kaum laki-laki guna menjadi kekuatan pendukung moral, sosial dan politik. Karenanya, dengan menolak laki-laki dalam kategori feminis, justru feminisme mempertahankan suatu pandangan esensialis dengan menentukan bahwa hanya perempuanlah

yang bisa menjadi feminis. Hal itu tentu saja akan mengarah pada absurditas wacana. Untuk itu, sebenarnya laki-laki dapat menyatakan diri sebagai feminis sepanjang mereka ikut berjuang bagi kepentingan kaum perempuan. Gus Dur, dalam konteks ini, dapat dikategorikan sebagai feminis laki-laki atau laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan, sebagaimana dalam pandangan ketiga yang diungkapkan oleh Yanti Mukhtar di atas.

Meski tidak secara eksplisit, Gus Dur menyuarakan kesetaraan gender dalam karya tulisnya, namun dalam banyak event, ia sebenarnya secara tegas sering menggugat kemapanan rumusan fiqh perempuan yang dinilai masih melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan. Ia dengan berani menumbuhkan kesadaran atas persoalan gender dan mengkritisi sistem budaya patriarkal, ideologi mapan yang senantiasa mengekang kebebasan perempuan.

Gus Dur mengetahui ada masalah besar yang dihadapi dan dialami perempuan dalam kurun waktu yang panjang. Kaum perempuan dimanapun dan dalam pemahaman agama manapun tengah mengalami proses marjinalisasi dan penindasan. Dari situlah, Gus Dur berkenalan dengan gerakan feminisme yang

berusaha memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial. Melalui daya pikirnya yang kritis, Gus Dur dengan mudah mampu menguasai inti feminisme sebagai *tool* bagi perjuangan kaum perempuan. Dia sudah memegang substansinya dan mengembangkannya secara abstraktif dalam wacana 'keadilan' yang ia bangun.

Gus Dur, secara sadar, merasakan adanya peran para ahli agama (agamawan), bukan saja Islam tapi dari seluruh agama, yang turut memperkuat posisi subordinasi atas perempuan. Meski ia meyakini bahwa Islam tidak akan menjustifikasi ketidakadilan dan segala sesuatu yang bertentangan dengan hakekat dan misi luhur diturunkannya agama kepada manusia, namun penafsiran terhadap agama tak akan bebas dari tendensi, interest ataupun background pemikiran serta budaya penafsirnya. Dari situlah Gus Dur mulai menganalisa persoalan itu dari sudut pandangan keilmuan yang diterimanya dari kolaborasi khazanah keilmuan Islam dan Barat.

Sensitifitas gender yang dimiliki Gus Dur terbentuk melalui pengalaman hidup yang dilaluinya sendiri, ketimbang pengamatan dan literatur yang ia baca. Meski, tentu saja, pengamatan dan bacaan atas berbagai

literaturpun menjadi faktor signifikan dalam membentuk alam pikirannya tentang feminisme dan gender. Gus Dur banyak belajar dari sosok ibunya. Sepeninggalan ayahnya, ibu Gus Dur menjadi sosok satu-satunya yang digugu dalam memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Ia berjibaku meretas jalan bagi kesuksesan buah hatinya hingga mencapai kesuksesan. Kegigihan seorang perempuan dengan segala keterbatasan biologisnya mampu menginisiasi Gus Dur untuk memaknai peran aktif perempuan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemahamannya tentang sisi feminitas dan kualitas kaum perempuan menghadirkan sebuah kesadaran untuk mengaplikasikan konsep kesetaraan tersebut, yang dimulai dari dalam keluarganya sendiri.

Dalam lingkup keluarga, Gus Dur tidak pernah sama sekali menghendaki pembagian gender secara kaku; ibu Nuriyah (istrinya) di wilayah domestik sementara ia di wilayah publik. Ia lebih mengapresiasi istrinya untuk memiliki karya sendiri, tidak terkondisi dalam sekat rumah tangga. Karenanya, menurut pengakuan ibu Nuriyah, Gus Durlah yang mendorong dirinya untuk aktif mengembangkan potensi di ranah publik, yakni menjadi reporter/wartawan di majalah Zaman (sekitar awal 80-an), majalah Matra, di

samping aktif di organisasi kemasyarakatan.

Dalam kondisi keluarga dimana istri aktif bekerja, tidak jarang Gus Dur ikut mengasuh anak-anaknya dan melakukan kerja-kerja domestik. Bahkan menurut penuturan Ibu Nuriyah, sejak awal pernikahan, sepuluh tahun pertama, semua pekerjaan rumah (domestik) dikerjakan bersama antara Gus Dur dan istrinya. Berikut petikan uraian ibu Nuriyah tentang relasi harmonis dalam keluarganya: *"Mas Dur karena berbadan gemuk selalu menangani pekerjaan yang ada hubungannya dengan air, misalnya ngepel, cuci pakaian, cuci piring. Sedangkan saya (ibu Nuriyah) menyapu, menyetrika, memasak dan lain-lain. Semua pekerjaan rumah dilakukan secara bersama dengan pembagian sesuai kebutuhan dan ketertarikan masing-masing. Tanpa ada paksaan dan keengganan. Bahkan, ketika kami punya anak bayi yang pertama, Mas Dur selalu bangun duluan pada malam hari. Ia mengganti popok (pakaian dalam bayi), lalu dikasihkan kepada saya untuk segera disusui."*

Lebih lanjut, Ibu Nuriyah menyatakan, bahwa *"Mas Dur sangat demokratis. Apapun yang saya inginkan, ia tidak pernah melarang dan mendoktrin. Selama tidak bertentangan dengan syari'at, asal saya mau, dia pasti membolehkannya. Kepada anak-anakpun demikian. Misalnya dalam menentukan*

pilihan sekolah, konsentrasi belajar, maupun lainnya yang bersifat sosial, anak-anak bebas menentukan pilihannya. Mas Dur tidak akan mendikte, asal itu dilakukan dengan kebebasan dan sepuh hati."

Pola relasi yang setara antara Gus Dur dengan istri dan anak-anaknya, tentu saja, tidak lazim bagi masyarakat pada umumnya. Bukan hanya karena Gus Dur terlahir dari kalangan ningrat, namun masyarakat biasapun telah mempatenkan budaya 'tabu' bagi laki-laki untuk turun tangan melakukan pekerjaan rumah tangga yang selama ini dilakukan hanya oleh kaum perempuan. Tapi berbeda dengan masyarakat pada umumnya, Gus Dur, dengan sensitifitas gendernya, mampu menerobos tradisi yang tidak lazim itu. Itu adalah sesuatu langkah kongrit yang sangat berarti. Pemihakan Gus Dur pada wacana gender tidak berhenti pada tataran wacana semata, karena secara praktis konsep "keadilan gender" itu telah ia terapkan dalam kehidupan keseharian serta lingkup yang sangat kecil, yakni keluarga.

Perempuan dalam Pemikiran Progresif Gus Dur

Meski pemikiran Gus Dur dalam konteks wacana gender bukan termasuk yang sering

dijadikan rujukan utama, sebagaimana halnya Ratna Megawangi, Mansour Faqih, Masdar F. Mas'udi, KH. Husein Muhammad dan para aktifis gender di Indonesia lainnya, namun konsistensi sikap Gus Dur dalam memihak persoalan-persoalan perempuan di lapangan tidak diragukan lagi. Keberpihakan Gus Dur terhadap nilai-nilai kesetaraan gender tampak dari gagasan beliau tentang kesetaraan dan keadilan antar manusia, kepemimpinan perempuan, dan penolakannya atas berbagai Undang-undang dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap laju perjuangan kaum perempuan.

1. Kesetaraan dan Keadilan antar Manusia

Titik tolak gagasan Gus Dur tentang kesetaraan antar manusia berakar pada interpretasinya atas konsep Tauhid. Menurutnya, Tauhid adalah sebuah konsep yang tidak sekedar berdimensi aqidah (*vertical oriented*), tapi juga berdimensisosialkemanusiaan(*horizontal oriented*). Dengan kata lain, dua kalimat syahadat *lailaha illallah* mengandung dua pengertian: peniadaan (*al-Nafyu, negation*) dan pengukuhan (*al-Istbat, affirmation*). "Tidak ada tuhan" merupakan konsep peniadaan terhadap segala bentuk kekuatan

apapun yang diyakini mampu mendatangkan kemanfaatan dan dapat menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi manusia, termasuk di dalamnya tuhan-tuhan kecil yang didewakan manusia. Kalimat “kecuali Allah” adalah bentuk pengakuan dan pengukuhan bahwa hanya Allah semata satu-satunya dzat yang paling berhak disembah, wahana bagi seluruh manusia untuk tunduk (*al-Din*) dan pasrah secara totalitas (*al-Islam*) kepada-Nya.

Secara elaboratif, konsep tauhid ini bermakna pula bahwa tidak ada manusia yang setara dengan Allah dan tidak ada anak ataupun titisan Allah. Seluruh manusia pada hakikatnya sama. Tidak ada manusia yang nomor satu (*the first class*) ataupun manusia nomor dua (*the second class*). Tidak ada manusia yang boleh dipertuhankan dalam arti dijadikan tujuan hidup dan tempat bergantung, ditakuti, disembah, dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat. Absolutisme di antara sesama manusia tidaklah dibenarkan, karena Allah adalah satu-satunya zat yang paling berkuasa terhadap alam semesta ini.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan pula, bahwa suami bukanlah tuhan bagi istri, sebagaimana raja bukanlah tuhan bagi rakyatnya ataupun orang kaya atas orang miskin. Oleh

karena ia bukan tuhan, maka istri tidak boleh mempertuhankan suaminya, orang miskin tidak boleh mempertuhankan orang kaya, dan rakyat tidak boleh menyembah rajanya. Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada suami, raja ataupun orang kaya yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah merupakan pengingkaran terhadap konsep tauhid itu sendiri.

Implementasi dari konsep tauhid di atas seharusnya melahirkan kesimpulan yang tegas pada terwujudnya pola hubungan antarmanusia dalam semangat egalitarianisme. Refleksi tauhid atau iman kepada Allah meniscayakan adanya dampak paling nyata pada emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepada-Nya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya. Karena itu, iman dan harkat serta martabat kemanusiaan melandasi demokrasi, dan tak mungkin mendukung sistem yang totaliter, otoriter, absolut, hirarkhis, tiranik, dan patriarkhis,

Berangkat dari perspektif di atas, Gus Dur sangat mengapresiasi setiap entitas manusia, termasuk istri, anak-anak perempuannya serta

seluruh perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang setara. Kekuatan tauhid dalam diri Gus Dur membuatnya berani membela siapapun yang direndahkan, teraniaya, dan terlemahkan secara struktural dan sistemik. Gus Dur menyadari, bahwa diantara kelompok yang banyak termarginalisasi dalam hal ini, baik dalam skala lokal, nasional dan internasional adalah kaum perempuan.

Menurutnya, kalaulah dalam struktur masyarakat ada bermacam lapisan dan bila lapisan-lapisan itu dibedah lagi, maka akan didapati kaum perempuan selalu berada pada lapisan sosial terbawah yang paling diabaikan hak-hak kemanusiannya. Pernyataan Gus Dur tersebut diamini oleh data Statistik yang menunjukkan, bahwa kaum perempuan lah pihak termiskin di dunia dan pihak yang banyak terpinggirkan dalam pemberdayaan di berbagai ranah; kesehatan, politik, ekonomi dan pendidikan. Kemampuan Gus Dur untuk melihat realitas ini menunjukkan kepekaan nuraninya dalam menyoroti kelompok ini secara khusus dan memberikan perhatian secara khusus pula. Ia dengan gigih membela kaum perempuan, meskipun sampai pada skala personal-individual.

Hal itu tampak dari praksis kehidupan

keluarganya, Gus Dur tidak pernah melarang putri-putrinya untuk aktif di dunia publik, termasuk politik praktis. Karena ia meyakini bahwa potensi perempuan ataupun laki-laki adalah sama. Keduanya harus mendapatkan akses yang sama pula. Disamping itu, ia pun tidak pernah memaksa istrinya untuk memberi keturunan anak laki-laki, karena perempuan dan laki-laki adalah entitas yang sama, yang tidak perlu dibeda-bedakan atau diagungkan salah satu di atas yang lain. Menurutnya, perempuan sebagai manusia punya hak setara dan itu berasal dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menggugat itu. Konsistensi keberpihakan Gus Dur terhadap perempuan dalam lingkup domestik ini, tentu saja, sangat berpengaruh pada kepeduliannya terhadap nasib perempuan dalam skala yang lebih luas lagi, yakni skala nasional dan internasional

Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di atas menuntut adanya implementasi konkritnya dalam konsep keadilan. Kasus poligami menjadi salah satu isu yang banyak disoroti Gus Dur dalam konteks ini. Menurutnya, perilaku poligami yang selama ini digadang-gadangkan orang dengan legitimasi agama, sebenarnya bukanlah an sich berangkat dari kitab suci. Dengan tegas, ia mengatakan,

bahwa orang yang melakukan poligami adalah orang yang tidak mengerti kitab suci. Karena, menurutnya, kalau disebutkan poligami boleh dilakukan, itupun ada persyaratan yang sangat ketat yakni persyaratan adil.

Ada tiga poin dalam al-Qur'an yang terkait dengan poligami. *Pertama*, anggaplah semacam memberikan kesempatan untuk berpoligami. *Kedua*, adalah peringatan atau *warning* agar berlaku adil, *fain khiftum allâ ta'dilû fawâhidah* (kalau engkau sangsi tidak dapat berlaku adil, satu sajalah). *Ketiga*, ada ayat yang menyatakan *wa lan tastathî'û 'an ta'dilû baina an-Nisâ walau hasashtu* (Artinya, dan kamu sekalian (wahai kaum laki-laki) tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) sekalipun engkau berusaha keras).

Dengan kata lain, pembacaan terhadap implementasi sebuah hukum dalam al-Qur'an selayaknya dipahami dalam konteks transformasi yang bersifat gradual. Ini bermakna pula, bahwa poligami yang awalnya, sebelum masa Islam, dapat dilakukan terhadap lebih dari 4 orang istri, sebagaimana dilakukan oleh nabi-nabi sebelum nabi Muhammad, kemudian dibatasi menjadi empat, kemudian dibatasi lagi dengan konsep keadilan, sebagaimana dipaparkan dalam dua poin terakhir di atas. Karenanya, tidaklah terlalu

tepat kalau dikatakan bahwa Islam mempunyai dalil untuk memperbolehkan poligami.

Untuk itu, Gus Dur melihat perlunya pembacaan ulang atas QS. al-Nisa ayat 1 melalui perspektif perempuan. Diperlukannya perspektif perempuan karena subjek yang paling berkepentingan dan paling potensial diperlakukan tidak adil dalam persoalan ini adalah perempuan. Dan penentu adil tidaknya sebuah perkawinan poligami itu seharusnya adalah sang objek yaitu si perempuan sendiri. Menurutnya, rasa keadilan dalam diri setiap orang berbeda dan Gus Dur memberikan tempat pada rasa keadilan perempuan yang jelas-jelas berbeda dengan laki-laki. Itulah yang menjadi pegangannya, sehingga dalam pembicaraan apapun, ketika orang menyinggung dan melibatkan persoalan perempuan, maka harus dilihat dari kacamata, kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Pemahaman Gus Dur tentang keadilan dari perspektif perempuan di atas mendorongnya untuk mengadakan polling tentang kesediaan perempuan dipoligami. Keinginan ini setidaknya diharapkan dapat membuktikan bahwa tidak ada seorang perempuan pun yang dari hati nurani dan *insight* psikologinya menginginkan menjadi istri pertama, kedua ataupun seterusnya. Kalau

bukan karena himpitan faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik, niscaya perempuan tak akan bersedia dipoligami. Keterpaksaan ini menjadi cermin subordinasi sistemik kaum perempuan dari kaum laki-laki. Perempuan sulit menentukan pilihan untuk keluar dari lingkaran setan poligami. Poligami menjadi alat pengesahan perempuan sebagai alat pemuas laki-laki semata. Apalagi bila dalam prakteknya, perilaku poligami seringkali menistakan perempuan.

Dari paparan ini tampak dengan jelas sensitifitas Gus Dur untuk terus memihak pada kepentingan perempuan, termasuk pada wacana poligami-monogami yang kontroversial, dimana mayoritas ulama sampai saat inipun masih menunjukkan sikap pro terhadap wacana poligami.

2. *Kepemimpinan Perempuan*

Tidak dipungkiri, bahwa agama, dalam sistem perpolitikan di Indonesia, seringkali menjadi kerikil tajam yang menyulitkan perempuan dalam menggapai akses kepemimpinan di ranah publik. Budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat pada gilirannya terinternalisasi pula dalam penafsiran agama, di mana perempuan

dianggap akan lebih aman dan terjaga auratnya bila hanya bekerja di wilayah domestik, hingga akhirnya perempuan dilarang menjabat sebagai pemimpin karena yang berhak memimpin adalah laki-laki. Legitimasi atas nama agama ini kemudian menjadi pedoman politik yang menunjukkan bahwa agama secara politis praksis menjadi jurang pemisah antara perempuan dan politik.

Realitas membuktikan, bahwa menjelang pemilu beberapa tahun silam, terjadi perdebatan sengit mengenai boleh tidaknya presiden perempuan. Respon keras muncul dari Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) pada tahun 1998 yang mengeluarkan fatwa “presiden Indonesia haruslah seorang pria muslim.” Namun yang berkembang di masyarakat adalah bahwa KUII mengeluarkan fatwa presiden perempuan itu haram. Isu kepemimpinan perempuan itu sempat mengundang komentar Amien Rais yang menyebutkan perempuan boleh menjadi pemimpin selama tidak ada laki-laki yang menempati posisi itu. Preposisi Amien Rais ini menyiratkan suatu kondisi akan kentalnya pandangan kultural diskriminatif masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan yang sangat terkait erat dengan wajah agama (baca: Islam.)

Pola Pandang di atas diamini oleh banyak kalangan agamawan, termasuk KH. Abdullah Faqih dan mayoritas kaum nahdliyyin. Berbeda dengan mayoritas masyarakat NU, meski itu adalah basis massanya, Gus Dur sendiri selaku ketua dewan syuro PKB malah memiliki pandangan yang berseberangan. Ia tidak mendukung fatwa tersebut. Menurutnya, fatwa haram yang dilontarkan para ulama NU itu merupakan pandangan konservatif. Pandangan ini sudah ada semenjak dahulu, sebagaimana disebutkan dalam hadits *lan yufliha qaumun wallaw amrahum imro'ah*. Anggapan atas hadits tersebut yang menyatakan, bahwa suatu negara akan hancur kalau dipimpin oleh seorang perempuan, menurut Gus Dur, hanya berlaku di zaman lampau. Karena itu perlu kiranya analisa atas konteks lahirnya (*asbab al-Nuzul*) hadits dimaksud.

Menurut Gus Dur, konteks turunnya hadits tersebut sebenarnya, dirumuskan Nabi untuk masyarakat zaman beliau. Saat itu suku-suku di jazirah Arab sedang getol-getolnya berperang, saling jahat, menawan musuhnya, dan sebagainya. Pemimpin suku saat itu juga bertindak sebagai pemimpin perang, pembuat hukum dan pelaksana peradilan serta berbagai job pemerintahan lainnya. Dengan kata lain,

semua kekuasaan di tangan seseorang dan kepemimpinan saat itu sifatnya sangat personal. Dalam pemerintahan seperti itu, Gus Dur menambahkan, perempuan memang tidak sesuai menjadi pemimpin. Fisiknya terlalu lemah. Pada zaman itu, tak mungkin perempuan memimpin perang di garis depan. Begitulah kondisi dan peraturan politik saat itu. Berbeda dengan sekarang. Kalau ada perang, jenderalnya di markas dan yang di depan serdadunya. Karena itu, hadis tersebut bisa dikatakan tak berlaku lagi untuk konteks sekarang ini," demikian penuturan cucu pendiri NU itu.

Lebih lanjut, Gus Dur mengambil contoh kasus kepemimpinan perempuan di Pakistan. Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, yang pada awal berkuasa sempat menjadi 'momok' bagi sebagian ulama di Pakistan. Gus Dur sendiri saat itu pernah bertemu sekelompok ulama besar Pakistan pada awal pemerintahan Benazir menjadi Perdana Menteri. Ulama yang paling sepuh, waktu itu, menyatakan kekesalannya dan tak bisa menerima terpilihnya Benazir. Para ulama itu takut akan terjadi malapetaka di kalangan muslim Pakistan karena merefer pada hadis tersebut. Jawaban Gus Dur sangatlah sederhana. "Benazir, menurut Gus Dur, tidak memimpin

Pakistan secara perseorangan. Jadi buat apa dikhawatirkan?" katanya. "Benazir punya kabinet yang mayoritas terdiri atas kaum pria. Selain itu, segala keputusannya harus disetujui lebih dulu oleh parlemen (yang juga mayoritas kaum pria) dan harus diundangkan lebih dulu. Pelaksanaan keputusan pun masih diawasi Mahkamah Agung, yang hakim-hakim agungnya semua laki-laki. Jadi, kalau ada perempuan yang memimpin negara, Ia hanya merupakan salah satu yang memimpin negara. Tidak sendirian."

Di depan para ulama di Pakistan, Gus Dur menjelaskan, bahwa "kaum ulama di Indonesia punya tafsiran yang lebih modern dan realistis dibanding di Pakistan. Boleh jadi, ulama Pakistan lebih hafal Alquran, menguasai kitab-kitab, dan lebih hebat penampilan keulamaannya. Tapi semangat keulamaannya kalah mumpuni dibanding ulama Indonesia dalam menghadapi zaman yang berubah," kata Gus Dur. Lanjutnya, "Di zaman sekarang, perempuan bisa saja memimpin negara. Kaum pria dan ulama tak perlu takut atau khawatir dengan adanya pemimpin perempuan, karena di zaman sekarang tidak ada kepemimpinan yang bersifat personal."

Ketegasan dan keberanian Gus Dur dalam memihak kaum perempuan dalam ranah politik

dalam skala nasional maupun internasional di atas menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang tokoh pluralis yang gigih membela dan memberi ruang kepada perempuan untuk tampil dalam pentas politik. Puncak dari keberpihakan Gus Dur dalam konteks ini terbukti ketika ia terpilih sebagai presiden RI keempat pada 20 Oktober 1999 dengan memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Bukan cuma itu, pasca kepemimpinannya sebagai Presiden pada Juli 2001, Gus Dur memilih Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden pengganti dirinya guna melanjutkan perjuangan dan penegakkan demokrasi.

Dalam tubuh NU sendiri, Gus Dur mengingatkan untuk tidak melupakan sisi keperempuanan NU. Menurutnya, "Orang sering melupakan satu sisi, yaitu sisi perempuan. Hakim perempuan pertama di Indonesia adalah sepupu saya, Nyai Afidah Mahfudz. Ia menjadi hakim perempuan pertama di Indonesia. Sekarang, di seluruh Indonesia ada sekitar 400 hakim perempuan. Jadi, sisi ini merubah segala-galanya. Di tempat lain, perempuan boleh jadi apa saja, tetapi enggak ada yang jadi hakim sebagaimana di Indonesia," selorohnya untuk menunjukkan kekagumannya pada sosok perempuan.

Demikianlah sosok Gus Dur yang tiada henti memberi ruang bagi perjuangan perempuan di bidang politik. Di berbagai organisasi masyarakat dan organisasi politik, putra dari KH. Wahid Hasyim dan Hj Sholehah ini pun terus mengorbitkan perempuan sebagai bukti keberpihakan terhadap gender yang dikampanyekan ketika keran reformasi 1998 terbuka.

3. Perda dan UU yang Diskriminatif

Pola pandang dan sikap yang terus menghargai perbedaan dalam kerangka keragaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia, adalah ciri khas yang menetap dimiliki oleh Gus Dur. Kyai nyentrik ini kembali mengingatkan pentingnya menolak penyeragaman cara pandang, sikap, maupun perilaku dalam beragama dan bernegara di negeri ini, termasuk di dalamnya penerapan otonomi daerah yang merencanakan untuk menyeragamkan pelaksanaan syari'at Islam di berbagai daerah.

Menurutnya, "tuntutan legislasi syari'at Islam dalam rumusan peraturan ditingkat daerah tentunya sah menurut logika demokrasi, namun persoalannya kemudian adalah penerapannya

di lapangan yang seringkali terjebak pada pemaksaan pemahaman satu kelompok Islam tertentu terhadap kelompok yang lain serta mengentalnya klaim kebenaran atas pemahaman satu kelompok Islam tertentu. *Wal-hasil*, tak dapat dihindarkan munculnya kekerasan dengan mengatasnamakan misi suci agama. Padahal substansi Islam sangat menentang kekerasan dan pemaksaan pemahaman. Dan yang lebih ironis lagi, adalah perempuan yang seringkali menjadi kelompok paling rentan dalam pemaksaan dan tindakan kekerasan tersebut.”

Beberapa contoh penerapan syari’ah Islam di Indonesia menunjukkan hal itu. Di daerah Tasikmalaya, tidak sedikit perempuan digunduli oleh masyarakat karena keluar malam tanpa ditemani muhrimnya. Di Yogyakarta, sekelompok pemuda dan partai Islam melakukan *sweeping* terhadap perempuan-perempuan yang keluar malam. Di Ternate, para perempuan, termasuk pegawai negeri di daerah itu diharuskan memakai jilbab, Pelarangan ini diberlakukan dengan alasan untuk memberantas berbagai tindak maksiat dan kebobroan moral masyarakat, dan perempuan dianggap sebagai sumber dari segala problem tersebut.

Kalau masyarakat memiliki cara pandang

egalitarianisme sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka tidak akan ada klaim kebenaran, pemaksaan, apalagi klaim manusia paling mulia (baca: laki-laki) dan manusia sumber maksiat (baca: perempuan) seperti yang ada dalam kognisi penerapan syari'ah Islam itu. Karenanya, menurut Gus Dur, "pihak yang memaksakan untuk memberlakukan perda diskriminatif tersebut, termasuk mengesahkan RUU Antipornografi dan Pornoaksi (APP), pada dasarnya telah menentang Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Islam yang substansif. "

Ia menambahkan, "UUD 1945 sudah membuat pemisahan yang jelas antara negara dan agama. Para pendiri negara seharusnya sadar adanya kebhinnekaan dalam negara Indonesia, baik agama, suku, dan adat yang harus selalu dibina. Saya merasa, kini mulai ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebhinnekaan tersebut. Mereka ingin mengubah rasa kebhinnekaan itu melalui berbagai aturan perundang-undangan," katanya dalam Panggung Terbuka Konsolidasi Nasional "Mempertahankan Pancasila, Meneguhkan Kebhinnekaan,"

Terkait dengan RUU APP, mantan presiden ini berkata, "membuat UU adalah tugas dari negara. Persoalan pornografi dan pornoaksi

adalah urusan akhlak dan moralitas serta agama. Untuk itu, Pemerintah tidak seharusnya turut campur dalam urusan kehidupan pribadi rakyat Indonesia. Kalau RUU APP ini dijalankan, itu berarti pemerintah ikut campur begitu banyak masalah pribadi rakyatnya. Moralitas itu urusan masyarakat, bukan urusan negara, bukankah telah banyak UU dan peraturan yang dibuat untuk memerangi pornografi ini. Itu sudah cukup dan Mahkamah Agung lah yang berhak memberikan penafsiran soal itu. Itulah yang belum dilakukan.”

Lebih lanjut, menurutnya, “Erotisme merupakan sesuatu yang selalu mendampingi manusia, dari dulu hingga sekarang. Untuk mewaspadaai dampak dari erotisme itu dibuatlah pandangan tentang moral. Dan moralitas berganti dari waktu ke waktu. Dulu pada zaman ibu saya, perempuan yang pakai rok pendek itu dianggap cabul. Perempuan mesti pakai kain sarung panjang yang menutupi hingga mata kaki. Sekarang standar moralitas memang sudah berubah. Memakai rok pendek bukan cabul lagi. Oleh karena itu, kalau kita mau menerapkan suatu ukuran atau standar untuk semua, itu sudah merupakan pemaksaan. Sikap ini harus ditolak. Sebab, ukuran satu pihak bisa tidak cocok untuk pihak yang lain. Contoh

lain adalah tradisi tari perut di Mesir yang tentu saja perutnya terbuka lebar dan bahkan kelihatan puser. Mungkin bagi sebagian orang, tari perut itu cabul. Tapi di Mesir, itu adalah tarian rakyat; tidak ada sangkut-pautnya dengan kecabulan.”

Begitupula tentang konsep aurat. Menurut Gus Dur, “menutup aurat dalam arti semua tubuh tertutup itu baik saja. Aurat memiliki batasan maksimal dan minimal. Nah, bukan berarti batasan minimal itu salah. Kesalahan RUU yang ingin mengatur itu adalah menyamakan batasan maksimal dan minimal dalam persoalan aurat. Sikap itu merupakan cara pandang yang salah. Kemudian, yang disebut aurat itu juga perlu dirumuskan dulu sebagai apa. Cara pandang seorang sufi berbeda dengan ahli syara’ tentang aurat, demikian juga dengan cara pandang seorang budayawan. Tukang pakaian melihatnya beda lagi; kalau dia tak bisa meraba-raba, bagaimana bisa jadi pakaian’ ha-ha-ha.. Batasan dokter beda lagi. Kerjanya kan ngutak-ngutik, dan buka-buka aurat he-he-he,” imbuhnya.

Seraya berkelakar Gus Dur menambahkan, “Saya juga heran, mengapa aurat selalu identik dengan perempuan. Itu tidak benar.” Katanya, “perempuan bisa merangsang syahwat, karena itu tidak boleh dekat-dekat, tidak patut salaman.

Wah bagaimana dengan saya. Saya tiap pagi selalu kedatangan tamu. Kadang-kadang gadis-gadis dan ibu-ibu. Itu bisa sampai dua bis. Mereka semua salaman dengan saya. Masak saya langsung terangsang dan ingin ngawinin mereka semua?! Ha-ha-ha.. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Melihat perempuan tidak boleh hanya sebagai objek seksual. Perempuan itu sama dengan laki-laki; sosok makhluk yang utuh. Jangan melihatnya dari satu aspek saja, apalagi cuma aspek seksual tubuhnya.”

Karenanya, menurut Gus Dur, “ada banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan UU ataupun perda. Yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana melihat secara jernih penerapan perda dan UU tersebut agar tidak menistakan suatu kelompok tertentu, baik itu kelompok minoritas agama, etnis ataupun kelompok seks tertentu (baca: perempuan). Pemberlakuan menutup aurat tanpa disadari telah mengkriminalkan tubuh perempuan dan memaksa perempuan non muslim untuk melakukannya pula, disamping akan memberangus budaya lokal Indonesia sendiri yang begitu beraneka ragam.”

Postwacana

Dari sebagian pemikiran dan tindakan Gus Dur yang dapat penulis kupas, yang menunjukkan kepeduliannya terhadap nasib kaum perempuan di atas, sulit dibantah untuk mengatakan, bahwa Gus Dur adalah sosok feminis Muslim laki-laki. Gus Dur sangat berjasa dalam melakukan pembaharuan pemahaman masyarakat pada umumnya tentang agama dalam kaitannya dengan relasi gender. Jika tanpa keberanian Gus Dur, agama yang dijalankan selama ini kiranya akan kehilangan relevansinya dengan wacana kontemporer, bahkan akan bermakna diskriminatif bagi penegakan hak-hak azasi perempuan. Karenanya, ada dua hal yang menonjol dari pembaharuan yang dilakukan Gus Dur dalam konteks ini. *Pertama*, Gus Dur menjadi motor pemahaman dan pengubah persepsi dari agama yang eksklusif ke agama yang inklusif. *Kedua*, Gus Dur telah membelokan arah dari pemahaman agama yang formal menuju yang substansial, agama yang ramah terhadap perempuan

Untuk itu, tidak berlebihan kiranya, bila Farha Ciciek mendeklarasikan Gus Dur sebagai perantau intelektual penebar virus gender. Perannya dalam menebarkan wacana gender,

khususnya di dalam komunitas nahdliyyin dan umumnya pada masyarakat Indonesia, tidak hanya berkuat pada pembentukan wacana belaka, namun tegas pula dalam program aksi advokasi. Tindakan praksis termaksud diantaranya penyusunan RUU KDRT yang kemudian disahkan pada era pemerintahan Megawati, pembelaannya terhadap perjuangan kriminalisasi hak politik, sosial dan budaya masyarakat, termasuk marjinalisasi goyang 'ngebor' Inul Daratista, pembelaannya terhadap perempuan korban 1965 dan siapapun yang mengalami diskriminasi dan penindasan baik berdasarkan kelas, ras, maupun jenis kelamin. Ia adalah pembela sejati hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan. Ia merupakan bagian dari gerakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. ❧

Daftar Pustaka

Beyond the Symbols; Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur. Bandung: Rosdakarya dan INCRoS, 2000.

Prisma Pemikiran Gus Dur. Yogyakarta: LKiS, 1999.

Jurnal Perempuan. Jakarta: YJP, 2004.

Mengurai Hubungan Agama dan Negara. Jakarta: Grasindo, 1999.

Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurkholish Madjid dan Jalaludin Rahmat. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Gus Dur Menjawab tantangan Perubahan; Kumpulan Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 Republik Indonesia. Jakarta: Kompas, 1999

Tulisan-tulisan Gus Dur berupa kolom di berbagai majalah, artikel di berbagai media massa

IN MEMORIAM GUS DUR

Jamali Sahrodi

Asisten Direktur I Pascasarjana IAIN Syekh
Nurjati Cirebon

Pendahuluan

Wafatnya Gus Dur menjadikan momen yang massif untuk mengekspresikan kekaguman para simpatisannya, atas apa yang telah dilakukan selama hidup almarhum. Gus Dur populer. Kita tahu hal itu. Namun, popularitas Gus Dur seperti yang dimanifestasikan oleh publik menyertai wafatnya, sungguh luar biasa. Berhari-hari setelah kepergian dan pemakamannya, umat masih berdatangan. Peringatan dilakukan di banyak tempat. Pertanda popularitasnya di beragam umat beragama makin jelas, nyata, dan mengharukan. Gus Dur tokoh pemimpin yang ternyata populis dan karena itu populer. Bisa dimengerti jika pemimpin apalagi pemimpin

yang memegang jabatan tinggi menjaga jarak, misalnya karena pertimbangan keamanan dan protokol. Akan tetapi, rupanya, meskipun jarak pemimpin dan rakyat banyak apalagi sebagai massa toh mendambakan pemimpin yang tanpa jarak dengan rakyat. Pembawaan, karakter, dan sosok itu ada pada Gus Dur.

Simbol yang tetap disertai tandanya itu disaksikan oleh rakyat banyak ketika Gus Dur masih sebagai presiden tampil dengan hanya berpakaian celana pendek di beranda Istana. Pemimpin apalagi presiden yang adalah pula kepala negara terikat oleh protokol. Protokol mengatur busana serta gerak langkah yang berfungsi menjaga sosok dan kepribadiannya sebagai bukan sekadar pemimpin, melainkan kepala negara. Bukan hanya dalam kerajaan yang feodal, kepala negara terikat etiket berbusana. Presiden dari republik yang berdemokrasi pun terikat oleh ketentuan itu.

Gus Dur merupakan kekecualian yang ternyata mau dan mampu keluar dari ikatan ketat itu tanpa menimbulkan sebutlah sesuatu yang oleh publik termasuk oleh elit dipandang sebagai sosok pemimpin yang tak bisa diterima atau sekurang-kurangnya mengganggu. Kenyataan itulah salah satu ciri kepribadian Gus Dur. Publik

pun maklum, sosoknya yang tampak itu bukan dibuat-buat, memang itulah ekspresi dan cermin dari pribadi dan kepribadiannya. Populis bukan saja dalam ideologi, doktrin, dan politik, tetapi juga dalam pribadinya.

Namun, kita dapat melihat faktor lain yang ada pada almarhum. Yakni, sikap dasarnya dalam ekspresi kehidupannya yang memang lebih sederhana, apa adanya, dan karena itu secara lahiriah pun almarhum dekat dengan rakyat banyak. Dengan memahami bahwa setiap perbandingan adalah timpang, dalam konteks makna dan ekspresi gaya hidup. Gus Dur mengingatkan pada Mahatma Gandhi. Gus Dur dekat dengan hati rakyat banyak bukan hanya karena pandangan keagamaan dan politiknya, tetapi juga dalam sikap serta gaya hidupnya. Pandangan tentang kesederhanaan Gus Dur dalam sikap, cara, dan gaya hidup adalah faktor yang melengkapi pandangan dan sikap keagamaannya, menghormati setiap agama, melindungi kebebasan merupakan sikap dasar. Faktor itu juga ikut membangkitkan solidaritas, popularitas, dan keakrabannya dengan rakyat banyak.

Penghargaan terhadap pluralisme di negeri Indonesia ini akan tetap lestari dan berlanjut.

Bahkan terus menjadi panutan komponen bangsa pascawafatnya tokoh pluralisme, yang juga Presiden Republik Indonesia (1999-2001) ini. Sebagai sebuah nilai, pluralisme ada sejak awal bangsa dan negara ini ada. Masyarakat sudah lama mengenal keberagaman dan paham bagaimana hidup di dalamnya. Menurut peneliti senior Center for Strategic and International Studies, J. Kristiadi, (Kompas. 4/1/2010), "Kita sudah sejak awal hidup di lingkungan dengan beragam suku, agama, dan bahasa. Rakyat Indonesia paham apa itu pluarlisme. Bangsa ini bukannya tidak punya modal (pluralisme). Sejak dahulu kita punya yang namanya Bhinneka Tunggal Ika atau Sumpah Pemuda."

Kebijaksanaan tidaklah diukur dari panjangnya usia. Ada orang tercenung di depan televisi. Dialah Anton Sumer, warga Papua pengagum Gus Dur. Pemberitaan tentang wafatnya mantan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid menyita seluruh perhatiannya. Ia terkesima dengan pemberitaan itu. Seorang warga Papua ini mengatakan, "Beliau bapak kami orang Papua. Beliau pula yang mengembalikan lagi nama Papua." Gus Dur pula yang dengan terbuka mengakui kembali masyarakat Papua sebagai bangsa. Demikian pengakuan Anton Sumer

seorang warga Papua.

Ketua Umum Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut menegaskan bahwa “Ia (Gus Dur) tidak hanya membuka dan membangun ruang-ruang demokrasi, menghadirkan rasa aman dan nyaman, tetapi juga mengakui harkat dan martabat kami rakyat Papua.” (Kompas. 4/1/2010). Meskipun dalam logika ketatanegaraan pengakuan atas bendera Bintang Kejora dan lagu “Hai Tanahku Papua” sebagai salah satu simbol kepapuaan menurut Forkorius Yaboisembut sangat kontroversial, toh Gus Dur tetap merestuinnya. Pengakuan atas ekspresi kultural, kebebasan berpendapat, dan identitas politik itu tidak hanya penting bagi masyarakat Papua yang harus diperlakukan setara. Dengan keberanian iman dan intelektualitasnya, ia membebaskan masyarakat Papua dari kekangan masa Orba yang otoriter militeristik, demikian lanjut Forkorus. Bahkan Franz Magnis-Suseno menegaskan, “Betapa luar biasa Abdurrahman Wahid, Gus Dur kita ini! Seorang nasionalis Indonesia seratus persen, dengan wawasan kemanusiaan universal.” (Kompas. 4/1/2010).

Demikian, pernyataan yang tulus dari para simpatisan Gus Dur, yang telah merespon mereka semasa hidupnya. Dalam tulisan ini, penulis

akan mencoba mengingat kembali kenangan dan pelajaran yang telah diberikan oleh Gus Dur kepada bangsa Indonesia.

Kyai yang Intelektual

Kematian Gus Dur sungguh mengejutkan seluruh pihak. Doa senantiasa menggema di jagat republik ini, termasuk dalam pesta malam Tahun Baru yang lalu. Terlihat di media elektronik, kita sangat terharu ketika terlihat langsung ratusan ribu warga menyambut kedatangan jenazah almarhum di *pesarean* Pesantren Tebuireng. Mereka melambaikan tangan sembari *melafadzkan* pujian kepada Allah swt dan Muhammad saw, sebagaimana lazimnya dalam tradisi NU. Ketulusan mereka mengiringi kepergian Gus Dur bukan karena pamrih melainkan karena hormat bercampur keharuan dan kekaguman mereka terhadap sikap terjang yang dilakukan pendekar demokrasi dari Jombang ini.

Kekaguman warga Indonesia terhadap almarhum bukan hanya karena membela kaum termarjinalkan (*mustadh'afin*) namun juga karena kemampuannya secara intelektual, berpikir logis yang kadang membutuhkan pencernaan mendalam, kendatipun penyampaian gagasan

dan idenya melalui *joke* atau humor dengan bahasa ringan. Bahkan melekat dalam ingatan bangsa ini, beliau sering mengatakan, “Gitu aja kok repot”. Ternyata, pernyataan itu mengandung arti yang mendalam. Ketika masalah yang kita hadapi direspon dengan tenang dan berpikir rasional, maka persoalan itu akan mudah diselesaikan. Karena dalam pemikiran Gus Dur ada tiga, yakni (1) ada masalah yang dapat diselesaikan dengan cepat, (2) dapat di selesaikan namun dalam waktu lama, dan (3) memang masalah itu tidak dapat diselesaikan sehingga tidak perlu repot-repot memaksakan diri untuk menyelesaikannya.

Gus Dur memiliki penguasaan terhadap wawasan keislaman klasik namun ia juga menguasai disiplin keilmuan modern, sehingga ia terbiasa dengan kajian filsafat, sosiologi, antropologi, sastra, seni, budaya dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Barangkali, inilah kelebihanannya dibandingkan dengan kebanyakan para kyai lainnya. Penguasaan terhadap bahasa dunia hingga sembilan bahasa, membuat Gus Dur lebih leluasa melakukan komunikasi dengan beragam mitra kerja maupun koleganya. Dengan kemampuan bahasanya ini, ia memiliki kawan di berbagai negara yang dapat diajak ngobrol kapan saja. Satu hal yang menarik darinya adalah

kemampuan melontarkan joke-joke atau humor yang segar dan kontekstual. Jaya Suprana dalam sebuah stasiun swasta mengomentari humor Gus Dur, “Joke-joke yang dikeluarkan oleh Gus Dur aktual dan kontekstual. Artinya, setiap kali joke yang diucapkan memang baru didengar dan sesuai dengan konteks pembicaraan, dan yang lebih penting lagi adalah isi joke itu memiliki filosofi yang mendalam.” Kadang kala jika orang yang diajak bicara tidak memiliki wawasan yang luas maka bisa tidak *connect* dengan joke almarhum.

Tokoh Milik Bersama Lintas Iman

Ratusan orang lintas agama dan suku bangsa bersetia melantunkan doa untuk Gus Dur di tengah rinai hujan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (2/1/2010) malam. Selain berdoa, mereka juga menyatakan tekad untuk meneruskan semangat pluralisme yang diwariskan Gus Dur. Beberapa tokoh menyampaikan pikiran dan pengalaman mereka selama mengenal Gus Dur dalam acara yang diberi tajuk “Sejuta Lilin Duka Lintas Iman untuk Gus Dur”. Para tokoh itu di antaranya Ulil Abshar Abdalla, Djohan Effendi, Pendeta Albertus Pati, Romo Beni Susetya, BM

Billah, Todung Mulya Lubis, Syafi'i Anwar, dan Sudhamek.

Kesan yang paling kuat yang disampaikan para tokoh itu adalah sosok Gus Dur sebagai pejuang pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan. Selain itu, Gus Dur juga dikenang sebagai sosok yang punya pendirian yang keras dan berani melawan terhadap kezaliman, sekalipun itu harus melawan *mainstream*. Pembelaannya terhadap kaum minoritas tidak pernah mundur kendatipun berhadapan dengan massa yang sudah solid untuk melakukan perlawanan. Keyakinannya terhadap suatu kebenaran tidak akan mudah berubah walaupun dikompensasi dengan yang lebih menguntungkan dirinya. Pembelaan terhadap minoritas marga Tionghoa, Gus Dur memberikan pengakuan terhadap Konghucu sebagai agama yang dianut warga Indonesia. Bahkan ia memberikan hadiah kepada mereka, hari raya imlek sebagai hari libur nasional.

Gus Dur tidak merasa akan kehilangan keimanannya dengan mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani. Karena menurutnya, ucapan selamat natal tidak akan mengubah keimanan seseorang selama keyakinan itu didasarkan pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang diyakininya. Ini persoalan

pemahaman terhadap ajaran agama, semakin luas wawasan pengetahuan yang dimiliki seseorang maka akan semakin luas pula cara pandang interpretasi terhadap ajaran yang dianutnya.

Kesan Addaruqutni, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, terhadap Gus Dur adalah kesiapsediaannya untuk hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah, kendatipun hanya dengan lisan padahal beliau adalah seorang presiden. Dalam catatan Addaruqutni, dia telah meminta Gus Dur hadir dalam acara Pemuda Muhammadiyah dua kali, itu pun disampaikan melalui lisan namun beliau hadir dan inilah yang menjadikan kekaguman Addaruqutni terhadap almarhum. Bahkan kader Muhammadiyah ini sampai menyatakan bahwa Gus Dur bukan hanya milik komunitas Nahdlatul Ulama (NU) namun milik semua bangsa.

Politisi yang Humoris

Humoris menjadi *icon* Gus Dur. Hampir tidak ada ruang kapan saja ia berbicara tanpa humor-humor segar yang kontekstual. Beberapa anggota dewan yang terhormat pernah tersinggung dengan ucapannya. "Anggota dewan

kok seperti anak taman kanak-kanak”, demikian kata Gus Dur. Ungkapan ini menjadi bulan-bulanan komentar para politisi yang tersinggung. Sementara itu, ungkapan di atas dianggap sebagai pelecehan Gus Dur atas anggota dewan. Namun, pada akhirnya ucapan tokoh pluralis itu terbukti, bahwa prilaku dan ucapan para anggota dewan tidak menunjukkan sebagai komunitas terhormat. Tidak sedikit anggota dewan yang tersangkut masalah korupsi dan dijabloskan ke hotel prodeo (penjara). Bahkan sangat menistakan diri mereka sendiri akibat ulah perilaku dan ucapan anggota dewan terhadap publik. Semisal anggota dewan mengatakan terhadap kawan bicaranya sesama anggota dewan dengan kata-kata “bangsat”, “kurang ajar”. Hal ini menggelikan sekali, sebagai anggota dewan terhormat tetapi perilaku dan ucapannya tidak terhormat seperti anak kecil.

Dalam tutur kata, ada beberapa anggota dewan yang berkata tidak senonoh, misalnya, ada yang mengatakan ketua sidang pansus Bank Century dengan sebutan “bangsat”. Hal ini membuktikan bahwa emosi mereka tidak terkontrol, padahal mereka sedang menjadi perhatian sekian juta bangsa Indonesia yang berharap penyelesaian atas kasus Bank Century melalui jalur politik. Fakta ini membuktikan

pernyataan Gus Dur dahulu, “anggota dewan seperti anak TK”. Kata-kata itu diungkapkan dengan ringan dan canda namun bukan berarti mengolok-olok. Sebab, ungkapan Gus Dur bukan dalam kapasitas menghina atau menghardik mereka namun ia sedang melakukan kritik konstruktif. Mereka diminta untuk introspeksi diri, apakah jabatan sebagai wakil rakyat sudah tepat dilaksanakan sebagaimana tata aturan yang berlaku?

Kecerdikan Sang Kyai

Dalam tradisi nahdliyin, ada orang yang memiliki perilaku yang menyimpang dari *mainstream*, yang biasa disebut *khariq al-âdah*. Orang model ini cara berpikir dan perilakunya agak sukar ditebak, terkesan semau sendiri. Salah satu model orang seperti ini adalah Gus Dur. Karena tidak *nyambung* dengan pemikiran dan gaya kepemimpinan Gus Dur, ada kyai yang *mufarraqah* (memisahkan diri) dari kepemimpinan Gus Dur ketika memimpin PBNU.

Begitu banyak ide *nyeleneh* beliau yang diposisikan kontroversial di tengah masyarakat pada akhirnya terbukti sebagai ide-ide yang lurus, yang mendukung pluralisme dan demokrasi. Itu

artinya ada pertanyaan besar di tengah kita semua, adakah jalan yang kita tempuh selama ini begitu menyimpang sehingga jalan lurus pun dianggap sebagai *nyeleneh*?

Kecerdikan Sang Kyai ini—berdasarkan sejarah—sudah terlihat sejak masa anak-anak, terutama ketika ia menjadi santri di beberapa pesantren. Ketika ia *mesantren* (belajar) di suatu pesantren, ia meninggalkan cerita lucu dan cerdas. Seperti cerita di Pesantren Krapyak. Beliau dengan tiga kawan santri mengambil ikan milik Pak Kyai. Mereka membagi tugas, tiga teman santrinya sepakat bagian mengambil ikan di kolam, sementara Gus Dur bertugas menjaga kyai. Maksudnya, bila ada Sang Kyai keluar rumah maka Gus Dur harus segera memberi aba-aba kepada ketiga temannya. Namun yang terjadi adalah Gus Dur tidak memberi aba-aba kepada ketiga temannya di saat Sang Kyai keluar rumah. Ternyata Gus Dur tertidur, sehingga mereka *blingsatan* (kalang kabut). Akhirnya, ikan hasil tangkapan mereka tempatkan di sisi Gus Dur yang sedang tidur. Di saat Sang Kyai menegurnya, Gus sedang apa di sini? Gus Dur menjawab, “Ini Kyai, saya sedang menunggu ikan sampai ketiduran”. Ya, sudah bawa saja ke Nyai (Istri Sang Kyai) di dapur!, perintah Sang Kyai. Dibawalah ikan itu ke

dapur Nyai dan dimasak di sana. Gus Dur turut serta menikmati ikan yang digoreng itu.

Dalam pikiran ketiga temannya, Gus Dur sedang dimarahi Sang Kyai karena mencuri ikan. Mereka penasaran ingin segera melihat ekspresi Gus Dur setelah dimarahi Sang Kyai, rasanya puas melihatnya dimarahi karena ia lalai menjaga kesepakatan. Mereka tidak mengetahui kondisi yang terbalik dengan perasaan yang mereka rasakan. Justeru, Gus Dur bukan dimarahi Sang Kyai tetapi ia sedang menikmati ikan hasil tangkapan mereka. Kecele mereka...!

Sang Pahlawan Nasional

Pahlawan adalah mereka yang berani mengubah tragedi menjadi jalan emansipasi. Seperti itu jualah Gus Dur. Secara individual ataupun komunal, ia tumbuh mengerami rangkaian kepahitan dan keterpinggiran (marjinalisasi). Sejak masa kanak-kanak, ia mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya, ditambah kecelakaan susulan yang mengganggu penglihatannya. Sebagai “cucu dari kakeknya dan anak dari ayahnya”, Gus Dur yang mewarisi rumah Islam tradisional juga mendapati umatnya dalam situasi keterpurukan, sebagai

subaltern (yang terpinggirkan) yang diremehkan rezim kemodernan.

Ia tidak menyerah. Sebelah matanya yang berfungsi baik ia optimalkan untuk membaca. Keterpurukan tradisi tidak membuatnya rendah diri, melainkan memberinya dorongan untuk melakukan penyelamatan. Dalam mencari modus penyelamatan itu, ia mengamalkan wasiat Imam Syâfi'î kepada para pencari untuk berani melakukan pengembaraan (intelektual). "Berangkatlah, niscaya engkau akan mendapatkan ganti untuk semua yang engkau tinggalkan. Bersusah payahlah sebab kenikmatan hidup direngkuh dalam kerja keras. Ketika air mengalir, ia akan menjadi jernih dan ketika berhenti, ia akan menjadi keruh. Sebagaimana anak panah, jika tidak meninggalkan busurnya tak akan mengenai sasaran. Biji emas yang belum diolah sama dengan debu di tempatnya."

Gus Dur berbeda dengan pendahulunya yang demi mengagungkan tradisi kerap menolak unsur kemodernan, yang membuat pondok pesantren agak terlambat mengantisipasi kemajuan. Gus Dur berani melakukan pengembaraan hingga ufuk terjauh filsafat, pengetahuan, dan peradaban Barat. Namun, dia berbeda dengan pengembara lain yang cenderung melupakan

asalnya sehingga, menurut Harry J. Benda, adalah suatu perkecualian kaum inteligensia Indonesia yang mengenyam pendidikan Barat akan menjadi pembela dan juru bicara dari kelas asalnya. Gus Dur ibarat kacang yang tak pernah melupakan kulitnya. Sejauh apa pun ia mengembara, ia selalu ingat jalan kembali ke rumah tradisi, dengan menjangkarkan kemodernan pada akar jati diri dan mensenyawakan universalitas keislaman dengan lokalitas keindonesiaan. Tempat perabadiannya di Kompleks Pondok Pesantren Tebuireng meneguhkan komitmen Gus Dur untuk senantiasa kembali ke rumah tradisi.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui siaran pers mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada KH. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mantan Presiden ke-4 RI. Usulan serupa juga diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Semuanya dalam bentuk siaran pers.

Pahlawan nasional—menurut Asvi Warman Adam—berasal dari orang yang gugur dalam perjuangan menentang penjajahan atau membela bangsa dan negara. Atau bisa juga tokoh yang

semasa hidupnya memperlihatkan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi yang luar biasa bagi pembangunan serta kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Pengusulan pahlawan nasional dapat diajukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, organisasi, lembaga pemerintah atau non-pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan yang disahkan Presiden pada tanggal 18 Juni 2009. Pengajuannya disertai riwayat hidup calon dan perjuangannya, dengan kata lain, usulan itu harus disertai alasan-alasan yang kuat serta dilampiri fakta dan dokumen pendukung (*Kompas*, 5/1/2010).

Djohan Effendi (*Kompas*, 3/1/2010) menilai Gus Dur layak menjadi pahlawan nasional. "Tetapi lebih dari itu, saya ingat ucapan Gus Dur, "Saya ingin di kuburan saya ada tulisan: di sinilah dikubur seorang pluralis."" Andaikan Gus Dur tidak diberi penghargaan pahlawan oleh pemerintah, sesungguhnya ia telah mendapat pengakuan banyak dari warga masyarakat sebagai pahlawan. Kondisi seperti ini lebih substansial ketimbang pemberian penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Sebab, pemberian dari pemerintah malah terkesan formalitas.

Seorang Pluralis dari Jombang

Salah Satu jasa besar Gus Dur adalah mengukuhkan panji-panji pluralisme. Sebab itu, pernyataan Gus Dur sebagai bapak dan pejuang pluralisme merupakan sebuah realitas yang tidak terbantahkan lagi. Meskipun demikian, menurut Zuhairi Misrawi (Kompas. 4/1/2010), pernyataan tersebut meninggalkan dua hal: harapan dan tantangan. Harapan, karena pluralisme masih menjadi laku sosial-politik. Mereka yang mendukung tegaknya kebhinnekaan merupakan kelompok mayoritas. Sebaliknya, mereka yang menolak pluralisme adalah kelompok kecil yang kadang kala suara mereka lantang di permukaan. Meskipun suara mereka lantang, tetapi kehendak publik pada pluralisme tidak akan mampu ditundukkan oleh ambisi dan tendensi mereka.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pluralisme masih menghadapi tantangan yang serius, terutama pasca-fatwa MUI tentang pengharaman pluralisme. Fatwa semacam ini merupakan tantangan serius dalam membangun harmoni dan kebersamaan. Karena seolah-olah ketika berhubungan dengan kelompok lain yang berbeda, maka dianggap akan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Padahal, dialog dan

perjumpaan justeru dapat menjadi kekuatan dan potensi, terutama dalam konteks kebangsaan. Pluralisme pertama-tama dimulai dari kesadaran tentang pentingnya perbedaan dan keragaman. Sebab perbedaan merupakan fitrah yang harus dirayakan dan dirangkai menjadi kekuatan untuk membangun harmoni. Adapun anggapan bahwa pluralisme akan menjadi sinkretisme—menurut Misrawi—merupakan pandangan yang cenderung mengada-ada. Faktanya, pluralisme dan sinkretisme sangat tidak identik (Kompas. 4/1/2010).

Gagasan dan tindakan Gus Dur yang pluralis sebenarnya merupakan ajaran nilai-nilai kebangsaan yang hakiki berangkat dari realitas sosiologis keindonesiaan, berangkat dari penghargaan yang tinggi terhadap hakikat dan eksistensi kemanusiaan. Tidak bisa dihindari kenyataan multi etnik dan komunitas dengan budaya dan agama masing-masing yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari fondasi filosofis bangsa ini, *Bhinneka tunggal Ika*. Tepatnya, ketika Gus Dur mengembangkan pemikiran dan gerakan sosial budaya penghargaan terhadap eksistensi pluralisme, sebenarnya ia tengah melakukan penyadaran kepada masyarakat dan penyelenggara Negara untuk terus memperkokoh

bangunan keindonesiaan. Sebaliknya, bagi siapapun yang menghalanginya, boleh jadi merupakan bagian dari segelintir warga atau elemen bangsa yang secara tak langsung berupaya merapuhkannya. Yang terakhir ini sudah sangat tidak diinginkan.

Pemikiran kebangsaan dan perjuangan Gus Dur itu sudah sangat jelas dan seharusnya menjadi rujukan bagi penyelenggara Negara dan atau siapa pun yang berperan di ranah publik. Dengan demikian, tak perlu ada yang perlu khawatir dengan menganggap “jangan-jangan roh Gus Dur tak menjelma atau masuk dalam kalbu para penentu kebijakan di negeri ini.” Masalahnya, memang, andaipun “ajaran Gus Dur” diakui eksistensinya tetapi belum tentu ada yang secara berani mengimplementasikan-nya. Padahal, penghargaan terhadap Presiden ke-4 RI yang itu bukan hanya sekadar menganggapnya berjasa sebagai “pahlawan bangsa” dan atau istilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Pluralisme, melainkan pada tingkat ajarannya benar-benar diwujudkan dalam praktik hidup bermasyarakat dan bernegara. Tanpa itu, berarti sama halnya dengan mengabaikannya, hanya menjadikannya sebagai pelaku sejarah sosial dengan pemikirannya yang selalu menarik untuk

dikaji, tetapi sulit atau luput diaplikasikan.

Kekhawatiran seperti itu, hemat Laode Ida, pada dasarnya juga beralasan. Mengapa? *Pertama*, tindak lanjut perjuangan Gus Dur memerlukan figure berkarakter, kalau mau jujur diakui, hingga sekarang Indonesia masih sulit menemukannya. Indonesia memiliki banyak tokoh yang menonjol (*prominent figures*) dengan kapasitas individu yang kuat. Akan tetapi, [1] jarang yang memiliki keberanian untuk secara progresif tampil “melawan arus”, berkorban untuk sebuah idealism bernilai kerakyatan dan kebangsaan, dan [2] memiliki basis budaya dan massa yang jelas sebagai modal sosial dan *back up* politik. (Kompas, 4/1/2010).

Menurut Forkorus, aktivis gerakan adat Papua, Gus Dur telah mengilhami mereka untuk berjuang dalam dan demi perdamaian. Meski masa pemerintahannya sebagai presiden amat pendek, apa yang telah dilakukannya bagi masyarakat Papua sangat penting. “Meski secara fisik, Gus Dur sulit melihat, ia memiliki mata hati yang mampu melihat jauh lebih dalam daripada mata fisik,” kata Anton Sumer.

Penutup

Kepopuleran seseorang bukan karena umurnya panjang, namun peran dan kiprahnyalah yang menjadi acuan pancang tonggak catatan. Gus Dur—secara jasad—boleh mati tetapi secara warisan peninggalan karya, cipta, dan prakarsanya tetap dikenang selamanya. Tugas intelektual untuk “berkata benar pada kuasa” penting dipancarkan sebagai penjaga kewarasan bangsa. Keberanian berkata “benar” inilah warisan kepahlawanan Gus Dur yang teramat mulia untuk dijunjung tinggi tunas pahlawan masa depan. Seperti kata Leo Tolstoy, *“The hero of tale—whom I love with all the power of my soul, whom I have tried to portray in all his beauty, who has been, is, and will be beautiful—is Truth.”*

Dengan “kebenaran” yang engkau wariskan, pulanglah, Gus, dengan tenang. Kita hanyalah anak sang waktu yang mengalir dari titik ke titik persinggahan sementara. Namun, setiap jejak tidaklah sia-sia. Setiap kata yang engkau sapakan memberi gairah pada hidup. Setiap canda yang engkau kelakarkan memberi senyum pada kemelut. Setiap darma yang engkau sumbangkan memberi tenaga pada sesama. Dengan menanam, engkau hidupkan asa masa depan. Kata Yudi

Latif, (*Kompas*, 5/1/2010) “dengan mati, engkau abadi!” Di sinilah arti kepahlawan seorang Gus Dur, ia tidak pernah memikirkan penghormatan, penghargaan dan sambutan orang lain. Namun yang dipikirkannya adalah bagaimana ia dapat memberikan pelayanan kepada publik, lebih khusus kelompok termarjinalkan (*mustadh'afin*). Bahkan, Gus Dur senantiasa berusaha berbuat baik—dengan menunjukkan prestasi—kepada orang-orang yang menyakiti, mengeritik, mencaci, dan menghina. Ketika kejahatan orang lain dibalas dengan kejahatan, menurut Gus Dur, tidak akan memberikan keteladanan yang baik dan akan muncul masalah baru, setidaknya benturan-benturan sosial di tengah masyarakat. ❧

Daftar Bacaan

- Asvi Warman Adam, "Usulan Gus Dur Pahlawan Nasional", dalam *Harian Umum Kompas*, 5/1/2010.
- Benny Susetyo, "Indonesia dan Gus Dur", dalam *Harian Umum Kompas*, 5/1/2010.
- B. Josie Susilo Hardianto, "Obituari Gus Dur dan Damai untuk Papua", dalam *Harian Umum Kompas*, 4/1/2010.
- Djohan Effendi, "Obituari Doa Umat Lintas Agama untuk Gus Dur", dalam *Harian Umum Kompas*, 3/1/2010.
- Laode Ida, "Menghargai dan Mencari Figur Pengganti Gus Dur", dalam *Harian Umum Kompas*, 4/1/2010.
- Franz Magnis-Suseno, "Gus Dur Telah Pergi", dalam *Harian Umum Kompas*, 4/1/2010.
- Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Yudi Latif, "Dengan Mati, Gus Dur Abadi", dalam *Harian Umum Kompas*, 5/1/2010.
- Zuhairi Misrawi, "Pluralisme Pasca-Gus Dur", dalam *Harian Umum Kompas*, 4/1/2010.

TEKSTUALITAS “APA JARE GUS DUR” Telaah Hermenatika Filosofis Hans- Georg Gadamer

Faqihuddin Abdul Kodir

Kewafatan Gus Dur pada Rabu sore 30 Desember 2009 telah menguasai pemberitaan media massa cetak maupun elektronik secara masif. Berita-berita utama koran maupun televisi, lokal maupun nasional, mengenai politik negeri yang awalnya bertengger terpaksa harus bersembunyi untuk beberapa hari. Kalau tidak, publik pasti akan enggan membacanya. Kewafatan ini bukan soal kehilangan semata, tetapi tak pelak lagi penanda betapa Gus Dur adalah fenomena yang tiada duanya di bumi Indonesia. Sebagai presiden, hanya Gus Dur yang wafatnya ditangisi lautan manusia, tidak pada Soekarno, apalagi Soeharto. Sebagai kyai, juga hanya Gus Dur, yang diratapi jutaan non-muslim dan warga negara minoritas. Ungkapan belasungkawa dan

penulisan obituari di berbagai media, tuntutan publik untuk anugerah ‘pahlawan nasional’, penuturan kembali kisah-kisah “aneh” dan momen-momen humor Gus Dur, hanya sebagian dari makna-makna yang dilahirkan ‘Gus Dur’ sebagai sebuah tanda, teks, atau fenomena paska akhir hayatnya.

Tidak sebagaimana pada ‘teks-teks’ kontroversi yang berhamburan dari lisan Gus Dur ketika masih hidup, saat ini ‘Gus Dur’ nyata telah menjadi ‘teks’ tanpa ada kemungkinan konfirmasi apapun terhadapnya. Pertanyaan filosofisnya; apakah kita benar-benar bebas memaknai Gus Dur sebagai teks? Ataukah kita semua berada dalam jeratan dan terbawa arus tekstualitas Gus Dur? Tekstualitas Gus Dur paska hayat telah memaksa media lokal-nasional dan tokoh-tokoh angkat bicara soal Gus Dur. Banyak tokoh seperti SBY, JK, dan Amin Rais memilih untuk menyematkan ungkapan “Bapak Pluralisme” kepada Gus Dur, sementara KH. Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidziyyah PBNU lebih nyaman dengan “Gus Dur yang demokratis dan humanis”. Masih harus ditambah lagi dengan pernyataan “demokrasi dan humanisme yang berbasis pada kekuatan tradisi Islam”. Apakah mereka semua merasa menemukan kebebasan memaknai “yang

demokratis”, “yang humanis”, dan “yang pluralis” pada Gus Dur yang saat ini sudah menjadi teks secara total? Ataukah mereka sesungguhnya tidak akan pernah bisa lari dari teks-teks itu, yang telah ‘mengada’ dan ‘menyejarah’ secara hermeneutis? Ataukah mereka mampu secara obyektif memaknai ‘kehendak Gus Dur” dalam hal pluralisme, demokrasi, dan humanisme, hanya dengan melihat konteks Gus Dur, tanpa melibatkan prasangka-prasangka mereka? Tanpa nilai-nilai yang mengitari diri mereka para penafsir ‘teks Gus Dur itu’?

Kehendak ‘memaknai Gus Dur’ dengan menabalkan ketokohan, sebagai ‘pahlawan nasional’, merkonstruksi atau mengisahkan ulang cerita-cerita kewalian Gus Dur, juga kehendak untuk sekedar mengkoleksi cerita-cerita humor Gus Dur adalah bentuk dari upaya interpretasi terhadap teks-teks Gus Dur. Pertanyaan filosofis hermenetusnya; apakah kita dapat menemukan dan sampai pada makna yang rekonstruktif? Apakah ‘pahlawan nasional’ benar-benar untuk ketokohan Gus Dur misalnya, atau untuk kepentingan dalam kekinian kita? Ataukah kita benar-benar bisa ‘subyektif’ sehingga makna dan kehendak itu benar-benar milik kita yang terlepas dari “teks Gus Dur” itu sendiri?. Satu lagi, yang

masih jarang didiskusikan adalah pernyataan “*Apa Jare Gus Dur*”, atau “*Terserah kemauan Gus Dur*”. Teks ini, sekalipun pernyataan masyarakat, tetapi tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan “*tekstualias Gus Dur*”. Fenomena respon publik yang begitu masif atas kewafatan Gus Dur dari berbagai kalangan, baik pecinta, pengagum, simpatisan, sampai pengkritik adalah cerminan dari tekstualitas “*Apa Jare Gus Dur*”.

Dalam perspektif Islam modernis, “*Apa Jare Gus Dur*” yang pada awal reformasi politik menjadi jargon kampanye PKB di kalangan akar rumput, bisa dituduh sebagai titik kulminasi “*taklid buta*” kalangan Islam tradisional, yang sama sekali tidak menarik, kampungan, dan membodohi. Analisis modernis pasti menysasar persoalan taklid kalangan Islam tradisional sebagai sesuatu yang membelenggu setiap individu, sebaliknya ijtihad sebagai yang mencerahkan. Ijtihad diyakini yang akan membebaskan, sebaliknya taklid yang membutakan. Analisis ini cukup lama dalam dunia Islam, khususnya Indonesia mendominasi interpretasi sejarah umat Islam secara dikhotomis, dimana satu kalangan yang mengklaim panji-panji ijtihad, pembaruan, rasionalitas, kemajuan dan modernitas, merasa paling berhak atas atas tafsir tradisi yang ada dan pada saat yang sama atas

panggung sejarah kekinian umat, dan di sisi lain ada kalangan yang dipojokkan sebagai penganut taklid, jumud, terbelakang, penuh takhayul dan irrasionalitas yang tidak layak menaiki panggung sejarah tersebut dan harus dipinggirkan.

Setidaknya, tekstualitas Gus Dur pada masa hayat beliau, telah menjungkirbalikkan analisis yang dikhotomis tersebut, dimana pada puncaknya seorang Gus Dur yang sarungan, suka ziarah kubur, tetapi berwawasan metropolis, terkondisikan menjadi presiden yang justru didorong mereka yang mengaku anti ziarah kubur. Sekalipun dua tahun berikutnya, beliau dijatuhkan kelompok yang sama yang awalnya mengusung, tetapi 'prosesi penjatuhan ini' tidak mendatangkan 'berkah kekuasaan' yang berarti bagi kalangan modernis yang mengusung dan kemudian menjatuhkan, sebagaimana dikehendaki mereka.

Analisis postmodernis terhadap panggung budaya dimana taklid *versus* ijtihad bermain dan di-'permain'-kan, juga mempertontonkan dikhotomi tersebut sebagai sama sekali tidak valid, dan sulit untuk dikatakan tunggal kebenaran atau tunggal kesalahan. Taklid dan ijtihad, dalam analisis ini, sebenarnya telah bermetamorfosis sebagai hiper-realitas, yang tidak lagi bisa dimasukkan dalam

kotak “membutakan” sementara kotak lain “mencerahkan”. Mereka yang mengusung ijthad, bisa terjebak pada kejumudan yang akut, sehingga hanya mengulang-ngulang fatwa yang sama dan mengambilnya dari tradisi yang sebenarnya sudah ada. Sementara, mereka yang berasal dari kalangan taklid, justru mempertontonkan pembaruan yang maha dahsyat berangkat dari tradisi yang mereka miliki. Ketakutan banyak pihak terhadap laju liberal pola “taklid” anak muda NU terhadap pemikiran Gus Dur, yang dianggap melebihi sekat metodologis ijthad konservatif, menjadi contoh gamblang hiper-realitas ini.

Hermeneutika filosofis yang dikembangkan Hans-Georg Gadamer (1900-2002), menurut saya, sedikit banyak dapat mendeskripsikan hiper-realitas tekstualitas “*Apa Jare Gus Dur*” tidak sebagaimana analisis modernis yang sangat simplistik. Berbeda dengan hermeneutika tradisional, salah satu pemikir utamanya adalah Wilhelm Dilthey (1833-1911), dimana hermeneutika diposisikan sebagai metode interpretasi, hermeneutika filosofis *a la* Gadamer menggugat posisi ini dan menabalkan hermeneutika sebagai proses “mengada” yang ontologis. Interpretasi, atau setiap upaya pemahaman suatu teks, tradisi, atau apapun,

dalam hermeneutika filosofis bukan sesuatu yang metodologis, tetapi lebih pada proses dialogis dialektis dari prasangka-prasangka hermeneutis dalam horizon tertentu, yang kemudian “makna” atau “pemahaman” sesungguhnya lahir dari apa yang diistilahkannya sebagai “*fused of horizons*” atau “cakrawala-cakrawala yang menggabung”.

Prasangka adalah sesuatu yang niscaya dari setiap proses interpretasi, dalam telaah hermeneutika filosofis, mulai dari prasangka historis yang melekat secara inheren pada setiap teks dan prasangka setiap pembaca terhadap teks tersebut. Hermeneutika tradisional menuntut pemisahan yang jelas antara prasangka dalam kesejarahan suatu teks, dari prasangka yang ada dalam kotak intensi setiap pembacanya. Dengan pemisahan ini, diasumsikan akan dikenali ‘interpretasi yang obyektif’ dari ‘interpretasi yang subyektif’ melalui analisis hermeneutika metodologis. Perspektif positivistik meniscayakan pemisahan subyektitas pembaca atau penafsir, agar terlahir makna yang obyektif dari teks, melalui analisis historis dalam relasi teks, pengarangnya, dan konteks sejarah dimana teks dimunculkan si pengarang. Sementara hermeneutika filosofis menentang peniscayaan “relasi metodologi dan makna” yang

dihasilkannya, dimana yang satu makna dapat diklaim sebagai subyektif dan yang lain sebagai obyektif. Interpretasi tidak juga diusulkan sebagai sintesasa simplistis dari subyektifitas pembaca dan obyektifitas suatu teks yang dibaca.

Gadamer lebih menekankan interpretasi suatu teks sebagai 'mengada' dalam kesejarahan kemanusiaan atau *'being in the-world'*. Dalam proses ini, seorang pembaca pasti memiliki prasangka-prasangka yang hidup di alam cakrawala pemikirannya (*horizon*), pada saat yang sama suatu teks juga memiliki prasangka-prasangka historis dalam kesejarahan cakrawalanya (*historicality of its horizons*). Interpretasi kemudian merupakan proses dialogis prasangka pembaca yang bertemu dengan prasangka teks dalam suatu cakrawala baru, yang 'mengumpul dan menggabung' dari cakrawala-cakrawala (*a fused of horizons*) dari berbagai pembaca kontemporer, pembaca-pembaca sepanjang sejarah teks tersebut, maupun cakrawala pada saat teks tersebut terbentuk. *Horizon*, atau cakrawala pemikiran, adalah bentangan visi yang meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat dari titik tolak tertentu.

Jika Dilthey meniscayakan hermenetika sebagai metode interpretasi suatu teks untuk menemukan makna sebagaimana dimaksud

pengarangnya pada konteks dimana teks tersebut muncul, Gadamer justru menafikan kemungkinan tugas hermeneutika tersebut. Karena seorang penafsir, ketika menelusuri makna obyektif suatu teks dengan menggali maksud dari pengarangnya pada konteks tertentu, sebenarnya ia sendiri sedang dan sudah membawa prasangkanya sendiri mengenai pengarang dan konteks tersebut. Dilthey, dalam hal ini, berusaha mengungkap makna asli suatu teks dengan melihat konteks sejarah dan interpretasi tidak lain adalah reproduksi suatu makna. Ini tentu saja hal yang baik untuk memahami suatu teks melalui konteks historisnya. Tetapi yang juga perlu ditekankan, sebagaimana diingatkan Gadamer bahwa suatu teks tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dikomunikasikan dengan konteks kekinian. Di sinilah Gadamer mengenalkan kesadaran sejarah dalam proses pemaknaan, baik yang terkait teks dan tradisi masa lalu maupun para pembaca pada konteks kekinian. Dialog menjadi sesuatu yang niscaya dalam interpretasi sebagai upaya 'mengada' individu dalam pusaran makna peradaban kemanusiaan.

Menurut Gadamer, seseorang itu memahami suatu teks atau suatu fenomena menurut horizon historis dimana ia berada. Karena itu, memaknai

adalah sesungguhnya proses seseorang ‘mengada’ dalam sejarah. Horizon, atau cakrawala seseorang, diartikan Gadamer sebagai bentangan visi yang meliputi segala sesuatu yang bisa dilihat dari titik tolak khusus. Seseorang pastilah berada pada titik tolak tertentu, yang mempengaruhinya dalam melihat, menafsiri, dan bertindak. Horizon seseorang bisa menyempit dan mengembang, tergantung konteks, pergaulan, bacaan, dan sejauh mana ia punya intensitas untuk melakukan kontak dialogis dengan berbagai orang yang berbeda dan atau bertentangan dengan dirinya. Dalam horizon yang menyempit, prasangka seseorang juga bisa menyempit dan salah. Suatu interpretasi muncul dari horizon ini, karena itu ia bisa menyempit dan salah. Tugas hermeneutis dalam hal ini lalu, mengenali prasangka diri, membawanya ketika menafsiri, menahannya selama kita mendengar teks dengan prasangka-prasangka historisnya dan prasangka pembaca-pembaca yang lain, terus melakukan dialog dan komunikasi prasangka kita dengan prasangka-prasangka yang ada. Makna kemudian akan “mengada” dari komunikasi teks-pembaca dalam konteks “cakrawala-cakrawala pemikiran yang menggabung”. Dan demikianlah proses makna itu disebut Gadamer sebagai “*hermeneutic circle*” atau lingkaran hermenetis.

Dari suatu teks, makna akan “mengada” secara terus menerus dalam komunikasinya dengan pembacanya, yang bisa jadi berangkat dari titik partikular melingkar pada cakupan yang general, atau sebaliknya yang general “menjelas” melalui lingkaran titik-titik partikular.

Lingkaran hermeneutis tidak akan berhenti, yang diperlukan adalah keterbukaan kita untuk menerima horizon teks dan tradisi, kesediaan kita untuk mendengar ‘keasingan’ makna-makna yang ‘mengada’ dari horizon-horizon yang lain, dan kemauan kita untuk berdialog dan mengkomunikasikan teks dan tradisi itu dalam horizon kekinian kita. Tidak mungkin ada ‘rekonstruksi makna obyektif’ dari suatu teks tertentu, misalnya dengan memastikan korelasinya dengan kehendak pengarang dan konteks yang melatari, seperti yang dituntut positivisme gerakan pencerahan. Apakah kita pasti bisa melepaskan diri dari prasangka-prasangka kita ketika menafsir? Apakah kita benar-benar mampu untuk bebas nilai sebelum, ketika dan sesudah menafsir? Demikian pertanyaan mendasar Gadamer. Ia menjawab “tidak”. Tetapi kita juga tidak bisa ‘merasa paling berkuasa’ sehingga mengklaim bahwa “teks itu mati”, dan kita mampu dengan memaksakan “subyektifitas

makna” kita ke dalam “proses mengada” makna-makna menyeluruh yang berkeliaran dalam dunia. Kita tidak bisa melepas juga dari kesejarahan hermeneutis suatu teks atau tradisi.

Karena itu, interpretasi dalam hermeneutika filosofis Gadamer, sebagai sebuah dialog dengan orang lain atau komunikasi dengan suatu teks dan tradisi, bukanlah untuk menemukan makna yang setepat-tepatnya, tetapi lebih pada “untuk memahaminya” saja. “Memahami” adalah proses “mengada”, sehingga seseorang juga tidak sepenuhnya “subyektif” dengan makna yang dilahirkannya, tetapi “mengada” dalam cakrawala pemikirannya yang merupakan “cakrawala-cakrawala yang menggabung” dalam konteks sosial saat proses “memahami” itu terjadi. Yang terpenting dari hermeneutika Gadamer lalu, kita meneruskan pemaknaan-pemaknaan ini sebagai proses “mengada” kita di dunia “pemaknaan” ini, dengan penuh kesadaran akan prasangka masing-masing dan kesediaan terbuka dengan prasangka-prasangka yang lain, prasangka yang paling berbeda dan paling bertentangan sekalipun. Dengan demikian, pemaknaan akan mencipta terus horizon-horizon baru, dan horizon-horizon akan melahirkan prasangka-prasangka, dan prasangka akan melahirkan makna-makna

baru sesuai dengan konteks hermeneutis masing-masing. Manfaat publik akan didapatkan dan peradaban akan terbangun dari makna-makna baru ini, yang secara sadar dilahirkan dari pasar prasangka yang dibawa masing-masing individu.

Dengan demikian, taklid kalangan tradisional sebagai 'teks sosial' tidak bisa dipahami secara sederhana melalui analisis 'kamus kaum modernis' dan mendefenisikannya dengan makna tunggal 'ikut-ikutan yang membutuhkan'. Taklid dan ijtihad, tidak hanya klaim pemikiran, tetapi interpretasi tradisi dalam horizon masing-masing sebagai bentuk dialog dan negosiasi antara teks masa lalu, atau tradisi, dengan prasangka hermenetis kekinian. Sebagai proses interpretasi, taklid maupun ijtihad, adalah proses 'mengada' masing-masing individu dalam dunia pemaknaan, dimana suatu individu tidak mungkin bisa lepas dari prasangka-prasangka dan makna-makna yang telah 'mengada' di masa lalu seperti pada kasus tradisi atau yang 'mengada' pada masa kini seperti pada kasus 'makna-makna baru' yang dimunculkan.

Tradisi *matan* (teks inti), *syarh* (komentar), dan *hâsyiyah* (catatan pinggir) di kalangan pesantren, tidak bisa sesederhana dipahami sebagai kemunduran intelektual umat Islam.

Tradisi ini merupakan bentuk kejujuran prasangka terhadapnya pentingnya masa lalu dalam menginisiasi dan membentuk makna-makna baru dalam proses interpretasi. Dalam analisis hermenetis Gadamer, tidak ada seseorang yang mampu keluar dari lingkaran tradisi masa lalu, sekalipun ia mendakwahkan sesuatu yang baru sekalipun. Sesuatu yang baru, justru bermakna jika mendasarkan secara jujur pada prasangka hermenetis dari tradisi masa lalu. Dalam tradisi akademik perguruan tinggi sekalipun, tesis-tesis perlu didasarkan pada *review* keilmuan masa lalu, sehingga seseorang tidak bisa mendakwa ‘pembaruan’ tanpa merujuk pada dasar-dasar tradisi masa sebelumnya. Taklid, harus dipahami sebagai ‘posisi intelektual’ mengenai pentingnya merujuk dan mendasarkan pada tradisi masa lalu, sebelum dan ketika ‘mengada’ dalam proses interpretasi suatu tradisi, teks, atau fenomena sosial.

Yang diperlukan kemudian, sebagaimana diprasyaratkan Gadamer, adalah memperluas cakrawala (*horizon*) sebagai basis interpretasi tersebut. Tradisi bisa sama, terminologi bisa serupa, tetapi cakrawala seseorang yang justru akan membedakan pemaknaan setiap orang terhadap tradisi atau teks; mempersempit atau

memperluas; membawa sesuatu yang lama atau menghadirkan makna-makna yang baru. Perluasan cakrawala dilakukan melalui kesadaran menghadirkan prasangka individu pembaca atau penafsir, kesiapan bersanding dengan prasangka-prasangka lain yang paling kontradiktif sekalipun, lalu berpartisipasi mendialogkan berbagai prasangka tersebut dalam tuntutan kekinian yang melingkari setiap individu. Makna-makna baru akan lahir dengan sendirinya, sekalipun masih menggunakan tradisi yang lama, atau terminologi yang serupa.

Pada kenyataannya, taklid kalangan anak-anak Muda NU di belakang Gus Dur misalnya telah memporak-porandakan kamus modernis dikhotomis, dimana taklid dipersepsi sebagai kejumudan dan kemunduran sementara ijtihad sebagai pencerahan dan kemajuan. Kemandulan analisis modernis ini, yang kemudian memaksa kalangan tertentu hanya mampu mendeskripsikan ide-ide anak-anak muda NU dengan ungkapan 'kebablasan', karena tidak mampu memahami fenomena 'taklid' yang justru melahirkan kebaruan dan pencerahan yang berbeda.

Dalam kerangka analisis hermeneutika filosofis yang dikembangkan Gadamer, 'taklid' ini sesungguhnya telah dipahami para pengamal,

pembaca, penafsir dan pengkritiknya sebagai proses ‘mengada’ masing-masing dalam konteks sosial kekinian masing-masing. Makna masing-masing lahir dari horizon tertentu dengan prasangkanya masing-masing, pada saat yang sama merupakan ‘*a fused of horizons*’ dalam horizon tersebut. Taklid, tidak *melulu*, dan tidak mungkin, dengan melihat pada kenyataan kekinian, hanya ‘membuta’ pada teks atau tradisi semata. Taklid kalangan tradisionalis, harus dilihat sebagai proses mereka ‘mengada’ dalam pasar gagasan pemikiran Islam di Indonesia.

Taklid adalah interpretasi tradisi, di antara interpretasi-interpretasi lain di panggung kekinian pemikiran Islam Indonesia, yang dalam analisis Gadamer berkait erat dengan horizon masing-masing. Sebagai interpretasi, ia bisa menyempit dan dangkal, tetapi juga bisa meluas dan membukakan makna-makna baru. Tetapi makna baru hanya muncul, dalam versi Gadamer, jika sang pengamal, pembaca, penafsir, atau pengkritik, secara sadar mengenali prasangkanya sendiri, prasangka dalam kesejarahan teks, dan prasangka paling asing sekalipun dari teks maupun pembaca yang lain, mendialogkan semua itu dan melahirkannya dalam “makna baru” untuk konteks kekiniannya. Itupun harus

disadari, bukan sebagai “makna yang setepat-tepatnya”, tetapi tidak lebih dari “memahami” saja.

Dan sepertinya, demikianlah Gus Dur “mengada” ketika mendekati “taklid” kalangan tradisionalis sebagai sebuah “teks sosial”. Pendekatan itu dilakukan dalam tarik ulur dialog yang tidak menafikan ‘taklid’ sama sekali, sehingga perlu menggantikannya dengan ‘ijtihad’ yang baru, tetapi tidak juga membiarkan sebagaimana adanya. Di tangan Gus Dur, ‘taklid’ tidak lagi bisa dituduh sebagai yang mengekang atau membutakan. Siapapun tidak bisa menuduh ini. Pada saat yang sama, ‘ijtihad’ di seberang sana menjadi redup dan tidak terlihat mendatangkan hal-hal yang baru dalam cakrawala pemikiran Islam *a la* ‘taklid’ Gus Dur. Dalam tekstualitas Gus Dur, taklid dan ijtihad sama sekali tidak lagi bisa dipandang dalam oposisi dua arah (*binary opposition*), dimana yang satu membelenggu-membutakan dan yang lain membuka-mencerahkan. Tidak bisa.

Ketika publik banyak yang menilai tekstualitas Gus Dur sebagai sesuatu yang nyleneh, kontroversi, atau misteri, sesungguhnya dalam pendekatan hermenetika filosofis Gadamer bisa dijelaskan sebagai proses partisipasi dan

negosiasi yang paripurna terhadap dua kutub yang dipersepsikan berlawanan. Tekstualitas Gus Dur, dalam amatan banyak pihak, telah menjembatani-memadukan sesuatu yang tidak rasional dengan yang rasional, Timur dengan Barat, pesantren dengan perguruan tinggi, sipil dengan militer, rakyat dengan istana, orang kampung dengan orang perkotaan, kultural NU dan struktural NU, dan kutub-kutub sosial yang lain.

Tentu saja, bagi mereka yang *keukeuh* untuk duduk di kutub yang satu saja akan merasakan panas dengan tekstualitas Gus Dur, tetapi tidak bagi mereka yang ingin bergerak dari satu kutub ke kutub yang lain, atau balik dari suatu kutub ke kutub awal, sebagai proses ‘mengada’ dalam panggung kemanusiaan. Kejujuran prasangka diri, kesediaan menerima dan mendasarkan pada tradisi, kesiapan terhadap keganjilan prasangka orang lain, kesediaan untuk dialog, partisipasi dan negosiasi antar berbagai prasangka dan makna yang berlawanan, semua ini adalah syarat-syarat dasar dalam interpretasi hermenetika filosofis Gadamer. Dan semua itu hadir dan mencari karakter hermenetik dari tekstualitas Gus Dur dalam setiap tindakan yang dilakukan dan wacana yang dikembangkan.

Begitupun “*Apa Jare Gus Dur*”, tidak bisa hanya dipahami sebagai ‘taklid buta’ dalam tekstualitas Gus Dur yang lebih general. Setidaknya, dalam konteks politik dimana teks tersebut lahir, ia bisa dipandang sebagai komunikasi politik ‘yang paling mungkin’ di kalangan tradisional di antara jargon-jargon politik nasionalis dan Islamis yang saling berlawanan satu sama lain. Teks ini jika dipahami lebih luas, adalah simbol sederhana dari perjuangan politik Gus Dur, yang negarawan sekaligus Islami. Di satu sisi, beliau membela Pancasila dengan gigih, mengedepankan persatuan dan kesatuan nasional tanpa lelah, dan mengadvokasi semua komponen bangsa yang dipinggirkan karena mereka minoritas tanpa rasa takut sedikitpun. Dan di sisi lain, adalah pengamal Islam garda depan, khususnya Islam tradisional dengan segala atribut dan simbol-simbolnya; ziarah kubur, shalawat Nabi Saw, tahlil dan doa.

Apa Jare Gus Dur, yang di Cirebon dipopulerkan Kyai Ibnu Ubaidillah Syathori pengasuh PP Dar al-Tauhid Arjawinangun-Cirebon, adalah cita rasa kalangan tradisional akar rumput dalam memaknai karakter misterius dari tekstualitas politik Gus Dur. AJGD merupakan bentuk penerimaan sekaligus pemaknaan kalangan tradisional terhadap ijtihad politik Gus

Dur yang kerap dipersepsi banyak orang sebagai membingungkan-menegangkan, jurus dewa mabuk, atau politik tebar jala ketika beberapa tokoh justru hanya pasang pancing dalam panggung politik Indonesia. Sebagai bentuk interpretasi, sesungguhnya lebih melekat pada horizon masing-masing individu *ketimbang* pada diri Gus Dur sendiri sebagai teks yang ditafsir. Karena itu, tidak menutup kemungkinan bagi banyak individu yang awalnya dekat dan berada dalam ‘lingkaran politik praktis Gus Dur’ sebagai bentuk lain dari tekstualitas AJGD, kemudian memisahkan diri sembari tetap ‘mengada’ dalam proses interpretasi tekstualitas Gus Dur.

Individu-individu seperti KH. Hasyim Muzadi Ketua Tanfidziah PBNU dan Muhamin Iskandar Ketua Umum PKB versi Ancol, dalam pemahaman literal mereka telah memisahkan diri bahkan berkonfrontasi dengan teks politik maupun pribadi Gus Dur. Tetapi dalam berbagai kesempatan, mereka masih mencoba menjelaskan diri mereka sebagai interpretasi tekstualitas Gus Dur yang melahirkan ragam makna. Kalangan tradisional NU sering diperdengarkan bahwa ‘perpecahan mereka’ dengan Gus Dur adalah salah satu skenario politik Gus Dur sendiri, yang menginginkan berbagai sekoci tersedia bagi

kalangan tradisional. Pada saat berita kewafatan Gus Dur meluas, KH. Hasyim Muzadi masih harus mengklarifikasi bahwa persetujuan antara dirinya dengan Gus Dur yang dipersepsikan banyak pihak sebagai kesalahan, begitupun Muhaimin Iskandar yang mengklaim sebagai pewaris idiologis dari Gus Dur.

Baik KH. Hasyim Muzadi maupun Muhaimin Iskandar, maupun yang lain, terjebak dalam tekstualitas AJGD, yang sesungguhnya merupakan interpretasi masing-masing dalam kancan horizon yang masing-masing juga berbeda dari yang lain. Dalam interpretasi ini pasti ada prasangka hermenetik yang dibawa teks AJGD sendiri, maupun masing-masing penafsir. Dalam konteks hermenetika filosofis Gadamer; persoalannya adalah; apakah mereka sadar dan jujur dengan prasangka masing-masing; apakah mereka bersedia berdialog dengan prasangka-prasangka lain yang paling konfrontatif sekalipun; adakah kehendak mereka untuk melahirkan makna-makna baru dari dialog, negoisasi dan partisipasi pemaknaan; atautkah mereka tidak pernah bergeser dari prasangka masing-masing dan merapat hanya pada dan untuk kepentingan praktis masing-masing?

Ungkapan SBY, bahwa Gus Dur adalah

“Bapak Pluralisme” adalah bukti dari mengakarnya tekstualitas AJGD di kalangan nasionalis, tidak hanya kalangan tradisional NU. Ungkapan ini, dan sikap dan tindakan kenegaraan lain yang dimainkan SBY, adalah bentuk lain dari keterikatan dengan teks-teks yang telah dilahirkan dan dipromosikan seorang Gus Dur; *Apa Jare Gus Dur*. Tetapi pada saat yang sama, ungkapan itu tidak lain hanyalah interpretasi atas tekstualitas AJGD karena SBY berada dalam horizonnya sendiri. Persoalan hermenetisnya adalah; apakah SBY sadar dengan prasangka hermenetik yang melekat pada teks ‘pluralisme Gus Dur’? Bersediakah ia jujur dengan prasangka tersebut dan bersedia mengundang dan berdialog dengan MUI yang berada di seberang prasangka tersebut? Ataukah ia hanya membawa prasangkanya sendiri dan untuk kepentingannya sendiri ketika menyematkan ‘Bapak Pluralisme’ terpisah dari tekstualitas Gus Dur? Lalu bersediakah juga ia jujur dengan prasangka pragmatis ini?

SBY sesungguhnya memiliki momentum untuk berpartisipasi dalam perkembangan makna-makna baru bagi kepentingan pluralisme di Indonesia. SBY bisa menggulirkan dialog dengan mereka yang paling kontra terhadap pluralisme atau mereka yang paling pro sekalipun, sebagai

proses ‘mengada’ dalam tafsir dan interpretasi peradaban kemanusiaan khususnya Bangsa Indonesia. Tanpa kejelasan prasangka hermenetis yang demikian, tidak menutup kemungkinan kecurigaan berbagai pihak bahwa ‘Bapak Pluralisme’ yang disematkan, belasungkawa yang diucapkan, prosesi pemakaman kenegaraan yang diupacarakan, adalah tidak lain lahir dalam horizon kepentingan politik pragmatis, dimana SBY sedang digempur habis-habisan oleh skandal Bank Century. Horizon ini yang melahirkan berbagai prasangka hermentis SBY, di antaranya dengan menabalkan ketokohan pluralisme terhadap Gus Dur. Tentu saja, prasangka saya ini bisa jadi salah.

Aktivis gerakan pro pluralisme Indonesia adalah kelompok yang justru sedang berpesta pora, karena memperoleh momentum yang sangat tepat untuk mengeksploitasi isu pluralisme di berbagai media masa dan dalam berbagai kesempatan. Mereka adalah kelompok yang paling *ketara* berkait erat dengan tekstualitas AJGD, khususnya isu pluralisme. Mereka seperti para pejuang yang baru memperoleh kesempatan untuk membidik dan membuat tiarap musuh-musuh pluralisme di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan acara penghormatan atau doa atas Gus

Dur, pluralisme didengungkan kembali sebagai bentuk harapan sekaligus kekhawatiran karena kewafatan sang maha guru pluralisme. Semua ini adalah bentuk interpretasi terhadap tekstualitas Gus Dur yang pluralis, dimana hermeneutika filosofis mensyaratkan prasangka yang jujur dari individu-individu para penggerak, dan kesediaan untuk menerima prasangka-prasangka lain yang paling bersebrangan sekalipun.

Pluralisme di Indonesia memerlukan dialog lagi yang lebih segar, di antara mereka yang pro dan kontra, tidak sekedar tuduhan atau klaim sebagai sesuatu yang datang dari, dihadirkan dan didukung Barat atau sesuatu yang benar-benar bertentangan keras dengan nilai-nilai lokal dan keislaman. Hermeneutika filosofis tidak berbicara salah benar, atau tepat dan tidak tepat dalam hal interpretasi pluralisme untuk konteks Indonesia. Tetapi lebih pada upaya semua pihak untuk bersedia mengenal prasangka masing-masing, menahan diri dari prasangka tersebut ketika mengenali prasangka lain yang berbeda, dan bersedia berdialog dan bernegosiasi dengan prasangka yang paling bersebrangan. Dialog dalam kesejarahan ‘mengada’ suatu teks pada konteks masing-masing, maupun dalam kesejarahan masing-masing individu dari setiap

kita yang terlibat dalam konteks kekinian kita. Interpretasi dialogis seperti ini, yang dianggap sebagai partisipasi untuk melahirkan makna-makna baru dari pertemuan dan percampuran berbagai prasangka dari horizon yang berbeda dan menggabung (*a fused of horizons*).

Dalam amatan saya, prosesi penguburan Gus Dur adalah puncak dari tekstualitas “*Apa Jare Gus Dur*” yang paling prima. Khidmat upacara kenegaraan hadir dalam kesatuan yang menggabung, terkadang bersahutan dan berebut, dengan gema syahdu keislaman tradisional. Derap tentara yang mengiring dengan simbol-simbol resmi negara bersatu padu dengan ribuan pelayat fanatis yang hanya percaya dan yakin dengan simbol-simbol agama. Ini tidak pernah, dan mungkin tidak akan terjadi, dalam tekstualitas selain Gus Dur. Semua larut dalam tekstualitas AJGD, dan setiap pihak berebut dan merasa paling otoritatif dalam menafsirkan: siapakah Gus Dur; pahlawan negara atau wali Islam. sebagai

Salah seorang peziarah kuburan Gus Dur, ketika diwawancara salah satu media nasional mengenai kehendak banyak pihak untuk mengangkat Gus Dur sebagai pahlawan nasional, dengan antusias menjawab: tidak setuju. Alasannya, Gus Dur di atas semua pahlawan

nasional, yaitu wali Allah. Ini adalah pilihan lain dalam arus yang sama dari tekstualitas “*Apa Jare Gus Dur*”, yang menghadirkan sesuatu yang berbeda dari kehendak masif kepahlawanan Gus Dur, atau sebaliknya mereka yang sama sekali tidak tergerak sedikitpun bahkan kontra dengan ide kepahlawanan Gus Dur.

Jika ditengarai diantara penuntut kepahlawanan adalah para pengkhianat cita-cita Gus Dur, sebagaimana disinyalir Kang Maman Imanul Haq dalam acara In Memoriam Gus Dur di STAIN Cirebon, penolakan sang peziarah fanatik tadi setidaknya menginspirasi makna lain dari ‘Apa Jare Gus Dur’ agar kepahlawanan tidak berhenti pada pengesahan ‘kertas negara’ yang manfaatnya hanya melingkar di antara mereka yang memiliki kepentingan politis. Sebagaimana wali yang memancar barakahnya ke segenap rakyat, kepahlawanan Gus Dur harus dipraktikkan negara melalui penghormatan segala perbedaan, pembelaan warga minoritas dan penerapan nilai-nilai Islam dan demokrasi yang intinya mendahulukan kepentingan rakyat, karena negara ada untuk rakyat bukan sebaliknya.

Kewafatan Gus Dur adalah momentum setiap upaya tafsir atas AJGD; apakah akan meluas atau menyempit; mendatangkan makna-

makna baru atau berputar pada prasangka masing-masing semata tanpa pernah bergerak menjangkau prasangka-prasangka lain. Jika jawabannya yang kedua, maka tekstualitas AJGD masih belum bergeser jauh dari prasangka historis yang masih melekat pada teks Gus Dur itu sendiri. Para penafsirnya, baik dari kutub kultural maupun struktural, masih belum mencoba menggerakkan tafsir mereka masing-masing untuk melahirkan makna-makna baru dalam konteks kekinian yang sesungguhnya semakin kompleks dan dinamis. Karena kompleksitas dan dinamika kekinian inilah, justru dibutuhkan dialog-dialog yang paripurna dalam mengenali dan menjangkau berbagai prasangka dengan jujur.

Dialog prasangka ini dalam proses interpretasi, bukan untuk menemukan makna yang tepat suatu teks, mengenai orang lain atau pluralisme itu sendiri, tetapi lebih hanya untuk 'memahami' saja, dimana setiap individu sesungguhnya sedang 'mengada' di antara individu-individu yang lain yang juga 'mengada' dalam arena prasangka historis masing-masing, yaitu cakrawala-cakrawala yang menggabung. Dialog seperti ini akan melahirkan makna-makna baru untuk konteks kekinian peradaban kemanusiaan Bangsa Indonesia. ☞

TAFSIR ISLAM

Perspektif Gus Dur

Hajam, MA

Cendekiawan Islam Iran Ali Shariati (1933-1977) pernah menulis dalam makalah kecil yang berjudul *A Glance at Tomorrow's History*, seperti yang dikutip Jalaludin Rahmat (Tempo, 19 Juli 1986: h. 90). Menurutnya kita ada bisa menjenguk sejarah masa depan dengan melihat masa kini. Menurut Ali Shariati, pada setiap zaman selalu ada paham dominan yang dianut oleh cendekiawan elite dan ada paham *devian* yang dipegang oleh cendekiawan elit. Pada periode berikutnya, Paham *devian* itu akan menjadi paham dominan. Muncul lagi paham *devian* yang baru, yang selanjutnya akan menjadi paham dominan pada periode berikutnya. Dan begitu seterusnya. Paham dominan itu boleh disebut sebagai roh zaman atau paradigma.

Jalaludin Rahmat membuktikan Tesis Ali Shariati dengan melihat pada Abad pertengahan, kelompok terpelajar terdiri dari para pendeta dan ahliagama. Paham dominan waktu itu ialah memuja kitab suci dan meremehkan sains. Beberapa orang pendeta menyimpang dari tradisi itu. Mereka memuja sains. Mereka yang menyimpang antara lain Kepler, Galileo, Copernicus, Servetus. Zaman berganti. *Renaissance* menampilkan ilmuwan-ilmuwan yang memuja sains dan mencemoahkan agama. Kini sains dan teknologi, rasio dan empirisisme, di agungkan. Sains dianggap sebagai satu-satunya ukuran kebenaran. Sainisme inilah yang menjadi paham dominan masa kini. Tetapi pada saat yang sama, kita mendengar suara-suara sumbang yang mengkritik sains. Guenon, Carrell, Max Planck, Heidenberg dalam posisi mereka sebagai ilmuwan mengajak orang kembali untuk meragukan asumsi sains dan memulai penghayatan agama.

Kalau tesis Shariati itu benar, maka Gus Dur mewakili satu zaman dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam di Indonesia. Ketika Gus Dur meneriakkan desakralisasi kekuasaan, penolakan Islam sebagai ideologi, Demokrasi, Pribumisasi Islam, Pluralisme, penerimaan Pancasila sebagai dasar untuk memperjuangkan

aspirasi ummat Islam dan Pancasila sebagai dasar bernegara dan berbangsa sudah menjadi harga mati, Gus Dur dengan pemikirannya itu telah melawan arus, ia telah menjadi *devian*. Paham-paham tersebut belakangan menjadi paham dominan sehingga tidak lepas dari kritikan dan tantangan dari kelompok muslim lain yang biasa bermain dengan pendekatan tafsir tekstual, namun Gus Dur tetap komit dan istiqomahnya terhadap ijtihad keagamaan yang diyakininya dengan ragam disiplin ilmu dan penelitian ilmiah secara metodologis.

Abdurahman Wahid, mempunyai pikiran-pikiran keagamaan yang sebanding dengan Nurchalish Madjid, Munawir Sadzali ide-ide mereka terfokus pada kenyataan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan panduan-panduan kehidupan secara detail, karenanya Ijtihad menjadi sangat penting maknanya sebagai mekanisme untuk melakukan interpretasi atau reaktualisasi atas doktrin ajaran Islam. Dalam hal ini, adalah perlu bagi orang-orang Islam untuk mempertimbangkan pentingnya aspek-aspek lokal, kontekstual, dan temporal, dengan demikian kehidupan keagamaan komunitas muslim Indonesia tidak akan tercabut dari nilai-nilai budaya mereka sendiri.

Dalam konteks seperti ini, Abdurahman Wahid muncul dengan gagasannya tentang (1) Islam sebagai faktor komplementer kehidupan sosial budaya dan politik Indonesia, dan (2) "*Pribumisasi Islam*". Dalam alur pikiran yang serupa Munawir Syadzali, mengemukakan perlunya para pemikir muslim melakukan ijtihad secara jujur agar Islam terasa lebih resverensive terhadap keperluan-keperluan riil masyarakat. Perhatian Munawir memang lebih banyak difokuskan pada masalah bagaimana memahami syariat Islam dalam konteks keadilan yang lebih empiris. Dipengaruhi antara lain oleh keberanian dan kejujuran Umar Ibn al-Khathab dalam melakukan Ijtihad, Munawir mengajarkan sebuah proposisi, bahwa harus ada ukuran-ukuran yang tepat untuk memahami ajaran Islam, percaya kepada dinamika dan vitalitas hukum Islam, ia berpendapat bahwa para pemikir muslim harus berani melakukan proses reaktualisasi ajaran Islam agar antikulasi keislaman kita lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.

Kemudian Dr Syafi'i Anwar yang dikutip Zuhairi Misrawi dalam kata pengantar buku *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*, karya Gus Dur. Pernyataan tersebut menjadi kata kunci dan bingkai untuk memotret keseluruhan pe-

mikiran Gus Dur tentang Islam dalam kaitannya dengan isu-isu mutakhir, seperti nasionalisme, demokrasi, pluralism, hak asasi manusia, kapitalisme, sosialisme, dan globalisasi. Sebagai seorang cendekiawan, Gus Dur merupakan tokoh Muslim yang kaya talenta. Pembahasannya tentang Islam selalu mampu menerobos dan menyentuh wilayah-wilayah yang sering kali “tidak terpikirkan” oleh para ulama pada umumnya. Gus Dur mampu menghadirkan Islam dari konteks kehadirannya hingga zaman kini; dari nuansa tekstual hingga nuansa kontekstual; dari aspek struktural hingga kultural. Di sinilah, membedah pemikiran Gus Dur menjadi amat penting karena akan mengantarkan kita untuk menafsirkan Islam dari sisi yang lebih komprehensif, tidak bersifat monolitik.

Islam awal kelahirannya dalam keadaan berdiri sendiri belum ada embel- embel di awal atau akhir kalimatnya dan masih tunggal baik yang terdapat dalam teks al-Qur'an maupun Hadist dari Rasulluah SAW, sehingga Islam tunggal hanya berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini Nabi Muhammad SAW sebagai Muffasir tunggal dalam menafsirkan Islam belum muncul muffasir lain, Nabi Muhammad SAW dipandang oleh Ummat Islam sebagai orang yang

memiliki otoritas penuh untuk menyampaikan pemahaman Islam dan memberi jawaban langsung terhadap problem-problem yang dihadapi umat Islam yang berkaitan dengan relevansi Islam dalam kehidupan keseharian seperti hukum-hukum Ibadah dan Muamalah. Islam di tangan Nabi SAW belum tercampur oleh pemahaman baru dan terjaga dari sistem Polarisasi keragaman pemikiran.

Tafsir Islam menurut Gus Dur harus disesuaikan dengan konteks sekarang yang keadaan problemnya jauh berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW, maka Islam tidak lagi tunggal, Islam meniscayakan banyak tafsir agar Islam sebagai *Shalihu li Kulli Zaman wal Makan* tidak kehilangan relevasinya. Tafsir terhadap Islam tidak bisa dimonopoli oleh siapapun dan kelompok manapun, Islam tetap satu kalau dilihat dari sumber-sumber kepercayaan dalam teks suci, tapi Islam dalam tatanan realitasnya perlu banyak penafsiran, semakin banyak Islam ditafsirkan dari berbagai dimensi, maka Islam akan semakin berkualitas eksistensinya. Islam harus diposisikan sebagai proyek harapan yang tidak pernah habis bagi umat manusia dalam setiap fase sejarah, Islam bagaikan Samudra yang tak bertepi, semakin didekati akan semakin jauh.

Dalam hal ini Sejarah telah menjadi saksi betapa perbedaan dalam menafsirkan Islam pernah berlangsung Seperempat abad dari masa Nabi Muhammad SAW. Saling sengketa, bahkan tidak tanggung-tanggung sempat saling menumpahkan darah di antara komunitas Islam. Kasus hitam yang tidak telupakan adalah tiga dari empat Khalifah pertama tewas terbunuh. Peristiwa itu telah melahirkan polarisasi Islam, ada Islam Khawarij, Islam Murjiah, Islam Qadariyah, Islam Mu'tazilah, Islam Jabariyah dan Islam Asy'ariyah. Masing-masing Aliran tersebut saling sengketa dalam memposisikan Islam dalam perspektif Teologis, bahkan merambah ke wilayah Islam Politis. Aliran-aliran Islam klasik tersebut telah membawa pengaruh besar terhadap perjalanan dan dinamika pemikiran Islam berikutnya.

Satu Abad kemudian setelah Islam tersebar ke berbagai wilayah dunia, lahirlah Aliran Sunni dan Aliran Syi'ah. Dalam Aliran Sunni lahir Mazhab-Mazhab besar seperti yang kita kenal Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali dan masih banyak Mazhab lain. KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, tokoh dan pendiri NU seperti yang sering dikutip Prof. Dr. H. Nurcholish Madjid (Cak Nur) menyebutkan Ribuan perbedaan pendapat dalam empat Mazhab

dalam bidang Fiqh Islam. Perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Malik jumlahnya tidak kurang dari Empat Belas Ribu masalah, Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik jumlahnya tidak kurang dari Enam Ribu masalah, demikian juga antara Imam Ahmad Ibn Hanbal dan gurunya Imam Syafi'i terdapat banyak perbedaan dan selisih faham, namun mereka semua tetap bersahabat dan menggalang persaudaraan tanpa umpatan atau saling menyesatkan apalagi saling mengkafirkan (KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, *al Tibyan Fi al Nahy 'an Muqatha'at al Arham Wa at Aqarib Wa al Ikhwan*, 1360 H: 11).

Perbedaan penafsiran Islam dengan seiring perubahan zaman terus merambah dari Teologi Islam, Fiqh Islam, Politik Islam ke Islam Tasawuf. Islam Tasawuf melahirkan dua mazhab yaitu Mazhab Sunni dan Mazhab Falsafi. Dua Mazhab ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendekatan dalam menafsirkan Islam secara esoteris.

Di Indonesia kita mengenal dua organisasi besar Islam, NU dan Muhammadiyah dalam beberapa hal dua organisasi ini kerap terjadi perbedaan dalam pemahaman tentang Islam, hal ini karena berbeda metode dan sosial-kultur dalam pengambilan keputusan hukum. Sekedar

contoh kasus yang sering terjadi perbedaan ketika menentukan awal waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha padahal berada dalam batas geografis yang sama. Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah ketika terjadi perbedaan selalu menyatakan bahwa itu hanyalah *Khilafiyah*, yang lebih lunak lagi bahwa perbedaaan itu hanya perkara *furuiyyah* bukan perkara prinsip agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat bawah.

Perkembangan penafsiran Islam menemukan momentumnya ketika bermunculan pemikiran Islam dengan variasi *trend* yang beragam, ada Islam fundamentalis, Islam Tradisionalis, Islam Reformistik, Islam Postradisionalis. Versi lain menyebutkan Islam Revivalis, Islam Moderanis, Islam Neo-revivalis, Islam Neo-moderis, Islam Liberal, dan akan muncul Islam – Islam lain.

Trend pemikiran Islam Gus Dur telah turut andil dalam memberikan penafsiran dan pemahaman tentang relevansi Islam kepada umat Islam dan ini sebagai bukti bahwa Islam tidak tunggal, banyak tafsiran, Islam terbuka untuk ditafsirkan oleh siapapun sesuai dengan zaman dan lingkungan sosialnya. Pintu Ijtihad untuk menafsirkan Islam terbuka lebar. *Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan penghargaan kepada orang yang melakukan Ijtihad, apabila*

melakukan Ijtihad terjadi kesalahan maka dapat apresiasi satu pahala, dan bila benar maka dihargai dua pahala.

Islam terlahir bukan diperuntukan masa lalu saja, Islam selalu ada depan kita, nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai masa depan. Tidak ada monopoli Islam, Islam milik siapa saja. Islam untuk siapa saja. Menurut Prof. Dr Mukti Ali Bahwa Islam bukan agama monodimensi dan Islam bukan agama yang hanya didasarkan pada *intuisi mistis* manusia dengan Tuhan, ini hanyalah satu bagian dari sekian banyak dimensi Islam. Islam bisa ditafsirkan dengan berbagai pendekatan, Islam bisa dikaji dengan pendekatan interdisipliner agar Islam bisa dipahami komprehensif dan Islam menjadi semakin kaya makna.

Islam ditafsirkan secara tunggal justru akan mempersempit ruang lingkup Islam itu sendiri, yang pada gilirannya nanti akan menggagalkan statement Nabi Muhammad SAW. *Al-Islam Yu'la wa La Yu'la Alaihi* (Islam adalah agama tinggi dan tidak bisa ditinggikan oleh yang lain). Berbagai macam tafsir tentang Islam akan menjelma seperti toko yang menyediakan berbagai jenis barang dan orang akan menyerbu sesuai dengan selera dan kebutuhannya.

Sikap yang tidak perlu ada dan layak

dienyahkan dalam menafsirkan Islam adalah sikap *Superior*, sikap ini akan melahirkan bentuk "pembesaran" ke-Aku-an dan egoisme serta memandang remeh kepada orang lain, yang berbahaya dari sikap ini terjadinya monopoli Islam secara membabi buta dengan merasa dirinya paling layak dan menganggap satu-satunya orang yang pantas dan bisa memahami Islam, serta menganggap sikapnya paling benar. Orang yang hanya mau mengakui kebenaran tafsir dan pendapat dari golongan atau kelompoknya sendiri, bahkan orang lain dipaksa untuk mengikuti kebenaran yang mereka klaim, orang lain dipandang sesat dan kafir tak berpijak pada kebenaran.

Yang perlu dikedepankan dari berbagai perbedaan penafsiran Islam adalah memunculkan sikap kritis, dialogis dan terbuka untuk menerima kebenaran orang lain, serta sikap keberanian kita untuk membuka diri terhadap perbedaan, tetapi juga sekaligus berani untuk diperkaya keilmuannya oleh orang lain kendatipun terjadi perbedaan, perbedaan di kalangan Ummat adalah rahmat, asal perbedaan tidak dikemas dalam bentuk politik dan kekuasaan, hal ini bisa berbahaya.

Perbedaan penafsiran atau pemahaman tidak selayaknya diteruskan pada level peseteru-

an yang mengakibatkan permusuhan. Tidak perlu ada korban timbul lagi karena perbedaan pemahaman. Setiap orang memiliki hak berbeda untuk menentukan pendapat mana yang lebih cocok sesuai dengan keyakinan argumentasinya. Secara psikologis setiap manusia sudah pasti memiliki rasa suka dan duka. Setiap orang mengikuti suatu pendapat dengan dalil yang diyakininya akan dapat membangkitkan rasa bahagia dalam dirinya dan dengan syarat pendapat itu tidak berekses untuk mengganggu ketentraman orang lain, karena itu pendapat tak perlu dipaksakan kepada orang lain untuk menerimanya.

Kemudian Paradigma pemikiran Gus Dur secara substantif mendekati paradigma pemikiran Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Hasan Hanafi dalam menangkap hakikat Islam yang lebih mendahulukan kemaslahatan atau kebutuhan aktual masyarakat atau dalam kontek kebhinekaan di Indonesia bahwa kehadiran Islam untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai universal. Gus Dur dalam menafsirkan Islam tidak lepas dari metoda hermeneutika. Hermeneutika merupakan salah satu tema penting dalam pemikiran Gus Dur, bahkan Ia menjadi bagian integral dari wacana pemikirannya baik dalam

filosof, kalam, politik, agama untuk memahami teks. Gus Dur adalah salah seorang di antara tokoh yang menggunakan hermeneutika sebagai metodologi untuk memahami teks keagamaan dan realitas social, meskipun hermeneutik yang dikembangkannya dipengaruhi oleh hermeneutik kontemporer Barat.

Contoh penggunaan Hermeneutika dalam model sikap keislaman, menurut Gus Dur yang perlu dipraktikkan dalam pergaulan sehari-hari ada tiga model, *pertama*, **Islamku**, yaitu keberislaman yang berlandaskan pengalaman pribadi perseorangan. Model ini sebagai sebuah pengalaman, pandangan keislaman seseorang tidak boleh dipaksakan, kepada orang lain. Jika dipaksakan, hal itu akan mengakibatkan munculnya *dislokasi* pada orang lain, yang dapat membunuh keindahan orang lain. *Kedua*, **Islam Anda**, yaitu keberislaman yang berlandaskan keyakinan. Dalam hal ini, harus diakui bahwa setiap komunitas mempunyai keyakinan tersendiri terhadap beberapa hal tertentu. Contoh dalam model ini seperti pandangan yang berbeda antara NU dan Muhammadiyah, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menebarkan kekerasan di antara satu kelompok terhadap kelompok yang lain. *Ketiga*,

Islam Kita, yaitu keberislaman yang mempunyai cita-cita untuk mengusung kepentingan bersama kaum muslimin. Model ini Gus Dur menawarkan pemikiran pentingnya memahami Islam dalam konteks kebangsaan untuk membangun perdamaian dengan berbagai kelompok, dan keadilan social sehingga terwujud toleransi dan jauh dari kekerasan.

Beberapa pemikiran Gus Dur di atas menyebabkan Greg Barton, Fachri Ali, dan Bakhtiar Efendi memasukan Gus Dur sebagai tokoh Neo-Modernisme Islam, di mana gerakan pemikirannya mengandung ciri-ciri. *Pertama*, progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. *Kedua*, sikap neo-modernis Islam mengafirmasi semangat “sekularisasi” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu upaya titik temu antara Islam dan negara. *Ketiga*, neo-modernis banyak mewarisi semangat pemikiran rasionalis dengan melakukan ijtihad secara konsektual. *Keempat* neo-modernis pemikirannya lebih banyak mengedepankan pemahaman Islam yang terbuka, inklusif, dan liberal. Gus Dur dalam hal ini telah sukses mengkampanyekan dan mengafirmasi pluralisme masyarakat dan menekankan signifikan toleransi dan harmoni

dalam hubungan antar-komunal, baik di Indonesia maupun di seluruh jagad raya ini.

Kini Ulama sekaligus ilmuwan pluralis, inklusif, dan liberalis itu telah pergi untuk selama-lamanya, namun warisan pandangan keagamaan dan kebangsaannya masih tetap hidup dan bagi generasi selanjutnya berkewajiban untuk meneruskannya. Gus Dur telah meletakkan fondasi yang cukup kuat bagi proses peradaban, pemikiran, dan sejarah baru di Indonesia modern untuk abad ke depan, Fachri Ali (1996: h. 120), yang pernah menjadi Mahasiswa Gus Dur di Fakultas Adab IAIN Jakarta tahun 1970-an mengatakan *"Pastilah terlalu mengada-ada bila mengajukan pertanyaan semacam ini: Apa jadinya Islam Indonesia dewasa ini tanpa Nurcholish Madjid dan Gus Dur?"* ❧

GUS DUR Sang Ice-breaker

Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D

Lektor pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan
Wakil Pengasuh Pesantren Al-Mutawally Cilimus,
Kuningan

Pendahuluan

Meninggalnya KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 30 Desember 2009 selain meninggalkan kesedihan bagi bangsa ini karena kehilangan salah satu putra terbaiknya, juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana kelanjutan dari warisan pemikiran dan gerakannya yang sangat monumental tersebut. Sebagai upaya untuk menjawab hal kedua di atas, kiranya pantas jika mencoba untuk merenungkan salah satu pemikiran dan gerakan Gus Dur tersebut.

Salah satu yang paling menonjol dari pemikiran dan gerakan Gus Dur adalah bahwa beliau berani untuk berbeda dan menentang arus

umum yang ada pada masanya. Sikapnya untuk berani berbeda itu bagi saya lebih tepat disebut sebagai alternatif. Dalam artikel pendek ini, saya akan menyoroti pemikiran alternative Gus Dur pada ranah politik bangsa pada tiga dekade terakhir dimana Gus Dur secara langsung terlibat dalam politik secara intensif dibandingkan dengan dekade sebelumnya dimana Gus Dur lebih terlibat dalam wacana-wacana saja.

Dalam mengulas pemikiran alternative Gus Dur dalam ranah politik ini, tulisan ini akan secara garis besar memfokuskan pada tiga peristiwa penting antara lain asas tunggal, pendirian Forum Demokrasi (Fordem) dan pendirian PKB. Namun sebelum membahas tiga hal tersebut, kita mulai terlebih dahulu mengulas secara sekilas tentang sosok Gus Dur.

Sekilas tentang sosok Gus Dur

KH. Abdurrahman bin Abdul Wahid bin Hasyim Asy'ari atau lebih dikenal sebagai KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah anak pertama KH. A. Wahid Hasyim Asy'ari sekaligus cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari sisi geneologi, beliau mewarisi

kharisma sebagai pemimpin politik dan agama yang sangat dihormati di Indonesia. Kakeknya adalah pemimpin agama paling agung pada awal hingga pertengahan abad ke 20. Beliau adalah pendiri utama Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia bahkan dunia dengan jumlah pengikut berjumlah lebih dari 30-an juta yang saat ini tidak tersebar di Indonesia tetapi juga di beberapa negara seperti Mesir dan Belanda. Namanya menempati tempat paling tinggi dalam hirarki kepemimpinan NU sepanjang masa.

Sementara itu, ayahnya adalah seorang pemimpin nasional yang sangat dihormati. Karenanya, pendapatnya sangat berpengaruh seperti terlihat pada perumusan Piagam Jakarta dan penghapusan tujuh kata utama dalam Piagam Jakarta yang legendaris. Beliau juga mantan Menteri Agama selama beberapa periode. Melihat akar keturunan ini, tidak mengherankan jika Gus Dur tumbuh dengan rasa percaya diri yang tinggi ditunjang oleh kecerdasannya yang luar biasa. Dengan dua modal tersebut, Gus Dur pada masa selanjutnya mampu tampil sebagai pemimpin agama dan politik sekaligus pemikir Islam yang sangat disegani.

Semenjak kecil, Gus Dur yang merupakan

bagian utama dari salah keluarga agung di Indonesia sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang pluralis. Hal itu tidak lepas dari hubungan keluarga dan aktivitas ayahnya. Gus Dur terbiasa berinteraksi dengan berbagai kalangan dan komunitas dengan latar belakang sosial, suku, politik dan agama yang berbeda-beda. Interaksi ayahnya sebagai salah seorang pemimpin nasional dengan tidak saja para kiai dan warga NU tetapi juga politisi dari dalam dan luar negeri, termasuk kalangan non-muslim, banyak memberikan pemahaman dan pengalaman akan kompleksitas dan heterogenitas masyarakat.

Selain faktor keluarga, riwayat pendidikannya pun menunjukkan aspek kompleksitas Gus Dur secara pribadi dan wawasan. Ia menyelesaikan Pendidikan Sekolah dasarnya di Jakarta pada tahun 1953. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) yang ia tempuh mulai tahun 1953 sampai dengan tahun 1957 di Yogyakarta. Pada saat menempuh pendidikan di Kota Pendidikan inilah, Gus Dur mulai mengenal secara lebih dekat pemikiran Islam yang selama ini ia kenal dari keluarganya karena ia tinggal di rumah KH. Junaid, salah seorang pemimpin modernis sekaligus ulama Muhammadiyah yang menjabat sebagai anggota

Majlis Tarjih PW Muhammadiyah Yogyakarta.

Namun sebagai salah seorang anggota komunitas pesantren, dari tahun 1957 sampai 1959, ia kembali ke habitat “asli” keluarga besarnya ketika ia mulai belajar di Pesantren Tegalrejo, Magelang, di bawah bimbingan langsung salah seorang ulama NU terkemuka, KH. Chudlori. Hanya dua tahun ia belajar di pesantren, ia kemudian langsung dipercaya untuk mengajar di salah satu pesantren terkemuka di Jombang yaitu Muallimat Bahrul Madrasah di pesantren Tambak Beras, Jombang hingga tahun 1963. Kerinduannya akan suasana akademis Yogyakarta kembali mendorongnya untuk kembali kesana namun tidak belajar di Sekolah Umum seperti sebelumnya tetapi untuk kembali belajar di Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Setelah menyelesaikan pendidikan pesantrennya, Gus Dur memutuskan untuk berangkat ke Timur Tengah tepatnya ke Mesir untuk belajar di Universitas al-Azhar Kairo sebelum kemudian pindah ke Baghdad. Gus Dur belajar di al-Azhar dari tahun 1964 sampai 1966. Ia merasa tidak puas belajar di al-Azhar karena menemukan sempitnya wawasan di sana. Tidak heran jika lebih banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan American University di Kairo, mengikuti berbagai

seminar dan forum-forum diskusi daripada mengikuti perkuliahan yang “membosankan” di salah satu Universitas Islam tertua di Mesir tersebut. Selain itu, Gus Dur juga banyak menonton sepak bola dan film-film Perancis yang nantinya akan banyak menginspirasi tulisan-tulisannya. Pada tahun 1966 ia pindah ke jurusan Sastra Arab pada fakultas Adab di Universitas Baghdad. Ia belajar di sana selama empat tahun.

Setelah lima tahun berkelana di Timur Tengah, Gus Dur pada tahun 1971 kembali ke Indonesia. Sebagaimana sebelum berangkat ke Timur Tengah, Gus Dur kembali memilih untuk aktif di dunia pendidikan baik di pesantren maupun yang lainnya serta menduduki berbagai jabatan di berbagai lembaga pendidikan. Ia kembali ke tempat asal keluarganya di Jombang untuk mengajar di Pesantren Tebuireng milik kakeknya sekaligus menjadi dosen pada Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Pada tahun 1972 atau satu tahun setelah kembali dari Timur Tengah, Gus Dur ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Jabatan ini ia pegang hingga tahun 1974 ketika ia menjadi sekretaris umum Pesantren Tebuireng, Jombang.

Namun pada tahun 1978 KH. Abdurrahman Wahid memulai meretas jalan menuju

kepemimpinan nasional ketika ia memutuskan untuk hijrah ke Ibukota RI, Jakarta, untuk mendirikan dan memimpin Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan. Pada Mukhtamar NU tahun 1979, Gus Dur dipilih sebagai Katib Am (Sekretaris Umum) Syuriah NU, lembaga tertinggi dalam hirarki struktur kepengurusan NU. Pada Mukhtamar berikutnya, Gus Dur yang didukung oleh KH. Ahmad Siddiq, salah seorang ulama NU paling kharismatik saat itu, Gus Dur terpilih sebagai ketua umum Tanfiziyah. Jabatan ini ia pertahankan hingga dua Mukhtamar selanjutnya yaitu Mukhtamar ke-28 (Desember 1989) dan Mukhtamar ke-29 (Desember 1994).

Di luar NU, Gus Dur menjabat ketua Kelompok Kerja (Pokja) Forum Demokrasi (Fordem), menjadi salah satu anggota Dewan Presidium WCRP (*World Council of Religion and Peace*), anggota Dewan Pembina dan Pendiri Pusat Simon Perez untuk perdamaian (*Simon Perez Peace Centre*) yang bermarkas di Tel Aviv, Israel, serta menjadi salah satu anggota Penasehat pada *International Dialogue Foundation on Perspective Studies of Syari'ah and Secular Law* di Den Haag, Belanda.

Setelah tumbangya rejim Orde Baru, Gus Dur bersama-sama Amien Rais, Megawati

Soekarno Putri dan Sri Sultan Hamengkubuwono X (keempatnya terkenal sebagai kelompok Ciganjur) menjadi pelopor gerakan reformasi di Indonesia. Dalam pertemuan mereka di Ciganjur, mereka membuat pernyataan bersama yang pada intinya menyatakan sikap tekad mereka untuk mengawal jalannya gerakan reformasi menjelang Sidang Istimewa DPR/MPR. Pasca Orde Baru, sepak terjang Gus Dur tetap kontroversial. Ia mengunjungi (sowan) mantan Presiden Soeharto, ketika kebanyakan tokoh reformis, mahasiswa dan masyarakat Indonesia menuntut diadilinya mantan orang terkuat Indonesia itu. Ia juga membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk warga NU, dan terlibat mempromosikan partai itu. Ia dikecam oleh tokoh-tokoh NU lainnya yang kemudian mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI), dan Partai Nahdhatul Umat (PNU).

Setelah terjadinya proses reformasi di Indonesia, akhirnya pada tanggal 20 Oktober 1999 dengan dukungan dari aliansi partai yang menamakan diri "Poros Tengah", KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik menjadi Presiden RI yang ke-4. Gus Dur menduduki kursi kepresidenan RI hanya lebih kurang 1 tahun

karena pada akhir tahun 2000 beliau diturunkan dari kursinya. Akhirnya, sejak tidak lagi menjadi Presiden, dia menghabiskan waktunya untuk menjabat sebagai ketua Dewan Syuro PKB dan NU.

Dengan perannya yang kompleks dan luar biasa tersebut, Gus Dur dipandang sebagai salah seorang pemimpin sekaligus pemikir besar yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Ia tidak saja telah menduduki berbagai posisi strategis hingga menjadi orang nomor 1 di negeri ini tetapi juga lewat tindakan, ucapan dan pemikirannya telah memberikan warna khusus dalam catatan sejarah bangsa dan telah berhasil menginspirasi jutaan rakyat Indonesia, khususnya, dan juga warga dunia umumnya. Tidak heran jika kemudian, Gus Dur diproklamirkan sebagai Guru Bangsa. Bahkan, setelah meninggalnya, usulan untuk menjadikannya sebagai Pahlawan Nasional terus mengumandang tidak saja datang dari elemen santri dimana ia berasal tetapi juga dari hampir seluruh elemen bangsa ini.

Asas Tunggal

Pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru telah berhasil dalam mengimplementasikan

secara “penuh” Pancasila, sebuah konsep yang pada awalnya dipandang sebagai upaya untuk merekonsiliasi keaneka ragaman budaya yang ada di Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka, sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik, sosial, agama dan budaya yang ada di negara ini. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya sumber norma dan nilai bagi seluruh bangsa. Akibatnya, ideologi-ideologi lain baik yang didasarkan pada ajaran agama maupun ideologi sekuler lainnya tidak bisa lagi digunakan atau dipromosikan selama dipandang “bertentangan” dengan Pancasila.

Mempertahankan ideologi yang tidak sesuai dengan asas tunggal akan dipandang sebagai bentuk penentangan terhadap Undang-undang yang berlaku dan khususnya pemerintah. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan termasuk tindakan represif sekalipun. Salah satu contoh dari fenomena tersebut adalah ketika pemerintah Orde Baru membubarkan secara paksa organisasi Pelajar Islam Indonesia atau PII. Sikap penolakan mereka untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi dan bertahan dengan ideologi Islamnya menjadi alasan utama tindakan penguasa saat itu.

Keberhasilan untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal menjadikan Suharto semakin kuat. Bahkan, pernyataan Suharto seakan menjadi hukum negara dan menjadi rujukan utama untuk seluruh masyarakat Indonesia, jika ingin dipandang sebagai kelompok loyalis. Akibatnya, seluruh lawan politik potensial, terutama Islam, berada dalam kontrol secara penuh aparat-aparat negara yang “berjuang” untuk menjadikan “bosnya” bahagia. Mereka juga tidak jarang menggunakan berbagai cara untuk melumpuhkan setiap potensi pemberontakan sekecil apapun.

Fenomena itu sebenarnya telah berlaku bagi kelompok-kelompok Islam radikal yang muncul sebagai kekuatan yang diperhitungkan setelah PKI pada tahun 1960-an. Tindakan represif aparat negara terhadap kelompok-kelompok Islam radikal tersebut menggunakan berbagai cara termasuk kasar sekalipun untuk mengkonter adanya kemungkinan munculnya potensi pemberontakan di seluruh wilayah negara ini. Dalam situasi seperti ini, kekuatan politik Islam yang dipandang sebagai salah satu sumber potensial oposisi paska bubarnya PKI secara bertahap berkurang dan menjadi gerakan-gerakan yang kecil dan bersifat sporadis serta biasanya tidak bertahan lama.

Namun demikian, paling tidak sampai pertengahan tahun 1980-an, hubungan antara negara dalam hal ini pemerintah Orde Baru dan kekuatan Islam politik secara umum dipenuhi oleh pertentangan, jika tidak dikatakan permusuhan, dan sikap saling curiga. Dihadapkan pada hegemoni Orde Baru, umat Islam mencoba menerapkan pendekatan baru dalam rangka menjaga keberadaan mereka melalui apa yang nantinya dikenal dengan Islam berwajah budaya yang lebih diterima di negara yang berada dalam kerangka ideologi Demokrasi Pancasila. Hal ini tidak berarti bahwa kaum Muslim dengan demikian terhenti dalam menyuarakan pemikiran politik mereka. Sebaliknya, mereka masih bisa bersikap kritis tetapi dengan nada yang lebih menekankan pada penerapan sila-sila Pancasila secara murni yang pada realitasnya tidak bertentangan dengan penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam konteks ke-Indonesia-an.

Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 merupakan peristiwa terakhir yang gerakannya bersifat massif dan terinspirasi secara jelas oleh ideologi Islam, meskipun sebenarnya ada beberapa bentrokan lain antara dua kekuatan politik dominan tersebut tetapi dengan pengaruh yang lebih kecil pada akhir tahun 1980-an dan

awal tahun 1990-an seperti peristiwa Warsidi di Way Jepara, Lampung, tahun 1989 dan Haur Koneng di Majalengka tahun 1993. Menurut para pengamat, peristiwa tahun 1984 harus dilihat sebagai respon langsung terhadap upaya penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang dipaksakan oleh penguasa Orde Baru. Pemerintah yang sepenuhnya didukung oleh *Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)*, kemudian mengambil sikap represif then guna menghancurkan segala bentuk perlawanan. Akibatnya, ratusan pemberontak yang tewas dan beberapa lainnya dilaporkan hilang termasuk salah seorang pemimpin utama pemberontakan, Amir Biki yang pada masa sebelumnya dikenal memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi pemerintah.

Pada saat tegang itulah, Gus Dur tampil untuk mencairkan situasi dengan gerakannya melalui Muktamar NU tahun 1984 menyatakan bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Tentunya dalam situasi tersebut, langkah Gus Dur dan NU-nya dinilai *counter-productive* terhadap umat Islam. Tetapi pada perkembangan berikutnya justru hampir semua kelompok Islam di Indonesia mengikuti langkahnya untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Pada

akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, para politisi Muslim moderat ini mengkampanyekan ide untuk menerapkan apa yang dikatakan oleh Bachtiar Effendy sebagai artkulasi idealisme dan aktifisme politik Islam yang lebih “substantif, integratif dan inklusif” daripada bertahan pada pola yang sebelumnya sangat dominan dengan menekankan pada pendekatan “formalistis, legalistis, dan eksklusif”.

Pendekatan alternatif yang pada awalnya digawangi oleh Gus Dur telah berhasil mencairkan suasana tegang antara penguasa Orde Baru dan kelompok politik Islam. Dengan demikian, Gus Dur telah berhasil berperan sebagai *Ice-Breaker* hubungan politik antara Suharto dan kaum Muslim.

Forum Demokrasi

Pada awal tahun 1990-an, kelompok Islam semakin mesra hubungannya dengan penguasa Orde Baru dan pada saat yang sama, Suharto juga semakin menunjukkan kepada publik semangat keislaman. Dalam situasi seperti itu Gus Dur justru tampil berbeda. Dalam salah satu artikel yang ia tulis di Jurnal *Ulumul Qur'an*, ia mengatakan bahwa penguasa Orde Baru harus

berhati-hati terhadap kelompok Islam radikal yang semakin dominan dalam kebijakan-kebijakan keagamaan Orde Baru. Kelompok Islam radikal yang dimaksud tersebut ditujukan pada KISDI yang dipimpin oleh Ahmad Sumargono. Bisa diprediksi bahwa akibat munculnya artikel ini, kelompok radikal memberikan reaksi yang sangat keras seperti terlihat dalam tulisan-tulisan *Media Dakwah*, majalah yang dimiliki dan dikelola oleh DDII.

Seiring dengan perubahan pendekatan politik Suharto pada awal 1990-an, gerakan Islamisme telah berhasil kembali ke lingkaran pusat kekuasaan. Komunitas Muslim yang selama ini begitu anti terhadap Suharto seperti DDII dan KISDI mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka dengan dipimpin oleh Ahmad Sumargono menyuarakan dukungan mereka terhadap Suharto. Bahkan dapat dikatakan, beberapa tahun menjelang jatuhnya Suharto, kelompok Islam garis keras telah berhasil menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan. Mereka bahkan memiliki kedekatan khusus dengan kekuatan militer yang menjadi kekuatan paling dominan selama Orde Baru bahkan sesudahnya

Tidak hanya memberi peringatan tentang

bahaya kelompok radikal Islam yang mulai menguasai wacana keislaman pemerintah, Langkah kontroversial Gus Dur selanjutnya adalah ketika ia menolak untuk bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan pada bulan Desember 1990. Pendirian ICMI ini disambut tidak hanya oleh sebagian besar kelompok Islam tetapi juga mendapat dukungan penuh dari penguasa Orde Baru. Tidak heran jika hampir semua pemimpin Islam berperangaruh termasuk Nurcholish Madjid, Amin Rais, Ali Yafie dan lain-lain bergabung dengan organisasi cendekiawan Muslim pertama ini. Hanya KH. Abdurrahman Wahid yang menolak untuk bergabung, meskipun pada awalnya tidak juga menolak. Salah satu alasannya adalah bahwa para intelektual seharusnya tidak terorganisir pada satu kategori sempit yaitu agama Islam. Penolakan ini tidak saja menjadikannya sebagai *public enemy* bagi di kalangan Muslim tetapi juga menjadikan dirinya sebagai target serangan kecurigaan yang luar biasa dari penguasa Orde Baru. Prof. Ali Yafie, salah satu tokoh kharismatik NU, mengkritik posisi Gus Dur ini.

Dalam perkembangan berikutnya, kritik Gus Dur terhadap ICMI justru semakin banyak pendukungnya dengan berbagai alasan yang

berbeda. Dawam Rahardjo, salah seorang tokoh ICMI, misalnya mengkritik struktur kepengurusan ICMI yang dibentuk oleh Habibie. Penolakan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kurangnya Habibie melibatkan seluruh pihak dalam ICMI dalam pembentuka struktur kepengurusan. Tokoh lain yang juga cukup keras kritiknya terhadap ICMI adalah Aswab Mahasin, Ketua Departemen Litbang ICMI, dan Emha Ainun Najib, ketua Departemen Budaya. Keduanya menyatakan keluar dari ICMI. Salah satu alasan yang menonjol adalah ketidaksetujuan mereka terhadap garis politik ICMI yang terkooptasi oleh Orde Baru. Tuduhan tentang ICMI hanya berperan sebagai alat pemerintah untuk mengontrol para intelektual sebenarnya telah terdengar sejak awal kemunculannya.

Selain pada aspek garis politik, kritik juga muncul pada tuduhan bahwa ICMI mengkampanyekan ide-ide sektarian bahkan telah dikuasai oleh kelompok fundamendalis. Kritik ini banyak dilontarkan oleh Gus Dur. Sebagai upaya untuk menandingi ICMI, Gus Dur bahkan mendirikan Forum Demokrasi (Fordem) pada tanggal 3 April 1991 atau empat bulan setelah pendirian ICMI. Pendirian ini dilakukan bersama-sama dengan para aktifis demokrasi yang berasal

dari berbagai macam latar belakang agama dan suku berbeda yang secara total berjumlah 45 orang diantaranya Bondan Gunawan, Sutjipto Wirosardjono, AswabMahasin, YBMangunwijaya, Todung Mulya Lubis, Franz-Magnis Suseno dan lain-lain.

Salah satu alasan pendirian forum ini adalah menguatnya tendensi sectarian di kalangan masyarakat Indonesia baik yang didasarkan pada sentiment etnik, kedaerahan, agama atau kepentingan kelompok yang dapat mengancam persatuan bangsa. Salah satu buktinya adalah peristiwa pembubaran Majalah Monitor. Karenanya, Fordem diharapkan akan berperan sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan memajukan nilai dan prinsip demokrasi dan persatuan bangsa dengan mendorong terciptanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dan juga antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat Indonesia.

Kemunculan Fordem ini mendapatkan beragam reaksi. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri memanggil Gus Dur untuk menjelaskan maksud dan tujuan organisasi baru ini. Meskipun akhirnya, Gus Dur mampu meyakinkan pemerintah tetapsajadenganberbagai persyaratan dan tekanan. Reaksi juga datang dari

kalangan internal NU yang melihat keterlibatan Gus Dur dan Gafar Rahman yang juga Sekretaris Umum PBNU sebagai persoalan yang harus diselesaikan. Para tokoh NU mempertanyakan peran mereka dalam Fordem dengan tugas mereka sebagai pengurus utama PBNU. Reaksi ini bahkan telah memunculkan gerakan untuk mengadakan Muktamar Luar Biasa yang bertugas untuk menilai apakah kepemimpinan Gus Dur masih harus dipertahankan. Bukannya mundur, Gus Dur justru menjawab bahwa jika harus memilih untuk memimpin NU atau Fordem, ia akan memilih yang kedua karena merupakan organisasi baru yang memerlukan kepemimpinannya, sedangkan NU sebagai organisasi besar dan tua, jika ia meninggalkan akan banyak orang yang bisa menggantikannya. Untuk menyelesaikan kemelut internal ini, para pemimpin NU di Jawa Timur berkumpul dengan Gus Dur yang berkesudahan dengan tetap mendukung kepemimpinan Gus Dur di NU. Bahkan, setelah pertemuan tersebut, Gus Dur mengklaim bahwa ia justru semakin mendapatkan dukungan untuk meneruskan langkahnya.

Pada masa selanjutnya, Gus Dur semakin intensif mengkampanyekan ide-ide pentingnya mewujudkan demokrasi yang menghormati

perbedaan. Ia juga sering mengkritik kalangan Muslim yang menolak demokrasi dan bersikap memaksakan kehendak mereka. Ia bahkan mengkritik upaya untuk menonjolkan berbagai symbol agama dalam ranah public seperti pemberlakuan pengadilan agama khusus Islam dan pengajaran Bahasa Arab di televise. Gus Dur juga mengkampanyekan pentingnya perlakuan yang sama terhadap kelompok minoritas baik agama maupun etnis. Bahkan ia melontarkan ide bahwa tidak menutup kemungkinan untuk kemunculan presiden yang berasal dari non-Muslim.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Selama lebih dari 14 tahun lamanya, umat NU sejak menyatakan kembali ke khittah 1926 berada dalam posisi defensif dalam ranah politik praktis. Sebagian kader NU yang tetap memilih politik sebagai medan “perjuangan” dan karir tersebar di tiga partai politik yang berbeda, PPP, Golkar dan PDI. Mathori Abdul Jalil, KH. Maimun Zubair dan sebagian besar politisi NU misalnya memilih untuk bertahan di PPP, sementara Gus Dur dan Slamet Effendi Yusuf lebih memilih untuk bergabung dengan partai pemerintah,

Golkar. Sementara itu, Saifullah Yusuf berpindah dari satu partai ke partai lainnya.

Jatuhnya Orde Baru dan lahirnya Reformasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh politisi atau calon politisi Indonesia untuk mendirikan partai politik sesuai dengan visi dan ideologinya. Tidak heran jika dalam waktu yang relatif singkat, ratusan partai politik dengan berbagai warna bermunculan seperti jamur di musim hujan, meskipun pada akhirnya hanya 48 partai yang dinyatakan layak untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi pertama paska Orde Baru tahun 1999. Dari 48 partai tersebut, terdapat sekitar 17 partai yang secara tegas berideologi Islam seperti PBB, PK, PNU, PKU, PNU, PSII, PUI dan lain-lain. Sementara itu, PKB dan PAN mewakili partai yang berbasis agamis sekaligus nasionalis.

Di tengah euphoria politik ini, warga Nahdliyyin yang masih trauma dengan pengalaman pahit politik praktis pada tiga dekade awal kemerdekaan berada dipersimpangan jalan. Kelompok yang menghendaki konsistensi NU dalam koridor Khittah 1926 menolak keterlibatan NU dalam wilayah politik praktis. Mereka umumnya beralasan instabilitas perpolitikan nasional dan kepentingan yang luas dalam

konteks agama, sosial dan budaya hanya akan menjebak NU dalam pusaran kepentingan yang terkadang bertolak belakang dengan visi dan misi NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang menghendaki kestabilan.

Namun demikian, gegap gempita politik nampaknya tidak mampu ditolak oleh sebagian pemimpin NU termasuk KH. Abdurrahman Wahid. Gus Dur dengan dukungan besar dari para tokoh kharismatik NU seperti KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Mustofa Bishri, Munasir Ali dan Mukhir Muzadi, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tanggal 23 Juli 1998. Mereka sepertinya juga tidak mau ketinggalan kereta dalam mendirikan partai politik. Mereka pada instinya tidak ingin dijadikan sebagai obyek politisasi sebagaimana yang terjadi pada dekade terakhir Orde Baru dimana Suharto memanfaatkan secara maksimal kekuatan politik Islam untuk melanggengkan kekuasaannya. Antusiasme pada politik praktis bahkan sangat ekstrem ketika para pemimpin NU seperti berlomba untuk mendirikan partai baru yang mengatasnamakan warga NU. Paling tidak terdapat empat sampai lima partai sebelum pemilu 1999 yang mengatasnamakan warga NU mulai dari PKB, PKU, PNU, SUNI dan PKNU.

PKB didirikan oleh Gus Dur, PKU oleh KH.

Yusuf Hasyim, paman Gus Dur, PNU oleh KH. Syukron Ma'mun, SUNI oleh Abu Hasan. Selain partai-partai tersebut, warga NU sebenarnya telah pula memiliki partai yaitu PPP. Munculnya banyak partai tersebut dengan konstituen yang sama, pada akhirnya memunculkan friksi yang cukup tajam antara warga NU. Pertentangan ini tidak hanya pada level wacana tentang klaim partai mana yang sebenarnya paling berhak untuk mewakili warga NU tetapi juga sampai pada bentrokan fisik. Gus Dur misalnya mengklaim warga PKB lah yang merupakan representasi satu-satunya apirasi politik warga NU, sementara yang lain bukan. Perang klaim seperti menjadi hidangan rutin warga NU setiap kali menjelang peristiwa politik. Sementara itu, bentrok fisik terjadi pada saat kampanye pemilu tahun 1999. Konflik fisik ini juga berakhir dengan jatuhnya korban ketika pendukung PPP dan PKB di Jepara terlibat bentrokan. Keyakinan Gus Dur ini memang terbukti dimana hanya PKB yang terus bertahan dengan memperoleh dukungan yang cukup signifikan.

Apapun kondisi dan perkembangan perpolitikan di internal NU, pendirian PKB bisa dikatak sebagai teroobosan Gus Dur dalam mendorong tampilnya politisi generasi muda

dalam kancah perpolitikan nasional. Jika, Gus Dur dengan berani mendirikan PKB, niscaya kader-kader NU akan tersebar secara tidak efektif dalam berbagai partai yang berbeda bahkan tidak menutup kemungkinan bertentangan. Gus Dur bisa digambarkan sebagai maestro penciptaan kader-kader NU masa depan yang lebih menjanjikan seperti terbukti padaa tampilnya politisi-politisi NU muda seperti Alwi Syihab, Mahhfud MD, Muhaimin Iskandar dan lain-lain.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, Gus Dur yang sejak kecil terbiasa oleh lingkungan yang maju dan heterogen mampu tampil tidak saja sebagai Guru Bangsa yang progresif tetapi juga politisi cerdas. Progresifitas pemikiran dan gerakan Gus Dur sering kali melahirkan berbagai kontroversi yang justru sangat diinginkan oleh Gus Dur sendiri sehingga masyarakat menjadi semakin maju lewat konflik. Kontroversi ini seperti identik dengan perjalanan Gus Dur yang terus melihat segala perkembangan dengan hati dan pikiran yang jernih. Gus Dur memiliki keberanian untuk menentang arus umum, meskipun ia harus menanggung akibatnya. Dengan gayanya

yang santai tetapi tegas, langkah-langkah Gus Dur dapat dilihat sebagai bentuk dari proses pemberdayaan masyarakat melalui metode *Ice-Breaker*. Karenanya, tidak salah jika dikatakan bahwa Gus Dur adalah seorang Ice-Breaker sejati. *Wallahu'alam.* ❧

MENGENANG SANG PENDEKAR NU, GUS DUR

Kedigdayaan Era Mukhtamar NU
Cipasung

Mahrus eL-Mawa

Dosen IAIN Syekh Nurjati dan ISIF Cirebon
Kini, Mahasiswa S-3 Filologi FIB UI Depok

*“Landasan NU adalah
keadilan dan kebenaran memperjuangkan
kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat ”*
[KH. Hasyim Asy'ari] ¹

Gus Dur telah mendahului kita menghadap Sang Pencipta. Tak terkira jumlah kontribusinya untuk bangsa Indonesia ini. Dimanapun Gus Dur berteman dan beraktifitas, ia pasti dikenang sebagai orang penting dan berkontribusi. Tulisan ini mencoba mengungkap kenangan Gus Dur selama kepemimpinan terakhirnya di PBNU.

Diakui atau tidak, perilaku NU (dan politiknya) sejak tahun 1984, hingga tahun

¹ Mengutip *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 1/Mei-Juni 1997, h.7.

1999 sulit dilepaskan dari kiprah sosok KH. Abdurrahman Wahid, baik sebagai intelektual² atau ketua tanfidhiyah (pelaksana) PBNU. Karena itu, tak sedikit orang atau peneliti agak kesulitan untuk melihat NU lepas dari tokoh “*beyond the symbols*” yang sempat menjadi Presiden RI ke-4 (1999-2001) ini atau juga sebaliknya.³

Secara spesifik, paparan ini akan mengenang Gus Dur sebagai pendekar NU melawan rezim Soeharto di ujung kekuasaannya di NU pada Muktamar Cipasung, 1999. Bahasan diawali dari arena Muktamar sebagai ajang “perlawanan” tertinggi, lalu pasca Muktamar, dimana Gus Dur “dilawan” Abu Hasan, dan terakhir analisis peristiwa Muktamar dengan Demokrasi, yang

² Intelektual artinya, orang yang dapat menangkap gagasan ‘orang kecil’ kemudian mereformulasikannya dengan baik, dan sebaliknya mampu menerjemahkan gagasan-gagasannya dalam bahasa yang sederhana. Ide tranformasi sosial-keagamaan misalnya, yang meliputi pluralisme, demokrasi, gender, dll. dapat masuk dan diterima oleh komunitas santri. Begitupun, ketika NU, pesantren harus inklusif atau Aswaja sebagai *manhaj*. Pikiran-pikiran itu diulas apik oleh Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal.*, *op. cit.*, h. 338-429.

³ Sebutan *beyond the symbols*, merujuk pada buku Tim INCReS, *Beyond the Symbols: Jejak Antroplogis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Jakarta: Rosda, 2000), khususnya halaman xvi. Tentang NU dan Abdurrahman Wahid, dalam *guyonan*-nya sering dikatakan, “Gus Dur adalah NU mikro dan NU adalah Gus Dur makro”, mengutip Masykur Maskub, “Epilog”, dalam Marzuki Wahid., *Dinamika NU.*, *op. cit.*, h.199. Bandingkan dengan *footnote* no. 24 (bab pertama).

menjadi alat perjuangan Gus Dur dan Aswaja sebagai landasan etik NU.

Muktamar NU 1994, Mengulang Muktamar 1979 (?)

Kejadian tahun 1979, saat Muktamar ke-26 di Semarang hampir terulang kembali pada Muktamar ke-29, 1994 di Cipasung.⁴ Sayangnya, pada kasus Muktamar terakhir orba⁵ itu, intervensi pemerintah tidak sukses 100%. Jagonya, Abu Hasan tidak dapat melampaui Abdurrahman Wahid. Beda dengan Idham Chalid yang terpilih lagi menjadi nakoda tanfidhiyah PBNU untuk kali

⁴ Lihat, Andree Feillard, *NU vis-à-vis., op. cit.*, h. 212-213. Achmad Sjaichu sebagai rival Idham Chalid tidak mendapat simpati pemerintah, sebab ia dianggap sebagai mitra yang kurang dipercaya. Tapi, oleh Mitsuo Nakamuro dan Sidney Jones melihatnya berbeda. Kata Nakamuro, Sjaichu kurang rendah hati dan kurang memperhatikan tradisi *tawadlu'* NU. Adapun Jones, lebih melihatnya karena *money politics* kelompok Idham Chalid. Sama persis pada tahun 1971 ketika Idham Chalid terpilih pada Muktamar sebelumnya. Bandingkan, Sidney Jones, "Pengkerutan dan Pemuaian Makna 'Umat' dan Peran NU", dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme Radikal., op. cit.*, h. 106-107, dan Mitsuo Nakamuro, "Tradisionalisme Radikal.," dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme., op. cit.*, h. 71-72.

⁵ Tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto (1966-1998) mengundurkan diri dari kepresidenan, dan B.J. Habibie, wakil Presiden RI menjadi Presiden RI ke-3 (1998-1999). Orde baru diakui lahir pada tahun 1966, setelah menggantikan Presiden pertama RI Ir. Soekarno 1945-1965 yang dikenal sebagai orde lama.

keenamnya di Mukhtar Semarang itu.⁶

Lepas dari sebab-akibatnya, yang pasti kelompok non-politik NU tahun 1979 masih kalah dengan kubu politisi NU. Namun, paruh akhir periode Idham, sepeninggal KH. Bishri Syansuri, Ra'is 'Am PBNU, kubu non-politik NU di bawah *ad interim* Ra'is 'Am KH. Ali Maksum⁷ dapat 'memenangkan pertarungan'. Berawal dari satu sebab itulah pada Mukhtar ke-27 (1984) keputusan NU untuk kembali ke Khittah 1926 (baca: tidak terlibat secara formal organisatoris dan politik praktis) dapat diwujudkan.⁸

Khittah tersebut tetap dipertahankan hingga Mukhtar lima belas tahun berikutnya di Kediri tahun 1999. Pasca Mukhtar Krapyak

⁶ Idham menjadi ketua umum PBNU Sejak tahun 1956, Mukhtar ke-21 Medan, lalu berturut-turut, 1959 (Jakarta), 1962 (Surakarta), 1967 (Bandung), 1971 (Surabaya), dan 1979 (Semarang).

⁷ KH. Ali Ma'shum terpilih menjadi *ad interim* Ra'is 'Am PBNU melalui Munas Alim Ulama NU tahun 1981 di Kaliurang Yogyakarta.

⁸ Mitsuo Nakamuro, "Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an: Dari Mukhtar Semarang 1979 Hingga Mukhtar Situbondo 1984", dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme.*, *op. cit.*, h. 78-79. Bandingkan, Martin van Bruinessen, *NU Tradisi.*, *op. cit.*, h. 123-127. Khittah (خطة) adalah garis. Kembali ke khittah 1926 adalah kembali ke garis-garis pendirian, perjuangan dan kepribadian NU seperti tahun 1926, meliputi keagamaan, kemasyarakatan, baik personal atau institusional. Lihat, penjelasan Khittah, dalam LTN PBNU, *Keputusan Munas.*, *op. cit.*, h. 128. Rumusnya, bisa dilihat dari hasil Mukhtar ke-27 Situbondo tahun 1984. Tentang isi khittah tersebut akan dilampirkan di belakang.

tahun 1989, NU mulai menjauh dan menjaga jarak dengan Pemerintah RI (baca: Suharto), terutama --sebab, atau akibat-- perilaku ketua umumnya Abdurrahman Wahid, entah personal atau institusional. Hal ini, bertolak belakang dengan saat Mukhtar Krapyak berlangsung atau peristiwa Mukhtar ke-27 di Situbondo.⁹

Realitas tersebut, telah berdampak negatif bagi laju NU hingga Mukhtar ke-29 di Pesantrennya *ad interim* Ra'is 'Am KH. Ilyas Ru'yat¹⁰ tahun 1994. Bahkan, terpilihnya kembali Abdurrahman Wahid untuk kali ketiganya sebagai ketua Tanfidhiyah saat Mukhtar, menjadikan NU hingga pertengahan periodenya, dianggap lawan negara. Ini, lebih dahsyat dari genderang 'perang' negara vis-à-vis NU tahun 70-an, padahal oleh Nakamura NU disebut tradisionalisme radikal, karena menjadi oposan.¹¹

Sosok pendekar khittah NU yang terpilih

⁹ Martin., "Perjuangan Meraih Kekuasaan.", dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme., op. cit.*, h. 117-127. Saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI ke-4, NU juga tetap menjaga jarak dengan Pemerintah, lihat keputusan Mukhtar ke-30. Kalaupun, terkesan *memback up*, itu lebih bersifat personal, bukan institusi NU.

¹⁰ KH. Ilyas Ru'yat menjadi *ad interim*, setelah KH. Ali Yafie mengundurkan diri dari Wakil Ra'is 'Am sebagai pelaksana Ra'is 'Am. Hal itu ditetapkan pada Konbes NU 1992 No. 05/ Konbes/1992.

¹¹ Nakamura, "Tradisionalisme Radikal.," dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme., op. cit.*, h. 72-74.

lagi sebagai orang nomor satu masa khidmah 1994-1999 PBNU, tentu bukan tanpa perjuangan yang berat untuk dirinya dan masa depan NU, seperti halnya pada dua periode sebelumnya (1984-1989 dan 1989-1994). Sangat beratnya itu, lebih disebabkan faktor eksternal, di luar warga atau pengurus NU.¹²

Menurut pengamat NU yang juga staf pengajar Universitas Utrecht Belanda, Martin van Bruinessen, yang berada di Cipasung saat Muktamar mengemukakan bahwa kejadian di Muktamar itu sangat terkait dengan prospek suskesi di Indonesia. “Dalam pemilu ketiga orsospol akan berusaha mempergunakan, memperalat, atau menarik NU berdasarkan kepentingannya. Oleh karena itu, NU harus mampu menjaga jarak dengan ketiga orsospol”, katanya. Meskipun NU sudah *committed* untuk tidak berpolitik praktis, tapi sebagai ormas terbesar NU di masa depan mendapat berbagai

¹² Rekaman sejarah sekitar Muktamar ke-29 di bulan Nopember-Desember 1994 dan pasca Muktamar yang menggambarkan beratnya perjuangan Gus Dur dan penjaga Khittah NU 1926, lebih lengkap dapat dibaca, Marzuki Wahid, dkk. *Dinamika NU: Perjalanan Sosial.*, *op. cit.*, h. 3-71. Perjuangan Gus Dur tidak hanya saat Muktamar berlangsung, tapi juga harus menghadapi serangan mantan kandidat yang tidak masuk dalam jajaran struktur PBNU hasil Muktamar Cipasung. Abu Hasan, Chalid Mawardi, dkk. dengan membentuk PBNU tandingan, yakni KPPNU pada tanggal 29 Desember 1994.

tantangan.¹³

Nakamura Mitsuo, guru besar Universitas Chiba Jepang dan pengamat masalah NU-Muhammadiyah, tidak sependapat jika dikatakan, pentingnya peran NU dan Abdurrahman itu ada hubungannya dengan suksesi 1998. Dikatakannya, "Saya kira pada persoalan suksesi, NU tidak campur tangan sama sekali. Dengan Abdurrahman, NU hanya berkepentingan menyuburkan suasana demokratis". "Mereka sudah teruji demokratis, yang ramai itu bukan di dalam, tapi di luar yang ingin mengambil NU", lanjutnya.¹⁴

Kedua pengamat asing tersebut, diperkuat Greg Fealy, peneliti asal Australia. Diturunkan Fealy, "dengan terpilihnya kembali Abdurrahman Wahid dan berlanjutnya dukungan terhadap kepemimpinannya, NU telah menunjukkan kembali independensinya, yang jarang dimiliki organisasi sosial terkemuka di Indonesia, dewasa ini".¹⁵ Dengan begitu, sulit untuk tidak katakan bahwa pemerintah tak berkepentingan untuk suksesi. Upaya menggulingkan Abdurrahman, saat dan setelah Muktamar adalah realitas yang

¹³ Marzuki Wahid, dkk. *Dinamika NU.*, *op. cit.*, h. 32.

¹⁴ *Ibid.*, h. 33.

¹⁵ Greg Fealy, "Percikan Api.." dalam Greg Fealy., *Tradisonalisme.*, *op. cit.*, h. 237.

tak mungkin dipungkiri.¹⁶

Disebutkan, bahwa pasang surut ketidak-sukaan terhadap Abdurrahman yang meluas itu muncul juga dari para pemilih yang dibayar. Diakui secara luas, Abu Hasan rival Abdurrahman Wahid, biarpun pengusaha milyuner, sama sekali tidak mendanai sendiri kampanyenya. Banyak pengamat mempercayai bahwa tokoh-tokoh yang bercokol di akar bawah gerakan ABG (Asal Bukan Gus Dur) adalah termasuk Jenderal Hartono (saat itu Kassospol), B.J. Habibie (saat itu Menristek), Yogie S. Memet (Mendagri), dan Tarmizi Taher (Menag) bermain dengan dua cara, juga Presiden Soeharto. Fakta bahwa 3000 peserta Muktamar ditemani sekitar 1.500 tentara (termasuk, dalam uniform Ansor), komplit dengan personil-personilnya yang dipersenjatai lengkap, ditambah lebih dari 100 intel dan pasukan keamanan, berikut beberapa koran terkemuka di Indonesia – belum lagi, stasiun-stasiun televisi yang dikontrol pemerintah—yang menyebabkan tersebar berita-

¹⁶ Seperti, terlihat dengan pembentukan KPPNU, lalu menjadi PBNU tandingan oleh kelompok Abu Hasan dan saat kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur, 10 Oktober 1996. Hal tersebut dilakukan setelah Abdurrahman mendukung gerakan demokrasi Megawati, namun gerakan itu hancur pada 27 Juli 1996. Tanggal 27 Juli dikenal sebagai sebuah tragedi demokrasi, dengan penyerangan terhadap kantor PDI. Lebih jauh lihat, Robert W. Hefner., *Civil Islam.*, *op. cit.*, h. 308-321.

berita fitnah dan sesat, semua ini membuktikan betapa kampanye menentang Abdurrahman betul-betul tidak setengah hati. Juga, intervensi pemerintah di tingkat lokal dan provinsi serta skala memutarbalikkan, ternyata semakin menegaskan bahwa kekuatan ABG sepenuhnya ditujukan untuk menumbangkan Abdurrahman.¹⁷

Sebenarnya, jauh hari sebelum Mukhtamar, Abdurrahman sendiri dalam berbagai kesempatan sudah ingin berpindah posisi, tidak lagi di Tanfidhiyah. Beberapa usulannya tentang penghapusan Tanfidhiyah untuk meningkatkan otoritas Syuriah, ditolak. Apalagi, dengan akan tampilnya Chalid Mawardi¹⁸ sebagai kuda hitam dalam pertarungan memperebutkan posisi tertinggi organisasi, 'memaksa' Abdurrahman memutar otak. Jika sebelumnya ia tidak terlalu bernafsu untuk muncul kembali sebagai tokoh utama dalam elit organisasi, tetapi fenomena Chalid mengubah pendiriannya. Ada semacam trauma organisasi yang mengendap pada pemikiran Abdurrahman untuk memaksakan

¹⁷ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal.*, op. cit., h. 498-499. Keterangan lebih lengkap beserta bukti lainnya, seperti *money politics*. Lihat Greg Fealy, *Ibid.*, h. 227-233.

¹⁸ Ia, pernah menjadi ketua umum GP Ansor dan juga berseberangan dengan keputusan PBNU, saat itu. Ia kelompok Cipete, politisi dan tokoh NU yang di Golkar.

diri melawan yang hadir tersebut. Keputusan itu diambil, dalam rangka untuk menjaga integritas orientasi non-politik NU.¹⁹

Pasca Muktamar: Abu Hasan "Menentang" Gus Dur

Satu minggu pasca Muktamar ditutup dan pengumuman tim formatur, kelompok Abu Hasan merasa dikecewakan. Awalnya, keabsahan Muktamar tetap diakui, tetapi lama-kelamaan, mereka tidak mengakui keabsahan hasil Muktamar. Susunan kepengurusan, dianggap tidak mencerminkan rekonsiliasi atau akomodasi dari kelompok yang kalah.²⁰

Hal tersebut, memang di luar kebiasaan NU, baik Abu Hasan atau Abdurrahman sendiri. Sekalipun, sering terjadi dalam sejarah kemuktamaran NU. Sewaktu Abdurrahman

¹⁹ Iqbal Chaniago, "Mengukur Pendulum Politik NU" dalam Zainal Arifin., *Membangun Budaya.*, *op. cit.*, h. 73. Bandingkan, Greg Fealy, "Percikan Api.." dalam Greg Fealy., *Tradisonalisme.*, *op. cit.*, h. 222.

²⁰ Bukti-bukti tertulis, tentang pengakuan absah Muktamar dan tidak mengakui hasil susunan PBNU, mulai dari usulan tanggal 6 Desember, hingga rapat tim formatur 13 Desember 1994 oleh kelompok Abu Hasan, atau sejak Muktamar ditutup hingga pengumuman kepengurusan lengkap PBNU telah didokumentasi oleh Sekjen PBNU. Seperti dalam Buku putih PBNU, *Seputar Muktamar NU Cipasung*, (Jakarta: PBNU, 1996), khususnya h.41-56.

menang secara kuat (aklamasi) tahun 1989 atau waktu tahun 1984, di mana konflik antar faksi sangat keras, *toh* tetap saja ada akomodasi, bukan konfrontasi. Kecuali, KH. Idham Cholid pemeroleh suara kedua pemilihan Ra'is Am Syuriah, tidak masuk dalam jajaran Syuriah, dan tidak ada yang protes.²¹

Karena itu, barangkali, maka Fahmi D. Saefuddin²² menyatakan mundur dari susunan kepengurusan itu, sebelum genap sehari diumumkan. Menariknya, alasan mundur itu karena ia melihat ada empat alasan. Pertama, selama Muktamar berlangsung telah mengabaikan *al-akhlâq al-karîmah*. Kedua, sewaktu akan memilih ketua umum, terdapat intervensi eksternal yang berlebihan, baik yang menolak Abdurrahman ataupun yang ingin mempertahankannya. Semestinya, para ulama dapat mewujudkan suasana yang sesuai dengan *al-akhlâq al-karîmah*, ternyata tidak melaksanakan. Ketiga, keputusan bersedia mundur dari pencalonan ketua umum, karena wujud ketaatan pada beberapa ulama

²¹ Marzuki Wahid, dkk. *Dinamika NU.*, *op. cit.*, h. 47-49. Pernah juga terjadi, pada Muktamar ke-26 Semarang, ke-25 dan ke-24. Susunan kepengurusan pada tiga Muktamar tersebut, kurang mencerminkan hasil perolehan suara, tetap tidak ada yang melawan. Buku putih PBNU, *Seputar Muktamar.*, *op. cit.*, h. 58

²² Salah seorang tim penggodok Khittah pada tahun 1983/1984.

dan sesepuh NU yang memintanya mundur demi keutuhan. Begitu juga, saat bersedia maju sebelumnya, karena menghormati yang mencalonkannya. Keempat, terakhir, berharap kepada PBNU agar memiliki kemampuan untuk mengemban amanah kepemimpinan, baik perseorangan atau kolektif, supaya memenuhi harapan-harapan yang bersifat multidemensi.²³

Abdurrahman sendiri mengatakan, “Kalau menurut rasio, saya ingin merangkul semua warga NU, termasuk Abu Hasan, Chalid Mawardi atau semua orang lain. Tetapi, saya juga harus menjaga moral NU dan kepentingan seluruh warga NU”. Inilah pentingnya sikap kemasyarakatan NU, *tawassuth* (sikap tengah yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus dalam hidup bersama, serta menempatkan antara rasio dan moral). Dikatakan juga, mengharap agar masyarakat tidak mengidealisasikan NU dan tidak menempatkan NU untuk memikul tanggung jawab ideal yang tidak sanggup dikerjakannya.²⁴

²³ Disampaikan Fahmi, sebagaimana faksimail yang dikirimkan tanggal 14 Desember 1994. Merujuk pada Marzuki Wahid, dkk. *Dinamika NU.*, *op. cit.*, h. 44.

²⁴ Periksa Marzuki Wahid, dkk. *Dinamika NU.*, *op. cit.*, h. 50-51. Sikap Abdurrahman tersebut, tidak jauh berbeda dengan Ra'is Am KH. Ilyas Ru'yat dan KH. M.A. Sahal Mahfudh, wakil Ra'is 'Am, hanya dengan redaksi yang berbeda. Jadi, bagi PBNU hasil tim formatur sudah final.

Seiring dengan ketidaksediaan Presiden Suharto menerima NU di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid²⁵, konflik internal tersebut tetap dibiarkan berlanjut terus. KPPNU sebagai PBNU tandingan hasil kelompok Abu Hasan terbentuk tanggal 29 Desember 1994, lalu Konbes yang berubah jadi Mukhtar Luar Biasa (MLB), 17 Januari 1996. Dengan usainya MLB, KPPNU berubah menjadi PBNU yang dianggap sah, menurut mereka. Sebab, PBNU hasil Cipasung dianggap cacat hukum.

Tanggal 20 Januari 1996, untuk menyikapi itu, PBNU produk Cipasung mengadakan rapat pleno yang dihadiri Syuriah dan Tanfidhiyah. Satu di antara keputusannya adalah *rujû' ilâ al-haq* bagi warga NU yang berpartisipasi pada Konbes KPPNU yang berubah MLB.²⁶

²⁵ Yang sangat menyinggung Suharto, terdapat dalam buku *A Nation in Waiting*, katanya, *Suharto is stupid*. Saat Mukhtar berlangsung, termasuk yang tersebar luas. Entah darimana asal datangnya.

²⁶ Rapat pleno dipimpin oleh KH. Ma'ruf Amin (Ketua Harian Syuriah). Keputusan lengkapnya; pertama, PBNU menegur pengurus PBNU dan PWNU berkaitan dengan keterlibatannya Konbes KPPNU, tanggal 17 Januari 1996, yang lalu diubah menjadi MLB di Asrama Haji pondok Gede Jakarta. Keterlibatan mereka dinilai pelanggaran organisasi paling berat. Kedua, PBNU memberi kesempatan kepada yang telah berpartisipasi pada Konbes (diubah menjadi MLB) untuk melakukan *rujû' ilâ al-haq* (kembali ke jalan NU) hingga akhir Ramadhan, agar saat lebaran dapat halal bihalal. PBNU juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang menegakkan konstitusional. Yakni mengakui

Berbeda dengan Presiden Suharto, Yogie S. Memet (Mendagri) atas nama Pemerintah mengatakan Mukhtar tersebut sah atau legal dan menerima hasilnya, sekalipun 'lonjong'. Artinya, mereka membantah adanya kemungkinan upaya "menggusur" Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum PBNU. Begitu pula dengan ABRI, yang disampaikan panglimanya Jend. TNI Feisal Tandjung. Meskipun, mereka juga pada saat yang sama tidak melarang kiprah KPPNU.²⁷ Di era Suharto, tentu pengakuan demikian aneh sekali, jika bukan ambigu.

Perdebatan legalitas, legitimate atau tidak, akhirnya berhenti juga, khususnya *a la* Presiden Suharto. Hal itu terjadi, tepat tanggal 2 Nopember

PBNU hasil Mukhtar Cipasung Tasikmalaya, sebagai PBNU yang sah. Ketiga, jika sampai akhir Ramadhan belum juga dilakukan *ruju' ila al-haq*, PBNU akan mengadakan konsolidasi organisasi. Yakni, membuat *caretaker* terhadap PWNU dan PCNU. Karena, Abu Hasan tidak menginginkan PBNU, akhirnya dibebastugaskan dari pengurus PBNU. Periksa, Choirul Anam, *Membanding Ulah GPK Abu Hasan*, (Surabaya: Aula, 1996), h. 113-114.

Buku Choirul Anam tersebut, cukup baik untuk bacaan investigatif. Selain, disebutkan fakta dan klarifikasi fakta, juga analisis dari berbagai tokoh. Hal penting dari buku ini adalah mencoba menguak konflik antar tokoh dalam NU yang sempat heboh. Hanya, Abu Hasan saja, menurut Anam yang tidak pakai cara dan mengikuti tradisi NU.

²⁷ "Pokoknya kita kembalikan saja itu ke muktamar. Kalau menurut muktamar itu yang terbaik *ya* sudahlah, mau apa lagi. Kita 'kan negara yang demokratis", kata Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tandjung, ketika ditanya mengenai kepemimpinan NU periode 1994-1999. Marzuki., *Dinamika NU.*, *op. cit.*, h. 30.

1996, saat Presiden Suharto membuka acara Mukernas RMI (*Râbithah Ma'âhid Islâmiyyah*) ke-5 di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Jawa Timur. Legitimitasi itu dilihat dari kedatangan Presiden yang bersedia menggandeng tangan Abdurrahman Wahid, sebagai ketua umum PBNU yang selama kepemimpinan pasca Cipasung belum pernah diterima Presiden. Sejak saat itulah, konflik internal mulai tidak terdengar santer lagi, dan hubungan NU dan Pemerintah normal kembali.²⁸

Begitupun dengan kelompok Abu Hasan sudah tak terdengar lagi, sejak peristiwa “gandengan tangan” tersebut. Bahkan, hingga Muktamar di Kediri tahun 1999 tidak ada fenomena balas dendam konflik dari kelompok mereka. Walaupun, pada tahun 1998, saat munculnya partai-partai baru, kelompok ini mendirikan partai SUNI.²⁹ Apakah karena situasi politik telah berubah, terutama sejak lengsernya Suharto?

Jelasnya, berita-berita mengenai konflik internal ini, telah ditelan angin kemesraan NU

²⁸ Marzuki., *ibid.*, h. 76-77.

²⁹ Tapi, tidak sesolid kelompok Cipasung yang hanya satu partai, PKB. Dari kelompok Abu Hasan melahirkan tiga partai; SUNI, PKU dimotori Yusuf Hasyim, dan PNU oleh Syukron Ma'mun. Belum lagi, yang sudah ada di PPP dst.

dengan Pemerintah atau ABRI sejak pertemuan di Genggong, kecuali saat jelang Konbes dan Munas Alim Ulama di NTB tahun 1997 yang sempat membuat 'acara tandingan', tapi gagal (tidak direspons)³⁰. Selain itu, juga karena perkembangan sosial politik yang terus berjalan dan berubah dengan cepat. Mulai dari agenda pemilu 1997, Sidang Umum MPR 1998, dan munculnya era reformasi pasca Soeharto lengser dari Presiden RI selama 32 tahun. Di mana euphoria politik telah merasuki semua elemen bangsa, termasuk semua aturan main (*rule of the game*) politik. Pemilu sebagai sarana memilih wakil rakyat dipercepat, 7 Juni 1999, berdasarkan Sidang Istimewa MPR 1999.

Gus Dur, Penagak Demokrasi NU

Melihat kenyataan bahwa PBNU dan warganya tidak berhasil dipengaruhi *state* saat pemilihan ketua umum PBNU di Mukhtar Cipasung oleh pihak pemerintah (baca: Suharto), maka sesuai dengan teori demokrasi versi Carol³¹,

³⁰ Ulasan sekitar manuver Abu Hasan dan kelompoknya, lihat "Karamnya Kapal Selam Abu Hasan" dalam *Aula*, No. 11 Th. XIX November 1997, h. 82-87. Ditegaskan Dirjen Sospol, "Pemerintah mempersilahkan PBNU pimpinan Gus Dur menggelar Konbes".

³¹ Lihat, bahasan sebelumnya (bab II) tentang etika politik, bagian

sistem yang ada di NU menunjukkan bahwa demokrasi telah berjalan. Apalagi, goyangan melalui KPPNU, setelah PBNU terbentuk juga tidak dapat menggoyahkan kepemimpinan hasil Mukhtar. Artinya, prinsip-prinsip berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan ajakan untuk berdialog telah diwujudkan (ingat kasus Abu Hasan). Sekalipun, akhirnya pihak yang terlibat dalam KPPNU harus dibebastugaskan dari struktur NU oleh PBNU, karena mereka tidak mau melakukan upaya dialog yang ditawarkan (*rujû' ilâ al-haq*).

Selain fenomena Mukhtar, demokratisasi juga dapat terlihat, ketika munculnya berbagai partai di era reformasi. Sebuah era yang digulirkan sesaat pasca (atau bersamaan) mundurnya Presiden Suharto tahun 1998. PKB adalah partai resmi yang dideklarasikan para tokoh PBNU, tapi partai lain yang berafiliasi ke warga NU, tidak dilarang, dihalang-halangi atau dicegah secara represif oleh PBNU. Hal ini, sekaligus menegaskan sikap untuk kembali pada jati diri Khittah 1926, sebagaimana hasil Mukhtar ke-29.³²

Menegakkan Khittah juga tercermin

demokrasi.

³² Hasil-Hasil Mukhtar ke-29, *op. cit.*, h. 202-203.

dalam hal memilih partai, saat pemilu 29 Mei 1997. Meskipun, sempat terjadi fenomena yang agak membingungkan di kalangan warga NU, khususnya.³³ Karena, sikap NU (baca: Abdurrahman Wahid) yang dekat dengan pengurus pusat orsospol tertentu. Seperti, seringkali Ia berjalan dan menemani Mbak Tutut sebagai salah satu ketua Golkar, ke berbagai pesantren.

Sebagaimana pula, pernah dilakukan sebelumnya, antara Abdurrahman Wahid dan mbak Mega, sebagai ketua umum PDI *de facto*. Tapi, setelah diputuskan bahwa orsospol mbak Mega tidak boleh ikut pemilu, karena *de jure* PDI-Suryadi yang dibolehkan pemerintah, Abdurrahman Wahid berganti menemani mbak Tutut. Menurut Abdurrahman, satu pertimbangannya adalah ideologis. Bila terjadi pemboikotan dari pendukung Mega, untuk “golput”, itu berbahaya. Sama juga, kalau warga NU dari PDI hanya lari ke PPP, maka akan terjadi ketidakseimbangan.³⁴

³³ Kebingungan ini sebenarnya, lebih karena belum meratanya sosialisasi Khittah sesuai dengan yang sebenarnya pada semua elemen NU. Sekalipun ini juga masih wajar, karena masa transisi. Lihat, MA. Sahal Mahfudh, “NU-nisasi Parpol ?” dalam *Nuansa Fiqh Sosial, op. cit.*, h. 225

³⁴ Perolehan akhir suara dan kursi, yang menjadikan PDI (Suryadi) penurunan dramatis dari pemilu 1992 ke 1997, lihat J. Kristiadi, dkk.(penyunt.), *Pemilihan Umum 1997: Perkiraan, Harapan, dan*

Bahkan, bisa jadi mematikan proses wawasan kebangsaan dan keislaman. Itu alasan kenapa mesti mengundang mbak Tutut, yaitu untuk mengimbangi. Hal tersebut, sesungguhnya bukan untuk kepentingan sesaat, memenangkan Golkar atau PPP, apalagi PDI, tetapi untuk memenangkan kepentingan NU sendiri, yang orientasinya memenangkan orientasi keagamaan berwawasan kebangsaan.³⁵

Kasus jalan-bersamanya Abdurrahman dengan Tutut merupakan hal aneh, sebenarnya. Sebab, saat Mukhtar di Cipasung kelompok Tutut inilah yang telah memberi dukungan secara *financial* kepada kelompok Abu Hasan melalui orang terdekatnya Tutut.³⁶ Tapi, itulah konsekwensi menempatkan Khittah 1926 bagi pengurus NU, khususnya Abdurrahman Wahid. Hemat pengkaji, semua itu tak lepas dari pedoman dasar kemasyarakatan Aswaja NU, yaitu prinsip

Evaluasi, (Jakarta: CSIS, 1997), khususnya h. 167-179.

³⁵ Penjelasan Abdurrahman Wahid “Perkembangan di Tengah Keprihatinan”, saat pidato pengantar laporan ketua umum PBNU Konbes 17-21 Nopember 1997 di Lombok Tengah NTB, mengutip *Aula*, No. 12 tahun XIX 1997, h. 34-36. Disebutkan juga, bahwa Abdurrahman mulai tanggal 20 April 1997, ia belum pernah bertemu dengan mbak Tutut. Sekali pernah ketemu via telpon di rumah Hartono. Dengan lain kata, tidak ada *deal* apapun antara NU dengan Golkar. Sebab, kita, kata Abdurrahman, tidak memperlakukan masalah tersebut sebagai masalah politik, tapi masalah ideologi.

³⁶ Bandingkan, *footnote* 175, bab ini.

keseimbangan (*tawazzun*), toleran (*tasammuh*), menegakkan kebenaran atau mencegah kelaliman (*amar ma'rûf nahî munkar*). Seperti juga, jauh sebelum peristiwa Mega dan Tutut, NU telah lama beriringan dengan PPP.

Pedoman lainnya, prinsip tengah-tengah dan keadilan (*tawassuth-i'tidâl*). Bisa dilihat ketika Abdurrahman dengan Mbak Mega, sebelumnya telah di" safari"kan ke berbagai Pesantren yang juga dilakukan sama terhadap Tutut. Dengan begitu, Abdurrahman Wahid, sebagai personifikasi NU telah menempatkan NU pada posisi yang tidak diskriminatif. Begitupun, dengan aktualisasi Khittah 1926.

Aswaja dan Demokrasi

Dalam sejarah NU dan perkembangan politik Indonesia, termasuk sebelum NU kembali ke Khittah tahun 1984, nilai Aswaja dan penerapan demokrasi (baca: *syûrâ*), juga tetap dipergunakan dengan konsisten (*istiqâmah*), baik melalui Muktamarnya, atau prinsip Islam Aswajanya.

Tahun 1939, saat Indonesia masih dijajah Belanda, NU bergabung dengan MIAI (*al-Majlis al-Islâm al-A'lâ Indonesiyya*).³⁷ Karena persoalan

³⁷ Semboyan MIAI, "Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali

sistem politik kolonial Jepang MIAI bubar, tahun 1943 Masyumi (*Majlis Syûrâ Muslimîn Indonesiyya*) menggantikan MIAI dan NU tetap terlibat di dalamnya³⁸ hingga Indonesia merdeka dan pemerintahan orde lama, pada tahun 1952. Dalam waktu yang bersamaan, tahun 1952, NU menyatakan diri keluar dari Masyumi dan menjadi partai tersendiri (partai NU), seperti keputusan hasil Mukhtar Palembang tahun 1952.³⁹

Partai NU dalam dua kali pemilu, 1955 pada era orde lama dan 1971 era orde baru, mendapatkan perolehan suara/kursi di parlemen

Allah dan janganlah bercerai berai” (Q.S. Syura: 103). MIAI lahir di Surabaya tanggal 21 September 1937, saat itu KH. A. Wahab Hasbullah mewakili NU, bersama PSII, PUI, Muhammadiyah, al-Irsyad, al-Islam, dan Hidayatul Islamiyah Banyuwangi serta Khoiriyah Surabaya. H.A. Basit Adnan, *Kemelut di NU: Antara Kyai dan Politisi*, (Solo: Mayasari, 1982), h. 19-20. Bandingkan Kacung Marijan, *Qua Vadis.*, *op. cit.*, h. 47-57; A. Gaffar., *Metamorfosis NU.*, *op. cit.*, h. 52-54; M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama.*, *op. cit.*, h. 99; Deliar., *Gerakan Modern.*, *op. cit.*, h. 262-264.

³⁸ Sebelum Indonesia merdeka, posisi Masyumi (Oktober 1943) menggantikan MIAI. Masyumi di zaman Jepang, lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dakhide (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985) cet. ke-2, khususnya, h. 184-186.

Melalui keputusan Mukhtarannya ke-16 di Purwokerto, 26-29 Maret 1946, NU masuk ke Masyumi, di era Sukarno, yang lahir 7 Nopember 1945 oleh keputusan Mukhtar umat Islam Indonesia di Yogyakarta. Einar Martahan., *NU dan Pancasila.*, *op. cit.*, h. 90-91. Basit Adnan, *Kemelut di NU.*, *op. cit.*, h. 17-22.

³⁹ Alasan-alasan NU keluar dari Masyumi, cukup kompleks, baik dari sisi keagamaan ataupun ruang berpolitik dalam federasi. Laode Ida, *Anatomi Konflik.*, *op. cit.*, h. 21-23. Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila.*, *op. cit.*, h. 109-114.

cukup signifikan, dibanding sebelumnya. Pemilu pertama orde baru tersebut, bagi NU justru memperbaiki hasilnya (18,7%) dibanding tahun 1955 (18,4%) Hal tersebut, membuktikan bahwa NU masih mempunyai banyak pendukung dan konkrit. Dengan perolehan suara yang persis di bawah Masyumi (1955) dan di bawah Golkar (1971), berarti wibawa kyai dan pesantren tetap terpelihara di basis dukungan NU; pedesaan dan santri.⁴⁰

Berikutnya, seiring dengan sistem perpolitikan orde baru, sejak tahun 1973-1984 partai NU ikut dalam fusi⁴¹ di PPP (Partai

⁴⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Pesantren.*, *op. cit.*, h. Lihat juga, Kacung Marijan, *Quo Vadis.*, *op. cit.*, h. 60-101, khususnya h. 77.

⁴¹ Fusi merupakan salah satu bentuk dari transformasi politik yang bertujuan menciptakan sistem politik yang stabil. Ada tiga tujuan fusi; pergantian lembaga politik lama (parpol lama) ke lembaga politik baru (parpol baru). Parpol hanya tiga, PPP, Golkar dan PDI. Kedua, fusi menghendaki pembatasan yang tegas antara pelembagaan peranan politik dan non politik. Ketiga, fusi menginginkan perubahan nilai lama ke nilai baru, yaitu Pancasila dan Eka Prasetya Pancakarsa. Mengutip Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai.*, *op. cit.*, h. 49-51.

Ide fusi, terlontar Presiden Soeharto sejak Februari 1970. Pada Muktamar ke-25, 20-25 Desember 1971 di Surabaya, NU menolak fusi partai Islam menjadi satu partai. Tapi, keputusan itu pada akhirnya dicabut, karena NU kemudian mendukung fusi partai sebagaimana keinginan pemerintah. Tepat, hari Jum'at, 5 Januari 1973, pimpinan unsur parpol menandatangani deklarasi parpol baru, PPP; KH. Idham Chalid (NU), H.M.S. Mintaredja (MI, asalnya Parmusi), H. Anwar Cokroaminoto (SI), H. Rusli Halil (Perti), dan KH. Masykur (NU). Lihat, Kacung., *Quo Vadis.*, *op. cit.*, h. 102-109.

Persatuan Pembangunan) dengan lambang gambar ka'bah. PPP dianggap sebagai representasi partai umat Islam Indonesia, bersama MI, Perti, PSII, dan Parmusi, sesuai dengan perundang-undangan pemerintah. Awal berada di PPP, NU cukup mewarnai partai dan kritis terhadap pemerintah, oleh Nakamura, NU disebut sebagai tradisionalisme radikal⁴². Namun, lama kelamaan, NU tidak semakin baik posisi politisnya, baik dalam partai ataupun pemerintahan, justru semakin termarginal.⁴³

Setelah mempertimbangkan seluk beluk dan sepak terjangnya dalam dunia politik, khususnya di PPP, ternyata NU semakin kurang memperhatikan jam'aah-nya dan mereka tidak mendapatkan tempat yang proporsional dari NU. Pada tahun 1984, melalui Muktamarnya, akhirnya NU memutuskan untuk kembali ke khittah NU 1926 dan tidak lagi mengurus soal-soal politik praktis, apalagi menjadi partai politik. Hal itu merupakan bagian rekomendasi para ulama NU, setahun sebelumnya, pada Munas Alim Ulama NU

⁴² Nakamura, "Tradisionalisme Radikal.", dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme.*, *op. cit.*, khususnya, h. 72-73.

⁴³ Kedudukan NU dalam PPP hampir sama dengan kedudukannya dalam Masyumi. Einar., *NU dan Pancasila.*, *op. cit.*, h. 149. Proses marginalisasi NU dalam PPP, dapat lihat A. Gaffar., *Metamorfosis NU.*, *op. cit.*, h. 67-76.

di tempat yang sama, Situbondo Jawa Timur.⁴⁴

Keputusan tersebut sampai dengan Muk-tamar ke-30 tahun 1999, NU tetap mempertahankan sebagai *jam'iyah dîniyyah*, dan tidak terjun ke dunia politik praktis, seperti garis perjuangannya tahun 1926. Hanya saja, pada Muktar Kediri tersebut, memberikan ruang khusus untuk departemen atau divisi politik atau *lajnah siyâsah* (politik). Hal ini, mengingat pada tahun 1998, NU telah ikut mendirikan partai bagi warga NU, yang disebut PKB.⁴⁵ Meskipun, warga NU tetap diberikan kebebasan untuk memilih partainya sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan, sistem demokrasi di NU melalui Muktar telah dilakukan untuk setiap momentum politik yang berkembang. Hal tersebut, sebagaimana mekanisme *bahtsul masâ'il* untuk persoalan keagamaan lain, yang sedang berlangsung (*waqi'iyah-maulû'iyah*) di masyarakat, mulai

⁴⁴ Cukup banyak sumber-sumber tentang kembali ke khittah 1926 dan kaitannya dengan penerimaan asas Pancasila sebagai dasar NKRI. Seperti Mahrus Irsyam., *Ulama dan Partai Politik.*, *op. cit.*, h. 137-151. Einar., *NU dan Pancasila.*, *op. cit.*, h. 187-200.M. Ali Haidar, *NU dan Islam di Indonesia.*, *op. cit.*, h. 210-225. Andree., *NU vis-à-vis.*, *op. cit.*, h. 271- 276. Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi.*, *op. cit.*, h. 137-147.

⁴⁵ Lihat Sekjen PBNU, *Laporan Pengurus Besar NU periode 1994-1999*, h. 19.

persoalan *syakhshiyah* (*private*) ataupun masalah sosial lainnya (*syu'ûn ijtimâ'iyah*); ekonomi, budaya, kesehatan, buruh, tani, dst.⁴⁶

Semua itu, adalah pembelajaran berpolitik secara moral (etik). NU punya tugas dan kewajiban menegakkan moralitas politik, sebagaimana tercantum dalam “sembilan pokok pedoman berpolitik” dan konsep “mabadi' khairu ummah” sebagai manifestasi nilai Aswaja.⁴⁷ Sekalipun, untuk menegakkan Khittah 1926 tersebut, warga NU tidak semua dapat memahami dengan benar dan tepat, sebagian masih bingung.⁴⁸

⁴⁶ Lihat KH. A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu-1926 s/d kedua puluh sembilan 1994*, (Jakarta: RMI, 1997).

⁴⁷ Lihat, keputusan Munas Alim Ulama No. 04/04/1992 tentang rumusan Mabadi Khara Ummah dan Penjelasan Khittah NU. L T N PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes NU di Bandar Lampung*, (Semarang: Sumber Barokah, [t.tt]), h. 73-165. Butir pokok *mabâdi' khaira ummah*; *ash-shidqu* (kejujuran/kebenaran), *al-amânah* dan *al-wafâ bi al-'ahdi* (dapat dipercaya, setia, dan tepat janji), *al-'adâlah* (proporsional dan taat asas), *at-ta'âwun* (tolong menolong, setia kawan, gotong royong dalam kebaikan dan taqwa), dan *istiqomah* (ajeg-ajeg, berkesinambungan, dan berkelanjutan).

⁴⁸ Maka, wajar bila pemahaman akan khittah 1926, terbagi dalam tiga model: a). khittah murni; warga NU yang di dalam menjelaskan dan mengamalkan khittah 1926 secara murni dan utuh, tanpa mengurangi, menutupi bagian tertentu, dan tanpa menambahi yang diwarnai oleh kepentingan pribadi; b). khittah Plus; penjelasan dan pengamalan warga NU atas khittah 1926 secara berlebihan, seperti melarang terhadap hal yang sebenarnya tidak dilarang dalam khittah; dan terakhir, c). khittah minus; warga NU yang di dalam menjelaskan dan mengamalkan khittah 1926 secara tidak utuh, masih ada yang ditutup-tutupi, sebab akan merugikan

Melalui bahasan di atas, apakah dengan “perilaku” Gus Dur di atas, hakikat NU telah berubah? Mengutip pendapat Nakamura, hakekat keagamaan dasar NU tetap *istiqâmah*. Dalam kancah politik sebagai respons atas perkembangan politik nasional, yang berubah ekspresinya saja.⁴⁹ Dengan demikian, konsistensi Khittah NU 1926 sebagai hasil Muktamar ke-27, yang dipertegas pada Muktamar ke-28, dan diteguhkan kembali pada Muktamar ke-29, tetap terpelihara melalui Gus Dur. ❧

kepentingan pribadinya. Tiga model ini penilaian Abdurrahman Wahid, mengutip Laode Ida, *Anatomi Konflik.*, *op. cit.*, h. 98-99.

⁴⁹ Mengutip Marzuki Wahid, dkk. *Dinamika NU.*, *op. cit.*, h. 95.

Daftar Pustaka

- Tashwirul Afkar*, Edisi No. 1/Mei-Juni 1997
- Tim INCReS, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, (Jakarta: Rosda, 2000)
- Masykur Maskub, "Epilog", dalam Marzuki Wahid., *Dinamika NU*.
- Mitsuo Nakamuro, "Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas Awal 80-an: Dari Muktamar Semarang 1979 Hingga Muktamar Situbondo 1984", dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme*.
- Martin van Bruinessen, *NU Tradisi*.
- LTN PBNU, *Keputusan Munas*.
- Martin., "Perjuangan Meraih Kekuasaan.", dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme*.
- Nakamuro, "Tradisionalisme Radikal.," dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme*.
- Greg Fealy, "Percikan Api.." dalam Greg Fealy., *Tradisionalisme*.
- Robert W. Hefner., *Civil Islam*.
- Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal.*,
- Iqbal Chaniago, "Mengukur Pendulum Politik NU" dalam Zainal Arifin., *Membangun Budaya*.
- Buku putih PBNU, *Seputar Muktamar NU Cipasung*, (Jakarta: PBNU, 1996)

Choirul Anam, *Membanding Ulah GPK Abu Hasan*,
(Surabaya: Aula, 1996)

Marzuki., *Dinamika NU*.

Aula, No. 11 Th. XIX November 1997

Hasil-Hasil Muktamar ke-29

MA. Sahal Mahfudh, "NU-nisasi Parpol ?" dalam
Nuansa Fiqh Sosial

J. Kristiadi, dkk.(penyunt.), *Pemilihan Umum 1997:
Perkiraan, Harapan, dan Evaluasi*, (Jakarta:
CSIS, 1997)

Aula, No. 12 tahun XIX 1997

H.A. Basit Adnan, *Kemelut di NU: Antara Kyai dan
Politisi*, (Solo: Mayasari, 1982)

Deliar., *Gerakan Modern*.

Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit:
Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*,
terj. Daniel Dakhide (Jakarta: Pustaka Jaya,
1985) cet. ke-2

Basit Adnan, *Kemelut di NU*.

Laode Ida, *Anatomi Konflik*.

Zamakhsyari Dhofier, *Pesantren*.

Kacung., *Quo Vadis*.

Nakamura, "Tradisionalisme Radikal.", dalam
Greg Fealy., *Tradisionalisme*.

Masyumi. Einar., *NU dan Pancasila*.

A. Gaffar., *Metamorfosis NU*.

Mahrus Irsyam., *Ulama dan Partai Politik*.

- M. Ali Haidar, *NU dan Islam di Indonesia*
Andree., *NU vis-à-vis*,
Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi*.
Sekjen PBNU, *Laporan Pengurus Besar NU periode*
1994-1999
- KH. A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil*
Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama
Kesatu-1926 s/d kedua puluh sembilan 1994,
(Jakarta: RMI, 1997).
- L T N PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama &*
Konbes NU di Bandar Lampung, (Semarang:
Sumber Barokah, [t.tt])
- Laode Ida, *Anatomi Konflik.*,
Marzuki Wahid, dkk. *Dinamika NU*.

GUS DUR: Pikiran, Ucapan dan Tindakan (Deskripsi Ke-Indonesiaan di Dunia)

Andriyanto, S. Ag.

Michael Head seorang penulis buku “100 Tokoh Berpengaruh di Dunia”, pernah memberikan uraian peringkat 100 tokoh di dunia berdasarkan hasil dari fikiran, ucapan dan tindakan selama hidup tokoh-tokoh dalam buku tersebut.

Dalam buku itu ditempatkan sosok Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh pertama yang paling berpengaruh di dunia, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam tempo tidak lebih dari 23 tahun dapat membawa perubahan dan perkembangan masyarakat Arab (Makkah – Madinah) menjadi masyarakat yang kuat Aqidah, berpengetahuan tinggi, maju dalam kebudayaan, dan masyarakat yang beradab serta perilaku yang mulia. Karena memang Nabi Muhammad SAW

ditakdirkan menjadi seorang Rosul pilihan yang tak tertandingi, baik dari segi spiritual maupun segi kemanusiaan, hingga saat ini oleh kita.

Lalu ditulis sebagai peringkat ke dua dalam buku itu adalah Kal Marx, seorang pencetus faham “Komunis” hingga ajaran dan pengaruhnya masih dirasakan oleh Bangsa Indonesia yang puncaknya mencuat ditahun 1948 dibawa oleh Muso dan tahun 1965 dibawa oleh DN. Aidit. Kemudian akhirnya faham komunis dijadikan sebagai bahaya laten yang harus diwaspadai dinegara-negara yang memegang fahamteokratis.

Maka tidaklah kalah pentingnya untuk menempatkan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sepeninggalannya untuk menjadikannya, bukan hanya layak menyandang Gelar Pahlawan Nasional, tapi juga sebagai peringkat dua tokoh berpengaruh di dunia setelah Nabi Muhammad SAW berdasarkan bukti perjalanan hidup beliau dari Fikiran, Ucapan dan tindakan.

Betapa Gus Dur menjadi referensi semua kalangan Indonesia bahkan dunia pada saat beliau masih hidup terlebih sekarang beliau sudah wafat, baik yang menyangkut persoalan keIndonesiaan maupun problem-problem yang sedang dihadapi bangsa-bangsa didunia saat ini dan mendatang. Kendati seringkali menuai kritik

dan kecaman bagi sebagian kalangan yang tidak suka dengan Gus Dur atau halusnya “bodoh” dalam memahami dan memaknai fikiran, ucapan tindakan Gus Dur yang dipandanginya oleh mereka “Kontroversi”.

Secara sederhana ada tiga konsep pokok yang diusung oleh Gus Dur selama sepak terjangnya hidup dalam mengeksploitasi pemikiran, ucapan dan tindakan yang menyangkut keIndonesiaan dan dunia, yaitu:

Agama

Sebagai agamawan dan pemeluk Islam, Gus Dur benar-benar mengimplementasikan Islam secara Universal dan “Rahmatal Lil ‘Alamin”. Bukan hanya diterima dan diakui oleh pemeluk agama Islam sendiri tetapi juga dibenarkan oleh pemeluk-pemeluk ajaran agama lain bahkan sekaligus yang tidak beragama.

Sebagaimana ditulis oleh M. Syafi’i Anwar, bahwa hal ini merupakan salah satu tanda dari penganut paradigma Substantif-inklusif yang meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad bukanlah untuk membangun kerajaan atau Negara. Tetapi seperti halnya pada Nabi lainnya, yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan.

Dengan demikian misi Nabi Muhammad tidak pula diartikan sebagai langkah untuk membangun negara atau Sistem Pemerintahan tertentu.

Meninjau ungkapan pemikir mesir Husain Fawzi al-Najjar, concern Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam adalah lebih tertuju pada upaya untuk mempersatukan para pemeluk Islam (al-wahdah al-Ijtimai) dari pada membangun sebuah negara atau sistem pemerintahan.

Dalam pemikiran Gus Dur, Agama tidak harus dilabel formalkan dan terikat oleh ruang dan waktu. Melainkan agama harus menjadi landasan bergaul secara dinamis mengikuti konteks perkembangan zaman, dengan tetap memegang prinsip-prinsip substansial agama. Karena pada dasarnya kesadaran agama (hidayah) ada dan muncul pada setiap orang.

Fikiran Gus Dur mengenai memperkuat Substansi Islam ini, yang lalu kemudian terucap ditahun 1980 an tentang "Pribumisasi Islam". Ia meminta agar wahyu Tuhan dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hikum dan rasa keadilannya.

Tindakan yang dimunculkan oleh Gus Dur tentang "Pribumusasi Islam" inilah yang memunculkan tingginya perilaku tasammuh dan

tawazun dalam kehidupan antar dan diantara umat beragama. Sikap inilah yang dimiliki oleh Gus Dur sehingga akhirnya Gus Dur mampu merangkul agama-agama lain di dunia dan diangkat menjadi Presiden agama-agama dan budaya Internasional.

Negara (State)

Dalam banyak referensi disebutkan mengenai bentuk-bentuk Negara, antara lain bentuk Negara berdasarkan agama (teokratis), seperti Negara yang berada dikawasan Timur Tengah, Arab, dll. Bentuk Negara berdasarkan Kerajaan (Monarkis) seperti Negara Inggris. Bentuk Negara Atheis seperti Unisoviet, Bentuk Negara Liberalis seperti Negara Amerika Serikat dan Bentuk Negara Demokratis.

Gus Dur Menghendaki bentuk Negara Demokratis yang harus dipegang teguh dan diperjuangkan oleh Negara Indonesia dengan asas dan dasar Pancasila dan semangat hukum UUD 1945 yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur pendiri bangsa ini. Lepas dari latar belakang sejarah dan sistem pemerintahan (Government) yang dianut oleh masing-masing bangsa. Apakah sistem

Presidensial, sistem Parlemerter, Demokrasi terpimpin atau Demokrasi Liberalis.

Maka menurut Gus Dur minimanya da tiga syarat untuk menuju suatu Negara yang demikratis, yaitu: Tegaknya Hukum, terciptanya rasa keadilan, dan Pemberantasan Korupsi.

Tegaknya Hukum

Hukum harus selalu ditegakan tidak pandang bulu, itulah “Jargon” yang selalu diucapkan oleh Gus Dur dalam setiap kesempatan berbicara tentang hukum. Tidak pandang pejabat atau rakyat kecil, apabila melanggar hukum maka harus diproses sesuai dengan hukum (Krustitusi) yang berlaku dinegara ini.

Memang kepentingan dan berat menegakkan hukum, terbukti dalam setiap kasus pelanggaran hukum, di Indonesia justru banyak yang terlepas dari jeratan hukum karena memang kurang lengkapnya peraturan hukum di Indonesia dan lemahnya semangat penegakan hukum yang dimiliki oleh para penegak hukum sendidri, baik MA, Kejaksaan dan TNI-Polri.

Pelajaran besar bagi bangsa ini mengenai penegakana hukum yang dilahirkan oleh Gus Dur, misalnya ketika beliau “digoyang” oleh Dewan

Pusat yang terhormat tentang keterlibatannya dengan dana “Bulog Gate” dan dana bantuan dari Sultan Brunei. Gus Dur denganantang dan tegas mengatakan “Mari diproses secara Hukum”.

Puncak dari perjuangan Gus Dur mengenai penegakan Hukum adalah seperti yang terungkap bahkan disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia bukan lama ini, yaitu tertangkapnya “Markus” karena hikmah adanya pertentangan antara “KPK dan Polri”.

Terciptanya Rasa Keadilan.

Terciptanya rasa Keadilan merupakan hasil dari Implementasi tegasnya hukum. Karena Substansi dari tegaknya hukum adalah terpenuhinya rasa keadilan oleh masyarakat di semua kalangan, tanpa memandang “kelas” dan status sosial.

Seperti yang diungkapkan oleh Hadits Nabi bahwa “apabila Fatimah mencuri akan saya potong kedua tangannya”. Dan juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, ketika ia menemukan pencuri karena memenuhi hajat ketahanan hidup, maka Umar melepaskannya. Artinya bahwa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dengan tetap konteks dan contents keadilan itu sendiri.

Tidak sebaliknya dengan yang terjadi diIndonesia banyak kasus hukum yang tidak diputuskan dengan rasa keadilan masyarakat. Contoh kecil dan sederhana, orang miskin yang mencuri dua biji buah dihukum tiga bulan tahanan, sementara yang korupsi milyaran rupiah masih tetap bernafas lega untuk bias kabur dari jeratan hukum.

Penghapusan TAP MPR No. 25 Tahun 1965 merupakan bukti keberanian langkah Gus Dur dalam menciptakan tegaknya rasa keadilan dalam hukum. Karena setiap warga Negara mempunyai hak dan perlakuan yang sama dari Negara.

Pemberantasan Korupsi.

Pemberantasan korupsi terus menerus sampai keakar-akarnya, demikian yang kerap kali diungkapkan oleh Gus Dur, ini adalah dosa besar warisan Orde Baru. Karena sepanjang sejarah "Orde Baru" hanya ada tiga program penting yang berhasil digulirkan oleh pemerintahan Orde Baru, yaitu KB, Transmigrasi dan Pertanian melalui Repelita.

Selebihnya adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penyimpangan hukum, KKN, dan lain sebagainya, hingga ditahun 1997

Indonesia mengalami “Krisis Moneter” bahkan “Krisis Multi Dimensi”.

Meminjam Istilah Munawar Fuad Nooh bahwa Korupsi sudah menjadi budaya di Indonesia sehingga tidak gampang begitu saja menghapusnya, karena hamper disemua lini di Indonesia kerap kali menjalankan praktek KKN.

Program pembangunan yang tidak merata dan tidak adil dengan sistem “**Triple Down Effec**” dan angka kemiskinan yang semakin meningkat menjadikan sulit bangsa ini untuk bangun maju dari keterpurukan.

Maka tiga poin penting ini yang harus terus menerus di upayakan agar terwujud Negara yang Demokratis dan Sejahtera.

Kemasyarakatan – Kemanusiaan.

“*Pluralisme*” menjadi sinyal yang ampuh bagi Gus Dur dalam menganalisa dan memperjuangkan kemajemukan masyarakat Dunia khususnya kemanusiaan di Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gus Dur memakai masyarakat Dunia dan Indonesia memiliki latar belakang sejarah, budaya, etnis, suku, agama, warna kulit, yang berbeda-beda. Maka Gus Dur mampu memposisikan secara

proposidnal, mendudukannya secara elegan, dan memegangnya dengan penuh bijak dan hati-hati sesuai dengan konteks Zaman.

Maka dari persoalan pluralisme kemasyarakatan – kemanusiaan yang menyangkut konteks Indonesia dan dunia ini. Gus Dur mempertegas dua hal yang sangat signifikan dan fundamental, yaitu perjuangan Hak Asasi Manusia dan Perdamaian.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Banyak terjadinya tindak pelanggaran HAM di dunia ini khususnya masyarakat Indonesi, akibat rendahnya tingkat kesadaran dalam membangun dan menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, juga karena kualitas intelektual pemikir Islam yang tidak memadai dan kurang berani dalam melakukan upaya pembaruan fiqih.

Tajam dan berani ketika Gus Dur melontarkan konsep gagasan “penghapusan” hukuman mati bagi mereka yang keluar dari Islam (Murtad) atau pindah ke agama lain karena tindakan tersebut bertentangan dengan deklarasi hukum universal Zenewa mengenai Hak Asasi manusia yang menjamin kebebasan untuk berfikir, memeluk agama dan kepercayaannya masing-

masing.

Mengutip pendapat Moesa pemikir Islam progresif asal Afrika seperti yang ditulis oleh M. Syafi'i Anwar. Bahwa hukuman mati bagi mereka yang murtad berdasarkan kesepakatan ulama masa pertengahan yang menganggap muratd sebagai perlawanan dalam agama dan hukumannya telah ditetapkan dalam hukum. Padahal menurut Moesa, bahwa murtad bukan berarti perlawanan terhadap agama dan ketentuan tentang murtad tersebut tidaklah bersumber dari Al-Qur'an tetapi dari Al-Hadits yang bias jadi diragukan kesahihannya karena memungkinkan terjadi kesalahan transmisi atau pemahaman.

Terakhir pembelaan Gus Dur terhadap "Goyang Ngebor" Inul daratista, di tengah hujatan dan kecaman para tokoh agama dan tokoh dunia seni (Roma Irama) karena dianggap melanggar "Etika Moral" bangsa. Gus Dur tampil dengan tegas melakukan perlawanan bahwa hal itu merupakan pembunuhan kebebasan hak seni dan kreatifitas seseorang yang melanggar HAM. Karena Gus Dur berpedoman pada wahyu "Tiada yang tetap dalam kehidupan kecuali Wajah Tuhan" dan kaidah usul fiqih Al-Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi wujudan wa 'adaman. Dan masih banyak kasus HAM lainnya yang dilakukan

pembelaannya oleh Gus Dur diantaranya pembelaan terhadap diskriminasi kelompok minoritas, tampilnya kembali seni Barong sae dari China, penetapan tahun baru China sebagai hari besar Nasional, dan sebagainya.

Perdamaian

Tepatnya perdamaian dunia yang menjadi poin sangat penting bagi Gus Dur didalam memperjuangkan HAM. Tidak ada yang manfaat apabila terjadinya perang, dan tidak ada yang menang apabila perang usai. Yang ada hanya penderitaan dan kesengsaraan masyarakat dan penindasan hak-hak asasi manusia akibat perang. Tertinggalnya generasi masa depan, hancurnya sendi-sendi kehidupan dan budaya suatu bangsa, dan terlambatnya pemulihan membangun peradaban dunia.

Tanpa ragu Gus Dur mengancam invasi Amerika Serikat ke Irak yang kemudian berhasil menumbangkan Rezim Saddam Hussein, karena peperangan yang tidak seimbang. Bahkan dalam perkembangan kemudian, militer Amerika Serikat berhasil menangkap hidup-hiduo Sadam Husein.

Dalam konteks ke Indonesiaan Gus Dur lebih memilih mundur atau diberhentikan

oleh DPR sebagai Presiden, dari pada terjadi pertumpahan darah dikalangan pendasarnya dengan mereka yang “mempecunangi” ini adalah cerminan bahwa Gus Dur lebih mengedepankan perdamaian untuk segalanya.

Demikian sekilas Deskripsi Fikiran, Ucapan dan Tindakan Gus Dur sebagai bapak Pluralis, pejuang demokrasi dan HAM, serta Pahlawan Nasional. Mudah-mudahan dapat diambil contoh teladan guna meneruskan cita-cita dan perjuangannya sepanjang masa. *Wallahu'alam.* ❧

GUS DUR, ISLAM INDONESIA dan Pancasila

Moh. Sulhan

Dosen Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD
Bandung

Pengantar

Membicarakan diskursus islam, nasionalisme, libelarisme, kebudayaan di Indonesia nyaris tak akan pernah sempurna tanpa menyinggung keberadaan Gus Dur [1940-2009]. Gus Dur atau Abdurrahman ad Dakhil [sang penakluk] sepertinya tetap menjadi daya tarik tersendiri dalam studi ke Indonesiaan. Meski kini telah pergi, cucu pendiri NU *al maghfurllah* KH. Hasyim Asy'ari ini akan tetap hidup di hati bangsa Indonesia. Semangat dan spirit perjuangan yang sudah diukirnya akan tetap lestari. Dia mewakili pribadi sederhana yang suka kajian agama, kebudayaan dan pemikiran kritis. Meski telah

berselancar di berbagai pergaulan global tetapi tetap menyenangkan tradisi pesantren yang menjadi asal usulnya. Ciri yang paling menonjol adalah dia sangat terbuka, dan membuka diri pada “modernisme” dan “globalisme”. Pergaulan yang luas menyeberangi budaya yang beragam semakin mempertajam “*insight*” yang dampaknya dapat dibaca bagaimana ia memandang kemajemukan [pluralisme], hubungan antar agama, hubungan Islam dan Negara, serta pandangannya tentang ideologi. Keterbukaan diri menjadikan kaya perspektif, selalu berbeda, dan sering kali *nyeleneh* karena berbeda dari pandangan mainstream yang dominan. Ini boleh jadi karena kelebihan pandangan dunia [*world view*] yang memunculkan kreatifitas berfikir yang brilian. Dampaknya juga terlihat betapa ia juga sangat kritis, bahkan kritis pada tradisi, dan agama yang menjadi sandaran hidup dan sumber inspirasinya. Meski sebenarnya layak disebut pembaharu, tetapi ia tetap rendah hati, dan senang disebut Kiyai saja, bukan reformer, gak umum di Indonesia. Kiyai lebih pas, *opo-opo di ayahi* [segala hal dapat dilakukan]

Lahir dari lingkungan pesantren. Pesantren terkenal kaya tentang pengetahuan, tradisi, sejarah, pengalam hidup dan ajaran keluhuran.

Pelacakan masa lalu diperlukan. Gus Dur sangat menyadari tentang hal itu. Dalam salah satu tulisannya menandatangani ,

“Pembaharuan yang kokoh bukanlah pembaharuan yang mencaci maki masa lampau, tetapi yang memahaminya secara penuh. Mungkin pembaharuan itu sendiri terasa konvensional, ‘biasa-biasa’ saja, tidak main bongkar-bongkaran, melainkan hanya melanjutkan belaka tradisi berfikir yang telah berjalan. Namun, wajah konvensional itu menyembunyikan dalam dirinya peralihan sikap dan pandangan hidup yang mendasar. Karena memiliki fungsi aplikatif yang sangat besar. Bukan hanya sekedar asah fikiran dan hanya adu argumentasi belaka”¹

Di sini slogan pesantren, *‘almuhafadhotu alal qadimi as sholih wal akhdu bil jadid al aslah’*, akan tetap relevan, memiliki semangat zaman, mengandung pesan terbuka pada pembaharuan, pada sisi yang lain tetap teguh pada tradisi lama yang baik, yang menjanjikan hidup, kedamaian dan kemaslahatan.

Kiprah yang nyaris sempurna di NU dan Pesantren. Tak ada salahnya kalau kemudian muncul adigium , Gus Dur adalah NU, dan NU adalah Gus Dur. Juga Gus Dur adalah pesantren

¹ Lihat dalam *“Perluakah Pelacakan ?*, Pengantar Jurnal *“Pesantren”*, No 04/VOL.III/1986

dan pesantren adalah Gus Dur. Ini karena Gus Dur nyaris secara memadai dapat menjembatani diberbagai forum nasional dan internasional mengangkat NU dan Pesantren sebagai 'icon' penting dalam studi islam di Indonesia. Karenanya tak menjadi persoalan kalau kemudian dia menjadi semacam representasi ke dua lembaga tersebut. Karena dia nyaris bisa mewakili untuk bicara atas nama, untuk dan kepentingan pesantren dan NU, baik menyangkut masalah esensi, posisi, bahkan hubungannya dengan ekonomi, social dan politik. Keberhasilan yang lambat laun membawa NU dan Pesantren di terima di semua lapisan. Mulai gaul dengan birokrasi, menteri, presiden, politik elit, pemikiran maju dan tidak dipandang sebelah mata. Sangat berbalik diametral dengan kesan lama, tradisional, kolot, dan anti kemajuan sebagaimana dicibirkan saudara muslim lainnya. Kini sepertinya menjadi titik balik meminjam F. Capra, dan sebaliknya malah terjadi reaktualisasi progresif atas tradisi yang dulu sempat dicaci maki, dianggap kurafat dan sumber keterbelakangan Islam. Abad ini nampak adanya gejala renaissanc tradisionalisme yang sejalan dengan trend baru kebangkitan agama. Dimulai dengan pembacaan ramah atas tradisi, yang belakangan ini muncul kepermukaan sebagai bagian perubahan sudut

pandang yang lebih akomodatif atas kepercayaan lokalitas. Abad ini sepertinya menjadi momentum penting kebangkitan. Sepertinya, prediksi Naisbitt² atas kebangkitan agama dan tradisi pada millennium ketiga ini bukan isapan jempol belaka. Tanda-tanda semakin menguatnya ruang untuk berkembang bagi aneka kepercayaan local dan *indogeneous* tradisi semakin kasat mata. Ini juga yang mungkin agak sejalan dengan semakin di terimanya NU dalam konteks nasional.

Pengamat Islam asal Deakin University Greg Barton melihat dengan semakin bergeliatnya apa yang ia sebut sebagai “tradisionalisme Radikal” memantapkan, bagaimana Abdurrahman Wahid memang layak mewakili golongan NU dan Pesantren yang mengusung liberalisme. Berikut paparannya.

“Sejak mengemban kepemimpinan Nahdlatul Ulama [NU] pada bulan Desember 1984, retorika Abdurrahman Wahid nampak kian bernada liberal dan progresif. Ia banyak bersikap fleksibel dan positif dalam merespon modernitas, dan menegaskan bahwa watak pluralistic dan watak multi-komunal masyarakat Indonesia modern haruslah dihormati dan dipertahankan dari kecenderungan-kecenderungan

² Jhon Naisbitt dan Patricia Aburdane, “Mega Trends 2000”, Jakarta, Bina Aksara, 1987. h. 754.

sektarianistik. Berkaitan dengan sumber-sumber pemikiran Islam, ia mengkombinasikan sintesis yang canggih dari apa yang terbaik di dalam nilai-nilai modernitas dan komitmen terhadap rasionalitas dan keulamaan maupun kebudayaan tradisional. Ia dengan senang hati menerima cap “Progresif” yang dilekatkan terhadap pemikirannya, sebab komitmennya pada adaptasi tiada henti didalam penerapan social nilai-nilai keagamaan untuk secara tepat mempertemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang di masyarakat [kendati demikian tetap harus diingat bahwa sebenarnya ia tetap konservatif di dalam keyakinan-keyakinan inti teologisnya]. Ia tidak takut dengan cap “liberal” tersebut, bahkan ia berpendapat bahwa nilai-nilai inti islam adalah nilai-nilai “Liberal”³.

Gaya pemikiran dan penampilan yang nyentrik sebagai figure dan pimpinan NU dan Pesantren secara alamiah melekatkan ia sebagai tokoh liberal, Nu liberal dan bahkan pesantren liberal. Gaya pemikiran progresif berbasis tradisi yang di sintesakan dengan khazanah modernitas menjadi kemasan baru yang lebih kaya, lebih berani, lebih percaya diri. Abid al Jabiri menyebut kecenderungan ini sebagai postra [post tradisionalisme] yang menemukan momentum

³ Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta, LKIS, 1997.

setelah modernitas menemui ajal, karena gagal mensejahterakan bathin manusia. Sosok Gus Dur layak jadi *pace maker* kebangkitan Islam Modern di Indonesia.

Dinamika Islam Indonesia

Islam Indonesia menarik untuk di cermati. Dari awal kedatangannya sejak abad VII atau XII M sudah mengundang banyak perdebatan. Apakah Islam di Indonesia datang langsung dari Tanah suci Mekah, dari Persia, atau dataran India. Atau yang paling mutakhir dari persentuhan dengan budaya China yang sudah sangat kuat sejak zaman kerajaan di tanah Jawa. Semua data dan argumen dapat mendukung kearah pilihan mana yang disenangi. Namun yang pasti ada beragam pendekatan yang dijadikan alat transmisi bagaimana Islam sampai ke Indonesia. Data dari penelusuran sarjana belanda semisal J. C. Van Leur⁴, M.C. Ricklefs⁵ menunjukkan keragaman. Melalui jalur pendidikan, perdagangan, Kesenian, tasawuf, perkawinan, kebudayaan, pertukaran dan

⁴ J.C. Van Leur, "*Indonesia Trade and Society*", Bandung, Sumur Bandung 1960. Hlm. 91.

⁵ M.C. Ricklefs, "*Islamisasi di Jawa : Abad 14 hingga 18*" dalam Ahmad Ibrahim Dkk.[ed.], *Islam di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1989. Hlm 74.

jaringan pelajar Nusantara yang menuntut ilmu di Mekah. Jaringan perdagangan salah satunya menjadikan ciri paling nampak bagaimana Islam diterima di Indonesia. Taufik Abdullah mencatat, pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia dan India juga ada yang sampai ke kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad 7 M. [abad I H] ketika pertama kali Islam berkembang di Timur Tengah. Pelabuhan pelabuhan penting di Sumatra dan Jawa sering disinggahi pedagang asing, seperti Lamuri [Aceh], Barus Palembang, Sunda Kelapa dan Gresik Jawa sejak abad I sampai abad 7 M⁶. Dampak dari transmisi model ini menjadikan Islam sangat terbuka dan adaptif. Ini tentu berbeda dengan karakter Islam di Spanyol, di Andalusia, Maroko, Persia, Libiya yang secara umum melalui peperangan dan penaklukan. Dampaknya selalu muncul perlawanan, dendam, darah mengalir dan pasang surut Islam di seputar tanah Arab, Afrika dan Eropa. Namun, di Indonesia ada sedikit perbedaan. Karena jalur transmisi yang beragam, islam nampak lebih luwes, lebih diterima dan mudah melakukan sintesis dengan budaya Indonesia. Budaya yang semula ada dari tradisi Hindu-Jawa di beri

⁶ Taufik Abdullah [ed.], “*Sejarah Umat Islam Indonesia*”, Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, 1991. Hlm 34.

sentuhan nilai dari dasar Islam oleh para Wali [wali sembilan] sehingga terbebas dari problem aqidah. *Niyat karena Allah* dan diawali *bismillah*. Disini sebenarnya ada dialog kreatif antara Islam dan budaya local Indonesia.

Gus Dur dalam kontek Islam ke-Indonesiaan sabenarnya mampu memposisikan bagaimana Islam sebagai sumber kearifan hidup itu dapat diterima tanpa harus dikonflikkan dengan budaya Indonesia. Islam dan budaya di Indonesia dapat saling melengkapi dan memperkaya. Sejalan dengan argument Leif Manger misalnya, yang melihat agama bukan persoalan hitam putih, bukan persoalan tunggal, milik Timur Tengah, tetapi Islam dimungkinkan melakukan dialektika yang dinamis. Antara Islam dalam kategori universal dengan lokalitas dimana ia hidup. Hal ini dikarenakan sekalipun Islam memiliki karakter universal, ia juga merupakan produk dari pergulatan dengan kontek local⁷. Tentu pandangan ini seperti memberi spirit baru bagi tumbuh kembangnya tradisi. Tak berlebihan jika abad ini disebut Naser atau Hanafi sebagai abad reaktualisasi progresif atas tradisi.

⁷ Leif Manger, “Muslim Diversity: Local Islam in Global Context”, dalam Leif Manger [ed.] “Muslim Diversity Local Islam in Global Context”, Richmond, Curson Press, 1999. h. 2.

Berlawanan dari kondisi ini, pada masa-masa modernisme merupakan masa yang paling tidak nyaman bagi keberadaan tradisi. Selain dipersoalkan keontetikan di sisi agamanya, ia juga di cap sebagai sinkretis yang bertentangan dengan kemurnian Islam. Segala macam adat, tradisi, selalu di caci maki sebagai biang dari kerusakan aqidah, kerusakan agama dan akar dari keterbelakangan kebudayaan Islam.

Munculnya pandangan ini ditengarai sebagai kegagalan dalam melihat keragaman Islam. Esensialisasi Islam selalu berujung pada pendefinisian Islam sebagai sesuatu yang tunggal. Islam dipandang sesuatu yang fixed. Islam yang ada dipersepsi dan diyakini sebagai tunggal dengan menafikan adanya difersifikasi. Akibatnya, gagal dalam mengidentifikasi kekuatan Islam untuk berdialog dengan lokalitas yang menghasilkan sistesis yang kreatif⁸. Kegagalan ini karena Islam selalu diharuskan menolak setiap kemungkinan adanya realitas Islam yang menyimpang dari definisi awal yang ditentukan. Islam yang diekspresikan melalui simbol-simbol local di anggap sesuatu yang menyimpang.

⁸ Ahmad Zainul Hamdy, “*Neo Sufisme Islam Jawa: Perjumpaan Islam dengan Lokalitas*”, Jurnal Istiqra’, Jakarta, Ditpertaiss Depag RI, Vol. 04, no. 01 2005. h. 312.

Ini tak lepas dari pondasi dosa yang telah dibuat oleh Cliffordz Geertz yang terlalu terpaku pada sumber Islam modern atau puritan, dimana Islam di Jawa yang dekat dengan tradisi lokal dan dipengaruhi tradisi Hindu Budha sebagai Islam garis bawah kalau tak dikatakan semi Islam, atau bahkan bukan Islam sama sekali. Menurutny karena warna Arab pudar dan dikalahkan oleh simbol Jawa⁹. Islam Jawa bukanlah seorang muslim yang sesungguhnya karena ia tetap melaksanakan tradisi Jawanya. Selagi ia tetap melaksanakan tradisinya, maka ia akan tetap sinkretik, paganistik, dan hiterodok¹⁰. Islam di Jawa pada masa ini sangat tak diuntungkan, khususnya munculnya pemikir semacam Ricklefs¹¹ dan Deliar Noer¹² yang kehilangan apresiasi terhadap harmoni Islam pada lokalitas.

Namun dalam perkembangannya, cara pandang seperti ini menuai banyak kritik.

⁹ Clifford Geertz, *"The Religion of Java"*, Chicago and London, University of Chicago Press, 1960

¹⁰ Harry J. Benda, dalam Fahri Ali dan Bahtiar Effendi [ed.] *"Merambah Jalan Baru Islam"*, Bandung, Mizan, 1986.

¹¹ M.C. Ricklefs, *"Introduction: The Coming of Islam to Indonesia"*, dalam MC. Ricklefs [ed.] , *"Islam in The Indonesian Social Context"*, Center of Southeast Asian Studies, Monash University 1991. h. 1-3.

¹² Deliar Noer, *"Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942"*, Jakarta, LP3ES, 1996.

Marshal Hodson¹³, ahli peradaban Islam yang sangat terkemuka di Universitas Chicago, Amerika Serikat mengkritik Geertz dan yang lainnya sebagai seorang yang melakukan banyak kesalahan sistemik, "termakan" oleh bias-bias kolonial dan tak mengetahui islam kecuali dari sudut pandang kaum modernis muslim. Bagi orang-orang yang mengetahui Islam, fenomena Islam di Indonesia menunjukkan betapa sangat kecil sisa masa lalu Hindu, bahkan di Jawa pedalaman. Dan pada kesimpulannya, menimbulkan pertanyaan mengapa kemenangan Islam begitu sempurna. Robert Hefner dari Universitas Boston mendukung kritik Hudson diatas dengan temuannya yang menunjukkan bahwa bahkan di kalangan penduduk beragama Hindu di Tengger, pegunungan Jawa Timur, ciri-ciri keislaman sangat jelas tampak dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Demikian pula dengan penelitian lapangan Mark Wood Ward¹⁵ dari Universitas Arizona

¹³ Marshal Hodson, *"The Ventura of Islam"*, Chicago, University of Chicago Press, 1974. jld. 2. h. 552.

¹⁴ Robert W. Hefner, *"The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History"*, Berkeley, University of California Press, 1990.

¹⁵ Lihat dalam kutipan Nurcholis Madjid, *"Mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia"*, dalam Mark Woodward [ed.], *"Jalan Baru Islam Islam"*, Bandung, Mizan, 1998. h. 96.

ia menemukan bahwa dalam seluruh orientasi kulturalnya, keraton Jawa di Yogyakarta lebih terasa warna Islamnya daripada warna Hindunya. Semua ini mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa Islam benar-benar berpengaruh pada lapisan paling dasar kebudayaan Indonesia. Gus Dur dengan gaya tradisionalnya, gaya NUnya, gaya Kopyahnya tetap bangga memperjuangkan pilihan agamanya dalam panggung pergaulan nasional dan global.

Selain berhasil memposisikan secara tepat masalah Islam dan lokalitas, Gus Dur berjuang bagaimana Islam menjadi semacam nilai universal yang menjadi pijakan pembangunan nasional, menjadi spirit dan basis orientasi cultural masyarakat Indonesia. Namun demikian ini bukan berarti lantas menjadikan Islam sebagai ideology Negara yang sectarian. Pada sekitar 1990 an Ketika Habibi dengan Soeharto mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim [ICMI] di Malang dengan terang-terangan Gus Dur menolak Bergabung. Gus Dur melihat adanya ancaman dengan campur-tangannya Soeharto dalam pendirian ICMI hanya akan menjadi agenda terselubung melanggengkan kekuasaan politik Soeharto dan Golkar meraup dukungan suara umat Islam. Apalagi dalam konteks

keindonesiaan yang majemuk ada agenda “Primordialisme” yang diusung ICMI yang dikawatirkan rawan menciptakan segmentasi di kalangan politik Nasional. ICMI menolak kelompok non muslim bergabung. Dengan demikian akan dengan sendirinya memisahkan komunitas lain semisal Protestan, Katolik, Hindu, Buda dan Nasionalis sekuler yang dianggap tak sejalan dengan garis besar visi ICMI. Malahan, pada 1991 Gus Dur dan Marsilam Simanjutak mendirikan Forum Demokrasi [Fordem] yang beranggotakan intelektual, akademisi dan aktivis Lembaga Swadaya masyarakat [LSM] untuk menjadi *counter trend* atas kemunculan ICMI. Kelompok diskusi non formal ini cukup efektif memberi ruang terbuka bagi elit politik dan akademisi untuk berkumpul berserikat dan berdiskusi ditengah kecenderungan orang masuk dalam barisan ICMI yang mengklaim sebagai “*the Voice of Islam*” Menurut Gus Dur, dalam bingkai pluralistik masyarakat Indonesia yang di butuhkan adalah masyarakat demokratis yang memiliki kedudukan setara di setiap ruang kehidupan. Gus Dur menolak pada setiap upaya yang ideologisasi dan upaya formalisasi agama. Dalam “Agama dan Demokrasi” secara tegas ia menulis;

...merupakan pengingkaran hakekat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini , karena akan menjadikan mereka yang tidak memeluk agama mayoritas menjadi warga Negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga Negara dimuka undang-undang tidak tercapai.¹⁶

Gus Dur menghindari terlibat dalam setiap upaya menciptakan membawa Islam pada sisi legal formalistic. Menurutnya setiap upaya ideologis dalam pengaturan masyarakat telah menyebabkan menyempitnya ruang gerak bagi refleksi kontemplatif yang mengembangkan arti manusia sebagai subyek kehidupan. Setiap pengaturan masyarakat secara terlembagakan senantiasa cenderung untuk memperlakukan masyarakat sebagai obyek kehidupan. Pada sikap yang memperlakukan masyarakat sebagai obyek inilah bagaimana ketidak- adilan menganga karena tak ada ruang control dan partisipasi. Dalam sejarahpun ditemui ketika upaya menjadikan Islam menjadi acuan negara secara formal akan melahirkan frustasi, karena akan tak didukung oleh bagian umat Islam sendiri. Masalah ini nampak bagaimana upaya yang coba digalang

¹⁶ Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, dalam Th. Sumartana, et. al. [ed.], “*Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*”, Yogyakarta, Interfidei, 1994. Hlm. 274.

pada 1945, yang gagal karena tak ada dukungan dari sebagian umat Islam sendiri. Gagasan Islam sebagai ideology alternative yang diusung Abul A'la Al Madudi, Zia Ulhaq, Khomeini dikritiknya sebagai, “ *idealisme mereka terlalu tinggi sehingga tak dapat mendarat dalam kehidupan, gagal menemukan prinsip operasional dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat.*” Mereka sendiri saja bingung di Negara mereka sendiri, bagaimana mau diusung ke tanah air yang jelas sangat beda.

Sebagai pilihan penolakan Gus Dur atas sikap penempatan Islam secara eksklusifistik, yang sudah berurat akar dalam kognisi sebagian besar umat Islam, Gus Dur mengajak kepada umat Islam untuk mengembangkan sikap eklektif, daya serap positif yang tinggi terhadap budaya luar yang dimungkinkan untuk memberikan manfaat bagi diri dan umat Islam pada umumnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh tradisi Islam selama berabad-abad dahulu. Gagasan tentang pribumisasi islam, jelas konsep yang sangat membumi. Ia mengajak agar Islam difahami sapa ke inti nilai-nilai dasarnya, untuk kemudian diaplikasikan secara kontekstual. Bagi Gus Dur yang terpenting suatu negara ditegakkan di atas banyak pilar yang mengindahakan keragaman masyarakat dimana Negara itu di bangun. Gus

Dur menolak pendekatan Sosial Politik. Ia malah condong melalui pendekatan cultural dan sosio kultral. Melalui pendekatan cultural dapat diwujudkan Islam dalam kesadaran hidup sehari-hari, tanpa terikat kelembagaan apapun, kecuali dalam konteks penyebaran Islam secara budaya itu sendiri. Meskipun lebih menekankan wawasan Islam universal, Islam sebagai peradaban dunia. Namun yang paling ideal adaptasi model sosio-kultural. Pendekatan ini mengutamakan sikap mengembangkan pandangan dan perangkat cultural yang dilengkapi oleh upaya membangun system kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang ingin dicapai itu. Pendekatan ini lebih mementingkan aktifitas budaya dalam konteks pengembangan lembaga-lembaga yang dapat mendorong transformasi system social secara evolutif dan gradual. Disini tak di pentingkan sikap untuk masuk ke dalam system kekuasaan atau tidak.¹⁷ dalam pendekatan ini dapat dengan mudah di masukkan agenda Islam ke dalam agenda nasional bangsa secara inklusifistik. Kalaupun hendak melakukan perubahan, sasarannya bukan pada system pemerintahannya atau system politik tapi pada

¹⁷ A. Ghaffar Karim, "*Metamorfosis, NU dan Politsasi Islam Indonesia*", Yogyakarta, LKIS, 1994.hlm. 110.

sub-sub sistenya. Aksentuasinya pada perubahan perilaku tanpa merubah bentuk-bentuk lahiriah lembaga pemerintahan. Gus Dur menghendaki Islam sebagai kekuatan komplementer bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Makanya kenapa Ia secara konsisten menolak Islam dijadikan ideologi dan system alternative, apalagi sebagai factor tandingan yang bersifat disintegrative terhadap kehidupan bangsa.

Gus Dur dan Pancasila

Indonesia adalah Negara paling plural di dunia. Paling majemuk dari sisi budaya, agama, bahasa, suku dan adat istiadatnya. Sikap dan pandangan keagamaan yang toleran dan pluralistik, menjadi prasarat penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang multikultur. Kemajemukan sosio-budaya dan agama di Indonesia harus menjadi daya dorong yang progresif dalam menjamin keberlangsungan tiap potensi ini, berkembang dan berjalan lebih memadai secara holistik dan integral. Tak diperkenankan atas alasan apapun, menceraiberaikan potensi yang demikian besar, hanya karena sempitnya perspektif yang dimotivasi oleh premordialisme, baik suku, ras, politik, atau

agama. Toleransi dan pandangan pluralisme agama, paling tidak dapat dilihat dari kesiapan dan kemauan untuk menerima perbedaan sebagai karakteristik unik penciptaan.

Tak pernah ada konsep integrasi¹⁸ dalam level apapun, lokal, regional atau nasional, jika terjadi konflik agama. Toleransi dan kesadaran pluralisme akan menjamin keberlangsungan Indonesia, sebagai bangsa paling pluralis di dunia. Sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan 17.000 pulau lebih, 400 kelompok etnis,¹⁹ dan 600 bahasa dan dialek²⁰ yang berbeda-beda, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kebudayaan yang sangat beragam. Keragaman bukan saja pada sosial, budaya,

¹⁸ Integrasi merupakan masaah *transkultural*, yaitu proses peleburan dan penggabungan semua jala-jala sistem sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat hingga terwujudnya *sentrum* sebagai identitas dan pola orientasi bersama. Dalam konteks Indonesia mengikat kemajemukan ini disebut sebagai 'integrasi nasional'. Lihat J. Garang, "*Ambivalensi Agama : Antara Dominasi dan Toleransi*" dalam "*Agama dan Tantangan Zaman*", Jakarta, LP3ES, 1989. hal. 139.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islamic Root of Modern Islamic Pluralism, the Indonesian Experience*, dalam "*Religiosa*" volume I, Yogyakarta, LPKUB, 1995. hal. 18. Lihat pula dalam tulisan yang serupa pesannya, "*Mencari Akar-Akar Islam bagi Pluralisme Modern, Pengalaman Indonesia*". Dalam "*Jalan Baru Islam*", Mark R. Woodward (editor), Bandung, Mizan, 1996. Buku ini merupakan terjemah dari "*Toward the New Paradigm: Recent Development in Indonesia Islamic Thought* (Ihsan Ali Fauzi, terjemah). hal. 91.

²⁰ Tarmizi Taher, *Interreligious Harmony: Indonesian Experience* dalam "*Religiosa*" Volume I, Yogyakarta, LPKUB, 1995. hal. 1.

etnik, bahasa, tetapi juga keragaman dalam agama dan keyakinan. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, juga ditemui beragam kelompok-kelompok kecil penganut animisme dan dinamisme. Kemajemukan di atas harus difahami sebagai kekayaan bangsa dan dipelihara dalam pengembangan dan pembangunan nasional. Mengingkari kebenaran akan kemajemukan, hanya akan mengantarkan pada pandangan sempit, eksklusif, intoleran, dan menggiring pada konflik sosial yang berkepanjangan. Bentuk pengingkaran ini muncul sebagaimana konflik yang terjadi dalam kasus Poso, Ambon, Maluku, dan juga sejumlah daerah di Pulau Jawa dan Kalimantan.

Hal serupa nampak dari kecenderungan umum internasional yang makin menglobal. Dalam kehidupan yang bergerak serba cepat, menggiring dunia semakin heterogen. Keragaman budaya, agama, merupakan realitas kasat mata yang tak dapat dipungkiri. Orang Indonesia yang Islam, bekerja, hidup, membangun masjid di Hongkong, Korea, Amerika, Inggris yang bukan negara Islam. Muslim Turki tinggal di Jerman dan Belanda. Banyak kristiani Philipina bekerja dan tinggal di Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Orang Hindu Cina bekerja dan tinggal di Inggris dan Amerika. Begitu juga orang Budha

India banyak tinggal dan membangun Vihara di Swiss dan Eropa. Realitas tentang pluralitas suku, bangsa dan agama tak dapat di manipulasi oleh siapapun, atas alasan apapun. Multikulturalisme adalah kenyataan dunia dan karakteristik unik bawaan dari penciptaan.

Menyadari kondisi seperti itu instrumen pemersatu bangsa yang lahir dalam kearifan berbasis kesadaran lokal adalah Pancasila. Gusdur melihat pancasila menjadi alat pemersatu yang harus diperjuangkan. Selama ini pancasila ditafsiri secara monolitik dan bahkan menjadi alat indoktrinasi penguasa untuk melemahkan rakyat. Kasus penataran P4 contohnya, bukan masyarakat makin cinta dan patuh melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen, tetapi sebaiknya malah menjadikan semacam ancaman tersendiri dalam kehidupan mereka. Salah satu pernyataan Amin Rais yang dikutip Ramage cukup mewakili situasi pada saat itu;

*The Scariest Thing is to be accused of being an enemy of pancasila*²¹

Tafsir monolitik dari penguasa menjadikan pancasila sebagai alat represi. Akibatnya, sesuatu

²¹ Douglas E Ramage, "Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance", London and New York, Routledge, 1995. Hlm. 75.

yang paling ditakuti adalah jika orang dianggap melawan pancasila. Karena melawan pancasila sama saja dengan melawan negara dan mesti berhadapan dengan militer dan penjara. Saatnya sudah harus ada perspektif lebih manusiawi. Pancasila sebagai ideologi pemersatu yang harus di tafsiri dan diberi perspektif agar fungsional menjadi alat pemersatu tanpa takut disalahgunakan. Karenanya pancasila harus menjadi ideologi terbuka.

Dalam pidato peringatan *Sudjatmoko Memorial Lectur* pada 1 Pebruari 1994 Gus Dur mencoba mengulas hubungan ideologi dan agama lewat tulisannya, "*Individu, Negara dan Ideologi*", menyebutkan, bahwa fungsi utama ideologi adalah alat pemersatu. Sebagai pemersatu bangsa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Penggunaan ideologi untuk kepentingan yang lebih sempit dari fungsi tersebut, misalnya sebagai landasan legitimasi bagi otoritarianisme suatu regim terhadap masyarakat, hanya akan mendorong kehancuran ideologi itu". Pragmatisme dalam menilai ideologi ini akan membuat orang gagal menemukan alasan yang kuat membuka diri dan menerima pandangan dari Gus Dur.

Lebih jauh dalam fungsinya sebagai alat

pemersatu bangsa maka ideologi harus mampu menjadi perisai dari serangan terhadap kesatuan serta penahan bagi tarikan ke arah perpecahan bangsa. Untuk mencapai kapasitas itu, ideologi nasional seyogyanya merupakan sintesa dari berbagai pemikiran yang beragam, yang sudah dapat dipastikan eksistensinya dalam heterogenitas masyarakat. Karena itu Ideologi Nasional yang kuat pada umumnya adalah merupakan hasil pencarian titik temu dari berbagai ideologi universal yang sebenarnya, pada sisi tertentu, satu sama yang lain saling konfliktual.²²

Gus Dur mencoba menempatkan Pancasila dalam predisposisi itu. Ia berpendapat bahwa berbagai ideology universal masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai berbagai hal seperti kemasyarakatan, perekonomian dan lain-lain, telah masuk ke Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan. Olehnya ideology-ideologi itu di bagi dalam dua kategori umum, yakni ideology sekuler dan ideology yang teokratis. Ideology sekuler mengheandaki agar agama tidak turut dalam menjadi factor penentu dalam kehidupan kenegaraan, sehingga Negara harus netral dalam soal agama dan agama dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi

²² A. Ghaffar Karim, *Metamorfosis....* Hlm. 100-101.

setiap individu. Nasionalisme, sosialisme, kapitalisme dan komunisme termasuk dalam kategori ideology sekuler ini. Ideology dalam kategori ke dua menginginkan agar agama [dalam kasus Indonesia agama Islam menjadi kekuatan penentu utama dalam kehidupan Negara, sehingga terbentuk Negara teokratis. Jadi Negara turut bertanggungjawab atas terlaksananya syariat agama dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan individu. Silang polemik antara tokoh-tokoh pergerakan satu decade menjelang kemerdekaan dan berlanjut hingga dalam kurun waktu yang sama sesudahnya adalah terpola sebagai perdebatan antara kubu penganut masing-masing kategori ideology universal di atas.²³

Dus, perdebatan akhirnya terbentur pada kenyataan bahwa tak satupun dari mereka dapat kemenangan atas yang lainnya. Sekularisme sudah pasti tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia yang religius dengan keyakinan bahwa agama bagaimanapun tetap berperan dalam kehidupan Negara. Sementara teokratisme sekalipun itu teokratisme berlandaskan Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat, juga sulit diwujudkan mengingat masyarakat Indonesia sudah terlanjur terbentuk dalam satu model yang

²³ *Ibid.*

terkotak-kotak. Dengan demikian perumusan ideology nasional lalu didorong kearah pencarian titik temu. Dari sisnilah lahir kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional yang dimaksudkan untuk menyimpulkan semua ideologi besar dunia dalam pelaksanaannya di Indonesia. Selanjutnya Gus Dur menulis;

...Pancasila juga bersumber dari Islam, dari Nasionalisme, dari Komunisme dalam pancasila itu. Memang PKI-nya dilarang. Faham Marxismenya dilarang, tetapi semangat egalitarian [persamaan]-nya ada dalam pancasila. Semangat keadilan sosial itu milik komunis [Marxisme]. Sebab tidak ada istilah "keadilan social" sebelum lahirnya komunis. Istilah "Social Justice" itu tidak ada sebelum itu. Jadi pancasila itu hasil rangkuman dari macam-macam ideology dunia. Dari ideology yang teokratik [Islam] diambil sila yang pertama. Ini sudah merupakan kearifan dari bapak-bapak kita. Kearifan beliaulah yang akhirnya membentuk nation yang merdeka, dan bebas dari komunisme [pertentangan kelompok yang berlebihan] seperti di India.²⁴

Dalam Pancasila semua prinsip-prinsip kemaslahatan dan kebaikan dijadikan pondasi dalam sila-silanya. Prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Merumuskan.....*

permusyawaratan, dan keadilan yang juga sangat dekat dengan ajaran utama Islam menjadi nilai dasar Pancasila. Meski ideologi besar –ideologi besar dunia secara bersamaan juga mengangkat hal serupa. Ini karena nilai-nilai tersebut bernilai universal dan dapat diterima semua pihak. Di sini titik temu itu menjadi kekuatan bersama yang dapat mengakomodasi dari beragam gerakan. Walaupun setelah kemerdekaan masih saja ada perdebatan ideologi, Gus Dur menilai bahwa hal itu disebabkan karena para pengikut ideologi universal itu masih berada pada kerangka acuannya semula dan masih terkotak-kotak dalam pemahaman ideologi masing-masing. Dengan pemahaman itu maka indoktrinasi massif berupa penataran P4 yang dilaksanakan secara dramatis serta penetapan azas tunggal Pancasila bagi ormas dan parpol mestinya bisa dipandang sebagai upaya untuk sama sekali mengakhiri permasalahan ideologis yang terkotak-kotak itu. Akan tetapi menurut Gus Dur ada proses ideologisasi di Indonesia yang menampilkan dua sisi berbeda dan bahkan saling tolak belakang. Terjadinya kecenderungan ini di nilainya telah membuat artikulasi proses ideologisasi itu kehilangan makna, sehingga yang tersisa tinggal proses ideologisasi sebagai pemberi legitimasi kepada sistem pemerintahan yang

ada. Artinya ideologi akhirnya hanya berfungsi sebagai justifikasi kebijakan para pemegang kekuasaan, dan sangat kurang berfungsi sebagai alat pelestarian persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal dari sisi konsep Pancasila sudah tepat dan punya kekuatan mengikat dari sisi ideologi. Seringkali penguasa yang gagal meterjemahkan Pancasila dan kering dari perspektif, sehingga nyaris kehilangan daya pikatnya.

Gus Dur demikian bersemangat menterjemahkan pancasila di berbagai forum nasional dan Internasional. Karena Gus Dur meyakini tanpa Pancasila Negara akan mati, hancur dan tercabik-cabik. Negara akan gagal mewujudkan ikatan persaudaraan yang majemuk. Negara akhirnya akan menemui ajal karena kehilangan kekuatan menyatukan potensi yang beragam menjadi daya dorong yang progresif bagi pembangunan yang bernama Indonesia. Karenanya Gus Dur siap pasang Badan meski berhadapan dengan militer Sekalipun. Dalam salah satu kutipan di buku Ramage, Gus Dur secara tegas menyatakan;

Pancasila is a set of principle and it will live forever. It is the idea of the state that we should have, that we strive for. And this Pancasila I'll defend with my own life. Regardless of its being castrated by the armed forces or its being manipulated by the muslims,

*misused by both*²⁵.

Penutup

Sejak kehadiran Gus Dur di Panggung Nasional, khususnya setelah memenangi pemilihan ketua PB NU hasil Muktamar NU 1984, suara protes semakin nyaring. Ini mungkin akibat ketidakpuasan melihat situasi yang dihadapi pada saat itu atau karena kesabarannya nyaris habis melihat rakyat yang terlunta-lunta tanpa penerang. Sasaran protes Gus Dur bisa kemana saja, Negara, ideologi, birokrasi, muslim, bahkan NU yang merupakan komunitas asalnya. Keadaan yang dianggap dekaden dan lamban bergerak harus secepatnya diberi energy untuk dapat laik terbang lagi. Negara, Islam dan umat sudah lama berhenti bergerak akibatnya nyaris kehilangan otonomi dan kesadaran dirinya. Pergaulan yang luas, bacaan yang mutakhir memungkinkan memiliki sudut pandang yang lebih luas. Sehingga dapat mengkritik apa saja yang dinilai melanggar prinsip kemanusiaan. Bisa ditebak kalau kemudian Gus Dur menjadi bulan-bulanan,

²⁵ Lihat dalam Douglas E Ramage, *“Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance”*, London and New York, Routledge, 1995. hlm. 45

menjadi musuh Soeharto dan Militer yang melihat dia sebagai ancaman subversi, karena keberanian mengkritik penguasa dan Golkar. Sesuatu yang tak lazim dan larangan pada masa itu. Tapi itulah Gus Dur selalu punya cara dan kaidah tersendiri dalam melakukan perlawanan terhadap setiap hal yang bertentangan dengan prinsip kehidupan. Bahkan di kalangan NU sendiri, ia juga sering di caci dan di kritik, meski tetap tegar dan tak takut kalau ia harus di usir dari NU. Sesuatu yang tak mungkin. Mungkin ini juga yang membuat Gus Dur lantang dan berani melakukan kritik, karena memiliki basis masa dan dukungan kultural yang kuat, anak darah biru NU. Sehingga nyaris mustahil kalau ada yang mencopot dari NU.

Gus Dur di berbagai kesempatan dan tulisan selalu mengangkat pentingnya penguatan rakyat, warga Negara dan kedudukan yang seimbang dalam proses berbangsa dan bernegara. Perlunya terus memperjuangkan demokrasi sebagai alat untuk mengangkat derajat warga negara secara adil dan seimbang tanpa membedakan suku agama dan bahasa. Kemajemukan yang ada di Indonesia harus dipertahankan secara cerdas dan diikat dengan telogi toleransi yang kuat. Baik mrnyangkut hubungan antar warga, hubungan antar agama dan juga suku bangsa.

Pancasila menurutnya memadai untuk fungsi ideologi sebagai alat pemersatu. Ditengah-tengah mulai menipisnya kepercayaan orang pada ideology liberal atau marxisme, Pancasila hadir sebagai alternative pemersatu bangsa dengan menggunakan bahasa lokalitas. Panca Lima, sila dasar. Lima sila atau lima dasar Negara yang memuat dasar dan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan social menjadi prinsip yang mendasari ideologi ini. Nilai yang merupakan ramuan atau titik temu antara nilai Islam dan nilai-nilai ideology universal dunia. Gus Dur telah menancapkan pondasi yang kokoh bagi berlangsungnya bangsa dan Negara ini. Meski kini telah pergi, kelak akan muncul pula Gus Dur-Gus Dur baru atau paling tidak *Gusdurian* yang tanda-tanda kearah itu makin nampak hari ini. Selamat jalan Gus Dur, Guru Bangsa Indonesia. Semoga Allah merahmatimu. *amiin.* ❧

ISLAM PRIBUMI ALA GUSDUR

Mulyanto SWA

Dilihat dari sisi budaya dan agama, Indonesia merupakan Negara dan bangsa terunik di dunia. Sebab Nusantara ini multietnik memiliki sekitar 500 suku bangsa—dan dengan demikian menjadi bangsa multikultur yang memiliki sekitar 700 bahasa daerah. Sehingga secara otomatis tergolong bangsa Multimental. Menjadi bangsa multimental karena mendapat pengaruh dari berbagai bangsa, agama dan ideologi: India, China, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Budhisme, Islam, Kristen, Katolik, Kong Hu Cu, Komunis, Kapitalis, dll.

Indonesia adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna, dan karakter yang berbeda-beda melalui sebuah proses panjang yang bersifat historis, ideologis, religius, disambung-

sambungkan menjadi sebuah bangsa dengan karakter yang khas dan unik. Oleh sebab itu, masalah agama dan kebudayaan menjadi faktor penting dalam menjaga kelanggengan kesepakatan (*consensus*) dari yang beraneka ragam itu menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia yang utuh bersatu.

Menata kehidupan sebuah bangsa yang serba "multi" tentu tidak semudah bangsa yang terdiri atas sedikit suku bangsa dan agama. Masalah budaya yang beranekaragam dan agama yang berbeda-beda keyakinan menjadi masalah penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian adalah kondisi kehidupan beragama yang tidak hanya mengarah pada kekinian yang terfokus pada pengayaan rohani semata, tetapi juga mengarah pada kehidupan beragama di masa depan yang penuh dengan tantangan.

Agama dan Budaya

Apa yang dimaksud agama, dan apa pula yang dimaksud dengan budaya? Keduanya memiliki nama yang berbeda. Berarti ada perbedaan antara keduanya. Lalu, apakah tidak ada persamaannya? Kedua bidang ini telah banyak

dibahas oleh para ahli agama dan banyak antropolog, arkeolog, sosiolog, ahli budaya. Gus Dur mengatakan bahwa memahami keberagamaan sudah seharusnya melihat pada tingkat paling tradisional salah satunya adalah melalui budaya.

Artinya, tidak lagi mengklaim bahwa keberagamaan yang otentik, suci, dan murni adalah keberagamaan yang muncul di tempat asalnya agama. Adanya tarik menarik antara budaya dan agama akhirnya menimbulkan keberagamaan yang dinamis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat penganut agamanya. Seharusnya di era plural ini perlu mengetahui substansi ajaran dengan ajaran yang merupakan budaya masyarakat di mana agama itu berkembang.

Itulah wacana tentang “Islam Pribumi” yang ditawarkan Gus Dur di tahun 80-an. Dengan gagasan kiai kampung, Gus Dur hendak menerapkan gagasan Pribumisasi Islam kembali, yang berarti kebangkitan Islam sebagai agama rakyat, dan figur-figur “kiai rakyat” serta merta seharusnya menjadi acuan bagi pribumisasi Islam sendiri. Masalah yang muncul dalam keberagamaan rakyat seharusnya ditanyakan kepada figur rakyat atau warga setempat yang memang lebih mengenal warga dan rakyatnya.

“Islam Pribumi” adalah islam yang ingin

membebaskan puritanisme, otentifikasi, dan segala bentuk pemurnian Islam sekaligus juga menjaga kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas normatif Islam. Karena itulah, 'Islam lokal' lebih berideologi kultural yang tersebar (spread cultural ideology), mempertimbangkan perbedaan lokalitas ketimbang ideologi kultural memusat, hanya mengakui ajaran agama tanpa interpretasi. Sehingga dapat tersebar di berbagai wilayah tanpa merusak kultur lokal masyarakat setempat.

Maka, tidak akan ada lagi praktik-praktik radikalisme yang ditopang oleh paham-paham keagamaan ekstrem. Selama ini menjadi ancaman bagi terciptanya perdamaian. 'Islam Pribumi' sebagai jawaban dari Islam otentik mengandaikan tiga hal. Pertama, 'Islam Pribumi' memiliki sifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk menginterpretasikan ajaran. Dengan demikian, Islam akan mengalami perubahan dan dinamika dalam merespons perubahan zaman.

Kedua, 'Islam Pribumi' bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan terhadap ajaran dasar agama (Islam), tetapi dilihat sebagai

pemicu untuk melakukan respons kreatif secara intens. Ketiga, 'Islam Pribumi' memiliki karakter membebaskan. Dalam pengertian, Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa kekerasan.

Dalam konsep Gus Dur pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif dari Tuhan diakomodasikan ke dalam budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. 'Islam Pribumi' adalah islam yg ingin membebaskan puritanisme, otentifikasi, dan segala bentuk pemurnian Islam sekaligus juga menjaga kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas normatif Islam.

Karena itulah, 'Islam Pribumi' lebih berideologi kultural yang tersebar (spread cultural ideology), yang mempertimbangkan perbedaan lokalitas ketimbang ideologi kultural yang memusat, yang hanya mengakui ajaran agama tanpa interpretasi. Sehingga dapat tersebar di berbagai wilayah tanpa merusak kultur lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, tidak akan ada lagi praktik-praktik radikalisme yang ditopang oleh paham-paham keagamaan ekstrem, yang selama ini menjadi ancaman bagi terciptanya perdamaian. Dalam pengertian, Islam menjadi

ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat.

Di sinilah, gagasan 'Pribumisasi Islam' yang pernah dilontarkan Abdurrahman Wahid patut kita lanjutkan kembali untuk menjawab problem radikalisme Islam. Dalam 'Pribumisasi Islam' tergambar bagaimana Islam sebagai ajaranyang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Sehingga, tidak ada lagi pemurnian Islam atau proses menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim di Timur Tengah. Bukankah Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah berarti tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri? Dalam hal ini, pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan budaya-budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti 'Pribumisasi Islam' adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan (Abdurrahman Wahid, 2001).

Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, tetapi berwujud dalam pola nalar keagamaan yang

tidak lagi mengambil bentuknya otentik dari agama, serta berusaha mempertemukan dengan menjembatani jurang pemisah yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya. Dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antara agama dan budaya. Oleh karena itu Islam pribumi bukan berarti keberagamaan Islam yang tidak otentik, karena otentisitas keberagamaan menjadi hak Tuhan.

Islam Indonesia adalah juga sama otentiknya dengan Islam Arab atau Timur Tengah. Bahkan Islam Indonesia lebih kaya karena sarat dengan nilai-nilai luhur budaya lokal yang penuh kearifan. Fenomena Islam pribumi jika dilihat dengan perspektif struktural, maka sesungguhnya yang mengalami transformasi atau alih rupa hanya pada tataran struktur luar, dan tataran yang paling dalam tetap karena menjadi inti struktur.

Sampai di sini semakin penting melihat kebutuhan dan persoalan keberagamaan rakyat yang sepenuhnya tidak selalu dapat diselesaikan dengan merujuk pada agama tradisional. Sudah seharusnya tokoh-tokoh agama dalam tingkat bawah tradisional mendapat perhatian. Kalau Gus Dur mengundang “kiai kampung”, patut diapresiasi karena konsistensinya dengan sikap keberagamaan yang terbuka dan toleran dengan

agama lokal sebagaimana tercermin dalam gagasan pribumisasi Islamnya.

Ada dua pandangan tentang hubungan antara keduanya. Pandangan pertama menempatkan agama sebagai bagian dari kebudayaan, yang berarti antara keduanya pada hakikatnya ada kesamaan. Pandangan kedua menempatkan agama bukan bagian dari kebudayaan, dan dengan demikian agama berbeda dengan budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan tata pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan itu hadir karena datangnya wahyu atau firman dari Tuhan Yang Maha Pencipta yang diturunkan melalui utusannya untuk disebarkan kepada masyarakat. Agama merupakan suatu keyakinan akan keberadaan Tuhan yang menjadikan sumber ketenteraman dan semangat hidup serta kepada-Nya manusia akan kembali. Pemahaman tentang agama seperti ini menjadi dasar bagi pihak yang tidak setuju jika agama disebut merupakan bagian dari kebudayaan.

Lalu, apakah kebudayaan itu? Ada dua

antropolog, AL Kroeber dan C. Kluckhohn yang mengumpulkan definisi dari kebudayaan dan membukukannya dengan judul *Culture, A Critical Review of Concepts and Definition*. Dalam buku yang terbit tahun 1952 itu disebutkan ada 160 buah definisi tentang kebudayaan. Bisa dibayangkan betapa luas dan anekaragamnya arti kebudayaan. Untuk sekedar memberikan sedikit gambaran dari sekian banyak definisi. Koentjaningrat. Menyatakan yang dimaksud dengan kebudayaan adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar”.

Kebudayaan lahir sebagai hasil buah usaha budinya seseorang atau kelompok masyarakat. Kebudayaan adalah segala hasil karya dari proses “cipta, rasa dan karsa” manusia belaka, yang kemudian diwariskan secara turun temurun dan menjadi sebuah karya budaya yang melekat dalam masyarakat sekitar. Berdasarkan definisi ini kebudayaan dibedakan atas 3 bentuk budaya: kebudayaan dalam bentuk ide, gagasan, dan konsep (ada yang menyebutnya sistem nilai); kebudayaan yang berupa tingkah laku manusia; dan kebudayaan yang berupa benda karya manusia.

Ketiga bentuk kebudayaan itu berjalan saling bertautan. Ide manusia akan melahirkan pola tingkah laku, dan selanjutnya ide dan tingkah laku itu menghasilkan sesuatu karya dalam bentuk benda. Benda karya budaya itu akan berbalik mempengaruhi tingkah laku dan ide, dan dari rangsangan itu lahirlah ide baru. Dari ide baru akan lahir pola tingkah laku baru dan selanjutnya lahir benda baru. Demikian seterusnya saling bertautan dan saling merangsang tumbuhnya “temuan-temuan” baru itu berjalan terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari ketiga bentuk kebudayaan itu sering dikelompokkan menjadi 2 sifat kebudayaan, yakni kebudayaan yang bersifat non-benda, tak-benda, tak teraba atau intangible culture aspect; dan kebudayaan dalam bentuk benda atau tangible culture aspect. Bila dilihat dari sisi bentuk kebudayaan, maka agama berhubungan erat dengan masalah ide, gagasan dan konsep, yang selanjutnya berhubungan pula dengan pola tingkah laku (non-benda) dan benda sebagai karya budaya keagamaan (benda).

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama pada dasarnya juga merupakan memiliki ciri adanya ide, gagasan dan konsep, perilaku maupun benda. Agama

memiliki ciri budaya tak benda, di samping berupa benda. Agama merupakan salah satu unsur dari kebudayaan, dengan istilah Religi (Cassirer) dan Sistem Religi dan Upacara Keagamaan (Koentjaraningrat). Pendapat inilah yang menjadi dasar lahirnya pandangan pertama, yakni menempatkan agama sebagai bagian dari kebudayaan. Agama lahir sebagai perwujudan ide dan konsep tentang Keesaan Tuhan dalam bentuk keyakinan atau kepercayaan dan perilaku religi, dan dengan demikian maka agama menjadi bagian dari budaya.

Bila antara arti agama dan budaya disandingkan, maka keduanya memiliki persamaan isi. Agama dan kebudayaan adalah sistem nilai dan simbol-simbol yang berisi kaidah, ajaran, aturan, meskipun sumbernya berbeda. Sistem nilai dan simbol-simbol yang lahir dari rahim kebudayaan dihasilkan oleh kemampuan manusia dalam menghadapi segala tantangan hidup di lingkungan hidupnya dengan cara belajar dan belajar. Sementara kaidah, ajaran, aturan dalam agama diyakini sebagai wahyu. atau firman yang datang dari Tuhan Yang Maha Pencipta yang diturunkan melalui utusannya.

Masalah kedekatan hubungan antara agama dan budaya dapat disimak dari awal masuknya

agama ke wilayah Nusantara. Sebelum agama dari luar datang, masyarakat Nusantara telah memiliki kepercayaan tersendiri tentang Tuhannya. Mereka juga telah memiliki kebudayaan sebagai wujud dari kemampuannya menghadapi tantangan hidup dengan lingkungannya. Terjadilah pertemuan dan proses pembauran saling mempengaruhi antara keduanya. Kita mengenal istilah kebudayaan yang bernafaskan Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Katolik atau Kong Hucu. Lahirnya kebudayaan itu merupakan bukti adanya titik temu antara keduanya, meskipun antara keduanya juga memiliki titik pisah.

NU sebagai lembaga keagamaan (Jam'iyah Diniyah) dalam konteks khusus Indonesia, memiliki karakteristik pola-pola pemikiran yang bergerak dan berkembang secara dinamis sejak organisasi ini lahir hingga saat ini. Mengamati NU dari dimensi tipologi pemikiran jarang diminati oleh peneliti Indonesia ataupun Barat. Mereka lebih tertarik membahas NU dalam konteks sosial-politik. Pengenalan terhadap tipe pemikiran NU dimulai dengan istilah "tradisionalis" sebagai lawan dari "modernis". Sarjana Indonesia yang menggunakan istilah dikotomis ini adalah Deliar Noer dalam bukunya, "Gerakan Islam Modernis di Indonesia" yang menunjukkan NU dan lain-

lain sebagai Islam tradisional, sedangkan Islam modernis diwakili oleh Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain.

Pelekatan label “tradisi” pada NU merupakan konsekuensi sebab lahirnya NU untuk membela tradisi yang pada saat itu sedang terancam, baik oleh kekuatan Raja Abd Aziz bin Al Su’ud yang baru menguasai tanah Hijaz ataupun oleh gerakan-gerakan modernis di Indonesia yang sedang bernafsu melakukan kampanye anti takhayul, bid’ah dan churafat. Ulama NU juga sangat anti terhadap penggunaan kata modern dan sering dikaitkan dengan istilah Arab mudlirrun (membahayakan).

Namun dengan gerak zaman, klasifikasi dikotomis tradisional dan modernis mulai dikritik dan digugat banyak orang. Label tradisional sebagai ukuran NU tampaknya terlalu sempit, karena NU menunjukkan perkembangan yang pesat. Menurut banyak pengamat, hal ini disebabkan adanya sejumlah pemikir NU yang berpikiran luas dan tidak lagi terpaku pada tradisi, bahkan melampauinya. Harun Nasution seorang tokoh pentolan modernis pun mengakuinya.

Bila Muhammadiyah dikategorikan modernis, jika dilihat dari aspek sosial pendidikan, namun dilihat dari pemikiran keagamaan akhir-

akhir ini, agaknya citra modernis itu lebih memihak pada NU. Dalam bidang pemikiran, pembaruan Muhammadiyah bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Justru NU mulai menggelindingkan pembaruan pemikiran itu. Muhammadiyah sudah mulai ketinggalan. (NU “Liberal”, h. 27). Sebagian pengamat menggunakan kategori “konservatif” dan “liberal” dalam memetakan pola pemikiran NU.

NU klasik adalah konservatif tetapi saat ini mengalami perubahan sejak munculnya liberalisasi pemikiran di NU. Tetapi penggunaan “konservatif” dan “liberal” ini juga bermasalah. Memang, ketika NU lahir memperjuangkan isu-isu konservatif, seperti hak bermadzhab, membaca barzanji, ziarah kubur, tahlilan, dan lain-lain. Tetapi sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan beribadah, toleransi, keseimbangan dan penghargaan terhadap tradisi merupakan sikap moderat dan dalam kasus ini, sikap NU bisa dibenarkan.

Sedangkan label “liberal” sering menggerahkan pemikir-pemikir NU yang tidak mau disebut “liberal”. Bahkan KH. Hasyim Muzadi dalam Muktamar Pemikiran Islam NU di Situbondo bulan September lalu, mendesak agar istilah “liberal” tidak dilabelkan ke NU. Tipologi

pemikiran cendekiawan NU dibahas secara cermat oleh Mujamil Qomar dalam karyanya NU “Liberal”: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme Islam (Mizan: 2002). Buku ini berasal dari disertasi Mujamil di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Cendekiawan NU yang dijadikan objek penelitian oleh Mujamil berjumlah sembilan. Azyumardi menyebut “Wali Sanga NU”-Achmad Siddiq, Abdurrahman Wahid, Ali Yafie, Said Agiel Siradj, Masdar Farid Mas’udi, Sjechul Hadi Permono, Muhammad Tholchah Hasan, Abdul Muchith Muzadi, dan Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.

Dalam memetakan pemikiran “Wali Sanga” tersebut, Mujamil menggunakan empat tipologi. Pertama, tipologi antispatif ialah berpikir yang condong menanggapi sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Pola pikir ini mengakui perkembangan yang linier, baik yang terduga maupun tidak terduga. Pemikir NU yang digolongkan dalam pola ini adalah Muhammad Tholchah Hasan.

Kedua, tipologi elektik adalah suatu pemikiran yang berusaha memilih semua yang dianggap terbaik tidak peduli dari aliran, filsafat, dan teori mana pun asal lebih baik daripada yang lain, itulah yang dipilih. Masdar Farid Mas’udi

dan Sahal Mahfudh masuk dalam kategori ini. Ketiga, tipologi *divergen* adalah berpikir menjelajah keluar dari cara-cara berpikir konvensional (seperti lazimnya). Dalam pemikiran ini banyak terjadi lompatan-lompatan pemikiran sehingga menonjolkan sifat inovatif. Ciri khas pemikiran ini lebih menonjol kadar liberalisasi daripada ciri-ciri lainnya.

Pola pikir ini diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid, Said Agiel Siradj, dan Syechul Hadi Permono. Keempat, tipologi intergralistik adalah model berpikir yang berusaha menyatukan berbagai hal. Ciri khas pemikiran ini adalah mengompromikan dua hal yang dipertentangkan. Segala pertentangan sedapat mungkin dipersatukan. Ali Yafie mewakili tipologi ini.

Kelima, tipologi responsif adalah berpikir yang condong memberi jawaban terhadap problem-problem yang sedang dihadapi umat. Ciri pemikiran ini cepat tanggap, suka merespon, memiliki kepekaan terhadap fenomena sosial, dan berusaha menawarkan solusi. Achmad Siddiq dan Abdul Muchith Muzadi layak menempati posisi ini.

Menurut hemat penulis, di samping kategori tipologi yang ditawarkan Mujamil perlu

dikaji lebih lanjut, studi tersebut tidak mencakup dua hal primer. Pertama, dinamika pemikiran generasi anak-anak NU sebagai generasi ketiga yang jauh “liberal” dan bagi banyak pihak “mengkawatirkan”. Kedua, menjamurnya penggunaan label-label yang digunakan anak-anak muda NU sebagai label gerakan mereka, seperti Islam Liberal, Post-Tradisionalisme Islam (Postra), Islam Emansipatoris, Islam Kiri, Islam Pribumi dan lain-lain.

Penyebab dari kekurangan tersebut dikarenakan studi Mujamil pada tahun 1997-1999 telah rampung sebelum menjamurnya label-label gerakan tersebut. Namun, apakah label-label tersebut menunjukkan karakteristik pada pola-pola pemikiran aktivis-aktivis yang mengusungnya? Meskipun wacana tersebut masih dalam proses perkembangan dan pembentukan, tidak ada salahnya kalau kita mencoba mengamati secara khusus.

Pada awalnya, Islam Liberal muncul di kalangan aktivis muda NU khususnya di LAKPESDAM. Jurnal Tashwirul Afkar pernah menurunkan tema Mengusung Islam Liberal di Mesir, tetapi selanjutnya, Islam Liberal “pindah” ke Komunitas Utan Kayu (KUK) dan menjadi JIL (Jaringan Islam Liberal) dengan koordinator

Ulil Abshar-Abdallah Ketua LAKPESDAM. Di kalangan anak-anak muda NU sendiri muncul istilah baru, Post-Tradisionalisme Islam (Postra) sebagai judul buku terjemahan kumpulan tulisan Muhammad Abied Al-Jabiri di LkiS.

LAKPESDAM juga menurunkan tema Postra ini dalam jurnal Tashwirul Afkar. Pada periode selanjutnya, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengeluarkan label Islam Emansipatoris. Dan menggunakan label Islam Pribumi yang dijadikan tema Jurnal Afkar dan buku yang berisi kumpulan tulisan dan wawancara seputar Islam Pribumi yang diterbitkan Erlangga. Sedangkan di Surabaya, aktivis-aktivis NU yang tergabung dalam LSAD (Lembaga Studi Agama dan Demokrasi) akrab dengan penggunaan Islam Kiri.

Apakah perbedaan dari tipologi-tipologi tersebut? Menurut penulis tidak ada perbedaan yang sangat mendasar kecuali dalam titik-tolak pemberangkatan pembaruan dan metode pendekatan gerakan. Islam Liberal memandang pembaruan dimulai dari kritik teks, sedangkan Islam Emansipatoris memulai dari konteks, Postra menjadikan tradisi sebagai modal dan pemicu pembaruan, dan Islam Pribumi mencoba mengarifikan tradisi lokal dan sebagai pelanjut ide pribumisasi

Islamnya Gus Dur. Islam Liberal menggunakan wacana dan media dalam mengkampanyekan ide idenya, sedangkan Islam Emansipatoris, Postra, dan Islam Pribumi turun ke bawah melakukan pemberdayaan masyarakat sipil.

Keberagaman masyarakat di Indonesia sudah mengalami pergeseran yang cukup tajam setelah disibukkan dengan fenomena radikalisme beberapa tahun terakhir ini. Keaslian bangsa yang ramah, toleran, dan damai seakan sirna oleh aksi-aksi kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok agama dengan ideologi intolerannya. NU dan Muhammadiyah yang selama ini menjadi warna dari keberagaman (Islam) di Tanah Air mulai mendapatkan pesaing baru dari gerakanotentifikasi dan universalisme di dalam gerakan baru Islam.

Kalau dahulu masyarakat muslim berafiliasi secara kultural dan organisatoris dengan NU dan Muhammadiyah, sekarang afiliasinya mulai tersebar ke berbagai organisasi Islam yang lahir belakangan ini. Ironisnya, gerakan baru Islam ini menampilkan wajah keberagamaannya yang intoleran dan keras.

Gerakan baru keagamaan tampaknya tidak mengambil ideologi keagamaan yang toleran dan pluralis untuk memberikan tempat bagi

perbedaan, kemajemukan, dan keanekaragaman budaya. Bahkan, ada keyakinan kuat mereka untuk menyeragamkan pandangan keagamaan menjadi satu. Karena itu, yang selalu mereka usung adalah proyek otentifikasi Islam atau pemurnian Islam untuk menciptakan sistem sosial yang sama, seperti yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam klasik. Negara Islam dan pemberlakuan syariat Islam secara total selalu menjadi cita-cita luhur mereka dalam menggerakkan jaringan di seluruh belahan dunia. ❧

GUS DUR SOSOK YANG DISEGANI Masyarakat Indonesia

Hj. Umayah, M.Ag
Siti Fatimah

Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat berkesan pada hati masyarakat Indonesia dikarenakan pemikiran dan guyon-guyonnya yang menghibur namun butuh pemikiran mendalam. Beliau begitu disegani oleh semua masyarakat Indonesia bahkan secara Internasional baik yang beragama Islam maupun non Islam. Ide pluralis beliau mampu mempersatukan masyarakat Indonesia. Perhatiannya pada masyarakat kecil mengharukan semua orang. Semua yang telah beliau lampau dalam kehidupannya menjadi suri tauladan bagi siapa saja yang memahami dirinya. Kesan itu sangat terasa setelah beliau kembali kepangkuan Sang Maha Kuasa.

Biografi Abdurrahman Wahid

Gus Dur begitu panggilan yang sudah melekat pada lidah masyarakat Indonesia bagi seorang Abdurrahman Wahid, ayahnya adalah pendiri NU yaitu KH. Hasyim Asyari. Beliau lahir di Jombang-Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Istrinya bernama Sinta Nuriyah. Beliau dikaruniai 4 anak perempuan yaitu; Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Annita Hayatunnufus dan Inayah Wulandari. Beliau semasa hidup beralamat di Jl. Warung Silah No. 10 Ciganjur Jakarta Selatan 12630 – Indonesia. Adapun pendidikan beliau di antaranya; pada tahun 1966-1970 kuliah di Universitas Baghdad-Irak Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab, pada tahun 1964-1966 beliau kuliah di Al-Azhar University Cairo-Mesir Fakultas Syari'ah (Kulliyah al-Syari'ah), pada tahun 1957-1963 beliau mendapatkan pendidikan di Pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur dan pada tahun 1957-1959 beliau mengaji di Pesantren Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Semasa hidupnya beliau banyak menjabat di beberapa instansi dan organisasi, di antaranya; pada tahun 1998-2009 sebagai Ketua Dewan Syura DPP PKB Indonesia, pada tahun 2004-

2009 sebagai pendiri The WAHID Institute di Indonesia, pada tahun 2002-2009 sebagai Rektor Universitas Darul Ulum Jombang Jawa Timur dan pada tahun 2000-2009 sebagai Pengurus Besar Nahdatul Ulama Indonesia. Pengalaman jabatan beliau sangat banyak di antaranya; pada tahun 1999-2001 menjabat sebagai Presiden RePublik Indonesia, 1989-1993 sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, pada 1987-1992 sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1984-2000 sebagai Ketua Dewan Tanfidz PBNU, pada tahun 1980-1984 sebagai katib Awwal PBNU, pada tahun 1974-1980 sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebu Ireng dan pada tahun 1972-1974 sebagai Dekan dan Dosen di Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asyari Jombang. Pengalaman organisasi beliau banyak seperti; pada tahun 2003 sebagai penasehar Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional, pada tahun 2002 sebagai penasehat Solideritas Korban Pelanggaran HAM, pada tahun 1990 sebagai Pendiri dan anggota Forum Demokrasi, pada tahun 1986-1987 sebagai juri Festival Film Indonesia, pada tahun 1982-1985 sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Jakarta dan pada tahun 1965 sebagai Wakil Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Indonesia di Cairo (United Arab Republic di Mesir). Bahkan beliau

mempunyai aktivitas internasional di antaranya; pada tahun 2003-2009 sebagai Presiden Non Violence Peace Movement, Soul, Korea Selatan, pada tahun 2003-2009 sebagai Anggota Dewan Internasional bersama Mikhail Gorbachev, Ehud Barak and Carl Bildt di International Strategic Dialogue Center Universitas Netanya Israel, pada tahun 2003-2009 sebagai Presiden Kehormatan di International Islamic Christian Organization for Reconciliation and Reconstruction (IICORR) London-Inggris, 2002-2009 sebagai Anggota Dewan Penasehat Internasional di International and Interreligious Federation for World Peace (IIFWP), New York, Amerika Serikat, pada tahun 2002 sebagai presiden di Association of Muslim Community Leaders (AMCL), New York, Amerika Serikat, pada tahun 1994-2009 sebagai pendiri dan anggota di Shimon Perez Center for Peace, Tel Aviv, Israel, pada tahun 1994-1998 sebagai presiden di World Conference on Religion and Peace (WCRP), New York, Amerika Serikat, pada tahun 1994 sebagai penasehat di International Dialogue Project for Area Study and Law, Den Haag, Beland dan pada tahun 1980-1983 sebagai anggota dewan juri di The Aga Khan Award for Islamic Architecture. Beliau punya hobi yaitu; Mendengarkan dan menyaksikan pagelaran

Wayang Kulit, Mendengarkan musik, terutama lagu-lagu karya Beethoven berjudul Symphony No. 9 th, Mozart dalam 20 th piano concerto, Umm Khulsum dari Mesir, Janis Joplin dan penyanyi balada Ebiet G. Ade, Mengamati pertandingan sepak bola, terutama liga Amerika latin dan liga Eropa, Mendengarkan audio book dan terutama mengenai sejarah dan biografi.¹

Masyarakat Indonesia Kehilangan Gus Dur

Ketika KH. Abdurrahman Wahid menghadap Tuhannya pada tanggal 30 Desember 2009 lalu, masyarakat Indonesia merasa berduka, duka karena Gusdur merupakan sosok yang disegani bukan saja oleh umat Islam Indonesia tetapi juga umat-umat agama lainnya, bukan hanya dari kalangan dewasa, bahkan anak-anak pun ikut berduka. Terbukti begitu banyak masyarakat Islam dan non Islam yang mengadakan acara bertajuk "*In Memorium Gus Dur*", di antaranya acara yang digelar oleh ISNU kerjasama dengan BEM STAIN Cirebon pada tanggal 7 Januari 2010 yang bertema: "*In Memorium Gus Dur Refleksi 100 Tokoh Cirebon atas Pemikiran dan Aktifitas Gus Dur untuk Indonesia*" yang dihadiri oleh tokoh-

¹ Jakarta_gusdur.net

tokoh Cirebon baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Menurut Kyai Abbas (pengasuh pesantren Buntet), Gusdur itu adalah wali Allah SWT. Gus Dur sebagai manusia biasa, merupakan figur pemuda bangsa yang memiliki ide-ide cemerlang dan ide-idenya dapat diberlakukan dalam hidup berbangsa dan beragama. Gus Dur dihormati karena ide cemerlangnya mampu mempersatukan umat dari berbagai suku dan agama.²

Begitu juga acara doa langsung yang dipimpin sejumlah agamawan dari berbagai agama dan kepercayaan: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Khonghucu, dan Tao dalam acara bertajuk "*In Memorium: KH. Abdurrahman Wahid-Gus Dur, Pahlawanku yang Sejati. Gus Dur Guru Bangsa untuk Semua*". Acara ini diselenggarakan oleh Solidaritas Masyarakat Tionghoa Indonesia, khusus dibentuk untuk mengenang jasa besar Gus Dur. Sebelumnya perwakilan kelompok ini juga sempat berkunjung ke Ciganjur untuk berdoa langsung ke makam Gus Dur di Jombang Jawa Timur. Acara tersebut digelar di Istora Senayan, 10 ribuan orang yang kebanyakan berasal dari

² ISNU & BEM STAIN Cirebon, *In Memorium Gus Dur Refleksi 100 tokoh Cirebon atas Pemikiran dan Aktifitas Gus Dur untuk Indonesia*, Kamis 7 Januari 2010, Aula STAIN Cirebon.

etnis Tionghoa tampak khidmat memanjatkan doa bagi almarhum KH. Abdurrahman Wahid.

Usai kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh ISNU & BEM STAIN maupun yang diselenggarakan oleh Solideritas masyarakat Tionghoa Indonesia, berakhir memberikan dukungan agar mantan ketua PBNU ini menjadi pahlawan nasional. Masyarakat Tionghoa begitu kehilangan sosok Gus Dur yang telah berjasa, karena Gus Dur lah yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 yang membatasi adanya kegiatan adat istiadat Cina di Indonesia semasa dirinya menjabat sebagai Presiden RI.

Akbar Tandjung mengatakan bahwa ia sangat kehilangan sosok yang sangat berjasa pada negara ini, yang telah memperkenalkan kepada dunia bahwa Indonesia negara yang majemuk dan beragam. Dan atas jasa Gus Dur, masyarakat Papua sekarang ini tak lagi malu menyebut dirinya orang Papua. Sedangkan Ahmed Mahfud mengatakan bahwa Gus Dur adalah inspirasi bangsa di mana sifat kemanusiaan dan multikulturalisme Gus Dur layak dijadikan panutan. “Meski dinilai kontroversi, beliau berani pasang badan membela kaum yang lemah.”³

Begitu juga KBRI Roma bersama warga

³ Jakarta_gusdur.net.

Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Indonesia-Italia (PII) Milano, baru-baru ini mengadakan doa bersama untuk almarhum Gus Dur, Presiden RI ke-4, serta keselamatan WNI yang berada di tanah air maupun di Italia. Acara ini dihadiri lebih dari 150 orang terdiri atas warga Indonesia yang berdomisili di Milan serta kawasan Italia Utara dan Tengah lainnya itu hadir Dubes RI untuk Italia beserta Ny Dewi Oemar.⁴

Penghargaan untuk Gus Dur

Karena kiprah dan gasasan-gagasannya Gus Dur sering mendapatkan penghargaan dari berbagai instansi dan organisasi, di antaranya yaitu; penghargaan Anugrah Mpu Peradah, DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Jakarta, Indonesia pada tahun 2004, penghargaan The Culture of Peace Distinguished Award 2003, International Culture of Peace Project Religions for Peace, Trento, Italia pada tahun 2004, penghargaan Global Tolerance Award, Friends of the United Nations, New York, Amerika Serikat pada tahun 2003, penghargaan World Peace Prize Award, World Peace Prize Awarding Council (WPPAC), Seoul, Korea Selatan, penghargaan Dare to Fail

⁴ Antara News, Rabu, 13 Januari 2010 09:21 WIB

Award , Billi PS Lim, penulis buku paling laris "Dare to Fail", Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2003, mendapatkan penghargaan berupa Pin Emas NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Indonesia pada tahun 2002, penghargaan Gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA), penghargaan Sampeyan dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XII, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 2002, penghargaan Public Service Award, Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat pada tahun 2001, penghargaan Ambassador of Peace, International and Interreligious Federation for World peace (IIFWP), New York, Amerika Serikat pada tahun 2000, penghargaan Paul Harris Fellow, The Rotary Foundation of Rotary International pada tahun 2000, penghargaan Man of The Year, Majalah REM, Indonesia pada tahun 1998, penghargaan Magsaysay Award, Manila , Filipina, pada tahun 1993, penghargaan Islamic Missionary Award, Pemerintah Mesir pada tahun 1991 dan Tokoh 1990, penghargaan dari Majalah Editor, Indonesia pada tahun 1990.

Selain penghargaan-penghargaan tersebut, beliau juga mendapatkan kehormatan doktornya di antaranya; pada tahun 2003 di Netanya University, Israel, pada tahun 2003 di Konkuk

University, Seoul, South Korea, pada tahun 2003 di Sun Moon University, Seoul, South Korea, pada tahun 2002 di Soka Gakkai University, Tokyo, Japan, pada tahun 2001 di Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pada tahun 2000 di Thammasat University, Bangkok, Thailand, pada tahun 2000 di Pantheon Sorbonne University, Paris, France dan pada tahun 1999 di Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.⁵

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Gus Dur terhadap masyarakat Indonesia saat beliau menjabat sebagai presiden RI. Sehingga beliau pantas mendapatkan penghargaan dari masyarakat, di antaranya; Gus Dur dianugerahi Mahendradatta Award 2010. Anugerah itu diterima oleh salah satu putri Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, pada Dies Natalis ke-47 Universitas Mahendradatta, Bali, Minggu (17/1/2010) di Denpasar.

Menurut Inayah, penghargaan itu sesungguhnya adalah penghargaan dari masyarakat Bali sebagai bukti dan hasil apa yang telah dilakukan Gus Dur selama hidupnya. Gus Dur tidak dapat melihat penghargaan dan menikmati. Inayah yakin penghargaan itu justru ditujukan pada anak-anak yang mewarisi

⁵ Jakarta_gusdur.net.

perjuangan Bapaknya. Penghargaan itu bukan hanya pajangan di atas meja. Tapi sekaligus pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Yakni menghidupkan nilai dan prinsip perjuangan Gus Dur yang mempunyai spirit menyetarakan manusia di mata negara dan hukum, keadilan harus senantiasa ditegakkan.

Sri Gusti Ngurah Arya Wedhakarna (Rektor Universitas Mahendradatta) menyatakan bahwa Mahendradatta Award adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh universitas itu terhadap tokoh yang dinilai pantas menerimanya. Penghargaan itu pantas diberikan kepada Gus Dur sebagai salah satu bapak bangsa ini. Penghargaan ini sekaligus menjadi penghargaan pertama yang diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi bagi Gus Dur. Wedhakarna menambahkan bahwa warga Bali sepakat apabila gelar pahlawan nasional diberikan kepada KH Abdurrahman Wahid.⁶

Humor Gus Dur

Sosok Gus Dur dikenal sebagai orang yang suka humor yang memiliki nilai falsafah yang terkadang sulit ditebak, seperti yang penulis kutip dari laporan Taufik Damas di RM One Line,

⁶ Sriwijaya Post - Minggu, 17 Januari 2010 17:09 WIB

yaitu;

Ketika naik mobil di jalan raya orang sering ditegur ketika salah satu anggota tubuhnya keluar dari jendela. Anggota tubuh yang biasa dikeluarkan dari jendela adalah tangan atau kepala. Di dalam bus kota sering ada peringatan “Dilarang mengeluarkan anggota badan”. Larangan ini berlaku karena bahaya mengintai ketika salah satu anggota tubuh kita keluar. Bisa jadi, dalam kondisi yang mepet, anggota tubuh itu tersenggol sesuatu yang ada di sampingnya. Bisa kendaraan lain, tembok, atau tiang listrik. Logikanya, orang dilarang mengeluarkan anggota tubuh karena bahaya yang mungkin menimpa tubuhnya.

Pernah Gus Dur naik mobil dengan rombongan kiai di Jawa Timur. Namanya kiai, kalo dalam rombongan pasti rame ngobrol dan guyonan. Saking asiknya ngobrol, beberapa kiai yang duduk di dekat jendela mobil mengeluarkan tangannya dari jendela mobil tanpa sengaja. Ketika itulah Gus Dur mengingatkan mereka dengan ucapan, “Awas, nanti tiang listrik pada bengkok.”⁷

⁷ Senin, 18 Januari 2010, 08:27:46 WIB

Wasiat Gus Dur

Seperti yang diberitakan tempo, bahwa Sejumlah kiai Nahdhatul Ulama di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memaknai wasiat almarhum Abdurahman Wahid atau Gus Dur sebagai petunjuk untuk memilih adiknya Sholahudin Wahid atau Gus Sholah Rais 'Am NU mendatang.

Menurut Kholil (Pengasuh Pondok Pesantren Gunung Jati Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur), Gus Dur berwasiat agar NU diharapkan kembali ke fitrahnya. "Gus Sholah itu cucu pendiri NU, Hasyim Asyari. Dia paling bisa mengembalikan NU ke garis perjuangan awal. Selain sebagai cucu pendiri NU, Gus Sholah dinilai paling tepat karena juga dari dunia politik, punya kredibilitas teruji, dan punya basis masa NU yang jelas, sehingga sangat tepat menduduki pucuk pimpinan NU. "Calon lain tidak punya basis masa NU yang jelas. Berdasarkan hasil konsolidasi dengan sejumlah kiai lain. Kholil mengatakan bahwa sejumlah tokoh cenderung akan mendukung Sholahudin Wahid meski belum ada keputusan resmi. Mengenai calon lain seperti Musthofa Bisri, Kholil menilai, ulama asal Rembang, Jawa Tengah itu lebih cocok sebagai penasehat Rais 'Am. Sementara

calon lainnya, Ulil Abshor Abdallah dinilai punya pemikiran berbahaya bagi NU.

KH. Abdul Ghoffur (ketua NU Pamekasan) mengatakan hingga kini pihaknya belum menentukan pilihan akan mendukung siapa, karena masih melakukan brain storming dengan NU cabang dan ranting. Ghoffur memaknai wasiat Gus Dur tersebut agar pemimpin NU ke depan jauh dari dunia politik. Karena politik telah melunturkan garis khittah NU.⁸

Cita-cita Gus Dur

Menurut Direktur the Wahid Institute, Gus Dur memiliki cita-cita untuk Bangsa Indonesia yaitu; *pertama* Gus Dur bercita-cita ingin menyambungkan demokrasi dan keadilan. *Kedua*, mewujudkan pluralisme atau kebhinekaan di negara ini. “Kebhinekaan, keragaman adalah rahmat Tuhan yang indah yang patut disukuri. Gus Dur ingin menegakkan konstitusi yang menjamin kebebasan dan eksistensi setiap pemeluk agama, keyakinan dan paham yang dianutnya. Umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negeri ini, harus mengembangkan budaya yang dimiliki kelompok minoritas di negeri ini. *Ketiga*, Gus Dur

⁸ Tempo - Jakarta, Senin 18 Januari 2010.

ingin mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa, bangsa yang besar adalah bangsa yang mandiri secara ekonomi dan rakyatnya sejahtera.⁹

Pemikiran Gus Dur

Pluralisme dan Pembelaan adalah dua kata kunci dalam kumpulan tulisan Abdurrahman Wahid yang berjudul 'Islamku, Islam Anda, Islam Kita' karya Gus Dur. Tulisan ini berangkat dari perspektif korban, terutama minoritas agama, gender, keyakinan, etnis, warna kulit, posisi sosial. 'Tuhan tidak perlu dibela,' kata Gus Dur, tapi umatNya atau manusia pada umumnya justru perlu dibela. Salah satu konsekwensi dari pembelaan adalah kritik, dan terkadang terpaksa harus mengecam, jika sudah melewati ambang toleransi.

Gus Dur mengatakan bahwa pluralisme yang menjadi isi buku dan roh dirinya diambil dari keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) pada 1935. Mukhtar memutuskan menjalankan syariat Islam tapi tidak perlu negara Islam di Indonesia. Keputusan tersebut lahir dari pemikiran kakeknya KH. Hasyim Ashari dan bapaknya KH. Wahid Hasyim yang melihat Indonesia sebagai

⁹ Jakarta_gusdur.net.

negara plural. Sampai saat ini tokoh-tokoh Islam sebagian besar menolak Negara Islam. Gus Dur sangat menolak peraturan daerah berdasarkan syariah Islam yang mulai menyebar di Indonesia.

M. Syafi'i Anwar mengatakan sejak awal Gus Dur memihak kelompok minoritas. Komitmen itu ditunjukkan dengan bukti sehingga Indonesia tetap menjadi negara plural. Karena itu Gus Dur adalah Bapak Pluralisme Indonesia. Pendapat tersebut didukung Wimar Witoelar. Berbicara sebagai kolega dan sahabat keluarga Gus Dur, Wimar mengatakan Gus Dur bukan hanya Bapak Pluralisme Indonesia tetapi juga sudah menjadi Bapak Pluralisme Dunia. Saatnya tepat karena dunia saat ini sedang kehilangan tokoh-tokoh pluralisme dan sebaliknya didominasi oleh tokoh yang bersikap eksklusif.¹⁰

Menurut Rumadi, satu hal yang tidak dimiliki orang lain pada Gus Dur adalah keberaniannya dalam mempertahankan apa yang ia yakini kebenarannya, meskipun harus berlawanan arus dengan banyak orang. Sementara menurut Ketua Pengurus Cabang NU Kota Serang KH. Amas Tajudin, pluralisme dalam prespektif Gus Dur ada dua hal yakni; 1) semua agama dipandang oleh Gus Dur sebagai

¹⁰ Perspektif Online, 21 September 2006.

pemersatu ideologi nasional, 2) kemudian, khusus ajaran Islam sebagai *rahmatan lilalamin*, sejatinya penganut Islam harus mampu melindungi keyakinan dan keberagaman kepada siapapun, tanpa membedakan asal usul agama dan ras.¹¹

Wakil Ketua Yayasan Buntet Pesantren, Cirebon, KH. Wawan Arwani, mengungkapkan, salah satu nilai yang ditularkan Gus Dur adalah keterbukaan terhadap penganut agama atau kepercayaan lain. Cara hidup bersama di negara multikultural itulah yang juga disebarkan kepada santri Buntet Pesantren. Santri diajarkan untuk tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan menegaskan terorisme yang mengatasnamakan jihad adalah haram.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, bahwa mendiang sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Gus Dur merupakan pejuang reformasi yang melembagakan penghormatan pada kemajemukan ide dan identitas. Gus Dur menyadarkan sekaligus melembagakan penghormatan kita pada kemajemukan ide dan identitas yang bersumber dari perbedaan agama, kepercayaan, etnik, dan kedaerahan. Disadari atau tidak oleh kita, sesungguhnya beliau adalah bapak

¹¹ Antara News, Sabtu 9 Januari 2010.

pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Almarhum Gus Dur, adalah salah satu pemimpin dan pemikir Islam yang sangat dihormati, baik di Indonesia maupun di dunia. Gus Dur meyakini Islam sebagai sumber universal bagi kemanusiaan, keselamatan, perdamaian, keadilan, dan toleransi. Gus Dur menetapkan berbagai kebijakan untuk mengakhiri diskriminasi dan untuk menegaskan bahwa negara memuliakan berbagai bentuk kemajemukan. Mari kita teladani gaya kepemimpinan dan kehidupan Gus Dur, terutama upaya mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan).¹²

Bagi Hasyim Muzadi (ketua umum PBNU), “Orang-orang yang mengerti adalah orang-orang pemikir dan memiliki kepentingan dan perlu ada pengkajian khusus untuk mengerti pemikiran seorang Gus Dur. Bahkan, ucapan dan pemikiran Gus Dur hanya dapat dipahami oleh sebagian orang. Pemikiran Gus Dur berangkat dari dua sisi yakni, sisi religi dan sisi kemanusiaan yang kosmopolitan. Sehingga, dasar pemikiran Gus Dur inilah yang harus dipahami. Pada saat tertentu Gus Dur akan berada pada posisi sebagai Islam dengan wawasan nasional. “Toh di suatu

¹² dinikina@plasa.com

ketika, dia loncat pagar sebagai seorang humanis yang berpikir kosmopolit dan tidak berpikir agama apapun. Oleh karena itu, agar tidak salah menafsirkan pemikiran dan ucapan Gus Dur, Hasyim meminta agar perlu pemahaman khusus, serta harus melihat pada konteks apa pemikiran dan ucapan Gus Dur saat itu. Namun lain halnya yang dikatakan Ulil Absar Abdalla tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL). Dikatakan Ulil, justru keunikan dari gagasan dan pemikiran Gus Dur adalah multitafsir. "Gus Dur tidak pernah memaksakan pengertian tunggal atas gagasan-gagasannya."¹³

Penutup

Kesan tentang Gus Dur tidak hanya datang dari pemeluk agama Islam, pemeluk agama lain pun memiliki kenangan khusus tentang Gus Dur, yang mereka nilai sebagai presiden yang pluralis. Pemikiran dan pengalaman serta penghargaan Gus Dur yang banyak merupakan inspirasi bagi semua. Terutama santri dan generasi muda 'Nahdliyyin', banyak terinspirasi oleh Gus Dur. Beliau merupakan teladan bagi semua warga negara secara internasional dan bagi semua penganut agama secara plural, Gus Dur telah

¹³ ismoko.widjaya@vivanews.com.

memberikan pelajaran banyak kepada bangsa ini. Pelajaran tersebut perlu direnungi untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Gus Dur merupakan potret tokoh bangsa yang sulit dicarikanandingannya, karena beliau menguasai banyak bidang dan konsen berjuang di banyak sektor. Untuk memahami pemikiran Gus Dur tidak bisa secara parsial. Kita dapat memahaminya secara mendalam dan menyeluruh harus berangkat dari prinsipnya. Pemikiran Gus Dur terlampau maju. Masyarakat, bahkan komunitas yang disebut intelektual sekalipun, tertinggal jauh dalam hal pemikiran. ☞

GUS DUR SANG PLURALIS

Yohanes Muryadi

*Ia bagaikan air bening
Bagi yang kehausan
Tempat berteduh
Bagi yang kepanasan
Kehadirannya membawa kesejukan*

Semasa Gus Dur masih hidup ia sudah menjadi sumber berita yang tak pernah habis, baik yang pro maupun yang kontra. Ia dikenal sebagai kiai yang mumpuni, budayawan, negarawan, politikus, pembela minoritas, pluralis, toleran, dan humoris. Masih banyak julukan lain misalnya kutu buku sebab pada usia 10 tahun ia sudah membaca buku-buku dalam bahasa Inggris yang ditulis oleh penulis terkenal dari Amerika, Inggris, Rusia yang bagi orang dewasa

saja menjadi bacaan berat. Pembicaraan semakin santer ketika Gus Dur meninggal dunia yang menurut banyak orang terlalu cepat. Banyak yang tidak percaya bahwa Gus Dur meninggal secepat itu. Banyak orang tidak hanya se-Indonesia tetapi juga dunia mendoakan Gus Dur dan merasa kehilangan. Sampai sekarang masih ada dan akan terus ada orang yang berdoa mengenang beliau dari segala macam agama. Saat dinyatakan meninggal banyak sekali orang datang ke Ciganjur tempat kediaman Gus Dur. Saat pemakaman ribuan orang melayat, ribuan orang berjejer dari Surabaya sampai Jombang untuk menghormatinya. Setelah dimakamkan banyak sekali orang datang dimakamnya untuk berdoa dan mengambil tanah serta bunga di makamnya untuk segala keperluan termasuk agar sehat . Mereka datang secara spontan tanpa ada yang menyuruh. Yang datang dari seluruh umat beragama. Seluruh televisi menyiarkan Gus Dur. Itu semua membuktikan bahwa Gus Dur dicintai semua orang.

Gus Dur Pembela Minoritas

Meskipun Gus Dur menjadi Presiden hanya dua tahun dan dilengserkan tetapi telah

membuat gebrakan yang luar biasa. Yang saya maksud adalah perjuangan Gus Dur membela minoritas yang sering diperlakukan tidak adil. Suku Tionghoa yang sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia tetap dianggap sebagai warga negara asing, maka ia wajib memiliki SBKRI. Oleh Gus Dur aturan itu dihapus, Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan keturunannya diakui sebagai bangsa Indonesia. Agama Khong Hu Cu sebelum Gus Dur tidak diakui sebagai agama, oleh Gus Dur diakui sebagai agama. Gus Dur juga menentukan Imlek, tahun baru Tionghoa sebagai hari libur nasional sama dengan tahun baru masehi, tahun baru Jawa. Budaya Tionghoa yang dulu tidak boleh muncul, sekarang banyak diundang. Barongsai sekarang muncul di depan umum, yang mengundang tidak hanya Tionghoa tetapi umum.

Tahun 2007 terjadi konflik yaitu tidak daikuinnya Ahmadiyah sebagai Islam dan dianggap sebagai aliran sesat. Gus Dur membela Ahmadiyah bukan aliran sesat, keberadaannya harus diakui. Ahmadiyah berjalan sampai sekarang.

Sang Pluralis

Gus Dur sebagai Muslim sejati mencabut

sekat-sekat antar agama. Gus Dur bergaul luas dengan semua tokoh agama. Ia selalu mengucapkan selamat saat agama lain merayakan hari besar misal Natal, Waisyak, Nyepi, bahkan jika ada tokoh agama berulang tahun, ia selalu memberikan selamat. Ia menjalin hubungan silaturahmi dan kerjasama dengan agama lain. Ia tidak mengklaim diri yang paling benar . Ia menjalankan kebenaran agamanya tetapi juga menghormati orang lain yang menghayati agamanya . Ia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Ia juga meyakini bahwa keselamatan dari Tuhan untuk semua orang tanpa membedakan agamanya.

Humor

Gus Dur terkenal dengan humor-humornya yang sehat dan selalu baru. Lewat humornya Gus Dur berhasil mencairkan suasana yang mungkin buntu. Lewat humor Gus Dur membuka cakrawala baru. Humor yang tertinggi adalah menertawakan diri sendiri, Kita perlu menertawakan diri sendiri karena dalam banyak hal kita “bodoh” artinya tidak bijaksana.

Contoh humor Gus Dur.

Jawaban yang benar.

Suatu hari ada turis asing datang di Indonesia. Ia ingin menanyakan sesuatu. Ia mendekati penjual bakso dan bertanya.

“Pak mau tanya apakah betul ini Jalan Ahmad Yani?”

“Ho...oh” jawab penjual bakso itu. Ia tidak puas dengan jawaban itu, maka ia bertanya pada seorang bapak yang sedang lewat.

“Pak mau Tanya, apakah betul ini jalan Ahmad Yani?” “Betul” jawab Bapak tadi.

Turis itu bingung. Bapak yang pertama menjawab Ho...oh. Yang kedua menjawab betul. Mana yang betul. Kemudian ia bertanya pada Gus Dur.

“Gus mau tanya, apakah betul ini jalan Ahmad Yani?” “Benar” jawab Gus Dur.

Tentu saja turis tadi makin bingung. Bertanya pada tiga orang, jawabnya beda semua. Mana yang harus dianut. Ia minta penjelasan pada Gus Dur. Kemudian Gus Dur menjelaskan sebagai berikut:

“Yang menjawab Ho...oh berarti ia lulusan SD. Yang menjawab betul berarti ia lulusan

SMA. Sedangkan yang menjawab benar, ia itu lulusan sarjana. Kemudian sahut turis itu “O... berarti Gus Dur itu sarjana ya?”

Jawab Gus Dur dengan serius . “Ho...oh.

Tentu saja Turis itu semakin bingung, Gus Dur itu sarjana atau lulusan SD.

Lalu Gus Dur menjawab, “Gitu aja kok repot.”

Mana Yang Paling Berani

Pada suatu hari Gus Dur bersama Presiden Amerika Serikat dan Presiden Perancis, ada di sebuah Kapal Pesiar di lautan yang penuh ikan hiu. Mereka ingin memamerkan bahwa tentaranya yang paling pemberani. Mula-mula Presiden Amerika memanggil tentaranya berpangkat koprал.

“Koprал, saya ingin Anda menunjukkan keberanian Anda. Terjunlah ke laut. Berenanglah mengelilingi kapal ini dua kali dan kembali dengan selamat”.

Tentara itu lalu terjun, berenang mengelilingi kapal dua kali, diuikuti oleh ikan hiu. Ia naik ke kapal lagi dengan selamat, tak kurang

suatu apa. Hebat.....

Kemudian Presiden Perancis memanggil tentaranya:

“Sersan, terjunlah ke laut. Berenanglah mengelilingi kapal ini empat kali dan kembalilah dengan selamat. Maka tentara itu melepaskan bajunya, terjun ke laut berenang mengelilingi kapal empat kali diikuti oleh hiu. Ia naik ke perahu dengan selamat. Presiden Perancis merasa menang.

Kini giliran Gus Dur memanggil tentaranya.

“Letnan coba terjunlah ke laut. Berenanglah mengelilingi kapal enam kali dan kembalilah ke kapal dengan selamat. Tentara itu diam sejenak lalu menjawab:

“Apakah Presiden menghendaki saya mati? Bagaimana mungkin saya terjun ke laut padahal laut penuh dengan hiu?” jawab tentara itu berani.

Maka bertanyalah Gus Dur kepada Presiden Amerika dan Perancis, “Nah sekarang Anda tahu, tentara mana yang paling berani?”

Gitu Aja Kok Repot.

Kalimat pendek itu sering dikatakan Gus Dur menanggapi ulah orang lain yang ruwet. Kalimat ini sering juga diucapkan seseorang untuk menirukan Gus Dur atau mengolok Gus Dur. Seperti ada unsur meremehkan.

Jika kita renungkan kalimat tersebut mengandung falsafah yang tinggi. Maknanya masalah seruwet apa pun dapat kita sederhanakan sehingga menjadi mudah untuk diselesaikan. Masalah menjadi semakin ruwet atau semakin sederhana, gampang diatasi, tergantung pada cara kita berpikir. GusDur tidak pernah memandang sesuatu terlalu rumit Ia selalu *easy going*. Segalanya diatasi dengan optimis.

Seorang Ayah Yang Sangat Demokratis

Sewaktu diundang di TV One untuk talk show, para putri Gus Dur memberi kesaksian bahwa Gus Dur tidak pernah mengatur para putrinya, harus begini atau harus begitu. Gus Dur memberikan kebebasan untuk mandiri, bertanggung jawab.

Suatu ketika putrinya yang nomor tiga mengecat rambutnya menjadi pirang. Saudara-

saudaranya marah tapi putri yang ketiga itu tetap tak berubah. Merasa kewalahan mereka melapor kepada Gus Dur, maka semua putrinya dipanggil. Kata Gus Dur, “Kamu mengecat rambutmu sudah kamu pikirkan sebelumnya, apa akibatnya?”

“Sudah” jawabnya.

“Sudah siap jika dibicarakan orang?”

“Siap” jawabnya.

Lalu kata Gus Dur, “Dia sudah siap kenapa kalian bingung?”

Maka saudaranya yang lain itu diam saja dan tidak membicarakannya lagi.

Staminanya Prima

Banyak orang mengagumi kemampuan Gus Dur. Tahun 2003 Gus Dur datang di Cirebon. Sejak jam 14.00 para tamu sudah menunggu. Sedianya Gus Dur dijadwalkan datang jam 15.00. Sampai jam 16.00 tetap belum datang tapi orang-orang tetap menanti. Kharisma Gus Dur memang luar biasa. Dia baru datang jam 18.00 karena jalan macet. Tak seorang pun pulang. Semua menunggu. Begitu Gus Dur datang, acara dimulai. Semua pertanyaan lancar dijawab tentu dengan humor-humor segarnya. Waktu dua jam berjalan sangat cepat. Acara itu digelar oleh teman-teman

Tionghoa Cirebon untuk berterima kasih kepada Gus Dur atas perjuangannya kepada minoritas.

Waktu selesai sudah jam 22.00, yang mengherankan adalah malam itu juga Gus Dur mau ke Pekalongan, Rembang terus ke Jombang. Semua orang geleng kepala. Ditanya mengapa ia mampu mengadakan perjalanan sejauh itu? Jawabnya sederhana, "Ya niat!"

Banyak orang mengatakan bahwa Gus Dur tetap sadar, dapat mendengarkan segala yang dikatakan orang termasuk pertanyaan saat seminar, meskipun kelihatan tidur, bahkan tidur sungguh. Gus Dur waktu masih sehat dapat mengingat 2000 nomor telepon di luar kepala. Waktu seminar, sesudah berbicara ia diam "tertidur" saat giliran menjawab ia dapat menjawab semua yang ditanyakan dengan runtut. Ia juga dapat menunjuk siapa saja yang bertanya.

Punya Indera Keenam

Banyak yang mengatakan bahwa Gus Dur memiliki indera keenam. Sewaktu ia akan dipanggil Tuhan ia pergi ke Jombang untuk menunjukkan tempat ia akan dimakamkan nanti. Ia juga sudah mengatakan bahwa pada hari Jumat sore yang akan datang, ia harus datang di

Jombang. Dan memang Gus Dur datang untuk tinggal di situ selamanya.

Sewaktu menjadi Presiden ia banyak ke luar negeri untuk menjalin relasi dengan negara lain dalam kerja sama ekonomi. Hubungan dengan DPR kurang bagus. Ketika ia di luar negeri ia dapat mengatakan ada pertemuan di mana saja untuk menjatuhkan dirinya tanpa ada yang memberitahu.

Yang Perlu Kita Teladani

Gus Dur telah pergi tak akan kembali. Banyak hal dapat kita teladani sehingga semangat Gus Dur tetap hidup di bumi pertiwi ini, lebih-lebih di hati kita.

Hal-hal yang perlu kita tiru adalah:

- Hidup sederhana itu indah.
- Hidup hanya bersandar pada Tuhan, tidak melekat pada harta dan tahta.
- Bersahabat dengan semua orang tanpa membedakan.
- Berani membela kebenaran.
- Berani membela yang lemah.
- Berbicara jujur.

Sebagai penutup tulisan saya, saya akan menuliskan humor sebagai berikut:

Tukang Cukur yang Baik Hati

Di sebuah kota adalah tukang cukur yang sangat baik. Ia tidak minta bayaran terlebih jika yang potong rambut adalah tokoh agama.

Suatu hari datang seorang kiai potong rambut. Ketika kiai itu mau bayar, tukang potong rambut, “O tidak usah, untuk seorang Kiai tidak usah bayar”.

Esok harinya Kiai tersebut memberi buah-buahan kepada tukang cukur itu.

Datanglah tokoh agama Budha, minta cukur. Tukang cukur tidak mau dibayar.

Pagi harinya ia memberi kue-kue pada tukang cukur itu tanda terima kasih.

Lalu datanglah tokoh agama Hindu minta dipotong rambutnya. Ia juga gratis.

Pagi harinya ia memberi makanan lezat tanda terima kasih.

Datanglah kemudian tokoh agama Kong Hu Chu. Juga tak mau dibayar.

Pagi harinya ia memberi roti yang enak sekali.

Kemudian datang lah seorang pendeta
minta cukur dan tak boleh membayar.

Pagi harinya ia memberi kain yang bagus
untuk tukang cukur itu.

Terakhir datanglah tokoh agama Katolik
juga minta potong rambut.

Tukang cukur itu juga tidak mau dibayar.
Tokoh itu senang sekali.

Esok harinya

Ia mengajak dua belas temannya untuk
dicukur gratis. ☪

Yohanes Muryadi - Katolik.
yohanes.muryadi@yahoo.com

WARNA PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

Dalam Diskursus Pluralisme Global

Burhanudin Sanusi dan Beny Baskara¹

Masalah pluralitas dan pluralisme begitu hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, bahkan mengundang perdebatan hingga pro dan kontra. Pluralisme, yang secara umum diartikan sebagai sebuah cara pandang terhadap fenomena pluralitas atau kemajemukan, begitu sering dikumandangkan dan sekaligus ditentang. Bagi para penganjur pluralisme, paham ini sangat diperlukan karena kita hidup di lingkungan yang majemuk, serba berbeda, dan serba beragam, sehingga kita harus mengakui perbedaan tersebut sebagai suatu keniscayaan

¹ *Burhanudin Sanusi*, dosen tetap Fakultas *Dirasat Islamiyah (Islamic Studies)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati-Cirebon, Jawa Barat. *Beny Baskara*, dosen tetap Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Keduanya mahasiswa program *PhD* pada *International Consortium for Religious Studies (ICRS)*, Yogyakarta.

(*sunatullah*) dalam kehidupan. Di lain pihak, para penentang pluralisme selalu memperingatkan bahwa pluralisme adalah paham yang berbahaya, karena dengan mengakui pluralisme, kita berarti mengakomodasi pandangan dan keyakinan lain, sehingga kita bisa kehilangan identitasnya.

Tulisan ini akan menghadirkan ruang yang secara khusus memotret pemikiran Gus Dur terkait tema ini. Memang, harus diakui, baik dalam skala lokal maupun global, Gus Dur bukanlah orang pertama yang berbicara tentang pluralisme. Oleh karena itu, di awal, makalah ini akan mengurai pemikir Islam kontemporer lain mengenai pluralisme seperti Fazlur Rahman, Fathi Osman, Nurcholish Madjid, dan Khaled Abou El Fadl. Selanjutnya, akan dilakukan tinjauan singkat kepada masing-masing pemikiran tersebut. Diharapkan, setelah melihat dan meninjau pemikiran mereka, kita bisa memahami betul warna dari bangunan pemikiran Gus Dur tentang pluralisme secara lebih tajam dan komprehensif.

Pengertian Literal

Secara harfiah, makna kata *pluralisme* adalah “suatu keadaan di mana terdapat dua atau lebih kelompok, prinsip, keyakinan, kekuasaan,

dan lain-lain, yang berada atau hidup secara berdampingan (*coexist*).”² Dalam wilayah yang lebih sempit, yaitu pluralisme agama, pluralisme di sini merupakan suatu paham yang terbaru dari tiga paham sebelumnya, yaitu naturalisme, eksklusivisme, dan inklusivisme. Makna pluralisme agama adalah “suatu realitas tunggal tertinggi yang dipahami dan diyakini secara berbeda-beda dalam tradisi-tradisi agama-agama, di mana agama-agama tersebut menawarkan jalan yang berbeda-beda menuju tujuan tertinggi yang sama.”³

Definisi di atas adalah definisi literal. Namun demikian, banyak pihak yang mendefinisikan pluralisme, khususnya pluralisme agama, sebagai “semua agama sama saja”, jadi boleh memeluk agama ini atau itu, dan bebas melakukan peribadatan agama ini atau itu, dan dengan bebas bisa berpindah-pindah agama. Pemahaman seperti ini tampaknya cukup beredar luas di masyarakat, entah apakah mereka membentuk pemahaman sendiri ataukah ditanamkan oleh kelompok tertentu dengan pemahaman semacam itu. Bertolak dari pemahaman demikian, biasanya

² Oxford Dictionary of English, digital dictionary version 1.00, Oxford University Press.

³ Routledge Encyclopedia of Philosophy, digital Version 1.0, London: Routledge.

mereka kemudian menolak atau menentang pluralisme.

Tampaknya, atas dasar pemahaman seperti itulah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme (beserta sekularisme dan liberalisme, biasa disingkat “sipilis”) adalah haram. Dalam fatwa No. 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tersebut, MUI menyebutkan “pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Pluralisme, (Sekularisme dan Liberalisme) agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, (Sekularisme dan Liberalisme) Agama.”⁴

Senada dengan itu, berita yang cukup menghebohkan baru-baru ini adalah hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menyatakan bahwa sebagian besar dosen perguruan tinggi Islam, khususnya studi Islam (*Islamic studies*) ternyata bersikap menentang pluralisme. Survey tersebut dilakukan

⁴ The Jakarta Post, 26 Nov. 2008, dalam The Jakarta Post Online: www.thejakartapost.com/news

pada bulan Oktober 2008 kepada 500 orang dosen Studi Islam di seluruh pulau Jawa. PPIM sampai pada kesimpulan tersebut dengan melihat butir-butir hasil survey antara lain: sebanyak 62,4% dari mereka menolak pemimpin non-Muslim, 68,6% menolak pejabat non-Muslim di kampus, 73,1% menentang umat agama lain mendirikan tempat ibadah di lingkungan sekitar mereka, 85,6% melarang mahasiswa merayakan perayaan-perayaan yang berasal dari tradisi Barat, dan 87% melarang mahasiswa untuk mempelajari agama lain. Mengenai keyakinannya, 67,4% lebih merasa sebagai orang Islam daripada orang Indonesia. Lebih jauh, direktur PPIM Jajat Burhanudin menyatakan bahwa “ternyata konservatisme atau radikalisme tidak hanya terjadi pada dan ditanamkan oleh kelompok-kelompok tertentu, namun sudah begitu mengakar dalam sistem pendidikan kita.”

Pluralisme: Pandangan Cendekiawan Muslim

Fazlur Rahman

Menurut Fazlur Rahman, pluralisme adalah setua Islam itu sendiri.⁵ Pendapat tersebut

⁵ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, Bibliotheca Islamica, Chicago, 1980, appendix II.

dikemukakannya dalam konteks kehidupan di Arab, Makkah khususnya, ketika Islam diturunkan dalam masyarakat yang plural, yaitu penduduk asli Makkah yang Arab Pagan, para penganut Kristen, dan kaum Yahudi. Sikap Islam terhadap ketiga penganut keyakinan yang berbeda itulah, Kristen dan Yahudi khususnya, sebagai landasan ajaran pluralisme dalam Islam. Dalam beberapa bagian, Islam mengambil ajaran-ajaran Kristen dan Yahudi, namun dalam beberapa bagian yang lain mengkritiknya. Namun demikian, secara umum pandangan Islam lebih merupakan hasil dari sikapnya terhadap kedua agama tersebut dan para pemeluknya.

Fazlur Rahman mencoba menganalisis hubungan antara ketiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, dengan melacak benang merah serta akar historis yang sama dari ketiga agama tersebut. Sepanjang proses kenabiannya, Muhammad mengakui juga kerasulan para nabi terdahulu, seperti Ibrahim, Musa, dan Isa, serta mengakui ajaran-ajaran yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Sebaliknya, pengakuan juga diberikan oleh para penganut Kristen dan Yahudi, bahwa Muhammad adalah rasul terakhir dan kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Dari sini, Rahman menyimpulkan bahwa nabi-nabi yang

berbeda diutus kepada bangsa dan masyarakat yang berbeda, namun pesan-pesan yang mereka sampaikan adalah sama dan universal.⁶

Bila Muhammad dan umatnya mengakui kenabian terdahulu, maka tidak mengakuinya sama dengan tidak mengakui kenabian terdahulu. Inilah yang terjadi pada kaum Yahudi dan Kristen kemudian, bahwa mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Rahman menyebut kaum Yahudi dan Kristen yang demikian ini sebagai *al-ahzab* (partisan atau sektarian, yang tidak mengakui kesamaan akar agama dan garis sejarah kenabian)⁷. Di sini, setiap *hizb* atau *syi'ah*⁸ (partai) merasa eksklusif, dan cenderung menolak sesuatu yang lain dari dirinya. Lebih lanjut, dalam perkembangan di Madinah, sekte-sekte atau kelompok-kelompok ini menjadi lebih kuat lagi, sehingga kaum Yahudi dan Kristen disebut sebagai suatu komunitas.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa secara historis umat ketiga agama itu satu dan berasal dari akar yang sama, namun dalam

⁶ Fazlur Rahman, *ibid.* hal. 163

⁷ Fazlur Rahman, *ibid.* hal. 164

⁸ *Syi'ah* di sini maksudnya adalah partai. Tidak jelas apakah berkaitan juga dengan Islam *syi'ah* dan kaum *syi'ah* yang berkembang sampai sekarang ini. Ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa *syi'ah* yang berkembang sampai sekarang itu asal-usulnya adalah *syi'ah* Ali, atau golongan Ali (pen).

perkembangannya mereka terpecah-pecah dan saling memisahkan diri. Untuk menegaskan pendapatnya ini, Rahman mengutip ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri...” (Al-Baqarah: 213).

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.” (Hud: 118).

“Manusia dahulunya adalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.” (Yunus: 19).

Demikianlah, di antara mereka selalu terjadi perselisihan, bahkan masing-masing

saling mengklaim bahwa dirinyalah yang terbaik dan akan memperoleh satu-satunya keselamatan dan petunjuk dari Tuhan. Mengenai perselisihan tersebut, sesungguhnya yang terbaik adalah berbuat baik itu sendiri dan berserah diri kepada Tuhan. Rahman menegaskan dengan mengutip firman Tuhan:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang *Shabiin*, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah: 62; Al-Maa'idah: 69)

Dari kutipan ayat di atas, kita bisa mengetahui bahwa yang paling utama adalah perbuatan baik, dan berarti kebaikan itu bersifat universal. Oleh karena itu, di antara para penganut agama itu persaingan yang dianjurkan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, seperti ditegaskan Rahman dengan kutipan ayat berikut:

“...Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat

kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semuanya kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.” (Al-Maa’idah: 48).

Demikianlah, kaum Muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan kaum lainnya. Dalam beberapa ayat-Nya, Tuhan menegaskan bahwa kaum Muslim diperintahkan untuk selalu berbuat baik, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyeru kepada yang baik dan mencegah keburukan. Bahkan, Tuhan memperingatkan bahwa dan “jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.” (Muhammad: 38). Akhirnya, Rahman menyimpulkan bahwa kaum Muslim tidak hanya dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, namun juga harus mengembangkan sikap kerja sama yang positif demi kebaikan bersama. Maka, pluralisme bukan hanya berarti “universal monoteisme” saja secara historis, namun dalam dataran praksis, dengan mengembangkan kerja sama yang positif, pluralisme juga mempunyai dimensi “egalitarianisme”, yaitu prinsip kebersamaan dan kesejajaran.⁹

⁹ Fazlur Rahman, *ibid.* hal. 170

Fathi Osman

Fathi Osman berpendapat bahwa pluralisme pada dasarnya mengacu kepada perbedaan-perbedaan, seperti perbedaan suku, ras, agama, dan elemen-elemen lainnya, termasuk perbedaan ideologi dan politik dalam demokrasi, di atas suatu latar filosofis yang tidak terdapat satu pun pemahaman tunggal mengenai kebenaran. Oleh karenanya, berbagai macam keyakinan, lembaga, dan komunitas muncul bersama dan mendapat pengakuan yang sama, dan hubungan-hubungan seyogyanya bersifat membangun, apa pun keyakinan kelompok-kelompok tersebut.¹⁰

Selanjutnya, Fathi Osman menambahkan bahwa pluralisme menuntut suatu pendekatan terhadap upaya memahami pihak lain dan kerjasama yang membangun untuk kebaikan semua. Semua manusia seharusnya dapat menikmati hak-hak dan kesempatan yang sama, sekaligus harus memenuhi kewajiban yang sama. Setiap kelompok harus memiliki hak untuk berhimpun dan berkembang, memelihara identitas dan kepentingannya, dan menikmati kesetaraan hak dan kewajiban, baik dalam suatu negara maupun dunia internasional. Pluralisme

¹⁰ Fathi Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan*, terj. Irfan Abubakar, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2006, hal. 4

juga berarti bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat berperan serta secara penuh dan setara dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat, sekaligus dapat mempertahankan identitas serta ciri khas mereka. Oleh karena itu, pluralisme harus dilindungi oleh negara dan hukum, baik oleh hukum negara hingga hukum internasional. Harus ada suatu ukuran kelembagaan dan legal yang melindungi, menjamin, serta mengesahkan kesetaraan dan mengembangkan persaudaraan di antara sesama manusia, baik sebagai pribadi maupun kelompok.¹¹

Pada prinsipnya, pluralisme meniscayakan adanya perbedaan. Perbedaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perbedaan bawaan alamiah dan perbedaan karena perolehan. Pluralisme seyogyanya tidak membiarkan orang jatuh ke dalam jebakan “ketidakbedaan yang relativistis”. Dalam hal ini, Osman mengutip Nicholas Rescher, bahwa “jika keragaman alamiah dan akaliah tidak mampu dihindari, maka sebuah sistem sosial harus dibentuk sedemikian rupa sehingga harmoni dan interaksi yang membangun dapat terwujud kendati dalam keragaman, dan perbedaan dapat dibiasakan tanpa konflik; hal ini menuntut kesepakatan dalam perbedaan dan

¹¹ Fathi Osman, *ibid.*, hal. 3.

penghormatan terhadap otonomi pihak lain.”¹²

Oleh karena itu, mufakat bisa menjadi bentuk sebuah jebakan. Selanjutnya, Rescher mengatakan bahwa “ajakan pendekatan mufakat kepada kebenaran mudah dimengerti, namun praktiknya adalah hal yang lain.”¹³ Dengan demikian, seharusnya pluralisme tidak hanya berhenti pada dataran pemahaman saja, namun yang terpenting adalah pewujudannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Pluralisme tersebut masih sebatas pluralisme kognitif, yaitu seseorang dapat mengombinasikan alternatif-alternatif yang mungkin berkaitan dengan penalaran ideal dengan keterikatan kuat dan logis kepada nilai-nilai dalam pribadi seseorang. Bentuk pluralisme yang lebih nyata adalah pluralisme politik dan pluralisme keagamaan. Pluralisme politik menyatakan bahwa kekuasaan dan kewenangan seharusnya tidak dimonopoli atau terpusat pada satu kelompok, organisasi, atau tatanan yang tunggal, dan setiap orang bisa bersaing atau bekerja sama secara sah. Pluralisme keagamaan berarti mengakui keragaman kelompok-kelompok keagamaan, pengakuan dan pengungkapan suatu keyakinan, perkumpulan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan,

¹² dalam Fathi Osman, *ibid*, hal. 7

¹³ dalam Fathi Osman, *ibid*, hal. 8

baik secara individu maupun kelompok. Apabila pluralisme bisa menjadi suatu prinsip nasional yang universal, maka perbedaan yang ada justru akan memperkaya modal intelektual, moral, dan material umat manusia melalui kerjasama yang membangun di antara kelompok-kelompok tersebut.

Dengan gambaran mengenai pluralisme tersebut, kemudian bagaimana dengan umat Islam? Kaum Muslim, sebagaimana halnya dengan pemeluk agama lain, harus hidup berdampingan dalam suatu negeri atau wilayah tertentu. Penduduk Muslim di suatu negara dapat memiliki perbedaan kesukuan maupun perbedaan keyakinan dengan penduduk lainnya, terlebih dengan penduduk negara lain. Dalam pandangan Islam, suatu negara dapat dianggap sebagai keluarga atau kerabat yang diperluas dengan kepentingannya masing-masing, namun sama sekali tidak mengurangi hubungan kebersamaan dan solidaritas universal.¹⁴

Islam dapat ditampilkan dan diberlakukan kepada non-Muslim dalam pluralisme dewasa ini sebagai suatu ideologi, meskipun pemahaman intelektual tidak memberikan kedalaman moral seperti keyakinan spiritual atau agama. Islam

¹⁴ Fathi Osman, *ibid*, hal. 5

mempunyai prinsip-prinsip moral dan hukum mengenai pluralisme yang tersedia dalam sumber-sumber dan khazanah keagamaan, sehingga mampu menjadi kontributor dalam pluralisme global dewasa ini. Globalisasi saat ini telah menciptakan kesalingtergantungan yang takkan terelakkan antar segenap umat manusia, melintasi adanya perbedaan, baik perbedaan bawaan alamiah maupun perbedaan karena perolehan.¹⁵

Berkaitan dengan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara, pluralisme dapat memberikan landasan konseptual dan psikologis yang kokoh bagi kesetaraan hukum dalam hak-hak dan kewajiban warga negara. Berbagai bentuk desentralisasi, federasi, dan otonomi dapat meupakan mekanisme praktis untuk merawat keharmonisan masyarakat serta kesatuan dan stabilitas negara. Demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, apapun kemungkinan perbedaan-perbedaan yang ada, dan memberikan kepercayaan dalam diri mereka dan masyarakatnya. Lebih jauh, ikatan yang konstruktif dalam hubungan-hubungan tersebut bisa menjamin perdamaian dan keadilan,

¹⁵ Fathi Osman, *ibid*, hal. 6; 77.

sebagai satu landasan yang kokoh bagi tatanan dunia yang setara dan bisa mengembangkan suatu kerja sama di antara negara-negara di dunia.¹⁶ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pluralisme merupakan fondasi yang kokoh bagi tegaknya demokrasi dan terjaminnya perdamaian dunia.

Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, mengungkapkan definisi pluralisme secara aktif dan dinamis, yang disebutnya sebagai “pluralisme positif”. Berikut penuturan Nurcholish Madjid (Cak Nur) selengkapnya:

“Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita itu majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai

¹⁶ Fathi Osman, *ibid*, hal. 78-79.

“pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).¹⁷

Selanjutnya, menurut Cak Nur, pluralisme adalah suatu keniscayaan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya. Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Allah menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antara sesama manusia guna memelihara keutuhan dan kelestarian bumi, dan merupakan suatu wujud kemurahan Tuhan kepada umat manusia. Cak Nur mengutip ayat Al-Qur’an sebagai berikut:

“...Seandainya Allah tidak mengimbangi golongan manusia dengan golongan yang lain, maka pasti hancurlah bumi ini. Namun, Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam.” (Al-Baqarah: 251).

Sebagai seorang cendekiawan Muslim Indonesia, Cak Nur tentu memandang pluralisme dalam konteks Indonesia, sebuah negeri dengan masyarakat majemuk di mana hampir semua agama, khususnya agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu dan Buddha) terwakili di dalamnya.

¹⁷ Nurcholish Madjid, 1999, dalam Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2001, hal. 31.

Masyarakat Indonesia seringkali berbangga dengan toleransi keagamaan yang berkembang di negaranya. Pandangan tersebut memang benar, namun masih perlu adanya kemampuan untuk menumbuhkan dan memeliharanya secara lebih terarah dan sadar, sehingga diperlukan pengertian yang lebih substantif, yang tidak hanya berhenti pada jargon-jargon dan slogan-slogan semata.¹⁸

Menyinggung masalah kesadaran, menurut Cak Nur, salah satu kesadaran yang sangat berakar dalam pandangan seorang Muslim adalah bahwa Islam itu agama yang universal. Meskipun kesadaran serupa juga dimiliki oleh para penganut agama lainnya, dan tanpa mengurangi keyakinan seorang Muslim akan kebenaran agamanya, maka kesadaran tersebut harus diwujudkan dalam sikap-sikap dalam hubungan antar agama, yaitu toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, keadilan, dan kejujuran. Landasan bagi prinsip-prinsip tersebut adalah ajaran dalam Kitab Suci bahwa kebenaran universal dengan sendirinya adalah tunggal, meskipun manifestasi lahiriahnya beraneka ragam. Pokok pangkal kebenaran universal yang tunggal itu adalah paham Ketuhanan Yang Maha Esa atau *Tauhid*, yang

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1992, hal. 177.

secara harfiah maknanya adalah “memahaesakan Tuhan”.¹⁹

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka sesungguhnya Al-Qur’an itu mengajarkan paham kemajemukan keagamaan (*religious plurality*). Paham ini bukan berarti pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari (dalam ritual, peribadatan, dan ajaran), tetapi berlandaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, dengan risiko yang ditanggung oleh para pemeluk agama tersebut, baik secara individu maupun kelompok. Paham ini juga dapat ditafsirkan bahwa semua agama itu pada mulanya menganut prinsip yang sama, yaitu keberserahan diri dan memahaesakan Tuhan. Selanjutnya, baik karena dinamika internalnya sendiri maupun karena persinggungannya dengan agama-agama lain, agama-agama tersebut mempunyai bentuk manifestasi yang berbeda-beda. Namun demikian, secara berangsur-angsur agama-agama tersebut akan menemukan kebenaran asalnya, sehingga semuanya akan bertumpu pada suatu “titik pertemuan”, “*common platform*”, atau dalam istilah Al-Qur’an “*kalimah sawa*”.²⁰ Cak Nur

¹⁹ Nurcholish Madjid, *ibid*, 1992, hal. 178-179

²⁰ Nurcholish Madjid, *ibid*, 1992, hal. 184

mengutip ayat Al-Qur'an untuk menegaskan pendapatnya tersebut:

“Katakanlah olehmu (Muhammad): “Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu *kalimah sawa'* (titik pertemuan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (Ali Imran: 64)

Di samping adanya titik pertemuan atau *kalimah sawa'* tersebut, ada lagi makna sejati dari agama-agama, yaitu sikap berserah diri (*al-islam*) kepada Tuhan. Menurut akar katanya dalam bahasa Arab, “*al-islam*” mengandung pengertian *al-istislam* (sikap berserah diri), *al-inqiyad* (tunduk patuh), dan *al-ikhlash* (tulus). Oleh karena itu, sesungguhnya intisari dari ajaran agama-agama tersebut adalah sikap berserah diri kepada Tuhan (*al-islam*) (i kecil), yang di dalamnya termasuk agama Islam (I kapital). Secara kewajiban formal keagamaan, sikap ini diwujudkan dalam tindakan untuk tidak menyembah siapa pun atau apa pun

selain Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah, dari inti ajaran dan titik temu yang sama di antara agama-agama, sudah sepantasnya kaum beriman untuk menerima pluralitas masyarakat manusia sebagai suatu keniscayaan sekaligus sebagai tantangan.²¹

Khaled Abou El Fadl

Dalam bukunya “*The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*”, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Selamatkan Islam dari Muslim Puritan”, Khaled Abou El Fadl mempertentangkan pemahaman tentang pluralisme antara Muslim puritan dengan Muslim moderat. Fadl memang tidak menyebutkan pluralisme secara eksplisit, namun secara tidak langsung dengan menggambarkan sikap dan pola interaksi antara Muslim terhadap non-Muslim. Ia menggambarkan bagaimana Muslim puritan dan moderat membaca dan menafsirkan ayat-ayat—sebagai sumber keagamaan yang sama—yang berhubungan dengan kaum non-Muslim bisa begitu berbeda secara diametral.²²

Fadl mengawali pemaparannya dengan

²¹ Nurcholish Madjid, *ibid*, 1992, hal. 182; 196

²² Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, Serambi, Jakarta, 2005, hal. 244

menggambarkan pemahaman dan sikap Muslim puritan terhadap non-Muslim. Pemahaman Muslim puritan berangkat dari penerimaan mereka tanpa syarat terhadap konsep *dzimmah*, yaitu situasi ketika kaum non-Muslim harus membayar pajak sebagai bayaran atas perlindungan dari Muslim dan hak untuk tinggal di wilayah Muslim. Implikasi dari konsep *dzimmah* ini, kaum puritan menegaskan bahwa di negara Muslim, kaum non-Muslim harus diturunkan derajatnya sehingga statusnya lebih rendah di hadapan Muslim. Contohnya antara lain adalah sulitnya mereka untuk membangun tempat ibadah dibandingkan Muslim yang ingin mendirikan masjid, dan dinomorduakan dalam kegiatan sosial sehari-hari. Contoh lain adalah kaum Muslim tidak boleh mengawali salam kepada non-Muslim, dan apabila mereka mengawali salam, maka kaum Muslim mempunyai ungkapan tersendiri (yang merendahkan) untuk menjawabnya.²³

Fadl menisbatkan sikap-sikap yang merendahkan itu kepada hadits-hadits yang tidak jelas yang berasal dari abad ke-9 dan ke-10, dan menyebut hadits-hadits tersebut murni rekayasa yang tidak sejalan dengan praktik historis Nabi. Ia juga menisbatkan kepada ahli hukum klasik seperti

²³ Khaled Abou El Fadl, *ibid*, hal. 245-246.

Ibnu Taimiyyah, yang menganjurkan perlakuan yang merendahkan kepada non-Muslim. Akan tetapi, ini dilandasi fakta bahwa ia hidup dalam era ketika peradaban Islam terancam oleh invasi asing. Namun demikian, fatwa Ibnu Taimiyyah ini mempunyai pengaruh besar terhadap kaum puritan sampai saat ini, seperti kaum Wahabi dan kaum puritan lainnya.²⁴

Premis yang memotivasi kaum puritan adalah Islam harus menguasai dan mendominasi. Kaum non-Muslim harus dipandang sebagai inferior, yang bisa sebagai titik masuk untuk beralih ke Islam. Dengan masuk Islam, mereka bisa meninggalkan status rendah mereka. Doktrin yang selalu digemakan adalah *al-wala' wa al-bara'* (doktrin loyalitas dan pemisahan). Doktrin ini menyatakan bahwa kaum Muslim hanya boleh berinteraksi dengan sesama Muslim, selebihnya kaum Muslim hanya boleh berhubungan atau meminta bantuan pada non-Muslim untuk tujuan yang terbatas dan jelas saja. Kaum Muslim hanya boleh melakukan ini hanya jika mereka lemah dan membutuhkan, namun ketika kaum Muslim telah mendapatkan kekuatan, mereka harus menunjukkan keunggulannya semaksimal mungkin. Kaum non-Muslim dengan status

²⁴ Khaled Abou El Fadl, *ibid*, hal. 247.

mereka yang demikian itu dipandang sebagai kesalahan moral. Oleh karena itu, kaum Muslim dilarang mencintai non-Muslim, karena hal itu sama dengan mencintai sesuatu yang tak bermoral.²⁵

Kemudian, Fadl melanjutkan dengan pemaparan mengenai sikap Muslim moderat terhadap non-Muslim, yang sangat bertolak belakang dengan kaum puritan. Kaum moderat bertolak dari premis-premis yang berbeda. Kaum moderat berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak hanya menerima, bahkan mengharapkan realitas perbedaan dan keragaman dalam masyarakat manusia. Fadl mengutip ayat-ayat Al-Qur'an berikut untuk menegaskan pendapatnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (Al-Hujuraat: 11)

Al-Qur'an tidak hanya mendukung prinsip keragaman, namun juga memberikan tantangan besar kepada manusia untuk “saling mengenal”.

²⁵ Khaled Abou El Fadl, *ibid*, hal. 248.

Keragaman adalah bagian dari tujuan penciptaan untuk meneguhkan kemahakayaan Tuhan. Fadl juga membandingkan dengan ayat yang lain: “Jika Tuhan menghendaki, Dia bisa membuat manusia itu hanya satu golongan saja” (Hud: 118). Tujuan yang telah ditetapkan Tuhan, yaitu untuk saling mengenal, memberikan kewajiban kepada manusia untuk saling bekerja sama. Fadl juga mengutip pernyataan imam Syi’ah kelima, Imam Baqir Muhammad al-Hakim²⁶: “kesejahteraan hanya bisa dicapai melalui kerja sama.”

Pentingnya kerja sama ini ditegaskan kembali oleh Fadl dengan kutipan ayat berikut:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah...” (Al-Maa’idah: 2).

Perintah tersebut tidak bisa dilepaskan dari perintah untuk menegakkan kebajikan di muka bumi untuk mewujudkan kedamaian, kasih sayang, dan keindahan di muka bumi. Perintah kepada umat Muslim dan non-Muslim untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan bukan berarti mencampurkan atau melunturkan perbedaan, namun untuk mencapai tujuan yang

²⁶ dalam Khaled Abou El Fadl, *ibid*, hal. 250.

sama, yaitu untuk menegakkan kebajikan.

Fadhil juga merujuk kepada ayat-ayat *salam*, di mana "*salam*" adalah kata yang seakar dengan kata "*Islam*", yang berarti kedamaian, ketenangan, atau ketenteraman. Ayat-ayat *salam* tidak saja menekankan kebutuhan toleransi antar agama, namun juga untuk menjalin kerja sama untuk menegakkan kebajikan di muka bumi. Di antara ayat-ayat *salam* itu adalah surat Al-Maa'idah ayat 48, seperti telah dicantumkan di atas, tentang seruan kepada seluruh umat manusia untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Dengan begitulah kebajikan akan tegak di atas muka bumi.

Demikianlah, bahwa Al-Qur'an sendiri dengan gamblang menyodorkan ide keragaman dan pluralisme hukum. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap kelompok bisa memiliki hukum dan peraturannya sendiri, namun ini tidak mencegah mereka untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong. Setiap kelompok mungkin mempunyai hukum, keyakinan, dan aturan yang berbeda, namun ada prinsip-prinsip moral yang mempersatukan semua manusia, yaitu kewajiban menegakkan kebajikan, dan kita semua seyogyanya berpegang teguh kepada prinsip tersebut.

Abdurrahman Wahid

Di awal paparan ini, penting dikemukakan, tidak hanya terkait dengan pemikiran pluralisme saja tapi juga yang lain, sedikitnya tiga elemen penting—sekalipun tidak mutlak—yang dapat membantu untuk memahami ide-ide besar Gus Dur secara umum. Elemen-elemen tersebut adalah liberalisme, demokrasi, dan universalisme.²⁷ Hemat saya, Gus Dur selalu meletakkan ide-ide besarnya dalam bingkai dialektika kesejarahan, termasuk juga pemikirannya tentang pluralisme. Sehingga, bangunan pemikiran Gus Dur tentang pluralisme bersifat dinamis dan progresif sekalipun premis-premis utama bangunan pemikirannya—juga sama seperti sarjana Muslim lain—disusun atas dasar teks-teks normatif keagamaan.

Ini artinya, pluralisme menganggap setiap agama sebagai sebuah totalitas konkrit, suatu sistem simbol yang menyangkut kepercayaan-kepercayaan, ritual-ritual, dan praktik-praktik yang mendorong adanya pemaknaan dan pemahaman kolektif diri umatnya, apa yang dikatakan Peter Berger, sebagai ‘struktur logis-rasional’ (*plausibility structure*), seperti kondisi-kondisi sosio-historis objektif yang menghasilkan

²⁷ Mujamil Qomar, *NU Liberal*, Penerbit Mizan, Bandung, 2002, hal. 168.

pemaknaan dan pemahaman rasional.

Sebagai sebuah totalitas konkrit dimensi-dimensi seperti intelektual, estetika, dan praktik, suatu agama tak tereduksi oleh dimensi murni intelektual. Itu hanya bisa diapresiasi—bukan dikoseptualisasi—dan sekalipun hanya pada basis sebuah pembenaman eksistensi jangka panjang pada kedalaman totalitas itu dan dari basis horison dan perspektif yang diperolehnya saja. Hampir tidak ada kepercayaan, ritual, dan praktik-praktik tertentu akan menciptakan pengertian secara komplit dan menyeluruh pada keterasingan dari kepututannya pada totalitas yang itu adalah bagiannya. Sebagai totalitas-totalitas hidup, kepercayaan pokok, ritual, dan praktik-praktik, suatu agama selalu menetapkan adanya perbedaan total dan saling ketakberbanding. Penerimaan dan penolakan atas equalitas, kebenaran, superioritas, dan finalitas mensaratkan adanya suatu horison bersama terhadap pengertian dan diskursus yang sekarang ini hampir tidak ada.²⁸

Satu hal lagi, bangunan pluralisme Gus Dur dapat meminimalisir perbedaan agama-agama, mengatasi pluralisme, dan strata agama-agama jika kita mencapai suatu pemahaman tentang

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Wahid Institute, Jakarta, 2006, hal. 124-5.

agama sebagai totalitas hidup dan mendapatkan suatu horison tertinggi dan lebih komprehensif dari pada perbedaan agama-agama dalam mensikapi isu menciptakan suatu kemungkinan 'fusi horizon'. Totalitas konkrit suatu agama tak mereduksi dimensi intelektual, *common essence*, atau ukuran yang tidak menolak kemungkinan bagian-bagian pemahaman suatu agama, dimensi-dimensi totalitasnya, atau aspek-aspek biasa dalam agama-agama.²⁹ Ini artinya, suatu pemahaman selayaknya persial, abstrak, dan selalu dimulai dari suatu perspektif particular atau tertentu, dan hal itu bukan merupakan pengganti untuk pengalaman suatu agama sebagai sebuah keseluruhan yang konkrit.

Totalitas suatu agama tidak berarti totalitas sesuatu yang secara historis baku dan mati. Hampir tak ada totalitas konkrit yang *self-contained* bebas dari dialektika sejarah, atau terisolasi dari perubahan dan *otherness* untuk memiliki identitas permanen. Sejarah mempunyai cara pembangkitan dan pelarutan totalitas-totalitas konkrit, apakah itu bangsa-bangsa, institusi-institusi, suku-suku, atau agama-agama. Desakan pluralitas, dalam pemikiran saya, ada pada keunikan totalitas agama yang harus diambil dari pengertian

²⁹ *Ibid.*, hal. 135.

dialektika semacam ini. Sebagai totalitas, suatu agama tetap pada totalitas dalam pengertian agama tak bisa dirasionalisasikan atau direduksi secara total ke dalam sebuah *common measure*, tidak dalam pengertian kebal dari perubahan, kerap kali secara revolusioner. Ini keterbukaan intrinsik pada perubahan historis yang membuat suatu agama menjadi konkrit, terbedakan, tidak menjadi sesuatu yang abstrak, homogen, dan totalitas.

Persoalannya mungkin terletak pada bagaimana mensikapi teks-teks keagamaan tersebut: apakah bersifat totalitas, statis, progresif, atau bisa jadi tercerabut dari akar kesejarahannya. Bagi Gus Dur, ayat-ayat Qur'an secara keseluruhan baik yang membicarakan pluralisme ataupun tidak harus didudukan sebagai sesuatu yang tidak totalitas. Dengan kata lain, ayat-ayat Qur'an mustahil berbicara untuk dan dengan *dirinya sendiri*, tapi justru memerlukan pandangan-pandangan lain di luar ayat tersebut. Sehingga, dengan sikap yang semacam ini, kreatifitas-kreatifitas maupun kreasi-kreasi baru yang terinspirasi dari cara pandang perorangan terhadap ayat-ayat Qur'an tersebut sangat terbuka sekali.³⁰ Sebaliknya, akan muncul sikap radikalisme juga eksklusif dari

³⁰ *Ibid.* hal 168-9.

umat agama tertentu ketika pandangan totalitas menjadi *mainstream* cara pandang terhadap ayat-ayat Qur'an. Sikap semacam ini yang sebenarnya merupakan factor penghambat dan penyumbat pluralisme.

Gus Dur juga tidak setuju kiam kafir ditujukan kepada yang non Muslim. Pada awalnya, kata *k-f-r* menunjukkan dirinya sangat fkeksibel dan adaptif, yang melewati sebuah proses perkembangan yang cukup menarik terkait dengan perubahan cara pandang Muhammad terhadap lawan-lawan politiknya ketika itu.³¹ Lagi pula, dalam konteks makna, *k-f-r* mempunyai banyak arti yang mungkin sekali terbuka untuk berubah dari satu makna ke makna lain, digunakan sebagai penjelasan utama terhadap lawan-lawan Muhammad, dan berdiri tegak secara konfrontatif terhadap *a-m-n*. Selanjutnya, makna *k-f-r* terkait erat dengan *shirk*, hal ini juga melewati pokok perkembangan teoritis yang dipandang dari sudut kepatuhan rival Muhammad dan munculnya sebagai suatu konsep pada haknya. Terakhir, mendekati akhir Alqur'an, *k-f-r* mulai menunjuk pada kelas dalam masarakat yang harus diperangi oleh kaum Muslim.

³¹ Abdurrahman Wahid, "Membangun Kebersamaan Hidup," *Aula*, no. 11, November 1996, hal. 65.

Proses perkembangan makna *k-f-r* memunculkan pentingnya masalah metodologi. Model kronologis surat-surat dalam Alqur'an telah tersusun rapi oleh konsistensi logis dan tatanan sejarah. Masih belum ada keragaman kriteria untuk susunan yang dapat menghidar secara menyeluruh dari kemungkinan sumber untuk peristiwa-peristiwa sejarah menurut susunan surat-surat.

Di samping bersandar pada teks-teks keagamaan, bangunan pemikiran pluralisme Gus Dur juga didasari pada spirit dan nilai-nilai keadilan.³² Yang dimaksud dengan keadilan di sini berlaku untuk tidak saja pada tingkat yang sempit, namun berlaku juga yang lebih besar. Hak-hak hidup dan hak-hak lain yang melekat pada minoritas harus dipenuhi oleh mayoritas. Dalam konteks Indonesia, misalnya, masyarakat Muslim sebagai yang mayoritas harus terbuka terhadap minoritas. Sehingga, dengan demikian akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan beragama dan pluralisme berjalan dengan baik.

³² Abdurrahman Wahid, "Konsep-konsep Keadilan," dalam Budhy Munawar-Rahman (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta, 1994, hal. 100.

Menajamkan Warna Pluralisme

Dari pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pemikiran Gus Dur tentang pluralisme bersifat dialektika. Artinya, pluralisme yang membutuhkan pengakuan tulus dan memahami agama sebagai adanya komitmen dan transformasi termasuk juga melebihi rasionalitas objektif dan adanya suatu cara untuk diakui dalam kepercayaan dan praktek daripada memahami suatu teori dalam refleksi obyektif. Mendorong setiap penganut agama untuk respek dan mengakui adanya perbedaan kepercayaan dan klaim termasuk klaim finalitas. Tidak demikian dengan penganut pluralisme etik yang tidak merelatifkan klaim-klaim absolut agama-agama atau tuntutan, seperti Fazlurrahman dan Othman, penolakan klaim-klaim pada dasarnya adalah suatu kondisi dialog antar-agama. Nampaknya, dalam konteks karakter pengakuan agama, Gus Dur memberi ruang setiap agama untuk menjaga dan memodifikasi klaim pokok (*ultimate claim*) dengan terminology dan dalam *framework* tradisi agama mereka dan tantangan-tantangan situasi pluralitas.

Pluralisme ala Gus Dur mengawali langkahnya dengan menerima saling ketak-

berbandingan (*incommensurability*) agama-agama yang diambil sebagai totalitas konkrit. Juga, memberikan kepada setiap agama untuk mendefinisikan dirinya sendiri tanpa reduksi dan ordinasi. Di samping itu, secara tegas berposisi terhadap eksklusivisme dan inklusivisme tradisional, keduanya secara eksplisit menolak relativitas sejarah persepektif manusia dan mensubordinasi agama-agama dengan kriteria baik pada tingkat mengesampingkan pertimbangan atau merendahkan diri. Tipe pluralisme Gus Dur ini juga berposisi secara langsung terhadap semua bentuk universalisme abstrak yang mensubordinasi partikularitas setiap agama pada sebuah kesamaan konsep dasar atau kesamaan teologi Esperanto, sekalipun hal ini dilakukan dengan atau atas nama pluralisme damai dan respek terhadap agama lain.

Berbeda dengan pluralisme konvensional lainnya, Gus Dur Lebih menekankan pada a penjagaan terhadap *partikularitas* dan yang terkonsentrasi untuk menunjuk pokok harmony partikularitas dengan penguatan pada struktur ontology makhluk sebagai indeks keragaman. Penegasan Gus Dur ini, bagaimanapun, bukan berarti partikularitas *umat lain* saja ataupun harmony ontology mereka, namun proses sejarah

konkrit yang menciptakan solidaritas umat lain dan implikasi-implikasi proses tersebut untuk transformasi horizon hermeneutika kita.

Sementara itu, Khaled Abou El Fadl yang secara tegas memaparkan bahwa dalam kenyataan memang terjadi pertentangan dan pro-kontra mengenai masalah pluralisme. Sementara, ketiga pemikir lainnya lebih bersifat normatif dan elaborasi wacana, bagaimana seharusnya pemahaman tentang pluralisme, sekaligus penerapannya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari berkaitan dengan kenyataan masyarakat manusia yang memang majemuk, terdiri dari berbagai macam keyakinan, ras, dan suku bangsa. Butir-butir penting dari ketiga pemikiran yang pertama akan disebutkan lebih dahulu, sedangkan pemikiran Khaled Abou El Fadl yang memiliki corak berbeda dari ketiga pemikir lainnya akan disebutkan kemudian.

Butir penting pemikiran Fazlur Rahman antara lain ketika ia menilai bahwa pluralisme itu setua Islam itu sendiri. Dengan kata lain, pluralisme telah terkandung dalam ajaran-ajaran Islam. Memang Fazlur Rahman menguraikan pemikirannya dalam konteks kehidupan saat turunnya Islam pertama kali di Makkah, yang di situ telah hidup keyakinan-keyakinan terdahulu,

seperti Yahudi, Kristen, dan Pagan sebagai keyakinan masyarakat Arab tradisional. Namun demikian, kiranya nilai-nilai yang terkandung dalam semangat pluralisme itu universal, sehingga kita bisa menerapkannya dalam situasi dan konteks kontemporer, antara lain semangat egalitarianisme, atau kesetaraan dan kebersamaan yang terkandung dalam pluralisme.

Butir penting pemikiran Fathi Osman adalah pernyataannya bahwa pluralisme merupakan fondasi bagi demokrasi dan perdamaian. Dengan pluralisme berarti kita mengakui kesetaraan hak-hak dan kewajiban di antara kelompok-kelompok, sehingga mereka bisa mengekspresikan keyakinan dan pandangannya masing-masing. Pluralisme menjamin bahwa kekuasaan tidak akan berpusat di tangan suatu kelompok atau golongan tertentu, dan setiap individu atau kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat, yang mengatasi semua perbedaan bawaan maupun perolehan. Bentuk-bentuk desentralisasi dan otonomi adalah perwujudan yang nyata dalam memelihara harmonisasi di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Nurcholish Madjid sebagai murid Fazlur Rahman tentu pemikirannya sangat dipengaruhi oleh pandangan gurunya itu. Boleh dikatakan

bahwa pemikiran Cak Nur merupakan penerjemahan dan perpanjangan pemikiran Fazlur Rahman yang diterapkan dalam konteks dan situasi Indonesia. Rahman memang menyinggung sikap-sikap Muslim terhadap non-Muslim dan berusaha mencari akar pertemuan dari tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Cak Nur mempertajam pandangan Rahman ini dengan menekankan pada *kalimah sawa'*, sebagai titik temu dari ketiga agama tersebut, serta menyebutkan bahwa keberserahan diri dan pengakuan kemahaesaan Tuhan sebagai intisari ajaran agama-agama.

Pemikiran Khaled Abou El Fadl berbeda dengan ketiga pemikiran tersebut. Apabila ketiga pemikiran tersebut hanya bersifat “menganjurkan” kepada pluralisme dan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam bingkai pemahaman tentang pluralisme, maka El Fadl dengan pembedaannya antara Muslim puritan dan moderat, melakukan kritik tajam—kalau bukan sebuah “tamparan keras”—kepada Muslim puritan tentang pemahamannya yang keliru tentang pluralisme. El Fadl tidak menganjurkan lagi, karena pemahaman keliru tersebut benar-benar eksis di kalangan umat Islam, khususnya kaum puritan, dan Islam harus diselamatkan darinya.

Bahkan, dalam satu kesempatan, El Fadl menyatakan bahwa kaum puritan memang sengaja “menelikung” kitab Tuhan dengan menyatakan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang toleransi dan kerja sama telah di-*nasakh* (diabrogasi atau dianggap tidak berlaku) dan digantikan dengan perintah Tuhan untuk menghancurkan, atau minimal membenci, semua non-Muslim. Baginya, sikap tersebut tidak bisa dimengerti dan tidak masuk akal, serta mempertanyakan logika apa yang dipakai oleh kaum puritan sehingga bisa menyimpulkan seperti itu?³³ Tidak mengherankan apabila ditilik dari judul bukunya bahwa tindakan kaum puritan ini menodai dan merusak Islam, sehingga Islam harus diselamatkan dari mereka.

Berkaitan dengan pandangan El Fadl tersebut, lalu bagaimana dengan fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme dan hasil jajak pendapat yang menyatakan bahwa sebagian besar pengajar PTAI tidak pluralis? Apakah harus diberikan kritik tajam seperti El Fadl yang mengkritik kaum puritan, bahwa pemahaman mereka sebenarnya sama sekali keliru? Setidaknya, hal yang paling moderat yang bisa dikatakan adalah bahwa kesadaran dan pemahaman tentang pluralisme di kalangan umat Islam di Indonesia memang

³³ Khaled Abou El Fadl, *ibid*, hal. 261-262.

belum menyentuh substansinya, sehingga belum tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Penutup

Demikianlah, memang tidak dapat dipungkiri adanya fakta bahwa ada pihak-pihak yang mendukung dan menentang pluralisme. Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana kita, umat Islam khususnya, memiliki kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang pluralisme, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa melihat anjuran-anjuran para pemikir moderat seperti Fazlur Rahman, Fathi Osman, dan Nurcholish Madjid dalam mempelajari pluralisme, dan tidak harus menunggu dikritik secara tajam seperti yang dilakukan oleh Gus Dur dan Khaled Abou El Fadl. Kesadaran dan pemahaman tentang pluralisme sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan global dewasa ini, karena pluralitas itu sendiri merupakan keniscayaan yang tak terelakkan dalam kehidupan.

Akhirnya, sebagai sesuatu yang bisa direnungkan bersama mengenai pluralisme, berikut kutipan pernyataan Sri Sultan HB X dalam pidato "*Pisowanan Ageng*" bulan Juli 2008

di Pagelaran Kraton Yogyakarta:

“Sesungguhnya hanya ada dua rasa yang sejati dalam diri manusia, yaitu rasa ketuhanan dan rasa kemanusiaan. Adapun perasaan-perasaan lainnya seperti rasa keagamaan dan kebangsaan hanyalah turunan dan sebagai perwujudan dari kedua rasa yang sejati tersebut.” ❧

Bibliography

Buku

El-Fadl, Khaled Abou, 2005, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi

Mustofa, Serambi, Jakarta.

Madjid, Nurcholish, 1992, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Penerbit Paramadina, Jakarta,

Osman, Fathi, 2006, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan*, terj. Irfan Abubakar,

Penerbit Paramadina, Jakarta.

Qomar, Mujamil, 2002, *NU Liberal*, Penerbit Mizan, Bandung.

Rahman, Budhy Munawar, 2001, *Islam Pluralis*, Penerbit Paramadina, Jakarta.

-----, 1994, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Paramadina, Jakarta.

Rahman, Fazlur, 1980, *Major Themes of The Qur'an*, Bibliotheca Islamica, Chicago.

Wahid, Abdurrahman, 2006, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Wahid Institute, Jakarta.

Piranti Lunak

Al-Qur'an digital, versi 2.0, 2004.

Aula, No. 11, November 1996.

Oxford Dictionary of English, digital dictionary
version 1.00, Oxford University Press.

Routledge Encyclopedia of Philosophy (Digital
Version 1.0), London: Routledge.

Situs Internet

MUI online: www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php.

The Jakarta Post Online: www.thejakartapost.com/news.

GUS DUR

dan Progresivitas NU

Prof. Dr. H. Imron Abdullah, M.Ag

Perkembangan khazanah intelektual warga NU sangat luar biasa. Agar tetap lestari sepanjang masa, maka dibutuhkan transfer keilmuan secara berkesinambungan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Sehingga apresiasi NU terhadap pemikiran-pemikiran lama tetap terjaga, meskipun oleh kalangan tertentu diklaim sebagai bid'ah dan khurafat. Dari masa ke masa, faktanya, kekayaan intelektual yang dimiliki NU tidak mengalami perkembangan signifikan, bahkan cenderung menurun. NU dengan berbagai tradisi dan potensi lembaga pendidikan yang dimiliki, khususnya pesantren, kini telah menjadi "museum" ilmu keislaman. Sejauh ini tidak ada upaya serius untuk merevitalisasi, apalagi melakukan transformasi terhadap khazanah

keilmuannya. Upaya yang dilakukan masih sebatas formalistik yang minim target dan tanpa arah yang jelas.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan NU tentunya harus berangkat dari kesadaran warga Nahdliyin sendiri. Melalui geneologi intelektual yang cukup panjang dan rumit, peneguhan tradisi intelektual di kalangan ulama NU tak dapat dilepaskan dari jaringan yang dibentuk ulama-ulama perintisnya, terutama KH. Hasyim Asy'ari. Dengan kaidah *al-muhâfazah 'alâ al-qadîm al-shâlih wa al-akhzu bi al-jadîd al-ashlâh* (memelihara khazanah lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik). Khazanah ini merupakan modal dasar kultural-intelektual bagi NU untuk berdialektika dengan modernitas.

Hal ini bisa dipahami karena ulama NU pada umumnya mempunyai pengetahuan keagamaan yang hampir seragam, baik di bidang teologi, fikih, maupun tasawuf. Dengan demikian, perkembangan keilmuan NU pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tradisi intelektual dalam dunia Islam pada umumnya. Sumber pengetahuan yang digunakan, baik dalam arti geneologi intelektual maupun kitab-kitab yang menjadi rujukan, juga dapat

dikatakan sama, sehingga belum terjadi apa yang disebut “diversifikasi pengetahuan”. Lembaga pendidikan yang cukup mapan sebagai basis transmisi keilmuannya, yaitu pesantren. Dengan berbagai kekhasan dan subkulturnya, pesantren terbukti mampu bertahan dalam masyarakat yang terus berubah. Meskipun banyak kritik yang ditunjukkan ke lembaga pendidikan tradisional ini seperti kepemimpinan kiai yang sangat kharismatik, tidak menumbuhkan kritisisme santri, pengajarannya tidak terprogram, dan sebagainya, namun pesantren mempunyai kekuatannya sendiri berupa “nilai” yang tidak dimiliki oleh lembaga lain.

NU mempunyai modal sosial-intelektual bagus melalui tradisi-tradisi pesantren yang diajarkan ke santri. Lantas mengapa dalam waktu yang cukup panjang sejak tahun kelahiran NU (1926 M) hingga 1980-an, perkembangan intelektual NU hampir-hampir tidak bergerak, bahkan cenderung istiqomah sebagai penjaga ortodoksi? Inilah kemudian menjadi bahan evaluasi bersama, apa sebenarnya yang terjadi, sehingga tidak ada dinamika keilmuan modern di dalamnya yang mampu mewarnai corak keilmuan di saat itu.

Dalam waktu yang panjang tersebut, di

kalangan warga NU belum terjadi mobilisasi intelektual, dalam arti belum banyak nahtliyin terpelajar yang menempuh pendidikan tinggi. Hal ini bukan saja terjadi di kalangan NU, tapi umat Islam Indonesia pada umumnya. Akibat faktor tersebut, maka geneologi intelektual ulama NU juga hampir seragam, belum terjadi variasi dan diversifikasi sumber keilmuan. Hal itu bukan berarti ulama NU selalu mempunyai pandangan yang sama mengenai suatu masalah. Meskipun geneologi intelektualnya relatif sama, tapi ekspresi di tingkat personal seringkali berbeda, bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya.

Mereka belum bersentuhan, kalau toh bersentuhan mereka mengambil posisi defensif dengan “ilmu-ilmu sekuler” yang datangnya dari Barat, sebagai pisau analisa baru terhadap agamanya. Bahkan sebagian besar ulama NU pada masa-masa 1970-an dan awal 1980-an cenderung menaruh kecurigaan terhadap apa yang mereka definisikan sebagai Barat dan mengambil sikap apologetik, sehingga timbullah sebuah ketakutan akan kelunturan keimanan.

Pada masa-masa ini, orientasi intelektual mahasiswa Islam Indonesia, termasuk yang berlatar kultural NU, masih menjadikan Timur Tengah sebagai pusat orientasi intelektualnya

sebagaimana ulama-ulama Indonesia pada pada abad-abad sebelumnya. Mengikuti tradisi ini, hampir semua ulama besar NU, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Achmad Siddiq, KH. Ali Ma'shum, sampai generasi baru seperti KH. Abdurrahman Wahid yang pernah belajar di Timur Tengah. Pada akhir 80-an tradisi tersebut mulai bergeser tidak hanya Timur Tengah (Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandang Hidup Kiai*. 1994. LP3ES: Jakarta), mulai banyak anak-anak NU yang belajar ke Barat seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah mengirimkan pemuda-pemuda muslim belajar ke luar negeri.

Di dunia Islam pada umumnya, sikap yang sama juga dapat kita temukan. Dalam kaitan ini, paling tidak ada tiga sikap kaum muslimin ketika mereka berhadapan dengan Barat, yaitu apologetik, identifikatif, dan afirmatif. *Pertama*, sikap apologetik atau pembelaan diri. Biasanya dilakukan sebagian kaum muslimin dengan mengemukakan kelebihan-kelebihan Islam, disamping untuk menjawab hegemoni politik Barat juga tantangan intelektual Barat yang mempertanyakan beberapa aspek dari "ajaran" Islam seperti jihad, poligami, kedudukan wanita, perbudakan, dan sebagainya. Respons demikian

bisanya cenderung normatif dan idealistik, sehingga cenderung mengabaikan realitas. Sikap ini pada dasarnya merupakan mekanisme pembelaan diri terhadap ancaman, tantangan, dan kritik dari luar.

Kedua, sikap identifikatif diambil untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi untuk merumuskan respons sekaligus identitas Islam di masa modern. *Ketiga*, pendekatan afirmatif dilakukan untuk menegaskan kembali kepercayaan kepada Islam sekaligus menguatkan eksistensi masyarakat muslim sendiri. (Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996, h.iii-vi.30.)

Siapa yang dimaksud komunitas NU? Pertanyaan demikian penulis kira wajar karena di lapangan ternyata terdapat sejumlah nama yang berlatar belakang keluarga NU, tapi sulit dikatakan sebagai gerbong intelektualisme NU. Anak-anak muda NU yang memasuki perguruan tinggi, khususnya yang bersimbol Islam, untuk melanjutkan pendidikan dari pesantren, lebih memungkinkan untuk melakukan refleksi kritis atas tradisi keberagamannya. Mereka berani mendiskusikan hal-hal yang selama mereka belajar di pesantren dianggap sesuatu yang tabu

untuk diperbincangkan. Kalau toh tidak dianggap tabu, mereka belum mempunyai kesadaran kritis atas sejumlah tradisi dan pemikiran yang mereka warisi begitu saja secara turun-temurun.

Ajaran-ajaran yang diterima di pesantren, dengan demikian, dibandingkan dan diperkaya dengan pengetahuan dan metodologi baru yang diperoleh di perguruan tinggi. Dari dua arus besar intelektualisme antara Timur Tengah dan Barat tersebut, pada gilirannya akan membentuk dua corak pemikiran yaitu konservatif dan liberal. Namun harus segera digarisbawahi bahwa liberalisme dan konservatisme bukanlah sesuatu yang pasti, bahkan kategori demikian pada tingkat tertentu tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata ada beberapa tokoh NU alumni Timur Tengah yang justru sangat liberal.

Orang seperti Gus Dur merupakan pengecualian dari arus tersebut. Belakangan anak-anak muda NU yang belajar ke Timur Tengah, seperti Mesir, Arab Saudi, dan Syiria, justru menampilkan gejala liberalisme yang luar biasa. Tentu, sejauh ini liberalisme dalam konteks yang positif dan tetap berakar pada tradisi pesantren. Meski demikian, *mainstream* umumnya masih belum berubah. Hal ini terjadi karena tempat dimana dia studi yaitu arus liberalisme “dalam

negeri NU” yang juga ditangkap oleh mereka yang belajar ke Timur Tengah. Sebagai wahana kulturalnya dalam melakukan pergumulan. Oleh Semangat liberalisme ini belakangan tidak hanya menyebar kepada yang mengenyam pendidikan tinggi (mahasiswa) tapi juga dalam dunia pesantren yang sering dilihat sebagai basis konservatisme NU.

Pertanyaan selanjutnya adalah sejauhmana peran mereka dalam pembentukan wacana liberalisme NU? Dalam komunitas NU, corak intelektualisme paling tidak bisa dilihat dari dua kecenderungan, yang dipengaruhi oleh dunia kampus dan di luar kampus. Ini yang agak mengherankan, wacana liberalisme NU justru dimunculkan oleh orang-orang NU yang kesehariannya berada di luar kampus, baik di pesantren maupun pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Padahal asumsinya, kampus merupakan lahan akademik yang paling memungkinkan untuk menumbuhkan pikiran-pikiran liberal. Dugaan ini memang masih perlu diuji lebih jauh. Beberapa eksponen NU yang sering diidentifikasi mempunyai pemikiran pemikiran liberal seperti Masdar Farid Mas’udi, KH. Mustafa Bisri, KH. Sahal Mahfudh, bahkan Gus Dur sendiri adalah tokoh-tokoh yang

kesehariannya hidup “di luar kampus”. Boleh jadi penilaian semacam ini (membedakan “kader kampus” dan “kader LSM”) mengandung bias, karena apresiasi yang berlebihan terhadap orang yang selama ini dipandang secara *under estimate*. Sedangkan di pihak lain kampus sudah terlanjur sebagai lembaga akademik yang menjamin kebebasan mimbar akademik, sehingga orang berfikir *se-nyleneh* apapun di kampus dianggap biasa-biasa saja.

Memang beberapa kader NU di kampus seperti Alwi Shihab (Jakarta), Ali Haidar (Surabaya), Qodri A Azizy (Semarang), Masykuri Abdillah (Jakarta), dan sebagainya mempunyai beberapa karya, namun karya-karya mereka tidak mempunyai signifikansi terhadap pembentukan pemikiran progresif dalam NU. Karya-karya mereka terkesan “datar” dan tidak mempertanyakan aspek-aspek mendasar yang dianggap membelenggu. Namun demikian, bukan berarti karya mereka tidak mempunyai arti, tapi cukup dijadikan sebagai indikator munculnya gairah intelektual di kalangan NU.

Atas dasar itu, arus liberalisme NU dalam banyak hal diwakili oleh eksponen yang melakukan gerakan-gerakan kultural di luar kampus, meskipun *support* orang-orang kampus terhadap

gerakan kultural tersebut tak dapat diabaikan begitu saja. Arus yang begitu menonjol dari semua itu, katakanlah “gerbong kedua” di belakang “lokomotif” Gus Dur adalah kelompok-kelompok studi anak muda NU yang mengembangkan ide-ide progresif-liberal. Gerakan intelektualisme NU memang semakin menampakkan gairahnya sejak pertengahan 1980-an ketika dalam komunitas NU (atau anak-anak muda NU) mulai muncul kelompok-kelompok diskusi.

Kelompok tersebut bukan sekadar melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi juga mengusung gagasan dan pemikiran ke-Islaman yang lebih segar. Kelompok muda ini mulai berani mendobrak dan mempertanyakan beberapa segi tradisi, bahkan doktrin, yang selama ini diterima begitu saja nyaris tanpa *reserve*. Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya bahwa hal itu tidak terlepas dari mulai munculnya mobilitas vertikal dan horizontal. Perbedaan ini mungkin tidak terlalu tepat jika kedua komunitas tersebut dipisahkan secara diametral.

Bagaimanapun harus diakui bahwa sebagian besar orang-orang yang menjadi lokomotif gerakan intelektualisme NU adalah mereka yang pernah hidup di kampus. Perbedaan ini diperlukan

semata-mata sebagai alat analisis untuk melihat kecenderungan yang terjadi di lapangan. Sebagian orang-orang NU, terutama kaum mudanya, yang memasuki dunia pendidikan tinggi modern. Seiring dengan itu, banyak kaum muda NU yang tinggal di perkotaan dan melakukan gesekan dengan ilmu-ilmu modern yang tidak pernah diperoleh ketika masih tinggal dan belajar di kampung.

Konsekuensi dari perkembangan itu adalah adanya perubahan dan variasi pemikiran, bukan saja berupaya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ajaran dan tradisi ke-NU-an dengan realitas yang terjadi di luar, tapi juga mengembangkan pemikiran kritis atas sejumlah doktrin agama yang diyakini selama ini. Kenyataan tersebut tentu saja menimbulkan respons yang beragam di kalangan NU, terutama para kiai senior. NU sebagai sebuah jamaah dan jamiyah kemudian terbelah dalam dua arus besar, yaitu konservatif yang begitu setia dengan tradisi dengan wataknya yang eksklusif dan defensif di satu pihak, dan komunitas kritis yang terus mempertanyakan doktrin dan tradisinya di pihak yang lain.

Dari segi kuantitas dan otoritas tradisional, kelompok pertama jauh lebih besar, meskipun

kelompok kedua mempunyai kualitas pemikiran yang lebih terstruktur dan dokumentatif. NU tidak hanya mampu meletakkan kader-kadernya dalam posisi strategis pemerintahan saja, tetapi juga harus mampu berperan dalam memberi kontribusi pemikiran alternatif-progresif dan melakukan pemberdayaan rakyat di tengah otoritarianisme Orde Baru. Perubahan orientasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari seorang figur yang sangat berpengaruh, yaitu Abdurrahman Wahid.

Gus Dur merupakan figur penting yang merepresentasikan seorang pemimpin NU yang peduli dengan perkembangan sosial budaya dan intelektual daripada sosial-politik. Keberadaan tokoh ini memberi spirit intelektual di antara generasi muda NU. Tradisi pemikiran progresif di kalangan kaum muda NU tersebut belakangan menjamur dalam sebuah lembaga-lembaga yang dikelola anak-anak muda NU. Munculnya tradisi yang mengembangkan program-program dan berorientasi pada pengembangan masyarakat, terutama masyarakat pesantren dengan segala khazanah dan tradisi pemikiran yang dimiliki, mempunyai dampak signifikan karena meskipun terdapat aksentuasi yang berbeda, secara umum *concern* dari “Islam pribumi” dan “pribumisasi

Islam” tidak jauh berbeda, yaitu bagaimana agar lokalitas bisa berbicara dan tidak “terjajah” oleh “makhluk asing” atas nama otentisitas dan universalitas agama. Berkembangnya wawasan pemikiran progresif di kalangan pesantren. Kelompok-kelompok kecil inilah yang menyebut dirinya sebagai post-tradisionalisme Islam.

Dalam konteks ini, Gus Dur merupakan sumber energi bagi perkembangan intelektualisme komunitas NU yang cukup dahsyat. Ia selalu memancarkan energinya bagi mereka-mereka yang mau menyentuh dan mempelajari “gagasan dan gerakannya” dalam menjalani kehidupannya yang sangat majemuk dan kompleks. Gus Dur telah meninggalkan warisan yang tidak pernah habis untuk dikaji dan diteliti. Ia adalah teks sebagai objek kajian, sekaligus konteks yang memandu dan menjelaskannya. Gus Dur adalah “rahkmat” bagi kehidupan manusia. Selamat Jalan Gus Dur, semoga apa yang selama ini engkau perjuangkan tetap lestari, dan terus diperjuangkan oleh generasi-generasi berikutnya. ☞

KH. ABDURRAHMAN WAHID

Kiai Besar yang Sangat Peduli Kaum Kecil

*Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
Wilayah Cirebon*

Kiai Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur telah tiada, dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa di penghujung akhir tahun 2009 tepatnya tanggal 30 Desember 2009 jam 18.45 WIB. Mantan Presiden ke 4 Republik Indonesia, Negara yang terbentuk atas ribuan pulau, puluhan suku dan bahasanya, serta menganut agama yang berbeda.

Di mata seorang Abdurrahman Wahid perbedaan ini adalah sebuah kenyataan yang harus diterima oleh siapapun di Republik ini, Indonesia tercinta. Ini adalah esensi dari demokrasi, dan Indonesia dikenal sebagai Negara demokrasi terbesar ke 3 berdasarkan jumlah penduduk serta Negara berpenduduk muslim terbesar yang menganut faham demokrasi. Konsekwensi

dari penegakan demokrasi bagi seorang Gus Dur adalah secara konsisten melindungi kaum minoritas, dalam hal ini berkaitan dengan agama yang minoritas, penghayat kepercayaan kepada Tuhan, masyarakat adat dan lain sebagainya. Atas pandangan beliau yang memberikan kesempatan kepada setiap kelompok, setiap golongan untuk tumbuh dan berkembang maka Gus Dur dikenal pula sebagai Bapak Pluralisme.

Demokrasi dan pluralisme sebenarnya bukan barang baru untuk rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya mengenai pluralisme sudah merupakan komponen yang ada semenjak pra kemerdekaan. Seperti kita ketahui bahwa nilai pluralisme tersurat pada lambang Negara “Garuda Panca Sila” yang mencengkram pita bertuliskan **Bhineka Tunggal Ika** yang mempunyai makna; “Berbeda-beda tetapi tetap dalam kesatuan”, sedang nilai-nilai demokrasi tercantum dalam dasar negara Panca Sila. Nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan dan lain-lain serta kebhinekaan atau pluralisme sudah digali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan disajikan dalam bentuk Dasar Negara dan Lambang Negara. Hanya saja yang perlu kita apresiasi terhadap Gus Dur bahwa beliau secara konsisten ingin menegakkan dan mempraktekkannya dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara.

Kami memang tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan Gus Dur, tetapi melalui artikel, berita, atau cerita dari beberapa tokoh yang menggambarkan sosok beliau, kita patut bersyukur bahwa pernah ada seorang putra bangsa yang konsisten membela kaum minoritas atau kaum termarginalkan baik menyangkut agama, kepercayaan, budaya, kaum adat dan sebagainya. Bagi beliau adalah jalan terbaik, biar masyarakat yang menilai. Ibarat orang berjualan, kalau dagangannya tidak bermutu pasti tidak ada pembelinya.

Kini Kiai Besar telah tiada, telah menghadap kembali kepada Sang Pencipta. Yang lenyap dari muka bumi hanyalah badan wadagnya, secara fisik kita merasa kehilangan tetapi kita masih mewarisi semangat perjuangannya, pemikiran-pemikirannya. Beliau bukan hanya membicarakan pluralisme dan multi cultural tetapi berjuang, bahkan tidak segan-segan pasang badan, mengambil resiko besar demi membela kaum kecil yang terpinggirkan.

Kita tidak boleh pesimis. Yakinlah bahwa perjuangan beliau pasti akan ada yang meneruskan. Setiap masa melahirkan pemimpinnya, setiap zaman melahirkan anak zaman. Gus Dur muda

akan lahir demi tegaknya cita-cita para pendiri bangsa, Bangsa Indonesia yang berlaku adil terhadap “anak-anaknya”.

Selamat jalan Gus Dur, selamat jalan Kiai Besar, kami orang-orang Hindu mendo’akanmu; **“Semoga arwahmu, Sang Atman, kembali bersatu dengan-Nya”** Semoga.

Manava Seva adalah Madava Seva.

Pelayanan yang kau berikan kepada hamba-Nya bernilai sama seperti doa yang kau panjatkan kepada-Nya. ☸

*Disampaikan pada acara
refleksi mengenang Gus Dur di aula STAIN Cirebon
Tanggal 7 Januari 2010*

INDEKS

A

ABRI 217, 244, 246

Abu Hasan 227, 232,
233, 236, 238, 240,
242, 243, 244, 245,
246, 247, 249, 258

Adam Schwarz 71

Adang Djumhur xviii,
424

Afidah Mahfudz 126

Ahmad Bahar 94, 95

Ahmad Sumargono
219

Al-Baqarah 366, 367,
375

Al-Hujuraat 382

Al-Maa'idah 367, 368,
383, 384

al-Qur'an 119, 193

Al-Zastrouw Ng 80,
94, 95

Albertus Pati 144

Ali Shariati 189, 190

Alissa Qotrunnada
Munawaroh 326

Ali Yafie 220, 235, 319,
320

Alwi Syihab 228

Amanah 85

Amerika v, xiv, 265,
272, 286, 294, 328,
329, 332, 333, 345,
350, 351

Amin Rais 162, 220,
295

Andriyanto xxii, 261,

- 424
Annita Hayatunnufus 326
Anton Sumer 140, 157
April iv, xii, 221, 249
Arab Saudi 294, 407
Arief Affandi 94
Arizona 286
Arjawinangun 179, 423
Aswab Mahasin 221, 222
A Thantowi Jauhari 94
Aula 74, 84, 85, 244, 246, 249, 258, 330, 389, 399
Australia 73, 237, 423, 424
Azyumardi Azra 406
- B**
- B.J. Habibie 233, 238
Bachtiar Effendy 218
Baghdad 19, 209, 210, 326
Bakhtiar Efendi 202
Bangkok 334
Bank Century 147, 183
Benazir Bhutto 124
Beni Susetya 144
Beny Baskara xxii, 359, 425
Bhinneka Tunggal Ika 140
BJ Habibie 69, 93
BM Billah 144
Bondan Gunawan 222
Boston 286
Bung Karno vi, xv
Burhanudin Sanusi xxii, 359, 425
- C**
- Carrell 190
Chicago 286
Ciganjur 2, 3, 29, 46, 211, 212, 326, 330, 346
Cina 294, 331
Cipasung xxii, 231, 232, 233, 236, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 257
Cirebon i, 2, 329, 179, 13, 353, 330, 43, 137, 186, 205, 231, 341, 354, xxi, 418, 415, 423, 424, 425, xvi, 425, 426, xi, xii, vii, xvi, 425,

- xvi, xiii, iii, iv, 359,
xxiii
- Cliffordz Geertz 285
- Copernicus 190
- CV Dharma Bhakti 84
- D**
- Dedy Djamaluddin
Malik 94, 95, 99
- Desember xv, 1, 2, 45,
65, 161, 205, 211,
220, 236, 240, 242,
243, 252, 279, 329,
415
- Didin Rasyidin xix,
425
- Djohan Effendi 144
- Douglas E Ramage 70,
94, 295, 302
- DPR 50, 212, 273, 355
- E**
- Editor iv, 68, 81, 85,
333, xxi
- Einar M. Sitompul 71
- Ellyasa 70, 71, 94
- F**
- Fachri Ali 202, 203
- Faqihuddin Abdul
Kodir xxii, 161
- Farha Ciciek 133
- Fathi Osman 360, 369,
370, 371, 372, 373,
374, 394, 397
- Fazlur Rahman 360,
363, 364, 365, 368,
393, 394, 395, 397
- Forkorus Yaboisembut
141
- Franz-Magnis Suseno
222
- Franz Magnis-Suseno
141, 160
- G**
- Gadamer xxii, 161,
166, 168, 169, 170,
171, 172, 174, 175,
176, 177, 178, 181
- Galileo 190
- Gamal Abdul Nasser
v, vi, xiv, xv
- gender 78, 80, 83, 101,
103, 104, 105, 106,
108, 109, 110, 111,
113, 114, 127, 133,
232, 339
- Genggong 245, 246
- Golkar 224, 225, 239,

- 248, 249, 252, 287,
303
- Greg Barton 70, 71, 93,
94, 160, 202, 232,
239, 257, 279, 280
- Greg Fealy 70, 71, 94,
233, 234, 235, 237,
239, 240, 253, 257,
258, 280
- Gresik 282
- Guennon 190
- Gus Dur i, iii, v, vi, vii,
viii, ix, x, xi, xiii,
xiv, xv, xvi, xvii,
xviii, xix, xx, xxi,
xxii, 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 22,
23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37,
38, 42, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 77, 56, 57,
65, 66, 67, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 77,
152, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85,
87, 88, 89, 103, 104,
105, 106, 107, 109,
110, 111, 112, 113,
114, 116, 117, 118,
120, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 129,
131, 132, 133, 137,
138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149,
150, 78, 82, 150,
151, 152, 153, 154,
156, 84, 80, 53, 17,
418, 21, 41, xxi, 68,
418, 156, 157, 161,
155, 76, 86, 85, 78,
87, 81, 159, 158, 43,
1, 58, 89, 65, 135,
160, 162, 67, 86, 90,
91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 155, 158,
159, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 175,
177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 189,
190, 191, 192, 193,
194, 197, 200, 201,
202, 203, 205, 206,
207, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 217,

- 218, 220, 221, 222,
223, 224, 226, 227,
228, 229, 231, 68,
232, 233, 236, 238,
240, 246, 256, 257,
262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273,
275, 277, 278, 281,
283, 287, 288, 289,
290, 292, 296, 297,
299, 300, 301, 302,
303, 304, 307, 309,
311, 323, 325, 326,
329, 330, 331, 332,
334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353,
354, 355, 360, 385,
386, 388, 389, 390,
391, 392, 397, 407,
408, 410, 412, 413,
415, 416, 417, 159
- H**
- H. FARIHIN NUR xii
H. Imron Abdullah
xxii, 401
- Hadist 193
Hairus Salim HS 92
Hajam xxii, 189, 424
HAM 78, 80, 82, 83,
270, 271, 272, 273,
327
Harry J. Benda 152,
251, 258, 285
Hartono 238, 249
Heidenberg 190
Hindu xxiii, 282, 285,
286, 288, 294, 316,
330, 332, 356, 375,
415, 418
Hj. Umayah xxii, 325
Husain Fawzi al-Najjar
264
Husein Muhammad
xxi, 1, 114
- I**
- Ibnu Ubaidillah
Syathori 179
ICMI 220, 221, 287, 288
Idi Subandy Ibrahim
94, 95, 99
Ilman Nafi'a xx, 426
Ilman Nafi'an iv-426,
v-426
Imam Hanafi 196

- Imam Syâfi'î 151
 Inayah Wulandari 326,
 334
 Indonesia v, xiii, xiv,
 xxii, xxiii, 7, 47, 50,
 51, 52, 54, 55, 56,
 59, 63, 67, 70, 71,
 72, 73, 74, 81, 85,
 87, 88, 89, 90, 94,
 95, 97, 98, 99, 101,
 102, 103, 105, 106,
 114, 121, 122, 125,
 126, 127, 128, 129,
 130, 132, 134, 135,
 139, 140, 141, 142,
 145, 147, 152, 153,
 157, 160, 161, 164,
 176, 180, 182, 183,
 184, 187, 190, 191,
 192, 196, 200, 203,
 207, 208, 210, 212,
 213, 214, 215, 216,
 217, 220, 222, 225,
 231, 236, 237, 238,
 250, 251, 253, 254,
 258, 259, 183, 88,
 265, 250, 251, 253,
 254, 258, 259, 262,
 265, 266, 267, 269,
 270, 275, 276, 278,
 279, 281, 282, 283,
 285, 286, 287, 288,
 291, 292, 293, 294,
 295, 297, 298, 299,
 300, 301, 302, 303,
 304, 305, 306, 311,
 312, 316, 317, 323,
 325, 326, 327, 329,
 330, 331, 332, 333,
 334, 338, 339, 340,
 341, 342, 346, 347,
 349, 362, 363, 374,
 375, 376, 379, 390,
 395, 396, 404, 405,
 415, 416, 418
 Inggris 265, 294, 328,
 345
 Irak 65, 272, 326
 Islam xviii, xix, xxii,
 16, 26, 27, 34, 37,
 43, 48, 49, 50, 52,
 53, 54, 59, 60, 61,
 68, 70, 71, 72, 74,
 78, 79, 80, 81, 83,
 85, 90, 93, 94, 95,
 99, 103, 104, 105,
 110, 115, 119, 120,
 122, 127, 128, 129,
 135, 150, 152, 162,
 164, 173, 176, 177,

- 179, 185, 186, 189,
190, 191, 192, 193,
194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201,
202, 203, 207, 208,
210, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220,
224, 225, 226, 232,
238, 239, 250, 251,
252, 253, 254, 257,
258, 259, 264, 271,
276, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 298,
299, 300, 302, 304,
305, 307, 308, 309,
310, 311, 316, 317,
318, 319, 321, 322,
323, 324, 325, 329,
330, 338, 339, 340,
341, 342, 343, 347,
359, 360, 362, 363,
364, 365, 369, 372,
375, 376, 378, 379,
381, 384, 386, 390,
393, 395, 396, 397,
399, 402, 404, 405,
406, 412, 424, 270,
194, 413, 264, 50,
52, 53, 54, 59, 60,
61, 68, 70, 71, 72,
74, 78, 79, 80, 81,
83, 85, 90, 93, 94,
95, 99, 103, 104,
105, 110, 115, 119,
120, 122, 127, 128,
129, 135, 150, 152,
162, 164, 173, 176,
177, 179, 185, 186,
189, 190, 191, 192,
193, 194, 310, 311,
194, 310, 194, 195,
196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203,
207, 208, 210, 214,
215, 216, 217, 218,
219, 220, 224, 225,
226, 232, 238, 239,
250, 251, 252, 253,
254, 257, 258, 259,
263, 264, 270, xxii,
276, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 298,
299, 300, 302, 304,
305, 307, 308, 309,

- 310, 311, 316, 271,
 317, 318, 319, 321,
 322, 323, 324, 305,
 325, 329, 330, 338,
 339, 340, 341, 342,
 343, 347, 359, 360,
 362, 363, 364, 365,
 369, 372, 375, 376,
 378, 379, 381, 384,
 386, 390, 393, 395,
 396, 397, 399, 402,
 404, 405, 406, 412,
 413, 424, 425, xviii,
 xix, xxii, 316, 263,
 425
- ISNU vii, xvi, xxi, 329,
 330, 331
- Israel 16, 211, 328, 333
- J**
- Jakarta 71, 80, 84, 90,
 94, 95, 135, 144,
 203, 207, 208, 211,
 232, 234, 240, 243,
 249, 251, 255, 257,
 258, 259, 279, 281,
 282, 284, 285, 293,
 319, 326, 327, 329,
 331, 332, 333, 334,
 338, 339, 362, 369,
 375, 376, 379, 386,
 390, 399, 400, 405,
 406, 409, 424
- Jamali Sahrodi xxii,
 137, 424
- Januari 43, 90, 91, 243,
 252, 329, 330, 332,
 335, 336, 338, 341,
 418
- Jawa v, xiv, 33, 74, 85,
 206, 223, 238, 245,
 254, 281, 282, 284,
 285, 286, 287, 294,
 326, 327, 330, 333,
 336, 337, 347, 359,
 363, 425
- Jawa Pos v
- Jawa Tengah 326, 333,
 337
- Jawa Timur 33, 74, 206,
 223, 238, 245, 254,
 286, 326, 327, 330,
 336, 337
- Jaya Suprana 90, 144
- Jibril 11
- JIL 321, 343
- John F Kenedy v, xiv
- Jombang 6, 142, 154,
 206, 209, 210, 326,
 327, 330, 346, 354,

- 355
 Juli 126, 189, 226, 238,
 397
- K**
- Kairo 50, 52, 209
 Katolik 288, 294, 305,
 316, 330, 357, 423,
 425
 Kediri 234, 245, 254
 Kepler 190
 Kesan Addaruqutni
 146
 KH. Abdullah Faqih
 123
 KH. Abdurrahman
 Wahid iii, iv, v,
 vi, xii, xiii, xiv, xv,
 xxiii, 46, 47, 52, 61,
 65, 71, 87, 93, 135,
 140, 152, 205, 206,
 210, 212, 220, 232,
 262, 329, 331, 405
 KH. Ahmad Siddiq
 211
 KH. Ali Maksum 234
 KH. Dharwis 70, 71, 94
 KH. Hasyim Asy'ari
 6, 35, 48, 231, 402,
 405
 KH. Hasyim Muzadi
 162, 180, 181
 KH. Husein
 Muhammad 114
 KH. Ilyas Ru'yat 235,
 242
 KH. Ilyas Ruchiyat 226
 KH. Junaid 208
 KH. Maimun Zubair
 224
 KH. Musthofa Bisri v,
 xiv, xv
 KH. Mustofa Bishri
 226
 KH. Syukron Ma'mun
 227
 KH. Wahid Hasyim 6,
 48, 127, 339
 KH. Yusuf Hasyim 226
 Khaled Abou El Fadl
 360, 379, 380, 381,
 382, 383, 393, 395,
 396, 397
 Khawarij 195
 Khittah 71, 92, 225,
 234, 236, 241, 247,
 248, 249, 250, 255,
 256
 Kompas 68, 84, 85, 91,
 135, 140, 141, 153,

- 154, 155, 157, 159,
160
Komunis 74, 262, 305
Kong Hu Cu 10, 305
Koran Sindo 1
Korea 69, 294, 328, 332,
334
Krapyak 149, 209, 234,
235
Kristen 59, 60, 61, 294,
305, 316, 330, 364,
365, 375, 394, 395
Kuwait 294
- L**
- LAKPESDAM 321, 322
Laode Ida 94, 157, 160,
251, 256, 258, 259
Lappenas 84
Leo Tolstoy 158
LKIS 92
LP3ES 90, 281, 285,
293, 405
LSAD 322
- M**
- Ma'mun Murod al-
Barabasy 94, 95
Magelang 209, 326
Mahendradatta 69,
334, 335
Mahhfud MD 228
Mahrus eL-Mawa xxii,
231
Makkah 261, 364, 393
Maman Imanul Haq
186
Mansour Faqih 114
Marzuki Wahid iv, 12,
xx, xxi, 65, 232,
236, 237, 241, 242,
256, 257, 259, 423
Masdar F. Mas'udi 114
Mathori Abdul Jalil
224
Media Indonesia 85
Megawati 126, 134,
211, 238
Mesir v, vi, xiv, xv, 19,
36, 50, 65, 69, 131,
207, 209, 210, 321,
326, 327, 329, 333,
407
Mitsuo Nakamura 71,
88
Moh. Sulhan xxii, 275
MPR 50, 73, 74, 93,
212, 246, 268
Muhamin Iskandar
180

- Muhammadiyah xix,
146, 208, 209, 251,
317, 318, 323
- Muhammad SAW 193,
194, 195, 197, 198,
261, 262
- MUI 154, 182, 362, 396,
400
- Mukhir Muzadi 226
- Muktamar xxii, 211,
217, 223, 231, 232,
233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240,
241, 243, 244, 245,
246, 247, 249, 251,
252, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 302,
318, 339
- Mukti Ali 198
- Mulyanto xxii, 305,
425
- Munasir Ali 226
- Munawir Sadzali 191
- Murjiah 195
- N**
- Nahdlatul Ulama vii,
xiv, xvi, xxi, 37, 71,
88, 94, 98, 146, 207,
251, 255, 259, 279,
280, 333, 339, 423
- nahdliyyin x, xi, 123,
134
- Natal 348
- New York 68, 295, 302,
328, 332, 333
- NKRI xiv, 55, 254, 342
- NTB 246, 249
- NU xi, xxii, 32, 48, 52,
67, 70, 71, 79, 82,
83, 88, 92, 94, 96,
98, 99, 123, 124,
126, 142, 146, 166,
175, 178, 180, 182,
195, 196, 197, 201,
207, 208, 209, 211,
212, 213, 217, 220,
223, 224, 225, 226,
227, 228, 231, 232,
233, 234, 235, 236,
237, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249,
250, 251, 252, 251,
252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259,
275, 277, 278, 279,
280, 291, 302, 303,
316, 317, 318, 319,
321, 322, 323, 326,

- 333, 337, 338, 339,
340, 385, 399, 401,
402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409,
410, 411, 412, 413,
423
- Nurcholish Madjid 71,
81, 94, 95, 99, 195,
203, 220, 293, 360,
374, 375, 376, 377,
379, 394, 397
- Nuruddin Amin 92
- O**
- Oktober 93, 126, 212,
238, 251, 363
- Orde Baru 60, 65, 67,
97, 211, 212, 213,
214, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 225,
226, 268, 412
- P**
- P3M 322
- Pakistan 124, 125
- Pamekasan 337, 338
- Pancasila x, xxii, 50,
70, 71, 78, 79, 94,
129, 179, 190, 191,
214, 215, 216, 217,
251, 252, 253, 254,
258, 265, 275, 292,
295, 296, 297, 299,
300, 301, 304
- Panji Masyarakat 85
- Papua 69, 140, 141,
157, 160, 331
- Paus Yohanes Paulus
II 61
- PBNU v, xiv, 65, 70, 86,
148, 162, 180, 223,
231, 232, 233, 234,
236, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 249,
254, 255, 257, 259,
327, 331, 342
- PDI 224, 238, 248, 249,
252
- Pebruari v, xiv, 296
- Pelita 84, 85
- Perancis 210, 350, 351
- Perang Salib 60
- Persis 317
- Pesantren 6, 32, 72,
84, 85, 91, 142, 149,
152, 205, 209, 210,
211, 245, 250, 252,
258, 276, 277, 278,
279, 280, 322, 326,

- 327, 337, 341, 405,
423, 424, 425
- Petrus Juarno xvii, 45,
xxi, 423
- PHDI xxiii, 415
- Philipina 68, 294
- PKB 86, 123, 164, 180,
206, 212, 213, 224,
225, 226, 227, 228,
245, 247, 254, 326
- PKI 73, 215, 299
- Pluralisme xxii, 12, 13,
17, 21, 22, 47, 58,
80, 155, 156, 160,
162, 182, 183, 184,
190, 269, 286, 293,
339, 340, 359, 362,
363, 369, 370, 371,
374, 391, 394, 399,
416
- PPP 224, 227, 245,
248, 249, 250, 252,
253
- Pribumisasi 79, 190,
192, 264, 307, 310
- Prisma 71, 84, 85, 93,
135
- Q**
- Qadariyah 195
- R**
- Ratna Megawangi 114
- RMI 85, 245, 255, 259
- Robiul Akhir xii
- Rusia 345
- RUU 129, 130, 131, 134
- S**
- Saeful Arief 94
- Said Agiel Siradj 319,
320
- Saifullah Yusuf 225
- SBY 46, 162, 181, 182,
183
- Semarang 71, 233, 234,
241, 255, 257, 259,
409
- Seoul 69, 332, 334
- Septi Gumindari
xviii, xxi, 103, 423
- Servetus 190
- Simon Perez 211
- Siti Fatimah xxii, 325,
425
- Situbondo 71, 234, 235,
238, 254, 257, 318
- Slamet Effendi Yusuf
224
- Soekarno 68, 161, 212,
233

- Sri Sultan Hamengkubuwono X 212
STAIN xvi, 186, 329, 330, 331, 418
Sudhamek 145
Suharto 215, 218, 219, 226, 233, 235, 243, 244, 245, 246, 247
Sumatra 282
Sunni 195, 196
Suryadi 248
Sutjipto Wirosardjono 222
Syafi'i Anwar 145, 192, 271, 340
Syi'ah 195, 365, 383
Syiria 407
- T**
- Tahlil 9
Tanjung Priok 216
Tarmizi Taher 238, 293
Tebuireng 6, 8, 32, 142, 152, 210
Tempo 84, 85, 91, 189, 338
The WAHID Institute 327
Todung Mulya Lubis 145, 222
- U**
- Ulil Absar Abdalla 343
Ulil Abshar Abdalla 144
Umar Ibn al-Khathab 192
Universitas al-Azhar 209
UU 127, 129, 130, 132
UUD 1945 x, 129, 265
- W**
- Waisyak 348
Wali Sanga 319
- Y**
- Yahudi 16, 27, 364, 365, 367, 394, 395
Yanti Mukhtar 107, 109
Yasin 9
YB Mangunwijaya 222
Yogie S. Memet 238, 244
Yogyakarta 70, 71, 91, 92, 93, 94, 128, 160, 208, 209, 234, 251, 280, 287, 289, 291, 293, 359, 398, 424, 425

Z

Zamakhsyari Dhofier
252, 258, 405
Zannuba Arifah

Chafsoh 326
Zenewa 270
Zuhairi Misrawi 154,
160, 192

BIOGRAFI PENULIS

KH. Husen Muhamad, Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid, Arjawinangun, Kab. Cirebon. Penggiat dan pemerhati feminisme, serta berbagai persoalan agama dan sosial.

Petrus Juarno, aktifis Gereja Katolik Cirebon, Pengusaha, Ketua Bidang Kajian LSM Pengkajian dan Komunikasi Kebangsaan.

Marzuki Wahid, Direktur Eksekutif Fahmina Institute Cirebon, Alumnus ANU Canberra Australia, Dosen UIN Bandung, Dosen ISIF Cirebon dan aktifis berbagai lembaga otonom Nahdlatul Ulama (NU).

Septi Gumiandari, Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Alumnus ANU Canberra

Australia, Penggiat dan pemerhati Studi Gender.

Adang Djumhur, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Jamali Sahrodi, Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Asisten Direktur I Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hajam, Pengasuh Pondok Pesantren al-Ishlah Bobos, Cirebon, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kandidat Doktor UIN Jakarta.

Faqih Abdul Kodir, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Alumnus ANU Canberra Australia dan Kandidat Doktor UGM Yogyakarta.

Sugeng Daryadi, Pendeta GKI Pamitran Cirebon, Majelis Pertimbangan PGIS Cirebon.

Makhrus el-Mawa, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kandidat Doktor antropologi UI Jakarta.

Andriyanto, Pengasuh Lembaga Pendidikan Islam al-Istiqomah Karangasem, Sindang Laut Cirebon, mantan Ketua Umum PMII Cirebon 1996-1997.

Mohammad Sulhan, Dosen UIN Bandung, Mantan Ketua Umum PMII Cirebon 1995-1996,

Kandidat Doktor UNINUS Bandung.

Didin Rasyidin, Pengasuh Pesantren al-Mutawaly Kuningan, Phd dari Leiden Belanda, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Umayah, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Siti Fatimah, Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Kandidat Doktor Filsafat UGM Yogyakarta.

Mulyanto, aktifis PMII Cirebon, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati dan ISIF Cirebon.

Yohanes Muryadi, Cendekiawan Katolik Cirebon, Pengusaha dan aktifis forum lintas agama Cirebon.

Burhanudin Sanusi, dosen tetap Fakultas Dirasat Islamiyah (Islamic Studies), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati-Cirebon, Jawa Barat, mahasiswa program PhD pada International Consortium for Religious Studies (ICRS), Yogyakarta

Beny Baskara, dosen tetap Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, mahasiswa program PhD pada International Consortium for Religious Studies (ICRS), Yogyakarta.

Biografi Penulis

HM. Imron Abdullah, Guru Besar Pemikiran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ilman Nafi'a (editor), Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Gus Dur adalah “Matahari Dhuha” yang cahaya spiritualitasnya menebarkan kehangatan cinta, kesegaran, kegairahan sekaligus mencerahkan dan menyuburkan bumi manusia. Gus Dur bagaikan gunung berapi yang menyimpan magma spiritualitas begitu dahsyat. Magma itu tak pernah berhenti bergolak dan begitu aktif yang seringkali meletup-letup, menumpahkan lahar panas, mengalir tanah kering-kerontang. Manakala telah dingin, tanah berubah menjadi subur, bumi menghijau menghasilkan bunga warna-warni, indah dan menebarkan wewangian”.

KH. Husein Muhammad

Gus Dur telah berhasil membalik prasangka banyak kalangan tentang wajah Islam yang cenderung dipersepsi tidak ramah terhadap isu-isu toleransi dan perdamaian.

Prof. Muddathir Abdel-Rahim

*International Institute of Islamic Thought
and Civilization, Malaysia*

Gus Dur adalah pemikir cemerlang yang memiliki pandangan luas. Indonesia belum tentu bisa melahirkan pemikir-aktivis seperti Gus Dur dalam jangka waktu seratus tahun ke depan.

Dr. Larry Marshal

La Trobe University, Australia